

Oleh:
Zusneli Zubir
Rismadona



SUMPUR KUDUS

DALAM PERJALANAN
SEJARAH MINANGKABAU
TAHUN 1942-1965

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB) PADANG

PADANG
2014



BAB I

PENDAHULUAN

*Anak urang Padang Mangateh,
Andak lalu ka Payokumbuah,
Singgah sabanta di Tanjuang Bonai,
Sajak hinggo iko kateh, Bijo barandang nan katumbuah.
Jarek bakumpa nan kamanganai.¹*

A. Latar Belakang Masalah

Sebait pantun di atas dikutip dari *Padang Ekspres*, pernah disampaikan Moh. Natsir kepada salah seorang saksi sejarah peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), bernama Damhoeri Ghafoer, ketika meninggalkan wilayah Tanjung Bonai Nagari Sumpur Kudus Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tahun 1959. Sumpur Kudus dalam perjalanan sejarahnya memang *unique* dan selalu menarik untuk diperbincangkan. Sama halnya ketika kita menyinggung Koto Tinggi, sebuah nagari yang terletak di Luhak Limopuluah Koto pada masa lalunya pernah menjadi perlintasan gerakan Paderi, peristiwa PDRI, hingga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Sumpur Kudus mempunyai episode yang cukup panjang dalam perjalanan sejarahnya, terutama saat proses masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini hingga bermukimnya Rajo

¹“Damhoeri Gafoer, Saksi Sejarah Perjuangan PRRI di Sumpurkudus, Sijunjung”, *Padang Ekspres* tanggal 11 September 2011.

Ibadat sebagai bagian dari *triumvirat* kekuasaan di Minangkabau. Berdasarkan keterangan Van Bezel sekitar tahun 1680 saat meninggalnya Raja Alif, mengakibatkan munculnya perselisihan raja-raja Minangkabau. Kerajaan Minangkabau pada masa itu terbagi tiga yakni: Sungai Tarab, Saruaso dan Pagaruyung.²

Raja Adityawarman³ disebut-sebut sebagai raja pertama Pagaruyung dalam catatan Tsuyushi Kato disebut mempunyai hubungan darah dengan Dharmasraya. Anggota-anggota keluarga raja pada masa itu telah tersebar dan menetap di lembah-lembah Sinamar dan Sumpur Kudus di tepi Sumpur.⁴ Pada masa kekuasaan Adityawarman yang bergelar Maharajadiraja dan *Kanakamediniendra* (penguasa bumi yang mengandung emas), Sumpur Kudus merupakan salah satu pusat perdagangan yang ramai dikunjungi pencari emas.

Pada abad ke-16, menurut van Bezel secara bertahap keluarga kerajaan yang menetap di Sumpur Kudus telah menganut agama Islam.⁵ Sebagai daerah pertama penganut agama Islam inilah yang menjadikan Sumpur Kudus dikenal dengan istilah Makkah Darek. Sebutan Makkah Darek itu, menurut mantan ketua PP Muhammadiyah itu sudah dikenal sejak lama, bahkan penduduk Sumpur Kudus mengenal istilah ini dari tradisi lisan (*oral history*). Fakta dan ingatan sejarah melalui tradisi lisan

²Pada saat itu terjadi perpecahan dalam negeri dalam penetapan raja, hak untuk menduduki tahta tidak diakui oleh beberapa pembesar kerajaan. Kemungkinan pembagian kerajaan pada waktu itu tidak terjadi. Lebih lanjut lihat arsip *Dagregister 1680* hlm. 123, 716, 721.

³Kedatangan pengaruh Hindu tidak merubah keadaan yang demikian itu. Secara umum pengaruh Hindu terasa di Minangkabau hanya pada waktu raja yang berkuasa seorang raja yang kuat seperti Adityawarman. Sesudah raja itu meninggal, maka pengaruhnya makin lama makin hilang, karena adat Minangkabau muncul kembali. Adityawarman merupakan seorang raja yang besar dan berkuasa penuh atas kerajaannya, banyak prasasti yang ditinggalkan menunjukkan kebesaran kekuasaannya. Tetapi Putera Mahkota yang bernama Ananggawarman tidak sempat lagi memerintah. karena telah digantikan oleh orang Minangkabau sendiri yang dibantu oleh "*BasaAmpat Balai*"

⁴"Gali Penyebaran Islam dan Nasionalisme PDRI di Sumpur Kudus.", *Padang Ekspres* tanggal 24 Desember 2012.

⁵Rusli Amran, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 34.

ini yang selanjutnya menjadi mitos, bahwa Sumpur Kudus merupakan daerah paling awal menganut agama Islam dan diperkuat dengan menetapkan raja ibadat di wilayah ini.

“...dari tuturan sejarah, Sumpur Kudus memang dikenal sebagai Makkah Darek, sebab di sanalah pada abad-abad yang lalu terdapat pusat kajian Islam, di samping pusat perdagangan, emas, kopi, dan lain-lain. Kemudian pusat itu berpindah, maka Sumpur Kudus ditinggalkan, dan jadilah ia sebagai desa yang lengang dan miskin.”⁶

Bila Maarif menyebut istilah Makkah Darek sebagai mitos, Marsden mengajukan fakta bahwa kehadiran Islam di Sumpur Kudus didukung melalui jalur perdagangan dan sistem transportasi sungai yang menghubungkan Batang Sumpur dengan Sungai Kampar dan Indragiri yang ramai untuk perdagangan masa kesultanan Malaka.⁷ Sungai Kampar dan Indragiri berkembang di sekitar muara-muara sungai induknya sebagai wilayah koloni Malaka yang paling penting. Hubungan Malaka dan wilayah pantai Timur Sumatera ini terkait dengan hubungan ikatan perkawinan, perdagangan transit emas, dan kain India.⁸ Sehingga untuk memperkuat hubungan pasca memeluk agama Islam wilayah kekuasaan di Minangkabau di bagi atas: Raja Ibadat di Sumpur Kudus, Raja Adat di Buo dan Raja Alam di Pagaruyung.

Sejak wafatnya Raja Ibadat terakhir wafat pada 1817, atau empat tahun menjelang peristiwa Padri (1821-1837), menurut catatan Dobin, putri Raja Ibadat ini dikawini oleh Tuanku Lintau, seorang tokoh Paderi yang berhasil meluluhlantakkan Pagaruyung dan menggabungkan kekuasaan Raja Ibadat dan Raja

⁶Ahmad Syafii Maarif, *Otobiografi Ahmad Syafii Maarif*. (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 94. Baca juga Muhammad Radjab. *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1833)*. Jakarta Balai Pustaka.

⁷William Marsden, *Sejarah Sumatra*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 18.

⁸Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri ; Minangkabau 1784-1847*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 298

Alam, berpusat di Lintau.⁹ Sejak wafatnya Raja Ibadat, ranah Sumpur Kudus mulai menghilang dari peredaran sejarah Minangkabau. Akibatnya, hanya segelintir orang Minang yang mengetahui keberadaan Sumpur Kudus pasca wafatnya tokoh legendaris itu, itu pun mulai dikenal kembali pasca lahirnya historiografi yang mengisahkan sejarah Minangkabau. Menggeliatnya ingatan terhadap Sumpur Kudus kembali terulang, ketika gerakan modernisasi Islam mulai menyentuh nagari ini. Haji Rasul dan Buya Sutan Mansur yang pernah berkunjung dan menyebarkan paham puritanisme di Sumpur Kudus.

Episode kejayaan sejarah Sumpur Kudus kembali mengapung pada masa PDRI. Kedatangan tokoh-tokoh PDRI di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara ini disambut hangat oleh penduduk. Dalam catatan Maarif, menyebut Halifah, seorang saudagar gambir yang kaya di kampungnya, menyerahkan berton-ton beras untuk kepentingan perjuangan PDRI, di samping uang, kerbau, sapi, dan komoditas perdagangan lainnya.¹⁰ Kehadiran tokoh-tokoh PDRI selama beberapa minggu di Sumpur Kudus, turut mengharumkan nama nagari ini, sebab mata rantai Republik Indonesia pernah hadir di negeri ini.

"Pernah beristana negara di Rumah Gadang Jamilah di Bidar Alam dan beristana presiden di Surau (Surau Tamar Syukur Sumpur Kudus) dan di Sumpur Kudus ini diselenggarakan rapat kabinet lengkap PDRI bertempat di rumah Hasan Basri Dt. Bandaro Putih."¹¹

Bupati militer Sawahlunto/Sijunjung Sulaiman Tan Tuah Bagindo Ratu pada masa itu juga ikut memotivasi masyarakatnya untuk bersama-sama menyukseskan dan memfasilitasi Rapat Paripurna Kabinet PDRI di Silantai Sumpur Kudus pada tanggal

⁹Akibat penyerangan ke kawasan Pagaruyung, Sultan Arifin Muning Alamsyah yang berusia sekitar 70 tahun itu bersama cucunya berhasil melarikan diri ke Lubuk Jambi (Indragiri), sedangkan dua putranya terbunuh. Lebih lanjut baca Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri ; Minangkabau 1784-1847...*, hlm. 136-137.

¹⁰Ahmad Syafii Maarif, *Otobiografi Ahmad Syafii Maarif...*, hlm. 70.

¹¹Yulizar Yunus, "Sumpurkudus dari Istana Rajo Ibadat ke PDRI", *Padang Ekspres* tanggal 26 Desember 2012.

14-17 Mei 1949. Tidak hanya difasilitasi dan dilayani kebutuhan sehari-harinya, Mr. Soetan Moh. Rasjid (Gubernur militer Sumatera Barat masa PDRI) pada tanggal 24 Oktober 1974 pernah mengungkapkan, bahwa pemerintah PDRI diberi pinjaman sebesar Rp 50.000.000 dan belum pernah dilunasi kepada masyarakat Sumpur Kudus.¹²

Masa keemasan sejarah Sumpur Kudus, seakan mulai meredup ketika nagari ini dipilih oleh Sjafruddin Prawiranegara sebagai salah satu basis gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Simpati masyarakat Sumpur Kudus pun tidak berkurang, seperti dukungan mereka pada masa PDRI. Sebagai salah satu basis “pemberontak”, tak ayal mengubah Sumpur Kudus menjadi gerakan anti “Soekarno”. Sumpur Kudus pun menjadi “bulan-bulanan” penyerangan tentara pusat. Tidak hanya diserang dari darat, Sumpur Kudus pun diserang dari udara oleh pesawat AURI tahun 1958. Seperti dukungannya pada masa PDRI, Halifah tetap memberi bantuan suplai makanan kepada petinggi dan tentara PRRI. Berikut kutipan dari catatan Maarif:

“Dengan susah pak Halifah membangun dan mempertahankan dunia bisnisnya dalam situasi yang serba manipolis itu. Entah sudah berapa harta bendanya dikorbankan semasa krisis itu.”¹³

Dalam situasi yang makin rumit tersebut, sebagian perempuan Sumpur Kudus, menurut catatan Reni Nuryanti ikut menjadi korban.¹⁴ Beragam kepentingan yang bermain atas nama PRRI di Sumpur Kudus, menjadi tragedi tersendiri bagi mereka. Mereka kerap mengalami intimidasi dari dua arah: pasukan PRRI dan APRI. Pada akhirnya, PRRI membawa perempuan dalam dua kelompok: mereka yang eksis dan tenggelam dalam konflik. Mereka yang eksis, menginduk ke dalam organisasi politik atau

¹²Yuzirwan Rasyid, “Relevansi Spirit PDRI dan Patriotisme Islam” *Padang Ekspres* tanggal 28 Desember 2012.

¹³Ahmad Syafii Maarif, *Otobiografi Ahmad Syafii Maarif...*, hlm. 160.

¹⁴Reni Nuryanti, “Hidup di Zaman Bergolak; Perempuan Minangkabau pada Masa Pergolakan Daerah (1956-1961)”, *Tesis*. (Yogyakarta: PPS UGM, 2009), hlm. 100.

mengikuti suami bergerilya. Sementara yang tenggelam, pasrah dengan situasi. Pasca peristiwa PRRI situasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Sumpur Kudus semakin tidak menentu. Bila sebelum PRRI massa pendukung PKI hanya segelintir orang, pasca peristiwa PRRI dukungan ini berbalik, bahkan walinagari Sumpur Kudus dijabat oleh orang PKI yang berasal dari Suku Caniago.¹⁵

Pasca peristiwa PRRI, nama Sumpur Kudus pun seakan tenggelam dalam kancah sejarah. Jika ada yang mengenal nama Sumpur Kudus itu pun hanya tertulis dalam karya historiografi, dalam ingatan sejarawan, namun tidak dalam ingatan sebagian orang Minang. Pada tahun 2004, nama Sumpur Kudus kembali mencuat kepermukaan seiring pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, melalui lobi Syafii Maarif terhadap Taufik Kiemas dan pemerintah. Pada tahun 2006, Sumpur Kudus kembali mengemuka setelah Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Kepres no.28/2006 yang menetapkan hari Bela Negara, di mana nagari ini merupakan bagian dari episode kisah PDRI. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul “Sumpur Kudus dalam Perjalanan Sejarah Minangkabau Tahun 1942-1965.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Bertitik tolak dari latarbelakang di atas, kajian ini akan memfokuskan kajian perkembangan nagari Sumpur Kudus. Untuk menjelaskan semua permasalahan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya antara lain: bagaimana awal sebutan Makkah Darek muncul di Sumpur Kudus? Bagaimana masyarakat Sumpur Kudus masa Kolonial Belanda, Jepang dan awal kemerdekaan dan bagaimana pula peranan Sumpur Kudus pada masa PDRI, PRRI hingga pecahnya peristiwa Gestapu 1965? Bagaimana peranan tokoh masyarakat dan pemerintah dalam membangun kembali kepercayaan diri masyarakat pasca G.30.S 1965?

¹⁵Reni Nuryanti, “Perempuan, Seks, dan Perang: Analisis Dalam Pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) (1958-1961)”, *Proceedings*. (Padang: BPSNT Press dan F. Sastra Unand, 2011), hlm. 58.

Batasan temporal dari persoalan yang hendak diteliti akan dimulai dari tahun 1942 sampai tahun 1965. Adapun batasan awal tahun 1948 diambil berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa pada tahun tersebut Sumpur Kudus memasuki masa pendudukan Jepang. Sedangkan tahun 1965 diambil sebagai batasan akhir, karena pada tahun itu Sumpur Kudus yang notabenenya sebagai daerah Islam yang taat, tetap bersikukuh tidak mau menukar ideologinya dengan komunis. Sedangkan batasan spasial yang akan diambil adalah Sumpur Kudus karena wilayah ini dalam lembaran sejarahnya memiliki kisah yang *unique* dan menarik untuk diperbincangkan, mulai dari penyebaran Islam, masa perkembangan Islam, masa PDRI, PRRI, hingga pasca meletusnya G.30.S 1965.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian tentang nagari Sumpur Kudus dalam lembaran sejarah ini bertujuan untuk:

- a. Menguraikan sejarah Sumpur Kudus dalam kaitannya dengan sebutan Makkah Darat.
- b. Menguraikan peranan Sumpur Kudus masa PDRI.
- c. Menjelaskan pengaruh PRRI pada masyarakat Sumpur Kudus, dan
- d. Mengungkap usaha pemerintah daerah dan tokoh masyarakat membangun kembali Sumpur Kudus pasca G.30.S 1965.

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan akademik, pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat antara lain adalah:

1. Manfaat akademik

Selain menambah khazanah historiografi lokal yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Sumatera Barat, juga menjadi langkah awal dari studi yang mendalam untuk masa yang akan mendatang. Dari penelitian ini diharapkan pula munculnya ide dan gagasan yang menyangkut tema penelitian seperti diatas dalam bentuk seminar dan diskusi,

sehingga akan melahirkan kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam membangun nagari Sumpur Kudus.

2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan bagi pemerintahan daerah dalam membangun kembali Sumpur Kudus sebagai aset dan ikon kebanggaan daerah Sumatera Barat. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemegang kebijakan untuk menggalakkan kembali potensi ekonomi dan pariwisata di nagari ini.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat menularkan pengetahuan mengenai peranan Sumpur Kudus kepada masyarakat luas, terutama di Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara pada umumnya, di samping kegiatan intelektual dalam masyarakat tradisional (*local genius*) dan citra daerah yang dibanggakan.

D. Tinjauan Pustaka

Informasi tentang nagari Sumpur Kudus memang sudah ada yang ditulis, namun masih terbatas dalam penyajiannya. Salah satu tulisan yang bicara mengenai Sumpur Kudus, ditulis Soedarman Dt. Bandaro Hitam dalam manuskripnya yang berjudul Sejarah Singkat Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Soedarman menjelaskan, pada tanggal 14 Mei 1949 rombongan Sutan Moh Rasjid, Sitompul, Teuku Moh. Hasan dikawal tentara *Mobrig* dan CPM telah sampai di Sumpur Kudus dan disambut oleh Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung. Selain itu dalam manuskrip ini, Soedarman juga menulis bagaimana pelayanan masyarakat Sumpur Kudus terhadap petinggi dan tentara PDRI. Namun dalam manuskrip ini tidak ada gambaran

mengenai aktivitas yang dilakukan Sjafruddin Prawiranegara dan anggota kabinetnya selama tinggal di Sumpur Kudus.¹⁶

Ahmad Syafii Maarif dalam karyanya *Auto Biografi Ahmad Syafii Maarif* yang diterbitkan Ombak tahun 2006. Dalam autobografinya Maarif menjelaskan sebutan “Makkah Darek” sudah ada sejak lama dan dianggap bagian dari tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, dalam catatannya Maarif juga menggambarkan kesetiaan dan dukungan masyarakat Sumpur Kudus terhadap petinggi PDRI dan PRRI. Namun, dalam buku ini tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana peranan Sumpur Kudus pada masa PDRI, PRRI hingga pasca G.30.S 1965.

Karya berikutnya *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang* ditulis oleh Rusli Amran dan diterbitkan Sinar Harapan tahun 1981. Tulisan yang dihadirkan Rusli Amran dalam karyanya ini kaya dengan sumber arsip dan foto-foto mengenai Minangkabau pada masa kolonial Belanda. Dalam salah satu bahasannya, terutama sistem pemerintahan, Rusli Amran menjelaskan istilah Rajo Nan Tigo Selo. Ia menulis, di samping Rajo Alam, ada Rajo Adat yang berkedudukan di Buo dan Rajo Ibadat di Sumpukuduih (baca: Sumpur Kudus). Selain itu, dalam pembahasannya Rusli Amran mengutip dari arsip De Rooy tahun 1889 yang menyatakan, bahwa kerajaan Minangkabau tua terdiri dari daerah-daerah yang berdiri sendiri, masing-masing di bawah pemerintahan yang terdiri atas penghulu-penghulu dan semua daerah tunduk pada kekuasaan Raja Alam Minangkabau di Pagaruyung. Namun dalam karya yang kaya akan arsip ini tidak dijelaskan mengenai asal-usul munculnya istilah Makkah Darek dan munculnya Raja Ibadat di Sumpur Kudus.

E. Kerangka Konseptual dan Pendekatan yang digunakan

Dalam membantu mengarahkan penelitian ini, beberapa konsep yang digunakan perlu mendapat kejelasan. Berhubung

¹⁶Soedarman Dt. Bandaro Hitam, “Sejarah Singkat Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia”, *Manuskrip*. t.t.

dengan tema penelitian ini fokus pada masalah sejarah nagari Sumpur Kudus ini akan diuraikan dalam beberapa konsep berikut.

Bicara mengenai Sumpur Kudus erat hubungannya dengan konsep sejarah lokal, sejarah desa, dan identitas lokal. Menurut Taufik Abdullah sejarah lokal adalah suatu peristiwa yang terjadi di tingkat lokal yang batasannya dibuat atas kesepakatan atau perjanjian oleh penulis sejarah. Batasan lokal ini menyangkut aspek geografis yang berupa tempat tinggal suku bangsa, suatu kota, atau desa. Ahli lain mengatakan bahwa sejarah lokal adalah bidang sejarah yang bersifat geografis yang mendasarkan kepada unit kecil seperti daerah, kampung, komunitas atau kelompok masyarakat tertentu,¹⁷ suatu peristiwa yang terjadi di daerah yang merupakan imbas atau latar terjadinya peristiwa nasional.

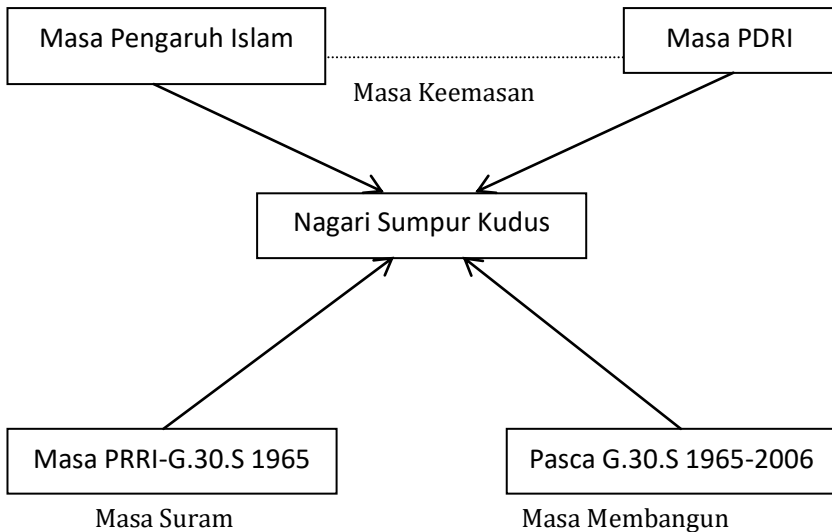
Sejarah lokal sebagai desain besar dalam kerangka konseptual ini, juga akan diperjelas dengan kerangka sejarah pedesaan. Sejarah pedesaan adalah sejarah yang secara khusus meneliti tentang desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian. Sejarah pedesaan melihat perubahan dari sudut pandang sejarah, seperti perkembangan demografi, laju proses monotonisasi, dan proses laju proletarianisasi. Politik nasional yang masuk ke wilayah pedesaan, menurut Kuntowijoyo selalu mendapat wujud baru, sebab masyarakat petani menerjemahkan cita-cita nasional itu ke dalam dinamikanya sendiri.¹⁸ Demikian halnya dengan peranan masyarakat Sumpur Kudus dalam menghadapi dua peristiwa episode sejarah, yakni PDRI dan PRRI, mereka tetap memiliki pandangan yang sama terhadap peristiwa sejarah yang mereka alami, termasuk juga penghormatan mereka terhadap tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam masa PDRI dan PRRI. Untuk melihat peranan Sumpur Kudus pada masa lampau, dapat dilihat dalam skema berikut ini

¹⁷Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*. (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 152.

¹⁸Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 73-85.

Bagan 1

Nagari Sumpur Kudus dalam Episode Sejarah



Pada bagan 1 di atas, tampak bahwa Nagari Sumpur Kudus menghadapi beberapa gelombang besar dalam episode sejarahnya. Episode pertama dimulai pada saat Islam masuk ke kawasan ini dari arah pantai Timur Sumatra. Episode ini dianggap sebagai awal keemasan sejarah Sumpur Kudus karena daerah ini juga dipimpin oleh tokoh spritual, yakni Raja Ibadat dan Syekh Ibrahim (Syekh Brai). Episode emas ini dilanjutkan pada tahun 1948-1949, dimana nagari ini menjadi salah satu basis kekuatan PDRI, selain Halaban, Koto Tinggi, dan Bidar Alam. Memasuki masa PRRI dan G.30.S 1965, episode sejarah Sumpur Kudus mulai memasuki masa suram. Pada masa 1958-1965, masyarakat Sumpur Kudus menghadapi tekanan yang cukup hebat dari pemerintah pusat karena dianggap sebagai daerah basis “pemberontak”, sehingga pada masa antagonis tersebut banyak masyarakat yang menjadi korban. Pasca tahun 1965-2006,

Sumpur Kudus mencoba untuk bangkit dan membangun kembali kepercayaan diri mereka melalui program-program pemerintah.

Bicara mengenai sejarah lokal dan pedesaan tentunya tidak lepas dari konsep desa. Namun konsep ini tentunya berbeda pemahamannya dengan konsep nagari yang berlaku untuk ranah budaya Minangkabau. G. Stibbe dalam *Wettelijke Regeling der Indlansche Gemeente ter Sumatra's Westkust en Haar Bestaan als Rechtspersoon* (Peraturan masyarakat pribumi di Sumatra Barat menurut Undang-undang dan kenyataannya menurut hukum) mendefenisikan nagari sebagai masyarakat di suatu daerah yang berdiri sendiri dengan alat-alat perwakilannya, hak milik, kekayaan, dan tanah-tanahnya sendiri.¹⁹ De Rooy dalam *De Positie van de volkshoofden in Gedeelte der Padangsche Bovenlanden* menulis, orang-orang pertama yang mendirikan nagari, dapat diusut sampai ke Pariangan Padangpanjang di kaki Gunung Merapi.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian Sumpur Kudus ini, menggunakan metode sejarah antara lain menurut Gilbert J. Garraghan dalam bukunya *A Guide to Historical Method* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah seperangkat asas atau kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu mengumpul-kan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.²⁰ Louis Gottschalk, dalam *Mengerti Sejarah* menjelaskan metode sejarah adalah proses menguji dan

¹⁹Lihat pendapat Stibbe dalam Rusli Amran, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang...*, hlm. 62.

²⁰Gilbert J. Graghan, *A. Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1984), hlm. 54-57. Lihat juga Ibrahim Alfian, *Tentang Metodologi Sejarah* Dalam Buku T. Ibrahim Alfian, et al., ed., *Dari babad Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis:Kumpulan Karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 409-419.

menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau²¹, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan.

Mengingat konteks waktu penelitian ini cukup panjang, maka pengumpulan sumber tertulis baik sumber primer maupun sekunder berupa foto, arsip, dan lain-lain diperoleh melalui studi pustaka dan studi arsip yang dilakukan di Perpustakaan Nasional Jakarta, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Padang Panjang, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, Arsip Nasional Jakarta, dan Badan Arsip Propinsi (BAP) Sumatera Barat. Disamping sumber tertulis, pendekatan sejarah lisan (*oral history*), dan tradisi lisan menjadi pilihan yang tidak dapat dielakkan. Apalagi metode sejarah lisan mempunyai sifat retrospektif, sehingga memungkinkan penggalian dan pengumpulan bukti-bukti dari masa lalu yang tidak tersedia dalam sumber tertulis.

Dengan pendekatan sejarah lisan, dapat membantu dalam menjelaskan kontinuitas kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Minangkabau, yang meliputi empat tahap yaitu; *pertama* melakukan pendataan dan survey para informan (pengkisah); *kedua* membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara); *Ketiga* menghubungi informan; dan *keempat* melakukan wawancara dengan informan, dalam hal ini dapat disebut sebagai informan kunci.

Guna memperoleh data lisan, keterangan dari pelaku sejarah dan saksi mata yang masih hidup yang berdomisili di Sumpur Kudus sangat diperlukan. Teknik yang dipakai adalah *snowball* dengan *mode sampling*, sehingga wawancara dilakukan terhadap masyarakat, tokoh adat Sumpur Kudus, pemilik rumah sewaktu petinggi PDRI dan PRRI menginap di Sumpur Kudus, ketua KAN, dan aparat pemerintah. Berbagai informasi yang diperoleh diseleksi dan dikritik relevansinya dengan pokok persolan penelitian, dengan membandingkan dengan beberapa informan dan sumber lain yang menjelaskan topik yang sama, dengan

²¹Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Penerjemah Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32.

maksud untuk *cross check* apakah informasi yang diperoleh cukup valid ataupun tidak, termasuk pengujian akurasi sumber itu sendiri dengan menghubungkan dan menbandingkan antara beberapa sumber dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta sejarah.

Kemudian data lisan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dikombinasikan pula dengan sumber primer tertulis yang ada yaitu arsip atau dokumen tertulis lainnya yang dapat diperoleh melalui catatan harian, manuskrip, koran atau harian se-zaman, foto dan *memoir* para pelaku sejarah. Fakta sejarah yang telah diperoleh baik dari lisan maupun tertulis diberi arti dan makna, kemudian dirangkaikan satu sama lainnya, sehingga menjadi suatu jalinan cerita yang sistematis (historiografi).

Dalam penelitian mengenai sejarah Sumpur Kudus, juga dipakai teori struktural Anthony Giddens. Menurut Giddens, ikatan struktural adalah jaringan sosial fungsional yang saling berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi aktor sejarah. Ketika berbicara mengenai unsur-unsur struktural yang menjiwai seluruh perilaku manusia, menurut Giddens gagasan ini merupakan kekukuhan atau pengulangan peristiwa dalam kontinuitas dalam kehidupan sosial.²² Bila teori struktural ini dihubungkan dengan kondisi Sumpur Kudus tampak jelas, bagaimana nila-nilai dan tradisi ke-Islaman yang kuat melekat dalam masyarakatnya, juga memperkuat ikatan mereka terhadap rangkaian sejarah pasca masuknya Islam ke wilayah ini, yakni PDRI dan PRRI.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka analisa, metode dan bahan sumber, dan sistematika penulisan.

²²Anthony Giddens, *Problematika Utama dalam Teori Sosial. Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.108.

Bab II berisi tentang kondisi geografis, ekonomi daerah Sumpur Kudus. Selain itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai sejarah, kisah tradisi lisan yang berhubungan dengan Sumpur Kudus dan munculnya label Makkah Darek untuk kawasan ini.

Bab III berisi Sumpur Kudus pada masa PDRI (1948-1949). Pada bagian bab ini juga akan dikemukakan mengenai peran penting Sumpur Kudus dan peranan masyarakat dalam episode sejarah PDRI .

Bab IV berisi tentang peranan Sumpur Kudus pada masa PRRI, dan ini membawa dampak yang sangat besar terhadap kondisi psikologis masyarakat Sumpur Kudus. Pada bagian lainnya, tulisan ini akan membahas upaya pemerintah dan tokoh masyarakat untuk “membangkitkan batang tarandam” dan membangun kembali kepercayaan diri masyarakat Sumpur Kudus.

Bab V membahas kisah suram sisi pergolakan daerah dan munculnya gestapu di Sumpur Kudus, menjadi sisi yang cukup menarik untuk diungkapkan.

Bab VI. berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

DARI NAGARI SUNGAI LANGSAT SUNGAI KEHIJAUAN MENUJU MAKKAH DAREK

A. Sumpur Kudus dalam Lembaran Historiografi Tradisional

1. Sungai Langsat Sungai Kehijauan: Asal Muasal nagari Sumpur Kudus.

Bicara mengenai nagari Sumpur Kudus merupakan sesuatu hal yang unik dalam benang sejarah Minangkabau. Siapapun tidak akan pernah menyangka, nagari yang berada di tengah hutan itu menyimpan lembaran-lembaran masa lalu yang dinamis. Sama halnya ketika banyak orang mengidiomkan nagari Sumpur Kudus sebagai negeri yang penuh misteri dan diliputi kekuatan magis. Suatu hal yang menarik, masyarakat Sumpur Kudus selalu terbuka dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

Sumpur Kudus merupakan sebuah nagari yang memiliki lima buah Jorong terletak di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Pada era 1980, Sumpur Kudus

masih berada di bawah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Adapun batas-batas dari nagari Sumpur Kudus adalah sebagai berikut:²³

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Silantai
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Sisawah dan Kecamatan Sijunjung.
- c. Sebelah barat berbatas dengan nagari Tamparungo
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Riau.

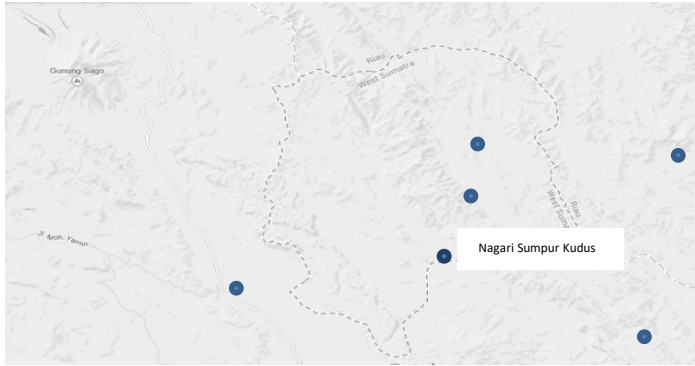
Nagari Sumpur Kudus dengan luas wilayah 8.800 Ha teletak pada posisi astronomi 0° - 26,49° LS dan 100° -54,29° BT²⁴ umumnya beriklim sedang dengan ketinggian 380 meter dari permukaan laut. Disebelah Barat dan Timur Sumpur Kudus adalah daerah perbukitan dan pegunungan, yang sebagian besar telah dimanfaatkan untuk tegalan/ladang. Keadaan permukiman penduduk untuk setiap jorong-jorong yang ada di Nagari Sumpur Kudus memanjang dari Utara ke Selatan, yang dihubungkan oleh jalan Nagari sepanjang sembilan kilometer. Sumpur Kudus mempunyai sebuah sungai yang membujur dari Utara ke Selatan, yaitu Batang Sumpur dengan empat buah cabang yaitu; Batang Sumi, Batang Karangan, Batang Menganti dan Batang Sitaok.²⁵

²³ Monografi Kenagarian Sumpur Kudus, *Arsip Nagari Sumpur Kudus* bulan Juni 1980.

²⁴ Profil Nagari Sumpur Kudus, *Arsip Nagari Sumpur Kudus* bulan Agustus 2009.

²⁵ Monografi Kenagarian Sumpur Kudus, *Arsip Nagari Sumpur Kudus* bulan Juni 1980. Lihat juga dalam Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Mutiara Terpendam: Sejarah Ringkas Suku Domo Dan Kebesaran Ninik Mamak *Manuruik Alur Jo Patuik* Nagari Sumpur Kudus". *Manuskrip* Januari tahun 2011, hlm. 2-3.

PETA 1 Nagari Sumpur Kudus



Sumber: Diolah dari www.googlemap.com.

Menurut sumber-sumber tradisi lisan menyebut nama Sumpur Kudus berasal dari kata-kata *Sumpah-Kudus* (sumpah suci) dan *Sempurna Kudus*. Menurut kisah tradisi lisan yang senantiasa hidup dalam ingatan masyarakat, bahwa sebelum abad XIV Sumpur Kudus bernama Nagari Sungai Langsung Sungai Kehijauan.²⁶ Asal nama awal nagari tersebut diambil dari dua buah aliran anak sungai yang mengalir yaitu

- a. dari arah Barat ke Timur ialah Sungai Langsung.
- b. dari arah Utara, ke Selatan ialah sungai Kehijauan.

Masih menurut tradisi lisan yang dipercayai masyarakatnya, bahwa Nagari Sungai Langsung Sungai Kehijauan merupakan simbol kerajaan tua di tanah Melayu, sebelum raja Minangkabau yang beragama Hindu dan diperintah oleh seorang Raja yang mula-mula memancang nagari ini, yakni Raja Sekutu. Yang mempunyai beberapa orang pembesar, di antaranya: Datuk Hariyo, Puyu Bariyang, Salelo, Ujuh Rahman, dan Marwan Sani Marwan Salasi.



Gambar 1 Keindahan Alam nagari Sumpur Kudus pada sore hari. Nagari yang terletak jauh dari pusat kota Kabupaten Sijunjung itu memiliki lembaran sejarah yang unik mulai dari pusat pemerintahan Raja Ibadat, masa Padri, masa PDRI, dan masa PRRI. Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.

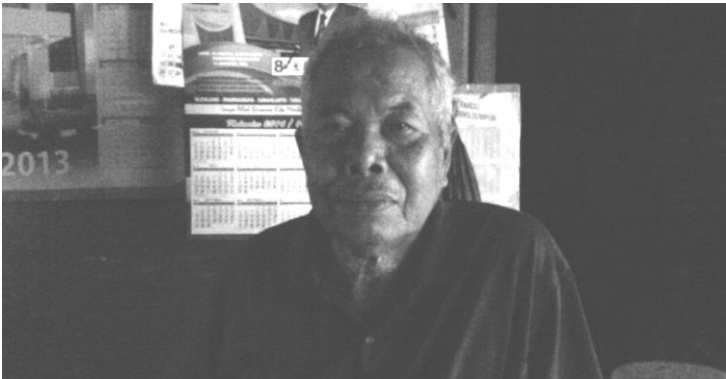
Adapun pada awal Nagari Sungai Langsung Sungai Kehijauan, sudah terbentuk sebuah taratak (dusun), yakni wilayah Koto Tuo. Wilayah Koto Tuo yang dimaksud adalah sawah yang terhampar luas, di Koto Selo dan di Koto Kaciek atau Calau (Jorong IV). Sementara itu, Koto Tinggi Koto Piabang adalah jorong Menganti (Jorong V). Menurut sumber tradisi lisan yang diyakini masyarakat, bahwa nenek moyang orang nagari Sungai Langsung Sungai Kehijauan berasal dari empat rombongan.²⁷

Proses kedatangan penduduk awal, menurut Mansur Dt. Paduko Rajo diperkirakan semasa kekuasaan Iskandar Agung atau yang dikenal dalam literatur Barat sebagai *Alexander The Great*, raja dari kerajaan Macedonia (336-323 SM).²⁸ Dirujuknya nama Iskandar Agung dalam versi historiografi tradisional di Minangkabau tentu bisa saja dipahami. Sebabnya antara lain, orang Minang selalu merujuk asal usul mereka berdasarkan kesadaran terhadap geografi sejarah, yakni Benua Ruhum, Arab, dan puncak gunung Merapi sebagai tempat terdamparnya kapal

²⁷ Monografi Kenagarian Sumpur Kudus, *Arsip Nagari Sumpur Kudus* bulan Juni 1980.

²⁸ Lebih lanjut baca A.R Dt.Rajo Melayu, "Sejarah Ringkas dan Silsilah Raja Minangkabau Pagaruyung, *Manuskrip*. (Sumpur Kudus: tanpa penerbit, 1992), hlm. 2.

Alexander the Great.²⁹ Demikian halnya dengan tambo asal usul suku yang pertama kali bermukim di Sumpur Kudus, juga merujuk proses kedatangan mereka bersamaan dengan kekuasaan raja Macedonia itu.



Gambar 2 Mansur Dt. Penghulu Mudo, seorang penghulu Suku Domo yang sudah menulis asal-usul orang Sumpur Kudus dalam manuskripnya. *Sumber:* Dokumentasi Zusneli Zubir.

2. Proses Datangnya Penduduk Sumpur Kudus Menurut Tradisi Lisan

a. Rombongan Marwan Sani Marwan Sarasi dan Ujuh Rahman: Penduduk Pertama Sumpur Kudus

Menurut versi tambo Suku Domo, bahwa kedatangan rombongan pertama terdiri dua rombongan dengan perahu layar menjelajahi samudera. Rombongan pertama Suku Domo yang datang adalah Marwan Sani, Marwan Sarasi dan Ujuh Rahman, rombongan ini terkenal dengan keahlian dalam pelayaran dan membawa peralatan lengkap serta orang cerdas pandai. Dalam pelayaran ternyata air laut mulai surut, sehingga perahunya terdampar di bukit batu (Bukit Mancolak). Barisan kawasan Bukit Mancolak sampai kini, menurut Tambo Suku Domo, bukti sejarahnya masih ada. Rombongan ini singgah dan mendiami

²⁹Ahmad Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau*. (Jakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, tt).

daerah itu untuk dijadikan daerah kekuasaanya seperti Siparok Sipuah, Sitongek Simaru.³⁰

Rombongan ke dua datang dari arah yang sama, yakni belahan benua Afrika dan Asia. Proses kedatangan rombongan ke dua masih dengan perahu menuju arah Barat Samudera Hindia. Mereka terdampar disebuah pulau yakni Pulau Sahilan India Selatan. Setelah ombak laut tenang, rombongan ini menuju arah Timur Sumatera mencari dataran tinggi untuk permukiman, rombongan ini adalah kaum Suku Melayu rombongan Datuk Hario, Silelo, dan Puyuh Bariang.³¹ Setelah sampai didataran tinggi Sumatera, atau tepatnya dikawasan bukit

Mancolak, ke dua rombongan itu bertemu dan tinggal bersama untuk sementara waktu. Rombongan ke dua ini juga

³⁰Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

³¹Lebih lanjut, Mansur dalam manuskripnya menulis, "Niniak kita tersebut beserta rombongan di bawalah oleh rombongan sekutu Salelo Puyuh Bariangan ketempat di Talaok (Talao-sekarang). Berkata sekutu kepada Uju Rahman, kami sudah lama tinggal disini di sungai kehijauan ini, belum ada orang peghuninya. Sudah sekian lama rombongan Uju Rahman tinggal bersama-sama dengan rombongan sekutu Salelo, Puyuh Bariangan Anak cucu bertambah banyak juga dan berkatalah Dt. sekutu kepada rombongan Uju Rahman karena kita telah berkembang perbaharui oleh (rombongan) Uju Rahman hutan yang disebelah kita sekarang (di selatan) Talaok kampung tersebut diberi nama kampuang hutan Baru, di kampuang hutan baru ini niniak kita berkembang biak. Sudah sekian lama niniak kita bermukim di kampung hutan baru. Maka manusia bertambah banyak, maka berdatanganlah ke sungai kehijauan ini. Seperti rombongan Dt. Bandaro hitam dari limo kaum, Dt. Paduko Rajo dari Aur Seriau dengan rombongan masing-masing telah begitu banyak rombongan yang datang ada dari selat air Kumanis. Berkata Dt. Sekutu Salelo Puyuh Beriang kepada rombongan Uju Rahman dan kepada rombongan yang baru datang tersebut. Kita buat satu perkampungan tempat yang kita caliak (lihat) Tempohari, yaitunya ranah Sikarak Sibakudo maka di mulailah oleh orang-orang ini membuat perkampungan tempat sekarang disebut Koto Tuo. Rombongan sekutu dan rombongan lain maka ditinggalkannya lah jalan dan hutan baru, talaok tersebut dinamakan koto salo dan ditanam seorang tuo kampung di beri gelar Dt. Bagindo Ratu. Hutan baru tersebut diberi nama koto kaciak sekarang (uncang, ldbuah) ditanam pulo urang tuo anak yang paling bungsu oleh suku tunggal yang bergelar Dt. Penghulu Mudo." Lebih lanjut baca Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Mutiaru Terpendam: Sejarah Ringkas Suku Domo Dan Kebesaran Ninik Mamak *Manuruik Alur Jo Patuik Nagari Sumpur Kudus*". *Manuskrip* Januari tahun 2011, hlm. 5-6.

membuat wilayah kekuasaan dengan daerah sebelah Barat Bukit Mancolak berbatas dengan Batang Siriau, Tanjung Bonai Aur, sebagian daerah ini dijadikan untuk perburuan dan sebagian untuk lahan.

Oleh sebab itu disini (bukit Mancolak-baca) terjadi dua fenomena alam Bukit Condong dan Bukit Tombuok berasal dari Datuk Hario menombak rusa, berdiri di satu bukit dan juga menembus bukit ke dua *manombuok bukit* tempat rusa berdiri.³²



Gambar 3 Herni Dt. Paduko Rajo, seorang penghulu suku Domo yang mengisahkan, bahwa bukti-bukti dari proses kedatangan dari penduduk pertama Sumpur Kudus masih ada di Bukit Mancolak. *Sumber:* Dokumentasi Zusneli Zubir.

Ke tiga orang yang terdampar di Bukik Mancolak membagi daerah mereka, yakni Datuk Hario di Sungai Siriau, Datuk Rajo Besar di Puntian Dikisai dikuasai Datuk Rajo Besar (*Basa*). Selain itu keturunan dari Puyuh Beriang menempati wilayah Penti, Sigompo, dan Sipuah. Setelah lama mendiami daerah tersebut, ke dua rombongan itu menulis *batu basurek* di bukit mancolak. *Batu basurek* ini dipercaya oleh masyarakat Sumpur Kudus sebagai tanda telah meninggalkan tempat itu untuk menuju arah Timur dengan melalui dua jalur, yakni Bukit Lontiek dan Bukit Coliek.

³²Herni Dt. Paduko Rajo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

Rombongan pertama bergerak ke Bukit Lontiek, karena lelah mereka melihat (*mancoliek*) ke bukit di sebelahnya.



Gambar 4. Bukik (bukit) Lontik, Sumpur Kudus terlihat dari .
Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.

Setelah itu rombongan ini menuju guguk kecil. Mereka berhenti sejenak di tempat itu dan melihat hamparannya, sehingga dinamakan daerah itu Guguk Tenok. Setelah jelas arah yang dituju, rombongan itu menuju dataran rendah dan memilih sebuah tanjung kecil yang tinggi dari permukaan sungai. Mereka menjadikan kawasan itu menjadi tempat bermukim mereka dan dinamakan Dusun Tinggi.³³

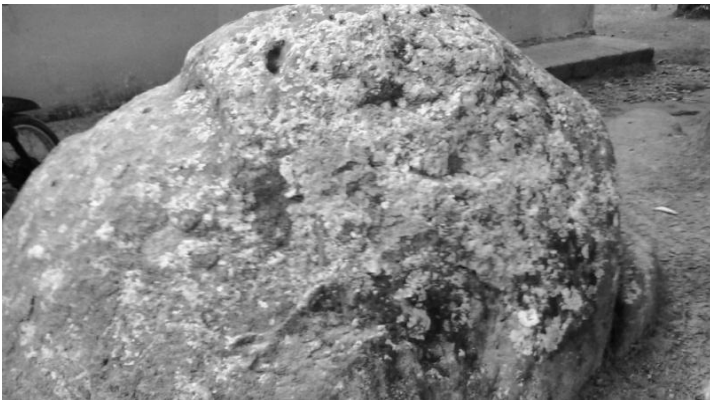
Rombongan ke dua melanjutkan perjalanan ke jalur pematang Bukit Sigale (asal kata dari singgah). Mereka selanjutnya menuruni dataran rendah arah Timur sampai menuju hulu sungai kecil yang bernama Sungai Lansek. Hulu Sungai Lansek ini dijadikan wilayah permukiman karena rombongan ini kebanyakan perempuan. Selain bermukim di hulu Sungai, aktivitas yang mereka lakukan adalah bercocok tanam di Lurah Basah. Selanjutnya rombongan yang mendiami dusun yang dinamakan Batu Tudung. Rombongan ini selanjutnya menuju arah Selatan yang lebih rendah daerahnya. Di tempat itu, rombongan

³³Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Mutiara Terpendam: Sejarah Ringkas Suku Domo Dan Kebesaran Ninik Mamak *Manuruik Alur Jo Patuik* Nagari Sumpur Kudus". *Manuskrip* Januari tahun 2011, hlm. 5-6.

ke dua membuat permukiman yang mereka namakan Koto Tuo. Setelah mendiami daerah ini, Datuk Hario dan Puyuh Bariang memantau sambil menjelajahi aliran Sungai Kehijauan sampai ke hulunya. Rombongan akhirnya sampai di kaki bukit yang bernama Sipandai (asal dari suara orang berandai andai).



Gambar 5 Batu *penumbok lasuang*. Jenis bebatuan ini diduga berasal dari zaman Megalithicum dan mengisyaratkan bahwa peristiwa migrasi suku-suku ke nagari Sungai Langsat Sungai Kehijauan telah lama terjadi. *Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.*



Gambar 6 Batu *babi*. Jenis bebatuan ini juga berasal dari masa Megalithicum. Batu ini dipercaya oleh masyarakat Sumpur Kudus bisa menghasilkan bunyi berbeda di setiap sudutnya. *Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.*

Rombongan ini bertemu dengan orang yang tinggal disana, dan Puyuh Bariang menjadikan daerah itu menjadi daerah kekuasaannya dan dikuasai oleh pewarisnya sampai sekarang, berita bertemunya dua rombongan ini disampaikan kepada orang yang tinggal di Koto bahwa orang yang melalui pematang Sigale sudah ditemukan tempat tinggalnya yang berada diranah sungai kehijauan.³⁴

Selanjutnya Datuk Hario dan Silelo Puyuh Bariang memantau dan menjelajahi daerah arah Selatan sambil berburu sampai menemukan hamparan kedataran yang sejuk dan berangin yang bernama Menganti. Kawasan ini dijadikan wilayah kekuasaannya dan mendirikan tempat permukiman di Tanjung nan Tinggi atau Koto Tinggi. Kawasan berikutnya yang dituju Datuk Hario Silelo dan Puyuh Bariang adalah arah Selatan sampai ke Kayu Rajo (Durian Gadang) dan meninggalkan pewarisnya, bernama Datuk Malano.³⁵

Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Datuk Hario dan Puyuh Bariang memutuskan kembali ke Koto Tuo. Rupanya kawasan yang ia tinggalkan itu sudah diramaikan oleh masyarakat yang membuat lahan sawah dan membuat pancang di sekitar hutan yang menjadi wilayah Marwan Sani Marwan Sarasi, dan Ujuh Rahman. Sejak itu, setiap kawasan dataran rendah dibagi untuk dijadikan ulayat kekuasaan masing masing dalam pembagian ulayat diambil batasnya dari Muaro Batang Somi. Di

³⁴Herni Dt. Paduko Rajo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

³⁵Menurut Mansur dalam manuskripnya, menjelaskan bahwa Dt Hario Puyuh Bariang kembali kearah Utara tanjung Peranginan Dt Hario dan Puyuh Bariang ingin kembali ke Tanjung Kedataran Koto Tuo tetapi Dt Silelo tidak mau beliau ingin tinggal ditempat itu maka Dt Hario dan Puyuh Bariang kembali menuju arah Utara sampai di Koto Tuo daerah yang dilalui oleh Dt Hario dan Puyuh Bariang diberi nama pantauan (rantau). Lebih lanjut baca Mansur Dt. Penghulu, "Mutuara Terpendam: Sejarah Ringkas Suku Domo Dan Kebesaran Ninik Mamak *Manuruik Alur Jo Patuik Nagari Sumpur Kudus*". *Manuskrip* Januari tahun 2011, hlm. 8-10.

Muara Batang Sowi, para penduduk membuat empang dan parik sebagai pembatas antara Lubuk Lumpang dan Parik.³⁶

a. Kedatangan rombongan Alim Parmato, Gundo Bogok, dan Datuk Oguong

Rombongan kedua yang datang ke Tanjung Kedataran hanya berjumlah tiga orang, yakni Alim Parmato, Gundo Bogok, Datuk Oguong. Rombongan ini diberikan ulayat arah Timur Tanjung Kedataran sampai Pantauan atau rantau. Berbeda dengan Alim Parmato yang diberikan oleh Datuk Hario sebagian ulayat kekuasaannya, baik tanah kering maupun tanah basah.³⁷



Gambar 7 Aliran Batang Sumpur Kudus. Menurut penuturan Khatib Amin, bahwa melalui aliran batang Sumpur Kudus ini masyarakat pada

³⁶Mereka membagi dua kawasan utara dan selatan masing masing mempunyai tempat yang pernah didiami sebelumnya, arah utara dikuasai oleh Dt Hario Puyuh Bariang sampai kekawasan Dusun Tinggi sedangkan arah selatan dikuasai kaum Marwan Sani, Marwan Sarasi dan Ujuh Rahman sampai kekawasan koto dan pantauan hilir sungai, sampai sekarang kawasan tersebut masih dikuasai oleh pewaris kedua kaum itu, sedangkan ujung tanjung kedataran dijadikan cadangan perumahan yang belum dihuni kedua rombongan ini diberi nama "Bapak" dan "Induok". Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

³⁷Menurut Mansur, sampai sekarang ulayat Alim Parmato berdekatan dengan pewaris Datuk Hario dan Puyuh Bariang, karena Alim Parmato diberi Datuk Hario Ulayat. Maka Datuk t Oguong meminta juga tanah pada Datuk Hario. Datuk Hario memberikan kawasan Dusun Tinggi sebahagian sekarang bernama Palanduok (asal kata meminta pada *induok*). Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

tahun 1940 memanfaatkan sampan menuju pantai Timur Sumatra.
Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.

b. Rombongan Datuk Sakutu di Tanjung Kedataran

Rombongan ketiga yang datang dari arah Selatan Tanjung Kedataran adalah Datuk Sakutu disebut Sailendra (keturunan Kerajaan Sriwijaya datang dari Bukit Siguntang-guntang. Rombongan ini mendirikan kerajaan kecil di daerah persinggahannya, yakni Silukah Pinang Tungga dan Siluka Nagari Durian Gadang. Rombongan ini membawa benda keramat, yaitu dua buah batu gadang dan satu buah pisau *gumantiang*. Menurut Herni, sampai kini buktinya masih ada di Silukah dan di Pintu Rayo (Sumpur Kudus). Sedangkan pisau *gumantiang* dipergunakan untuk membelah Batang Kuantan yang ditutupi batu dan akar pisau ini masih ada dan berada di Silukah Nagari Durian Gadang.

Selanjutnya rombongan Datuk Sakutu meneruskan perjalanannya menuju arah Utara Tanjung Kedataran melalui Tanjung Peranginan (daerah kekuasaan Datuk Silelo). Rombongan Datuk Sakutu yang terdiri dari Lobai Galombang, Iniek Kupiah dan Datuk Paduko Alam dalam perjalanan mereka menemukan sebuah *uncang sirieh* di tengah jalan. Sejak saat itu daerah tersebut diberi nama Uncang Labuah.³⁸

c. Utusan "Darek" di Tanjung Kedataran

Dengan telah tersebarnya penduduk di Tanjung Kedataran, rombongan ke empat pun datang ke daerah ini. Mereka adalah berasal dari Darek, utusan Datuk Parpatieh nan Sabatang dan Datuk Katumanguangan. Rombongan ini terdiri dari Suku Caniago dan Suku Piliang. Rombongan terakhir ini mendapat

³⁸Menurut Herni, rombongan Datuk Sakutu terus menelusuri lereng bukit batu. Pada satu tempat mereka berhenti dan *talaok* (terkejut) melihat dataran Tanjung Kedataran sudah dihuni terlebih dahulu. Datuk Sakutu kemudian menuju arah utara sampai ke hulu Batang Somi dan menjadikan daerah kekuasaannya, kawasan ini menjadi ulayat pewaris Datuk Sakutu sampai arah selatan Talao. Herni Dt. Paduko Rajo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

tanah ulayat dari Datuk Oguong dan Gindo Bogok yang berada di sebagian dataran rendah Koto Tuo sampai Pantauan. Setelah bermukimnya utusan dari Darek, kawasan Tanjung Kedataran didatangi Datuk Nyato yang datang dari arah utara Batang Sumpur Kudus. Lebih lanjut Mansur menjelaskan:

Tidak lama kemudian muncul seorang datuk yang muncul dari arah Utara dari Daerah Ulu Sungai Kederasan (hulu Batang Sumpu) dengan rakit batang pisang. Sesampai di Dusun Tinggi, ia turun dari rakit berjalan menuju guguk dan pancang yang tinggi sekarang bernama Macang Tinggi. Setelah mendirikan pancang itu, ia kembali menaiki rakitnya sampai ke Lubuk Lumpang atau Parik. Penduduk Koto Tuo pun melihat pancang tinggi diarah utara dan pergi menengok keperbatasan ternyata pancang yang tinggi itu didirikan oleh Datuk Nyato.³⁹

Datuk Nyato diberi permukiman oleh rombongan Marwan Sarasi, Datuk Hario Puyuh Bariang, karena Ujung Tanjung Kedataran tidak dihuni. Wilayah ini diperuntukan sebagai cadangan permukiman dan dinamakan wilayah ini Taye. Sejak saat itu keturunan Datuk Nyato dikelilingi keturunan penduduk awal Sumpur Kudus, yakni rombongan Datuk Hario Alim Parmato, Puyuh Bariang dan Marwan Sarasi. Pada masa ini, sudah mulai dibentuk pemerintahan di Sungai Langsung Sungai Kehijauan.

Dari proses kedatangan penduduk di Sungai Langsung Sungai Kehijauan berdasarkan kisah tradisi lisan, tampak dekat dengan konsep historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan kekayaan intelektual dalam sejarah Indonesia. Historiografi ini dijadikan sumber satu-satunya untuk penulisan pra sejarah, sejarah Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan terutama masa kerajaan Hindu-Budha, meskipun ada sumber lain seperti sumber Cina dan berita para peziarah namun kedudukan

³⁹Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Mutiara Terpendam: Sejarah Ringkas Suku Domo Dan Kebesaran Ninik Mamak *Manuruk Alur Jo Patuik* Nagari Sumpur Kudus". *Manuskrip* Januari tahun 2011, hlm. 8-10.

historiografi tradisional menjadi amat penting karena menjadi sumber utama dalam penulisan sejarah masa Hindu-Budha.

Meskipun banyak yang dipertentangkan mengenai isi dari historiografi ini karena sebagaimana kita ketahui penulisan historiografi pada masa ini cenderung raja sentris atau istana sentris dan berbagai hal lainnya, tapi setidaknya kita mendapatkan gambaran mengenai kondisi pada saat itu selain fakta-fakta yang kita dapatkan. Secara umum perkembangan corak penulisan sejarah di Indonesia sesuai tingkat historisitasnya, telah muncul dalam berbagai bentuk.⁴⁰

Corak religio-magis/kosmogonis adalah karya sejarah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat-masyarakat etnik tradisional seperti Hikayat, Babad, Tambo, Lontara, dan lain-lain. Bila kita hubungkan dengan historiografi tradisional Sumpur Kudus, baik mengenai asal usul nagari, maupun sejarah kedatangan orang pertama ke daerah tersebut, seringkali muncul sifat anakronis, “pengagungan” terhadap masa lalu, bercorak mitologis, dan bahkan tidak jarang menyertakan unsur-unsur kekuatan supranatural dalam rangka penokohan aktor sejarah yang dideskripsikan. Sejarah religio-magis ini biasanya bercorak *etnocentrisme*, yakni pendeskripsian yang memfokus pada ruang lingkup terbatas pada masyarakat etnik lokal.⁴¹

Sejak terbentuknya pemerintahan di Sungai Langsung Sungai Kehijauan, aturan adat yang berlaku pada masa itu adalah pucuk pimpinan dipegang rombongan pertama, sekaligus menentukan aturan dan peraturan. Menurut Mansur, pembentuk sistem pemerintahan pada masa itu masih dalam bentuk yang sederhana dan masyarakat masih menganut agama monotheis. Sebelum masuknya agama Islam ke Sungai Langsung Sungai Kehijauan, masyarakat sudah beratapencarian sebagai petani, peladang, pemburu, dan peternak.⁴² Sejak pola kehidupan terbentuk di

⁴⁰Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm.3.

⁴¹M. Nursam, *Membuka Pintu Bagi Masa Depan. Biografi Sartono Kartodirdjo*. (Jakarta: Kompas, 2008).

⁴²Menurut Herni, setiap ulayat sudah ditentukan dan dibagi menurut pembagian masing-masing dijadikan lahan pertanian. Seluruh hutan digarap dan dijadikan: lahan

Sumpur Kudus, maka sistem adat yang dipakai di Sungai Langsung Sungai Kehijauan adalah adat Bodi Caniago dan adat Koto Piliang, seperti diungkapkan dalam pepatah adat:⁴³

*Pisang sikalek kalek hutan
Pisang tambatu banyak gatah
Koto Piliyang iyo bukan
Bodi Caniago iyo antah*

Meskipun sistem yang diberlakukan adalah kelarasan Koto-Piliang dan Bodi-Caniago, namun dari empat suku besar yang ada di Sungai Langsung Sungai Kehijauan, yakni Domo, Melayu, Caniago, dan Piliang, hanya Caniago dan Piliang yang mewakili sistem kelarasan tertua di Minangkabau itu. Disamping empat persukuan induk, ditemui Suku Kampai dan Pitopang, yang merupakan pecahan dari Suku Melayu dan Piliang. Sementara itu, penghulu-penghulu di Sumpur Kudus disebut dengan datuk-datuk nan Sepuluh dan Tujuh, yaitu Datuk Nan Sepuluh di Sumpur Kudus dan Datuk Nan Tujuh di Koto Tinggi Koto Piabang Manganti.⁴⁴ Meskipun kerajaan Minangkabau yang berpusat di Sungai Langsung Siguntur berakhir (setelah Aditiawarman meninggal dunia), menurut A.R Datuk Rajo Melayu Kerajaan

pertanian dan perkebunan, tanah basah dijadikan sawah, tanah kering dijadikan ladang. Kegiatan ini dikiaskan dalam pepatah *Kaawang balantak basi, kadarek batanam batu, Kapadang baligundi, karimbo batauok kayu, sawah bapamatang, ladang bamintalak, ulayat dek datuok nan 10 nan dipakai dek anak kamankan bermanfaat dek urang nagari, banda baliku turuik buki, sawah balupak dinan data, ladang babidang dinan lereng cancang latieh nenek moyang tambilang kayu nan dahuluno dijadikan hak nan batipak haroto nan bapunyo, tipak dak bulieh tayiek manayiek, punyo tak bulieh tunggui mananggui, nan lah dipaciek dek datuok nan 10 dipawikkan kapitungguh ditombangkan ka pusoko, haroto tinggi nan dinamokan nan basipat baribu kalo adat nan dipakai di nagari Sumpur kudus*. Herni Dt. Paduko Rajo, wawancara, tanggal 13 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

⁴³ A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986).

⁴⁴ Mansur Dt. Penghulu Mudo, wawancara, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

Sungai Langsung Sungai Kehijauan masih terus berlanjut pemerintahannya.⁴⁵

B. Sumpur Kudus Masa Hindu-Buddha

Jauh sebelum munculnya berita Pamalayu tahun 1275, menurut Rouffaer sudah ada kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Sumatra bagian tengah. Rouffaer menemukan jejak-jejak kerajaan Melayu Jambi dan kerajaan Dharmasraya yang sering dihubungkan dengan Raja Adityawarman. Selain sebagai pusat agama Buddha, Rouffer meyakini bahwa Dharmasraya berada di Sungai Lansek, Rambahan, Pulau Punjung atau Siguntur. Lebih lanjut Roufer menulis, bahwa Dharmasraya adalah daerah Budhis yang makmur sekitar tahun 1350 di bagian Hulu Batanghari.⁴⁶

Sebelum dipimpin Adityawarman⁴⁷, Dharmasraya merupakan ibukota kerajaan Swarnabhumi yang diperintah Wangsa Malayapura di bawah pimpinan Maharaja Surya Naraya dan memindahkannya dari Jambi pada permulaan abad kedua belas.⁴⁸ Sedangkan nama "Pagaruyung" muncul sebagai nama ibukota kerajaan Dharmasraya ketika Adityawarman memindahkan ibukota Dharmasraya ke Melayu Kampung Dalam Siguntur tahun

⁴⁵A.R Dt.Rajo Melayu,"Sejarah Ringkas dan Silsilah Raja Minangkabau Pagaruyung, *Manuskrip* tahun 1992, hlm. 10.

⁴⁶Lebih lanjut lihat Rusli Amran, *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang...*, hlm. 38-41.

⁴⁷Maharaja Diraja Adityawarman disebut dengan nama Sang Aria Dewaraja Pu Aditya (Piagam Blitar berangka tahun 1330, dan pada Piagam Batu D.38 atau Piagam OJO-LXXXIV), Adityawarman (Piagam Manjusri berangka tahun 1343, dan di antara prasasti di Sumatera), Udayadityawarman dan Adityawarman (pada beberapa prasasti di Sumatera). Pada Kitab Catatan Raja-Raja Cina disebut dengan nama Seng K'ia Lie Yu Lan (Sang Adityawarman). Sedangkan nama resmi baginda adalah Udayadityawarman Pratapa Parakrama Rajendra Mauliwalwarman (tercantum pada salah satu prasasti di Sumatera). Lebih lanjut baca A. Chaniago H.R., "Silsilah dan Pemerintahan Adityawarman" *Haluan* tanggal 5 Februari 1983.

⁴⁸A. Chaniago H.R., "Putri Raja Swarnabhumi Dharmasraya" *Haluan* tanggal 10 Januari 1983.

1347.⁴⁹ Kerajaan Minangkabau, menurut A. Chaniago hanya mewarisi sebagian kecil dari Swarnabhumi. Nama kerajaan Minangkabau muncul pada sumber-sumber sejarah abad ke-16, maupun sesudahnya di kalangan orang Melayu dan peneliti asing dan tidak menyebutnya sebagai kerajaan Pagaruyung.

Namun sebelum munculnya pemerintahan di Dharmasraya, pusat pemerintahan Minangkabau berada di Pariangan Padang Panjang. Setelah periode Pariangan Padang Panjang atau *Lagundinan Baselo* masa Sri Maharaja Diraja, pemerintahan Alam Minangkabau dilaksanakan oleh pemerintahan Raja-Raja Adat di kerajaan Bungo Setangkai, Sungai Tarab dengan pemerintahannya yang bernama *Penghulu Tujuh Balai*. Adapun para penghulu yang pernah memerintah di sini adalah:⁵⁰

1. Datuk Bandaro Putieh, Penghulu Sungai Tarab.
2. Datuk Bandaro Kuning, Penghulu Dusun Tuo Lima Kaum.
3. Datuk Maharajo Kayo, Penghulu Pariangan.
4. Datuk Maharajo Nun Alam, Penghulu dari Tigo Tungku Sajaringan, Buo, Kumanis dan Tigo Jangko.
5. Datuk Rajo Melayu, Penghulu Sumpur Kudus.
6. Datuk Perpatih Suanggi, Penghulu Padang Ganting.
7. Datuk Indomo, Penghulu Saruaso.

Para Penghulu Tujuh Balai tersebut terdiri dari :

1. Penghulu Tungku Tigo Sajaringan dari aliran Batang Kawas (*Kaweh*) atau Sinamar, Buo, Kumanis dan Tigo Jangko.
2. Penghulu Sumpur Kudus, dari seberang Batang Kaweh.
3. Penghulu di Padang Ganting.
4. Penghulu di Saruaso, Tanjung Emas.
5. Penghulu di Sungai Tarab.
6. Penghulu di Sumanik.

⁴⁹A. Chaniago H.R., "Wilayah Minangkabau Maso Saisuak Terbentang di Sumbar, Riau, dan Bengkulu" *Haluan* tanggal 20 Januari 1984.

⁵⁰Sudarso Salih BCHK St. Carano, *Sejarah Ketatanegaraan Kerajaan Pagaruyung* (Purwokerto: Pribumi Offset, 1985), hlm. 60-63.

7. Penghulu di Pariangan dan Batipuah.⁵¹

Konsolidasi dari para pemuka adat ini tidak bertahan cukup lama, setelah itu para penghulu mulai membagi kekuasaan, sehingga embrio dari terbentuknya Raja Tigo Selo telah ada sejak kerajaan Minangkabau memasuki periode Hindu-Buddha yang telah membagi kekuasaan dalam tiga bentuk yaitu: Raja Alam, Raja Adat dan Raja Ibadat. Rusli Amran dan Navis mencatat bahwa Penghulu Tujuh Balai kemudian menjelma menjadi Rajo Tigo Selo dan Basa Ampek Balai.⁵² Sedangkan Mursal Ensten mencatat bahwa Tungku Tiga sajarangan adalah istilah lain dari pemerintahan Rajo Tigo Selo.⁵³ Hal senada juga diungkapkan M.D Mansur dalam karyanya, menyebut bahwa pada abad ke-7 dan 8 telah terbentuk pemerintahan Alam Minangkabau dengan struktur pemerintahan sebagai berikut.⁵⁴

1. Rajo nan Tigo Selo yang terdiri dari Raja Undang, Raja Pusako dan Raja Agama.

2. Basa Empat Balai. Struktur Basa Ampek Balai terdiri dari: Panitahan Sungai Tarab, Andomo di Saruaso, Mangkudum di Sumanik, dan Tuan Kadi Padang Ganting. Sedagkan Tuan Gadang Batipuh pada masa itu merupakan anggota yang terakhir masuk dalam struktur Basa Ampek Balai tersebut.⁵⁵

Geneologi Raja Ibadat, menurut tradisi lisan yang dipercaya masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari keturunan raja-raja Pagaruyung. Kondisi ini tentunya erat hubungannya dengan pepatah adat *RajoTurun Temurun, Puti Sunduik Basunduik*. Awal dari keturunan Rajo Tigo Selo berasal dari keturunan

⁵¹Sudarso Salih BCHK St. Carano, *Sejarah Ketatanegaraan Kerajaan Pagaruyung...*, hlm. 69-70.

⁵²Lebih lanjut lihat Rusli Amran, *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang...*, hlm. 38-41. Lihat juga A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau...*, hlm. 50.

⁵³Mursal Ensten, *Minangkabau : Tradisi dan Perubahan*. (Padang, Angkasa Raya, 1993), hlm. 23-24.

⁵⁴M.D Mansur, *Sejarah Minangkabau*. (Jakarta: Bhratara, 1979), hlm. 25.

⁵⁵A.R Dt.Rajo Melayu, "Sejarah Ringkas dan Silsilah Raja Minangkabau Pagaruyung," *Manuskrip* tahun 1992, hlm. 12. Lihat juga dalam M.D Mansoer, dkk. *Sejarah Minangkabau...*, hlm. 64.

Adityawarman, anak dari Dara Jingga putri Kerajaan Melayu Dharmasraya dari perkawinan dengan pembesar di Majapahit.

Menurut Kitab Pararaton, Dara Jingga menikah dengan seorang bergelar “Dewa” (Siraniaki Dewa). Dari perkawinannya lahirlah Tuanku Janaka Warmadewa atau Aji Matrolot. Ahli-ahli adat Minangkabau sebagian besar menyamakan Dara Jingga dengan Bundo Kanduang dalam Kitab Epos (*Kaba*) “Cindua Mato”. Sedangkan Tuanku Janaka disamakan dengan Dan Tuanku.⁵⁶

Adityawarman lahir dan dibesarkan di Kerajaan Majapahit. Kidung Ranggalawe yang pada dasarnya menceritakan tentang kisah kehidupan Ranggalawe yang *mencoupt* Jayanegara. Pada salah satu bagian, kidung ini menulis adanya ekspedisi Pamalayu yang diperintahkan Kertanegara. Dalam kidung itu ditulis, “...Bersama-sama dengan tentara Pamalayu yang dikirim oleh Kertanegara, datang dua orang puteri bernama Dara Petak dan Dara Jingga...”⁵⁷ Ambisi Adityawarman yang besar untuk menjadi Raja membawanya kembali ke kerajaan Dharmasraya.

⁵⁶A. Chaniago H.R., “Raja Puteri Swarnabhumi Darmasraya” *Haluan* tanggal 25 Januari 1984.

⁵⁷Kitab Pararaton yang merupakan naskah Jawa kuno yang menceritakan tentang sejarah tokoh Ken Arok dan sebagian kecil kisah sesudah masanya yang ditulis jauh sesudah masanya, diperkirakan dimasa Majapahit, dalam satu uraiannya disebutkan: “... sekitar sepuluh hari sesudah kedatangan rombongan yang bertugas ke Melayu, diperoleh dua puteri, seorang bernama Dara Petak ia diperisteri oleh Raden Wijaya dan satu puteri lagi Yaitu Dara Jingga, diperisteri oleh Dewa, (nant) anaknya diberi nama Tuhan Janaka, masih bersaudara dengan Sriwarmadewa, gelarnya adalah Aji Matrolot...” Lebih lanjut baca MD. Mansoer, dkk. *Sejarah Minangkabau*. (Jakarta, Bhartara, 1970), hlm. 57.



Gambar 8 Patung Adityawarman di Museum Nasional Jakarta. Masyarakat Sumpur Kudus meyakini kisah oral history, bahwa Raja Ibadat merupakan keturunan dari Raja Minangkabau itu. *Sumber:* Koleksi Zusneli Zubir.

Masyarakat Sumpur Kudus meyakini *oral history* yang diperoleh secara turun-temurun, bahwa setelah dinobatkan menjadi raja (1347), Adityawarman meninggalkan Dharmasraya menuju pedalaman Minangkabau beserta istrinya dengan menyusuri Hulu Batanghari hingga ke Batang Kaweh (Sinamar). Di Kumanis, Adityawarman diterima dengan baik oleh Tiga Ninik (tetua) dan Empat Ninik di Tanjung Bonai Aur, serta Raja Sekutu di Sumpur Kudus. Adityawarman kemudian mendirikan kerajaan pertama di Tanjung Alam Nagari Kumanis.

Adityawarman dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Diraja di Kubang Tigo Baririk Tanjung Bonai Aur. Kerajaan berkembang dengan nama Pagaruyung, nama Pagaruyung berasal dari tepian tempat mandi raja yang dipagar dengan *ruyung* (semacam kayu yang kuat) untuk menghindari gangguan dari buaya. Saksi bisu mengenai penamaan nama Pagaruyung ini, menurut Herni masih bisa dibuktikan, yakni berupa makam yang dipercayai sebagai komplek kuburan anak

Adityawarman beserta kuburan kepala buaya yang pernah memangsa putranya.⁵⁸

Setelah diterima dan menetap cukup lama, di sini Adityawarman menikahi seorang putri asal Sumpur Kudus, guna mempererat hubungan dengan daerah itu. Namanya Puti Pinang Masak yang kemudian melahirkan keturunan Raja Ibadat.⁵⁹ Keinginan yang kuat untuk menjadi raja yang besar membawa Adityawarman sampai ke Sungai Tarab dengan mengalir Batang Tampo. Adityawarman diterima dengan baik oleh Datuk Bandaharo. Di tempat ini terjadi peristiwa yang dinamai *babungo satangkai*, yaitu penyerahan kekuasaan secara simbolis kepada Adityawarman dari Datuk Suri Dirajo, Datuk Ketamanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang.⁶⁰

Adityawarman diakui sebagai raja di Alam Minangkabau dan dilantik untuk kedua kalinya. Setelah sampai di Saruaso, Adityawarman menikahi seorang kemenakan Datuk Bandaro Putih yang bertugas sebagai *Payuang Panji Koto Piliang*. Sehingga semasa hidupnya, Adityawarman menikahi tiga orang perempuan, yakni:

⁵⁸ Lihat Dato Paduka Haji Djafri, bahwa di Hilir Negeri Pangian terdapat Negeri Kumanih dan Tanjung Bonai Aur, setengah pendapat mengatakan bahwa di Negeri Kumanih inilah dulunya tepian yang berpagar dengan ruyung yang kemudian pindah ke Pagaruyung, di Hulu Batang Selo yang bermuara ke Batang Sinamar. Pendapat lain dari Ahmad Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo: bahwa nama tepian yang berpagar ruyung di Bungo Setangkai (Sungai Tarab). Lebih lanjut baca Ahmad Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau*. (Jakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, tt) hlm. 28.

⁵⁹ Berdirinya kerajaan Pagaruyung ini dilukiskan dalam tambo yang berbunyi: "*Bamulo sumua kadigali, asa limbago kadituang, bamulo mangko manjadi, baawal mangko baakhir, etan diulak Tanjuang Bungo, di Tanjuang Medan nan Bapaneh, di ranah nagari Pagaruyuang*" Yang dimaksud dengan Pagaruyuang adalah tepian yang "dipagar" dengan "ruyung" di Biaro Batu Jonggi Taniung Medan, Nagari Kumanih.

⁶⁰ Kedatangan Adityawarman diungkapkan dalam tambo: "Datanglah Anggang dari lauik, ditembak Datuak nan Batigo, badia sadatak tigo dantamnyo, mambebek kambiari lari kahutan, manyalak anjiang lari ka koto, bakotek ayam dalam talua, jatulah talua Anggang nantun, karumah niniak Suri Dirajo, di Pariangan Padang Panjang, barisi kudo samburani, bapalano amehkan dirinyo." Lihat Tim RSPDM, *Menelusuri Sejarah Minangkabau*, (Padang, Citra Budaya Indonesia, 2000), hlm.140.

1. Putri Komar dari kerajaan Dharmasraya Siguntur. Permaisuri ini diberi hadiah Istana Balai Janggo
2. Puti Pinang Masak dari Ranah sungai Langsung Sungai Kehijauan (Sumpur Kudus) dihadiahi Istana Kampung Tengah, dan
3. Puti Jamilan dari Saruaso dihadiahi Istana Kampung Gudam.⁶¹

Kekuasaan Raja Ibadat di Sungai Langsung Sungai Kehijauan tidak sama halnya dengan kekuasaan Raja Alam.⁶² Ia memegang hukum agama, sebagai orang yang dituakan, tempat para penghulu dan tuan kadi bertanya, mendamaikan sengketa, serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menghormati jasa-jasanya, Raja Ibadat diberi sawah, ladang, dan tanah sebagai perkampungan raja. Tanah-tanah yang diberikan itu merupakan pemberian untuk raja yang tidak boleh dijual dan

⁶¹Setelah Adityawarman pindah ke Bukit Batu Patah dan membuat sebuah perkampungan baru, kampung tersebut dinamai orang dengan "kampung raja yang berpagar ruyung", karena raja tersebut berasal dari kampung yang tepiannya berpagar dengan ruyung. Nama inilah yang kemudian terkenal dengan nama Pagaruyung. Disini ketiga keturunan raja berkembang. Adityawarman menurut Rauf, meninggal karena diracun sebab ingin menikahi seorang putri di Pagaruyung.

Keturunan Adityawarman yang dapat diketahui adalah Ananggawarman, anak dari perkawinan Adityawarman dengan Puteri Saruaso dan menjadi raja menggantikan Adityawarman, sepeninggal Ananggawarman tahta kerajaan berada ditangan Basa Ampek Balai karena terjadi pergolakan didalam istana, tahta akan tetap dipegang oleh Basa Ampek Balai sampai adanya raja yang kuat yang dapat menyatukan pendapat semua pihak yang bersengketa, hal ini diperkirakan berlangsung sangat lama, lebih dari satu abad sampai semua pihak keluarga raja mau menerima keputusan Ninik Mamak dan Cadiak Pandai di Luhak nan Tigo dan Lareh nan Duo. Mattudin Rauf, "Sirah Pagaruyung". *Manuskrip* tahun 1930.

⁶²Bentuk hirarki kerajaan, dimana, struktur yang paling atas adalah Raja yang membawahi Dewan Menteri. Konsep *Raja* di Minangkabau dikenal dengan sebutan *Rajo Tigo Selo*. Artinya ada tiga raja yang berkuasa dalam bidangnya masing-masing. Ketiga raja ini adalah Raja Adat sebagai pemegang kekuasaan di bidang adat, Raja Ibadat pemegang kekuasaan di bidang agama dan Raja Alam sebagai pemegang kekuasaan terakhir dari kedua raja yang disebutkan terdahulu. Sedangkan pada tingkat menteri disebut dengan *Basa Ampek Balai* yang terdiri dari Bandaro Titah di Sungai Tarab sebagai Perdana Menteri, Tuan Kadhi di Padang Ganting yang membidangi urusan keagamaan, Indomo di Saruaso dalam urusan keuangan dan Makhudum di Sumanik yang mengurus soal pertahanan dan daerah rantau.

digadaikan. Meskipun demikian, masyarakat Sungai Langsung Sungai Kehijauan memposisikan kewajiban untuk mematuhi para raja, ulama dan penghulu sama dengan pengganti Nabi.⁶³

Raja Ibadat yang menyandang *sako* kebesaran hanya memperoleh hutan dan tanah yang diserahkan oleh Datuak nan Sapuluh Sumpur Kudus. Raja hanya berkuasa dalam beberapa hal *ameh manah, tukup bubung, hak dacing, pengeluaran ubur-ubur, gantung kemudi* dan lainnya dari Taluak Kuantan, bandar-bandar di rantau-rantau kecil.⁶⁴ Sedangkan penghulu memiliki hak atas *Adat Bunga kayu, Adat Takuk Kayu, Adat Tanam Batu dan Adat Bunga Tanah*.⁶⁵

Wujud dari kekuasaan Raja Minangkabau telah diungkapkan pada pepatah adat yang berbunyi *Luhak ba penghulu, rantau Barajo*. Maksud dari pepatah ini adalah dikawasan luhak yang berkuasa adalah penghulu, sedangkan dirantau dikuasakan pada

⁶³Dalam tambo ditulis, "... Demikianlah segala Raja-Raja dan segala penghulu-penghulu yang mempunyai bicara, wajiblah atas kamu mengikut Sulthan kamu dan penghulu kamu, meskipun Raja kamu itu kanak-kanak sekalipun, wajib kamu menurut perkataan dan bicaranya yang berpatutan dengan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, karena orang itulah yang akan ganti dari padanya...". Lihat Ahmad Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau*. (Jakarta, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, tt), hlm. 40.

Dalam Tambo Minangkabau disebutkan tentang pembagian-pembagian raja adalah *Pertama*, Raja yang berdiri sendirinya, yang bernama "halur", itulah yang disebut orang salah kepada raja mati, artinya apabila seseorang yang tidak menurut halur dengan patut, "mati katanya" (tidak dihargai katanya). *Kedua*, Raja yang didirikan sekata Alam, artinya raja yang naik nobat mengisi kepada alam, penghulu yang naik nobat mengisi pada nagari. Itulah yang disebut "*tumbuh ditanam, Gadang dilambuk*", *Adil raja disembah, lalim raja disanggah*. Lebih lanjut lihat Datuk Batuah Sango, *Tambo Alam Minangkabau* (Payakumbuh: Perc. Limbago, tt), hlm. 38.

⁶⁴Diluhak raja hanya menerima berupa *ameh manah* ataupun pajak penambangan emas, *tukup bubung* atau hadiah dari para penghulu yang dikumpulkan dan sebarang banyaknya tidak ditentukan, *hak dacing* atau hak raja yang berasal dari timbangan, pengeluaran *ubur-ubur* atau merawa yang harus diterima oleh raja dan haluan kemudi atau pajak dari kapal-kapal dagang yang berlabuh dibandar-bandar dagang.

⁶⁵*Adat Bunga Kayu* yaitu dari hasil hutan, *Adat Takuk kayu* yaitu dari izin membuat ladang di rimba, *Adat Tanam Batu* yaitu izin membuat sawah dan ladang yang luasnya ditentukan oleh penghulu dan *Adat Bunga Tanah* yaitu dari izin menambang hasil bumi.

Raja kecil. Pepatah ini rupanya juga berlaku pada Raja Ibadat. Bedanya adalah adat istiadat dan kekuasaan penghulu tidak berlaku dalam perkampungan raja. Raja Ibadat Sumpur Kudus yang mendiami Istana Kampung Dalam dengan segala peralatannya, tidak terikat dengan adat istiadat di Sungai Langsat Sungai Kehijauan.⁶⁶

Perkampungan raja merupakan wilayah otonom yang tidak bisa diganggu gugat oleh para penghulu. Daerah hunian Raja Ibadat membentuk suatu daerah sakral yang tidak bisa dimasuki oleh pengaruh adat. Perkampungan raja yang juga dihuni oleh para pembantu raja pada awalnya bukanlah berasal dari suku-suku yang telah ada di Sumpur Kudus, mereka diangkat menjadi kemenakan Datuk Inyiah Nan Batigo dan Datuk Nan Sapuluh setelah kekuasaan raja Ibadat tidak ada lagi di Sumpur Kudus.

Dalam struktur atau lembaga pemerintahan Raja Ibadat terdapat *Tiga Orang Penghulu* yang diberi wewenang jika raja sedang tidak berada ditempat untuk yang menjalankan pemerintahan, penghulu tersebut adalah *Datuk Inyiah nan Batigo*, yang disebut juga sebagai Tuo Kampuang. Datuk Wak nan Batigo tersebut adalah :⁶⁷

- a. Datuk Rajo Gagah merupakan *urang tuo* (penasehat) dari Suku Melayu
- b. Datuk Rajo Mangkuto merupakan *haluan kamudi* bidang Adat dari Suku Piliang.
- c. Datuk Rajo Lelo merupakan *haluan Kamudi* bidang Syarak dari Suku Malayu.

C. Menuju Sebutan Makkah Darek

1. Peran Syekh Ibrahim dalam Penyebaran Islam di Sumpur Kudus

Pada abad ke-16, menurut van Bezel secara bertahap keluarga kerajaan yang menetap di Sumpur Kudus telah

⁶⁶Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

⁶⁷S. Khatib Amin, *wawancara* tanggal 20 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

menganut agama Islam.⁶⁸ Sebagai daerah pertama penganut agama Islam inilah yang menjadikan Sumpur Kudus dikenal dengan istilah *Makkah Darek*. Kisah mengenai *Makkah Darek* muncul diawali dengan datangnya Syekh Ibrahim (Syekh Beraih) dari Kudus Jawa pada tahun 1503, atau tepatnya pada masa pemerintahan Rajo Gagah Gumpito (Rajo Pandito II) di Sungai Langsat Sungai Kehijauan.⁶⁹



Gambar 9. Kompleks pemakaman Syekh Ibrahim atau oleh penduduk Sumpur Kudus dipanggil Syekh Beraih. Berkat kemampuannya, ia bisa mengajak Raja Sumpur Kudus untuk memeluk Agama Islam.
Sumber: koleksi Zusneli Zubir.

⁶⁸Rusli Amran, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 34.

⁶⁹Damhoeri Gafoer, "Kedatangan Syekh Ibrahim (Syekh Beraih)", *Manuskrip* (Sumpur Kudus: tanpa tahun), hlm. 5.

Dalam penelitian mengenai sejarah Sumpur Kudus, juga dipakai teori struktural Anthony Giddens. Menurut Giddens, ikatan struktural adalah jaringan sosial fungsional yang saling berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi aktor sejarah. Ketika berbicara mengenai unsur-unsur struktural yang menjiwai seluruh perilaku manusia, menurut Giddens gagasan ini merupakan kekukuhan atau pengulangan peristiwa dalam kontinuitas dalam kehidupan sosial.⁷⁰ Bila teori struktural ini dihubungkan dengan kondisi Sumpur Kudus tampak jelas, bagaimana nila-nilai dan tradisi ke-Islaman yang kuat melekat dalam masyarakatnya, juga memperkuat ikatan mereka terhadap rangkaian sejarah pasca masuknya Islam ke wilayah ini, yakni PDRI dan PRRI.

Menurut Mansur, Syekh Beraih datang ke Sumpur Kudus melalui Aceh menuju Sintuk Pariaman. Setelah itu, Syekh Beraih menuju pedalaman Minangkabau, yakni ke Talawi, Padang Ganting, dan Aur Siriau (Tanjung Bonai Aur). Daerah Sumpur Kudus yang pertama di Islamkan Syekh Barai adalah Aur Siriau tahun 1503. Sehingga tidak mengherankan, bila ia diberi gelar Inyiek Parumahan. Kisah seputar mitologi juga diyakini oleh masyarakat Sumpur Kudus, yakni *Lantiek Aur Kuning*.

Menurut kabarnya Syekh Beraih menyiarkan Islam dari Aur Siriau hingga Sumpur Kudus. Ia ke Sumpur Kudus untuk mengajarkan masyarakat *meneruka* sawah, membajak dan menanam padi, tapi pada batinnya mengajarkan agama Islam. Menurut cerita lama menjelang ke Sumpur Kudus sampai di *Lantiek Aur Kuning*, ia menancapkan ranting aur kuning pelecut kerbaunya, sambil beristirahat di puncak bukit itu.

⁷⁰Anthony Giddens, *Problematika Utama dalam Teori Sosial. Aksi, Sturktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.108.

Kemudian aur kuning itu tumbuh dan itulah sebabnya bukit itu bernama *Lantiek Aur Kunieng*. Menjadi tradisi bagi pendatang baru ke Sumpur Kudus, bila sampai di Lantiek Aur Kunieng turun dari atas kendaraan harus menancapkan ranting kayu disana.⁷¹

Metode dakwah yang dilaksanakan oleh Syekh Berahi cukup sederhana dan tidak rumit. Ia hanya mengingatkan, setiap memulai pekerjaan dimulai dengan menyebut *Bismillah*, dan apabila pekerjaan selesai menyebut *Alhamdulillah*. Tujuan dari pelafazan kalimat di atas, menurut Syekh Berahi adalah agar pekerjaan yang dilakukan diridhai Allah SWT dan bernilai pahala. Bila seorang penduduk mengalami sakit kulit, ia pun melarang si sakit tidak menyantap daging babi, anjing dan binatang haram lainnya.

Kalau mandi kata beliau sebaiknya badan digosok dengan daun kayu sungkai supaya penyakit kulit hilang. Demikian kebijaksanaan beliau dalam memasukkan agama Islam kepada masyarakat.⁷²

Melihat metode dakwah yang dilaksanakan Syekh Beraih itu, menyebabkan Rajo Pandito III⁷³ (raja Ibadat) tertarik memeluk agama Islam tahun 1505. Menyaksikan Rajo Pandito III resmi memeluk Islam, masyarakat Sungai Langsung Sungai Kehijauanpun beramai-ramai mendatangi Syekh Berahi. Pada awal tahun 1506, ditepi sebuah payau, di Islamkanlah ratusan masyarakat Sungai

⁷¹Maria, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Kampung Dalam Sumpur Kudus.

⁷²Damhoeri Gafoer, "Kedatangan Syekh Ibrahim (Syekh Beraih)", *Manuskrip* (Sumpur Kudus: tanpa tahun), hlm. 6-7.

⁷³Menurut Mansur, sejak Raja Sumpur Kudus Tuanku Rajo Gagah Gumpito atau Rajo Pandito III termasyhur memeluk Islam, maka sejak itulah sebutan Rajo Undang ditukar menjadi Rajo Alam, Rajo Pusako menjadi Rajo Adat dan Rajo Agamo menjadi Rajo Ibadat. Rajo Pandito III inilah yang menjadi Rajo Ibadat pertama di Sumpur Kudus. Tempat persemayaman Rajo Ibadat di Sumpur Kudus adalah di Kampung Dalam. Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

Langsat Sungai Kehijauan secara massal dipimpin Rajo Pandito III dan disyahadatkan oleh Syekh Beraih. Sejak saat itu, payau itu dinamakan oleh masyarakat “Payo Syahadat”.⁷⁴

Sejak berpindahnya agama masyarakat, nama negeri Sungai Langsat Sungai Kehijauan berubah menjadi Sumpur Kudus yang artinya sempurna suci. Sungai Kehijauan diubah namanya menjadi Batang Sumpur dan Sungai Langsat diberi nama Batang Karangan. Tepat di Sungai Langsat itu, masyarakat Sumpur Kudus diambil sumpahnya oleh Syekh Beraih atau dikenal dengan *Piagam Sumpah Satieh* tahun 1507. Salah satu isi dari perjanjian itu adalah rakyat Sumpur Kudus berjanji tidak akan pindah agama (murtad), kalau terjadi yang demikian maka kutuk akan menimpa nagari Sumpur Kudus.⁷⁵

Sebagai puncak peristiwa pertukaran agama dari Agama Hindu kepada Agama Islam, pada suatu ketika diadakanlah upacara sumpah bertempat di Koto Tuo ditepi Batang Air Sungai Langsat dengan mengarang kata-kata sumpah pada batu. Peristiwa bersumpah ini disebut dengan Sumpah Kudus karna telah sempurna Kudus (suci) dari rangkuman kedua kita inilah, maka nama Nagari Sungai Langsat Sungai Kehijauan bertukar nama seperti tersebut di atas menurut ejaan kemudiannya menjadi Sumpur Kudus, Batang Air Sungai Langsat bertukar nama menjadi Batang Karangan, karna dibatang air tersebutlah dikarang nama Nagari Sumpur Kudus, dan batang Sungai Kehijauan bertukar nama jadi Batang Sumpur yaitu mengikuti nama nagarinya.⁷⁶

Peristiwa sumpah suci (Sumpah Kudus) itu, merupakan suatu hal yang wajib dihayati, ditaati diamalkan oleh masyarakat Sumpur Kudus dengan sebaik-baiknya, sehingga pada suatu ketika Sumpur Kudus diungkapkan dengan kata-kata falsafah,

⁷⁴Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

⁷⁵ Soedarman Datuk Bandaro Hitam, *wawancara*, tanggal 14 Februari 2014 di Sumpur Kudus. Baca juga A.R Dt.Rajo Melayu, “Sejarah Ringkas dan Silsilah Raja Minangkabau Pagaruyung, *Manuskrip* tahun 1992

⁷⁶ *Ibid*,.

“Sumpur Kudus” Mekah Darat, airnya jernih ikannya jinak, kersiknya putih, tebingnya landai, rando berjalan sorang bak anjing lepas berkongkong, basahan tinggal ditapian, bajak tinggal disawah tidak hilang.⁷⁷

Selain bermakna sempurna suci, menurut Dhamhoeri Ghafoer, bahwa nama Sumpur Kudus berasal dari *Swarna Pura* (kota Emas).⁷⁸ Kata *Swarna Pura* kemudian oleh masyarakat sering dilafazkan *Swarnapur*, kemudian berubah lagi menjadi Sumpur. Selanjutnya disambung dengan kata Kudus, sehingga menjadi Sumpur Kudus. Dalam aktivitasnya, Syekh Berahi menyebarkan dakwah pada masyarakat Sumpur Kudus di Surau Raja Ibadat (sekarang Masjid Raya Raja Ibadat) dan Surau Lamo.



Gambar 10 Surau Longuang Sumpur Kudus, dipercaya oleh masyarakat Sumpur Kudus sebagai salah satu tempat yang dipakai Syekh Ibrahim untuk mengajarkan agama Islam, di samping masjid Raja Ibadat. Sekarang surau ini berfungsi untuk tempat suluk bagi penganut tarekat. *Sumber:* Koleksi Zusneli Zubir.

⁷⁷A.R Dt.Rajo Melayu, “Sejarah Ringkas dan Silsilah Raja Minangkabau Pagaruyung, *Manuskrip* tahun 1992, hlm. 10.

⁷⁸Damhoeri Gafoer, “Kedatangan Syekh Ibrahim (Syekh Beraih)”..., hlm. 8.

Surau Tuo yang berjarak lima meter di depan Masjid Raja Ibadat itu menjadi saksi dari penyebaran Islam di Sumpur Kudus. Setelah menganut Islam, Syekh Beraih mengajarkan masyarakat Sumpur Kudus bagaimana tata cara melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat, dan lainnya.⁷⁹ Di samping itu, secara perlahan mulai diperkenalkan jenis-jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan diharamkan oleh agama Islam. Namun, belum jelas aliran Islam yang dibawa oleh Syekh Beraih ini, apakah ajaran Islam yang dibawa oleh para wali Songo, atau ajaran tarekat Syattariyah, atau Naqshabandiah. Hampir bersamaan dengan kedatangan Syekh Beraih ke Sumpur Kudus, datang pula ke Pagaruyung seorang Arab bernama Syekh Maghribi. Syekh Maghribi mengajarkan agama Islam di kerajaan Minangkabau pada masa Tuanku Marajo Sati masuk Islam pula dan kemudian diikuti Raja Buo.

Namun, kuat dugaan ajaran Islam yang disebarkan oleh Syekh Beraih adalah tarekat Syattariyah. Sebab sebelum wafat, Syekh Beraih pernah berpesan, agar setiap memperingati hari kematiannya, ia minta diziarahi dengan membaca doa *kaul* serta makan bersama di komplek pemakamannya. Menu yang dihadirkan pun sederhana nasi seperlunya dan seekor belalang sawah. Syekh Beraih meninggal di Sumpur Kudus tahun 1510 dan dimakamkan di antara Koto Tuo dan muara Batang Karangan. Makam itu tetap dipelihara dan batu besar yang ditulis dengan tulisan kawi yang menyatakan penduduk Sumpur Kudus telah memeluk agama Islam.

Sepeninggalan Syekh Beraih, masyarakat Sumpur Kudus masih di perintah oleh Sultan Alif Khalifatullah fil Alam (Rajo Ibadat).⁸⁰ Semenjak itu tradisi basapa berlangsung dengan hikmat, sehingga hari pelaksanaannya serentak pada tanggal 13 Shafar.⁸¹ Upacara basapa berlangsung di bawah pimpinan Raja Ibadat. Upacara basapa, menurut Hamka sangat ribut karena ribuan

⁷⁹Ahmad Dusrianto, "Tradisi Basapa Di Sumpur Kudus (Suatu Tinjauan Historis dan Akulturasi Budaya).", *Skripsi*. (Padang: Fakultas Adab, 2002), hlm. 2.

⁸⁰Azwir Ma'aruf, *Laporan Penelitian Sejarah Rajo Ibadat dan Perkembangan Ajaran Islam Ke Sumpur Kudus*. (Sumpur Kudus : Yayasan Rajo Ibadat, 1988), hal. 9-10.

⁸¹Damhoeri Gafoer, "Kedatangan Syekh Ibrahim (Syekh Beraih)"..., hlm. 9-10.

pengikut ritual ini berduyun-duyun datang ke lokasi pemakaman Syekh Beraih.⁸² Pemerintahan Sultan Alif Kholifatullah dalam beberapa sumber menegaskan, bahwa peringatan 13 Shafar berdasarkan perundingan di Kandang Ampek, yakni:

Kendati bagaimana pun
Tiap-tiap 13 hari bulan Shafar.
Diperingati juga jasa-jasa kedua ulama
Sekalipun kita dapat mengadakan seadanya.
Seperti sepucuk rebung dan seekor udang.
Pada hari tersebut maka harus diperingati juga.
Karena merekalah yang membawah kita.
Dari jalan yang gelap kejalan yang terang.”⁸³

Hamka mengatakan bahwa basapa yang pertama sekali di Minangkabau bukanlah di Ulakan Pariaman sekarang, namun di Sumpur Kudus.⁸⁴ Hamka mencatat bahwa Tuanku Tambusai pernah satu kali ikut upacara basapa di Sumpur Kudus tahun 1215 Hijriyah atau bersamaan dengan tahun 1821. Namun tiga tahun kemudian (1824) makam Sultan Alif yang dianggap paling keramat dihancurkan atas perintah Tuanku Lintau, Darwis dan Mullah, pengembara banyak yang mati dipancung oleh kavaleri Tuanku Lelo. Selama tahun 1821-1842 acara *basapa* yang meriah tidak pernah lagi diadakan di Minangkabau karena tidak ada lagi makam suci di Sumpur Kudus dan upacara basapa dipindahkan ke Ulakan Pariaman.⁸⁵ Adapun tata cara pelaksanaan tradisi basapa ini antara lain:

1. Dua hari menjelang pelaksanaan Basapa di Makam. Syekh Ibrahim, kebiasaan masyarakat Sumpur Kudus mengadakan malam keramaian, Makasud dari malam keramaian mengadakan

⁸² Ahmad Dusrianto, “Tradisi Basapa Di Sumpur Kudus (Suatu Tinjauan Historis dan Akulturasi Budaya)”..., hlm. 10.

⁸³ Ahmad Dusrianto, “Tradisi Basapa Di Sumpur Kudus (Suatu Tinjauan Historis dan Akulturasi Budaya)”..., hlm. 10-11.

⁸⁴ Hamka, *Antara Fakta dan Khayalan Tuanku Rao*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 342-343

⁸⁵ Hamka, *Antara Fakta dan Khayal-Tuanku Rao*..., hlm. 344.

hiburan di central Kampung (Koto) seperti menggelar permainan rakyat, seperti randai, silek pedang, tari piring, talempong, dan lain-lain. Pada malam. tanggal 12 hari bulan shafar atau malam harinya sebelum pelaksanaan di mesjid Rajo Ibadat diadakan acara *barzanji*.

2. Upacara *basapa* dilaksanakan di alam terbuka, yaitu di sebuah Munggu (Bukit kecil tempat pemakaman Syekh Ibrahim) di tengah-tengah persawahan penduduk di kenagarian Sumpur Kudus. Berjarak sekitar 100 meter dari jalan raya Sumpur Kudus, Munggu tersebut dinamakan Tanah Bato (karena tanah yang berbukit kecil itu dihiasi dengan batu-batu), karena itu tempat ini dinamakan oleh penduduk Tanah Bato dan juga tempat Syekh Ibrahim dimakamkan.

3. Persiapan menjelang upacara *Basapa*, antara lain :
 - a. Masyarakat membersihkan jalan untuk menuju ke lokasi secara gotong- royong.
 - b. Membersihkan situs Syekh Ibrahim dengan cara gotong-royong serta pemasangan tenda untuk perlindungan peserta tradisi.
 - c. Menghiasi sepanjang jalan menuju situs dengan *merawa* atau sejenis bendera yang melambangkan adat setempat.
4. Tahapan-tahapan *basapa*, antra lain :
 - a. Menunggu atau menanti masyarakat dan *ninik mamak* (penghulu adat) dan masyarakat serta penziarah yang akan ikut dalam acara *basapa* tersebut.
 - b. Setelah peziarah telah hadir dilokasi, maka acara di mulai dengan pembacaan pasambahan atau mengumandangkan marhaban secara bersama oleh pengikut peziarah.
 - c. Setelah itu beberapa orang berdiri dan mengambil posisi yang telah ditentukan untuk mengumandangkan marhaban atau bersanji.
 - d. Salah seorang *ninik mamak* pewaris Syekh Ibrahim yang

bergelar Khatib Aminullah mengambil posisi dekat pusarah (nisan) guna melaksanakan zikir dan doa kepada ruh Syekh Ibrahim.

- e. Kemudian dilakukan penuturan sejarah dari salah seorang tokoh masyarakat Sumpur Kudus, biasanya disampaikan penghulu yang memangku adat dalam nagari.
- f. Sebelum acara ditutup dengan makan dan doa bersama peserta. Setelah itu peserta melaksanakan Salat Asar berjamaah.⁸⁶

Setelah Syekh Ibrahim wafat, kemudian datang Syekh Abdul Rauf dari Talu ke Sumpur kudus sebagai daerah Raja Ibadat untuk melanjutkan kembali pelajaran mengenai agama. Syekh tersebut mengajak Raja Ibadat, Sultan Abdul Jalil menjalankan hukum Islam, tetapi hanya berlaku untuk daerah Sumpur Kudus saja, sehingga terkenal pada waktu itu tentang Sumpur Kudus yang memiliki raja yang keras dalam menjalankan agama.⁸⁷ Pada waktu itu kehidupan masyarakat sangat aman dan sejahtera dan dikenal sebagai Mekah Darek.

3. Peranan Raja Ibadat dalam Memperkuat Islam di Minangkabau

a. Pemerintahan Raja Samiek

Setelah Rajo Pandito III wafat yang menggantikannya sebagai Rajo Ibadat tak tentu lagi, kadang-kadang dirangkap oleh Rajo Alam, kadang-kadang dijabat oleh Rajo Adat Persemayaman Rajo Ibadat tidak lagi di Sumpur Kudus tapi di Kampung Tengah Balai Bungo Pagaruyung. Tempat persemayaman Rajo Tigo Selo di Pagaruyung adalah:

- a. Rajo Alam di Kampung Balai Gudam
- b. Rajo Adat di Kapalo Koto Balai Jenggo
- c. Rajo Ibadat di Kampuang Tengah Balai Bungo

Yang melaksanakan pemerintahan di alam Minangkabau ini adalah Raja yang dibantu oleh Basa Ampek Balai, disamping itu

⁸⁶Damhoeri Gafoer, "Kedatangan Syekh Ibrahim (Syekh Beraih)" ..., hlm. 11-12.

⁸⁷Surau tempat Syekh Abdul Rauf mengajarim Islam bernama Surau Padang Talu yang sampai sekarang masih berdiri di dekat mesjid raya Raja Ibadat di Sumpur Kudus.

ditunjuk pula seorang Panglima yang disebut Tuan Gadang di Batipuh. Basa Ampek Balai itu adalah :

- a. Tuan Titah (Bandaro) di Sungai Tarab
- b. Tuan Makhudum di Sumanik
- c. Tuan Indomo di Suruaso
- d. Tuan Kadhi di Padang Ganting

Pada masa pemerintahan Sultan Bakilap Alam (1540-1580)⁸⁸ menjadi Raja Pagaruyung, Sultan Samiek yang masih kerabat Sultan Bakilap Alam diangkat menjadi Raja Ibadat tahun 1543. Namun karena usianya yang masih kecil, tugas-tugasnya sebagai Raja Ibadat dijalankan oleh Sultan Bakilap Alam. Setelah Sultan Samiek dewasa, jabatan Raja Ibadat dipangkunya dengan gelar Yang Dipertuan Sati. Sultan Samiek kemudian menikah dengan Tuan Gadih Reno Rampieng (anak Sultan Bakilap Alam). Setelah menikah istri Sultan Samiek itu pun digelar *Tuan Gadih Reno Pomai Suri*.

Rajo Samiek dengan isterinya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Indun Jati (*Tuan Gadih Reno Baruaci*). Tuan Gadih Reno Baruaci menikah dengan Rajo Alam Pagaruyung *Sultan Ahmadsyah*. Pernikahan Sultan Ahmadsyah dengan Tuan Gadih Reno Baruaci melahirkan seorang putera yang diangkat menjadi Rajo Ibadat Sumpur Kudus yang bergelar Duli Yang Dipertuan Sultan Alif Khalifatullahi fil Alam atau sering disebut juga dengan sebutan Sultan Abdul Jalil.

⁸⁸Sultan Bakilap Alam menaiki tahta Kerajaan Minangkabau sekitar tahun 1540 sampai 1580. Sumber-sumber Portugis menyebut nama raja ini dengan nama 'Rajo Garo.' Raja ini merupakan raja pertama dari Wangsa 'Tuan Gadih' yang menduduki jabatan sebagai Raja Alam Minangkabau. Justru itu, raja ini memakai gelar 'Sultan Alif,' yang menunjukkan sebagai raja pertama dari wangsa baginda. Raja Sultan Bakilap Alam sebelumnya bergelar Raja Bagewang. Gelar ini menunjukkan baginda sebelum menaiki tahta utama kerajaan Minangkabau, terlebih dahulu menjadi Raja Sungai Tarab. A. Chaniago Hr, "Wangsa Tuan Gadih," *Singgalang* tanggal 4 Mei 1982.

b. Sultan Alif Khalifatullahi fil Alam

Sultan Alif (II) atau yang dikenal dengan nama Sultan Alif Khalifatullahi fil Alam (1641-1680) merupakan anak dari Sultan Pasambahan yang menjabat tahta Raja Alam (1616-1636) yang menikah dengan Puti Komala Sari dari Istana. Kampung Tengah (Korong Sumpu), berarti secara matrilineal Sultan Alif berasal dari Sumpur Kudus.

Namun pada masa raja itu, situasi dan kondisi dapat terkendalikan. Menjelang mangkatnya Sultan Ahmadsyah, dua orang pangeran mengaku masing-masing sebagai Raja Alam Minangkabau. Seorang di antaranya dengan gelar “Sultan Khalifatullah” bahkan mengirim utusan pada Pemerintah Pusat VOC di Batavia untuk mengadakan perundingan mengenai wilayah Pesisir Barat. Satu orang lainnya dengan gelar “Yang Dipatuan” juga mengaku sebagai Raja Alam Minangkabau dan mengirim utusan pula kepada VOC melalui Sintuk Lubuk Alung.⁸⁹

Dengan adanya ‘tiga orang Raja Alam Minangkabau’ ini, Belanda pun mengulur waktu memberi setoran ke Pagaruyung. Pada masa pemerintahan Sultan Alif ini perpecahan mencapai puncaknya. Masing-masing menguasai di antara wilayah yang selama ini merupakan ‘wilayah perintah Raja,’ tetapi kemudian muncullah Sultan Alif Khalifatullah sebagai pemenang. Raja ini dapat mengendalikan kerajaan dan menyatukan seluruh wilayah yang selama ini diperintah raja sebelumnya.⁹⁰

Sultan Alif lebih menitik-beratkan politik pemerintahannya dengan melakukan konsolidasi ke dalam. Sultan Alif datang ke Sumpur Kudus untuk memegang kekuasaan adat yang dipegang oleh Pemerintahan Datuk nan Sapuluah. Sultan Alif meminta wilayah untuk ulayat Kerajaan kepada Datuk nan Sapuluah, yakni

⁸⁹A. Chaniago Hr, “Kaum Raja-Raja Minangkabau dari Balai Janggo Pagaruyung”, *Singgalang* 1 Juni 1982.

⁹⁰A. Chaniago Hr, “Kaum Raja-Raja Minangkabau dari Balai Janggo Pagaruyung”, *Singgalang* 1 Juni 1982.

sebagaimana tanah kering untuk permukiman sedangkan tanah basah untuk lahan pertanian demi kepentingan kerajaan.⁹¹

Pada masa Sultan Alif, Datuk nan Sapuluah sebagai pengayom dan pengatur pemerintahan di Sumpur Kudus, menetapkan wakilnya di Teratak Mengganti tujuh orang Datuk untuk mewakili Datuk Nan Sapuluah dengan batas wewenang yang tertentu. Dalam istilah adat di Sumpur Kudus disebut “Datuak nan Sapuluah tambah Tujuh”. Sedang di Calau ditetapkan Datuk nan Salapan, tapi unsur Datuk nan Sapuluah masuk didalamnya. Yang termasuk wewenang Datuk nan Batujuh di Mengganti mulai dari batas Uncang Labuah Hilir sampai Limbur dengan batas Sawahliek Hilir. Sejak dari Sawahliek mudik sampai batas Bonjual di Teratak Tambang termasuk wewenang Datuk nan Sapuluah. Segala wewenang pemerintahan nagari berada ditangan Datuk nan Sapuluah, Biang Cabiek, Gantieng Putuih sampai batas Sisawah dan Durian Gadang. Sedangkan wewenang Datuk nan Salapan di Calau. Dari Undang Labuah mudik berada di tangan Datuk nan Sapuluah.⁹²

Rajo Ibadat I pada masa kekuasaannya 1641-1680 mempunyai kekuasaan sampai ke cerenti Indra Giri Hulu dan daerah sekitar rantau Minang “nan kurang aso duo puluah”, yakni Teluk Kuantan dan sekitarnya. Selain itu, Raja Ibadat mempunyai wewenang dalam pemerintahan sebagai tambangan (*paciktan*). Dengan demikian, pola pemerintahan itu sesuai dengan keadaan Sumpur Kudus, di mana Raja Ibadat meneruskan dalam menjaga falsafah tanpa menambah dan mengurangnya Islam.

Sistim pemerintahan antara kerajaan dengan pemangku adat keduanya bekerja sama yang di haluan yang satu dikemudi, penghulu tambang Adat Raja Tambangan Undang undang, penghulu semasa itu baru ada delapan orang hanya sebutan Datuok Nan 10 karena yang dua ini merupakan, satu berupa adat yang kedua berupa Undang Undang,

⁹¹Ulayat ini menjadi hak pakai bagi orang yang ditinggalkan dan diamanatkan oleh raja kepada Datuk Nan 10 sampai sekarang. Ahmad Dusrianto, “Tradisi Basapa Di Sumpur Kudus (Suatu Tinjauan Historis dan Akulturasi Budaya)”...., hlm. 25-26.

⁹²S. Khatib Amin, *wawancara*, tanggal 15 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

kedelapan penghulu inilah berkuasa di Tanjung Kedataran dahulunya Empat Kawasan Koto Ampek kawasan rantau seperti yang berkuasa di rantau.⁹³

Masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil terbilang cukup lama memimpin Sumpur Kudus. Pada masa pemerintahannya, Sumpur Kudus berada dalam keadaan aman, rukun, dan damai. Sehingga julukan Sumpur Kudus sebagai Makah Darek bisa dilihat dari pepatah berikut.

*Sumpu Kuduih makah darek,
aiehnyo janieh ikannyo jinak,
sayaknyo landai,
anak gadih bajalan
sorang bak anjieng lapeh bakungkuang,
bajak tinggal di sawah,
kain basahan tinggal di tapian indak ilang.*⁹⁴

Artinya

Sumpur Kudus Mekah Darat
Airnya jernih ikannya jinak
Sayapnya landai
Anak gadis berjalan
Sendiri seperti anjing lepas dari kungkungan
Bajak tinggal di sawah
Kain basahan tinggal di tepian tidak hilang

Sebutan Makkah Darat itu, menurut mantan Ahmad Syafii Maarif sudah dikenal sejak lama, bahkan penduduk Sumpur Kudus mengenal istilah ini dari tradisi lisan (*oral history*). Fakta dan ingatan sejarah melalui tradisi lisan ini yang selanjutnya menjadi mitos, bahwa Sumpur Kudus merupakan daerah paling awal menganut agama Islam dan diperkuat dengan menetapnya raja ibadat di wilayah ini.

⁹³Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

⁹⁴Soedarman Dt. Bandaro Hitam, *wawancara*, tanggal 12 Januari 2014 di Sumpur Kudus.

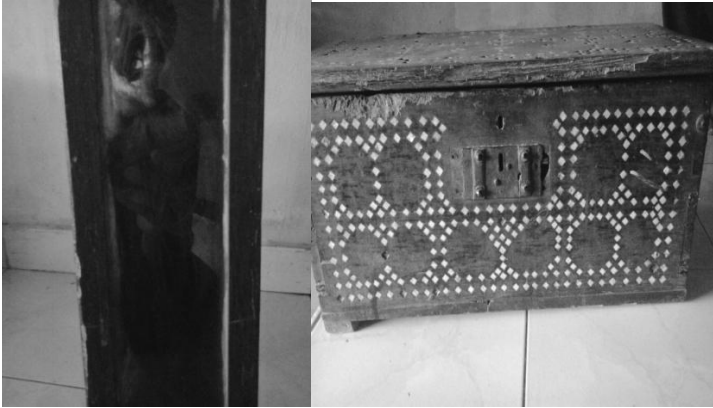
“...dari tuturan sejarah, Sumpur Kudus memang dikenal sebagai Makkah Darek, sebab di sanalah pada abad-abad yang lalu terdapat pusat kajian Islam, di samping pusat perdagangan, emas, kopi, dan lain-lain. Kemudian pusat itu berpindah, maka Sumpur Kudus ditinggalkan, dan jadilah ia sebagai desa yang lengang dan miskin.”⁹⁵

Pada masa pemerintahan Sultan Alif pemukiman dan pusat kerajaan dipindahkan dari Koto Tuo ke Koto Sumpur Kudus pada tahun 1642. Selain itu, pada masa pemerintahannya istana Kampung Dalam dibangun dan memiliki beberapa perangkat, seperti *Penghulu* atau *Datuk*, *Manti* (cerdik pandai), *Dubalang* (orang gagah atau perkasa, pagar nagari) dan *Mualim* yang mengerti ajaran Islam.



Gambar 11 Makam Sultan Alif Khalifatullah fil Alam yang merupakan raja ibadat yang melanjutkan kepemimpinan Sultan Pasambahan. Raja ibadat ini mendapat gelar Johan Berdaulat dari pemerintah Kolonial Belanda. *Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.*

⁹⁵Ahmad Syafii Maarif, *Otobiografi Ahmad Syafii Maarif*. (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. 94.



Gambar 12 Sebuah benda pusaka dan peti besi yang merupakan bagian peninggalan dari Raja Ibadat di Sumpur Kudus. *Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.*



Gambar 13. Batu kasur (batu uji) merupakan warisan peninggalan dari Raja Ibadat di Kampung Dalam Sumpur Kudus. Menurut ahli waris Raja Ibadat bahwa batu ini berfungsi sebagai penobatan Raja Ibadat yang akan dilantik. *Sumber: Koleksi Zusneli Zubir.*

Setelah Sultan Alif wafat (1680), jabatan Raja Ibadat kembali dijabat oleh Rajo Adat Buo. Pada tahun 1685 diangkatlah Raja Ibadat Sumpur Kudus yang bernama Rajo Dandang dari keturunan Sultan Samiek. Rajo Dandang ini dipanggil juga dengan gelar Yang Dipertuan Baringin, dan menikah dengan seorang puteri dari Cerenti. Dari perkawainannya, Rajo Dandang dikaruniai tiga orang anak yaitu Rajo Pingai, Gunuang Hijau, dan Puti Lindo Ameh .

d. Yang Dipertuan Sati Gunung Hijau

Setelah Rajo Dandang wafat, yang menggantikan posisinya sebagai Raja Ibadat adalah Gunuang Hijau yang bergelar Yang Dipertuan Sati. Yang Dipertuan Sati ini menikah dengan Puti Sumpu. Saat Yang Dipertuan Sati mangkat, jabatan Rajo Ibadat Sumpur Kudus dirangkap oleh Rajo Alam Perhimpunan Rajo Buo. Rajo Alam Perhimpunan adalah keturunan Rajo Alam Pagaruyung, yaitu adik Sultan Muningsyah I.

BAB III

MASYARAKAT SUMPUR KUDUS PADA MASA KOLONIAL BELANDA HINGGA AWAL KEMERDEKAAN

A. Sumpir Kudus Pada Masa Kolonial Belanda

1. Pemerintahan Raja Ibadat Sebelum Pemerintah Kolonial Masuk ke Pedalaman Minangkabau

Setelah Sultan Alif Khalifatullah Fil Alam Johan Berdaulat wafat ia digantikan oleh anaknya Sultan Abdul Jalil sebagai Raja Ibadat. Selain memegang posisi sebagai Raja Ibadat, Sultan Abdul Jalil juga menjabat Raja Alam pada tahun 1739-1780, menggantikan posisi Sultan Arif Badarunsyah (1719-1739). Pada masa Sultan Abdul Jalil dengan gelar Johan Berdaulat sebagai raja Alam ini dikirimkan seorang raja ke Negeri Sembilan yakni Raja Malewar tahun 1770.⁹⁶ masa Sultan Abdul Jalil ini kerajaan Minangkabau memiliki stempel atau cap kerajaan yang bertuliskan huruf arab, yang berbunyi:

⁹⁶Ada tiga kali pengiriman raja ke Negeri Sembilan, yakni Raja Malewar tahun 1770, Yamtuan Raja Hitam tahun 1795 dan yang Dipertuan Raja Radin tahun 1824. Setelah itu tidak ada lagi raja yang dijemput ke Pagaruyung, setelah itu muncul putera kandung dari Raja Lenggang. Untuk lebih jelas mengenai raja-raja yang memerintah di Negeri Sembilan lihat Dato Paduka Haji Djafri, *Susur Galur...*, hlm. 124- 136.

“Sultan Abdul Jalil yang mempunyai Kerajaan Negeri Minangkabau, mengaku anak kepada Sultan Mahyudin yang mempunyai Kerajaan Negeri Jambi, menyerahkan hingga Kala-Kala Kuning”.⁹⁷

Pada masa transisi dari Sultan Abdul Jalil Johan Berdaulat ke Raja Muningsyah I, muncul polemik karena putusnya hukum waris anak laki-laki di kampung Gudam Balai Janggo yang berlangsung sejak lama. Sehingga polemik ini menyulut pertentangan antara Raja Ibadat dan Raja Adat untuk menjadi Raja Alam di Pagaruyung. Sengketa ini tidak kunjung selesai sehingga para penghulu di Luhak nan Tigo dan Lareh nan Duo mengambil keputusan agar pemerintahan tetap berjalan dan rakyat tidak resah. Pemerintahan Alam Minangkabau dipegang oleh Datuk Bandaro Putih Panitahan Sungai Tarab, Datuk Indomo Saruaso, dan Tuan Kadhi Padang Ganting.⁹⁸

Menurut kisah tradisi lisan yang diyakini masyarakat Sumpur Kudus, bahwa kekuasaan Tuan Kadhi Padang Ganting masa itu meliputi Bukit Situnggang ke hilir sampai Bukit Marapalam hingga Muara Takung. Tuan Kadhi memerintah dengan keras melebihi raja-raja yang berkuasa sebelumnya dan Tuan Kadhi dipanggil dengan gelar Tuan Gadang atas permintaannya. Pemerintahan Tuan Kadhi tertuang dalam pepatah “*Ke hilir berkuda orang, ke mudik berkuda kain*”, yang berarti ketika Tuan Kadhi pergi mengunjungi daerah yang menjadi kekuasaannya ia ditandu seperti layaknya orang besar.

Ketika Tuan Kadhi kembali ke Padang Ganting, setiap penghulu di daerah yang dilaluinya harus menyediakan sekayu kain, emas dan kerbau satu ekor perkandang. Selain itu, setiap daerah yang dilaluinya menjadi miliknya. Melihat kekuasaannya

⁹⁷ Anonim, “Raja Adat Sumpur Kudus dalam Struktur Kerajaan Minangkabau.”, *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, tanpa tahun), hlm. 5.

⁹⁸ Menurut A.A Navis, bahwa Basa Empat Balai masing-masing mempunyai kewenangan mengutip emas manah (upeti) dari raja-raja bawahan di rantau atas nama raja Pagaruyung, Alam. Lebih lanjut baca A.A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986), hlm. 57.

yang abosolut. Tuan Kadhi meminta kepada raja Aceh untuk mensyahkannya menjadi raja. Tuan Kadhi disyahkan menjadi raja dengan gelar Tuan Kadhi Abdul Majid Suluh Bendang Koto Piliang Timbalan raja Aceh. Tetapi yang terjadi di Minangkabau justru sebaliknya. Orang Minangkabau tidak bisa menerima hal tersebut, karena rezim Aceh tidak berhak mengangkat raja di Minangkabau.

Kehendak Tuan Kadhi yang tidak diterima dan disyahkan oleh orang di Minangkabau membuat ia menjadi malu dan tidak berani terang-terangan keluar rumah sampai ia wafat. Kemudian setelah Raja Ibadat dan Raja Adat wafat, tidak jelasnya siapa yang menjadi raja pada waktu itu, tidak ada lagi persengketaan mengenai tahta Raja Alam sebab tidak seorangpun yang mau menjadi raja, para raja menunggu keputusan para pembesar di Minangkabau tentang siapa yang akan menjadi raja.⁹⁹

Untuk mencegah kevakuman pemerintahan, para pembesar kerajaan Minangkabau di Luhak nan Tigo dan Lareh nan Duo memutuskan untuk mengangkat raja Tiga Selo. *Pertama*, posisi Raja Alam dijabat Daulat Yang Dipertuan Sati Muningsyah I dari keturunan Raja Adat. *Kedua*, Raja Ibadat dipegang oleh Daulat Yang Dipertuan Sati Bersusu Tunggal, dari keturunan Raja Ibadat. *Ketiga*, Raja Adat dipegang Daulat Yang Dipertuan Sati Sultan Sembahyang I, dari keturunan Raja Ibadat.

2. Sumpur Kudus Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Proses masuknya pemerintah kolonial Belanda ke *Padangsche Bovenlanden*, bermula dari laporan Du Puy yang menerima laporan mengenai gerakan Padri di pedalaman Minangkabau. Du Puy dalam laporannya menyebut, Tuanku

⁹⁹Anonim, "Raja Adat Sumpur Kudus dalam Struktur Kerajaan Minangkabau.", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, tanpa tahun), hlm. 6-7.

Saruaso¹⁰⁰ dan beberapa orang penghulu dan kaum adat meminta bantuannya untuk memerangi kaum Padri.

Untuk membuktikan laporan Tuanku Saruaso, Du Puy mengirim pernyataan para penghulu lolos dari kejaran Padri ke Batavia. Dalam pernyataannya, para penghulu menegaskan, bahwa bersedia menyerahkan Kerajaan Pagaruyung kepada Belanda, asal mereka dibantu memerangi Padri. Tawaran menggiurkan dari pihak Suroaso tentunya tidak disia-siakan Du Puy, sehingga ia langsung mengantarkan pernyataan para penghulu itu ke Batavia. Pemerintah Hindia Belanda pun sadar, bantuan mereka bisa dimanfaatkan untuk memasuki pedalaman Minangkabau.

Pemerintah Hindia Belanda langsung menanggapi permintaan kerajaan Minangkabau. Melalui jalur diplomasi, pemerintah Hindia Belanda mencapai kata sepakat dengan keturunan Pagaruyung, Sultan Alam Bagagarsyah tanggal 10 Februari 1821.¹⁰¹ Dalam salah satu klausul perjanjian, disebutkan para penghulu dari Kerajaan Minangkabau, secara formal dan

¹⁰⁰Tuanku Saruaso pernah berhubungan dengan Raffles di Bengkulu dan membawa Inggris ke Pagaruyung. Setelah Inggris berangkat meninggalkan Pagaruyung dan kehilangan sumbangan tiap bulan, menurut Du Puy Tuanku Saruaso meminta sumbangan dari pemerintah Hindia Belanda, sekaligus untuk memerangi Padri. Rusli Amran, *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 406.

¹⁰¹Perjanjian lengkap antara pihak Belanda dengan pihak Sultan Alam Bagagarsyah adalah: (1) Kepala-kepala (para penghulu) dari Kerajaan Minangkabau, secara formal dan mutlak menyerahkan nagari Pagaruyung, Sungaitarab, Suroaso begitu juga daerah-daerah di sekitar Kerajaan Minangkabau kepada pemerintah Hindia Belanda. (2) Kepala-kepala tersebut dengan sungguh-sungguh berjanji atas nama mereka dan rakyat maupun keturunan rakyat mereka, untuk mematuhi tanpa kecuali pemerintah Hindia Belanda dan tidak akan menentang pemerintah apapun dari Hindia Belanda. (3) Pemerintah menyediakan satuan tentara terdiri atas 100 orang dibawah perwira-perwira bangsa Belanda dengan dua pucuk meriam. (4) Para kepala akan menyediakan kuli-kuli dalam jumlah yang dibutuhkan dan mengurus makanan tentara yang dibutuhkan dengan sebaik-baiknya. (5) Adat dan kebiasaan lama dan hubungan kepala-kepala itu dengan penduduk, akan dipertahankan dan tidak akan dilanggar selama tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam perjanjian. Lebih lanjut baca Rusli Amran, *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang...*, hlm. 407-408.

mutlak menyerahkan nagari Pagaruyung, Sungai Tarab, Suroaso dan daerah-daerah di sekitar Kerajaan Minangkabau.

Dari perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, sebenarnya yang mengundang Belanda ke *Padangsche Bovenlanden* adalah pihak Kerajaan Minangkabau yang diwakili Sultan Alam Bagagar Syah. Dalam sebuah surat rahasia Gubernur Jendral A.V Michiels, menegaskan bahwa mereka telah ditipu oleh orang yang berpura-pura sebagai raja. Michiels menegaskan, mereka telah dijebak oleh segelintir orang yang tidak berpengaruh (baca: Sultan Alam Bagagarsyah) dan tidak berhak menjual Minangkabau.¹⁰²

Selain itu, Michiels dalam tulisannya mendeskripsikan keadaan Sumatera Barat yang diliputi huru-hara sejak kedatangan kaum Padri, yang ia sebut berdarah-darah.¹⁰³ Kecendrungan konflik pada masa Padri, menurut Taufik Abdullah menandakan gerakan itu menuntut adanya penyesuaian ajaran Islam yang murni dengan realitas sosial dan budaya.¹⁰⁴ Episode menarik dari peristiwa Paderi sesungguhnya terletak pada revolusi intelektual, di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya telah berhadapan dengan pribadi dan budayanya sendiri.

Gerakan Paderi di Sumatera Barat, menurut Snouck Hurgronje, kaum Paderi bukanlah kaum Wahabi, dalam pengertian bahwa yang terakhir ini (Wahabi) menurutnya bukanlah penganut agama Islam yang ketat. Lagi pula terdapat sejumlah perbedaan lainnya. Kaum Wahabi, misalnya, menentang keras pemujaan terhadap Nabi, dan kuburan kramat (orang-orang suci), sesuatu yang tidak terlalu dihiraukan oleh kaum Paderi.¹⁰⁵ Lebih penting lagi, ide-ide pembaharuan sosial keagamaan di Sumatera Barat sebetulnya sudah berlangsung jauh sebelum

¹⁰² Lebih lanjut lihat *Standard-brief A.V Michels No,La.Q tanggal 3 Oktober 1842*. Baca juga dalam Rusli Amran, *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang...*, hlm. 463.

¹⁰³ AV Michels dalam *Bijdrage tot de Bibliografie van de huidige godsdienstige ter Sumatera's Westkust TBG.59* (1919-1921). Baca juga dalam B.J.O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat. Sebuah Sumbangan Bibliografi*. (Jakarta: Bhratara, 1973), hlm. 11.

¹⁰⁴ Lihat pernyataan Taufik Abdullah dalam B.J.O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat. Sebuah Sumbangan Bibliografi*. (Jakarta: Bhratara, 1973), hlm. 8.

¹⁰⁵ Lihat lebih lanjut dalam B.J.O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat. Sebuah Sumbangan Bibliografi*. (Jakarta: Bhratara, 1973), hlm. 25.

kepulungan beberapa tokoh Minang dari perjalanan haji mereka ke Mekah.¹⁰⁶ Gerakan Paderi bukanlah salinan bulat-bulat dari Wahabi. Ajaran Wahabi yang berkembang di Tanah Arab sejak pertengahan abad ke-18, menganut Mazhab Hambali, aliran mazhab paling ketat dan tanpa kenal kompromi. Mereka ingin mengembalikan "pemurnian" ajaran Al Quran dan *Sunnah* seperti di zaman Rasulullah. Untuk itu mereka ingin membangun umat Islam (*Islamic community*) dengan menerapkan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam al Quran dan Sunnah tanpa kompromi.

Persoalan yang dikritisi kaum Paderi di Minangkabau bersumber dari sistem materialisme, merebaknya penyakit masyarakat seperti berjudi, sabung ayam, minum tuak, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, gaya hidup kalangan bangsawan Pagaruyung yang cenderung hedonis juga mendapat perhatian serius kaum Paderi. Permasalahan sosial yang terjadi di kalangan bangsawan Pagaruyung terekam dalam karya Muhammad Radjab berikut ini:

"Kaum bangsawan itu menghabiskan waktunya dengan permainan, pergi ke gelanggang menyabung ayam, berdadu, dan berjudi. Setiap hari diadakan gelanggang di setiap kampung berganti-ganti."¹⁰⁷

Ulama yang seharusnya memberi peringatan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat, juga tidak berbuat banyak. Mereka hanya sibuk dengan rutinitasnya mengajar di surau-surau, ataupun ber*khalwat* dengan Tuhan melalui metode *sufistiknya*. Persoalan bobroknya moral orang Minang pada awal abad ke-19 inilah yang selanjutnya direspon oleh golongan Paderi. Lebih jauh, William Marsden dalam historiografinya *Sejarah Sumatera*, menegaskan bahwa Paderi merupakan gerakan dari golongan Islam yang saleh untuk

¹⁰⁶Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri ; Minangkabau 1784-1847*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 6.

¹⁰⁷Muhammad Radjab, *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1964), hlm. 9.

menentang kemerosotan budi dan sistem matrilineal di Sumatera Barat.¹⁰⁸



Gambar 1 Kemenangan tentara Kolonial Belanda atas Paderi di beberapa daerah pedalaman Minangkabau. Suasana Perang Paderi ini diilustrasikan Kepper. **Sumber:** www.googlebooks.com

Berbeda dengan Ira M. Lapidus yang melihat gerakan pembaruan Islam di Sumatera Barat memunculkan dualisme. Tuanku Nan Tuo menyerukan sebuah dakwah perdamaian, salah seorang muridnya, Tuanku Nan Renceh, justru mengorganisir sebuah gerakan kemiliteran. Para pengikutnya diperintahkan untuk berpakaian putih, merawat jenggot, dan menghidarkan diri dari pemuasan fisik. Mereka juga dipersiapkan untuk terjun ke medan perang melawan *nagari*, membunuh sejumlah penghulu, merampas harta kekayaan mereka, dan untuk membentuk pemerintahan Islam, yang dikepalai seorang imam dan qadi, yang mengabdikan diri untuk memberlakukan hukum Islam.¹⁰⁹

¹⁰⁸William Marsden, *Sejarah Sumatera*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 376.

¹⁰⁹Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, penerjemah Ghuftron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.734.



Gambar 2 Salah satu kursi batu untuk memimpin rapat dan terletak di depan istana Pagaruyung pada masa dulu. *Sumber:* Rusli Amran, 1981: hlm.163

Pada masa Perang Padri (1821-1837), Sumpur Kudus menjadi salah satu basis pertahanan menghadapi gempuran serdadu Belanda. Setelah Raja Muningsyah I wafat, tahta Raja Alam dilanjutkan oleh Tuanku Bersusu Empat yang bergelar Raja

Muningsyah II. Raja Muningsyah II memerintah saat kaum Paderi mulai menggeliat. Setelah Raja Muningsyah II wafat setelah dikudeta, maka naiklah Raja Muningsyah III. Namun, ada satu hal yang menarik Raja Muningsyah III rupanya melakukan pelawanan terhadap kaum Paderi, karena bisa mengancam keselamatan keluarga dan kerabat kerajaan Pagaruyung. Raja Muningsyah III ini terlibat dalam pertempuran di Koto Tangah Tanah Datar. Ia berhadapan dengan Tuanku Lelo yang merupakan bawahan Tuanku Rao. Akhirnya Raja Muningsyah III pun tewas di tangan Tuanku Lelo pada tahun 1825.¹¹⁰

Tidak sebatas raja Alam Minangkabau saja yang diburu kaum Padri, juga keluarga Raja Adat yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan adat juga ikut dihabisi, sedangkan Raja Ibadat dibiarkan hidup, karena ia dianggap sosok yang taat menjalankan agama Islam dan dianggap sebagai pengganti Nabi. Karena kealimannya sebagai seorang raja, Daulat Yang Dipertuan Sati Sultan Sembahyang III terpelihara dari kejaran Tuanku Lintau. Sejak Raja Alam Muningsyah I wafat, Daulat Yang Dipertuan Sati Sultan Sembahyang III praktis didaulat sebagai Raja Alam. Didaulatnya Raja Ibadat ini sebagai Raja Alam karena dari faktor umur, ia sudah senior, dan masih memiliki hubungan kerabat dengan Raja Alam Muningsyah II dan III.¹¹¹

Berbeda dengan kerajaan di Nusantara yang memiliki angkatan perang seperti Aceh, Demak dan lainnya, kerajaan Pagaruyung justru tidak memiliki angkatan perang, pada masa ini hanya ada Dubalang Adat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negeri yang disebut juga dengan "Pagar Nagari". Sehingga sejak pemerintahan Sultan Alif (I) sudah ada daerah taklukan Minangkabau yang melepaskan diri seperti Indrapura atau daerah yang diduduki Aceh seperti Pariaman, Tiku dan lain-

¹¹⁰A.R Dt. Rajo Melayu, "Sejarah Ringkas dan Silsilah Raja-raja Minangkabau Pagaruyung", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, 1992), hlm. 14.

¹¹¹Anonim, "Raja Adat Sumpur Kudus dalam Struktur Kerajaan Minangkabau.", ..., hlm. 9.

lain serta ada kota-kota yang didatangi tiga kali setahun oleh Belanda untuk memungut upeti.¹¹²

Serangan gencar dari kaum Paderi terhadap Koto Tangah dan Tanjung, menyebabkan keluarga Raja Muningsyah menyingkir dari Saruaso, sehingga istana Pagaruyung pun kosong. Tahta Raja Alam pun diambil alih Sultan Sembahyang III Raja Ibadat di Sumpur Kudus yang juga menggantikan Raja Bersusu Tunggal di Sumpur Kudus. Sultan Perak gelar Rajo Sembahyang (Raja Adat Buo) dan istrinya Tuan Gadih Halus (keturunan dari Raja Ibadat) yang hamil tua yang lolos dari peristiwa Koto Tangah. Mereka meninggalkan istana dengan tujuan ke Muara Lembu dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, mereka singgah di Istana Raja Ibadat Sumpur Kudus.¹¹³ Melihat kondisi Tuan Gadih Halus yang hamil tua, mereka pun tidak diizinkan ke Muara Lembu, sampai istri Sultan Perak itu melahirkan.

Anak Raja Perak itu diberi nama Tuan Gadih Reno Sumpu. Dalam perjalanan ke Muara Lembu juga ikut Tuanku Raja Hitam saudara dari Tuan Gadih Halus. Tuanku Raja Hitam kemudian dinobatkan menjadi Raja Alam Pagaruyung dengan gelar Tuanku Sultan Alam Bagagarsyah Johan Berdaulat. Tuanku Hitam Adalah raja terakhir yang dinobatkan sebagai Raja Alam yang kemudian ditahan oleh Belanda ke Betawi dan meninggal disana. Puti Reno Sumpu yang dijemput ke Sengingi untuk mengisi kekosongan tahta, tetapi tidak dinobatkan menjadi raja. Ia hanya di gaji oleh Belanda sebagai *Regen*.

¹¹²Walaupun demikian wibawa raja dan penghulu masih besar dimata masyarakat. Pemerintahan kerajaan Pagaruyung semenjak Sultan Alif memerintah (1641-1680) telah berdasarkan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* sampai datangnya pemurnian Islam dibawa oleh Haji Miskin, Haji Piobang dan Haji Sumanik. Gerakan pemurnian yang dinamakan gerakan Paderi dipimpin oleh "*Harimau nan Salapan*" (julukan untuk delapan tokoh Paderi) meluas sampai ke TanahDatar pusat pemerintahan dan kedudukan raja Pagaruyung.

¹¹³Anonim, "Raja Adat Sumpur Kudus dalam Struktur Kerajaan Minangkabau.",..., hlm. 10-11.



Gambar 3 Keturunan Tuan Gadih Reno Sumpu dari raja-raja Pagaruyung Daulat Dipatuan Raja Pagaruyung.
Sumber: Repro Sumatra antjes-Teisbniereven 1936

Setelah Pagaruyung dimasuki Belanda atas perintah Kolonel Raaf, Sultan Perak dan keluarga dijemput ke Muaro Lembu Singingi Kuantan. Setelah sampai di Pagaruyung, Kolonel Raaf meminta Sultan Perak menjabat posisi raja, namun ia menolak karena faktor usia yang telah lanjut. Iapun kembali ke Muaro Lembu dan meninggal disana pada tanggal 1 Agustus 1825. Untuk mengganti kamposisinya, satu-satunya yang berhak diangkat menggantikan Muningsyah III adalah Sultan Alam Bagagarsyah. Namun Bagagarsyah menolak dengan alasan kecilnya luas wilayah kerajaannya. Kekuasaan Raja Alam yang selama ini meliputi Darek, Rantau, Kuantan Inderagiri, Rembau Sri Menanti, sampai ke Asahan Batu Bara sudah berada di bawah kekuasaan Belanda.¹¹⁴

¹¹⁴Pada masa itu di Pagaryung perjuangan melawan pasukan Belanda dipimpin penghulu-penghulu dan ulama-ulama Paderi. Belanda terpaksa mendatangkan penghulu yang berpihak kepadanya dari Batipuh dan Simabur. Lebih lanjut lihat A.R

Sultan Alam Bagagarsyah kemudian diangkat menjadi *Regen* Tanah Datar. Jabatan *Regen* hanya alat pemerintah kolonial Belanda untuk menjalankan rodi dan belasting. Bagagarsyah masa itu menyatakan bergabung dengan kaum Paderi dan berkirim surat kepada Rajo Adat, Rajo Ibadat, dan ulama Paderi. Dalam surat itu, ia menyatakan akan bekerjasama dengan Sentot Ali Basya dan panglima Abdul Hamid Diponegoro yang dikirim Belanda dari Jawa untuk menghancurkan Paderi.

Pada tanggal 2 Mei 1833 diadakanlah perundingan antara Sultan Alam Bagagarsyah dengan pimpinan Kolonel Blout. Belanda pun kemudian menangkap Sultan Alam Bagagarsyah di bawah pengawasan satu pleton serdadu Belanda. Pasca penangkapan penguasa Pagaruyung tersebut, nagari-nagari yang telah dikuasai Belanda pun bergejolak. Rajo Buo dan Rajo Sumpur Kudus turut berjuang sampai ke Pangkalan Koto Baru mengikuti Paderi.¹¹⁵ Tiga bulan setelah Sultan ditangkap Bagagarsyah ditangkap dan dipenggal lehernya, 11 orang pemimpin kaum adat dan 3 orang ulama Paderi tanggal 29 Juli 1833. Mereka dituduh bersekongkol dengan Sultan Alam Bagagarsyah menentang Belanda. Pusat perjuangan Paderi di Bonjol masih belum dapat ditaklukkan oleh Belanda.

Setelah pemerintahan Sultan Sembahyang III sebagai Raja Ibadat yang kemudian menjadi Raja Alam, tahta Raja Ibadat diserahkan kepada Sultan Lembang Alam. Setelah Sultan Lembang Alam yang menjadi Raja Ibadat adalah Sultan Arif Badarunsyah yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Abdul Azis yang bergelar Yang Dipertuan Pandak. Sultan Pandak pada masa kekuasaannya, memindahkan pusat kerajaan dari Kampung Dalam Sumpur Kudus ke Kampung Tengah Balai Bungo Pagaruyung. Pada masa pemerintahan Sultan Pandak, seluruh wilayah Minangkabau sudah menerapkan adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah. Masa ini bertepatan pasca peristiwa Paderi dan perjanjian Bukit

Dt. Rajo Melayu, "Sejarah Ringkas dan Silsilah Raja-raja Minangkabau Pagaruyung"...., hlm. 13.

¹¹⁵Anonim, "Raja Adat Sumpur Kudus dalam Struktur Kerajaan Minangkabau.", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, tanpa tahun), hlm. 10.

Marapalam. Keadaan nagari Sumpur Kudus pada akhir abad ke-19 tampak pada pepatah.

*Perahu bakemudi Bakain Baselendang
Pengkulu dahulu baru bamonti
Bamalin dulu baru badubalang*

Terjemahan:

Perahu berkemudi berkain berselendang
Pengkulu dulu baru bermanti
Bermalin dulu baru berdubalang.¹¹⁶

Untuk memilih Manti, Malin dan Dubalang, pengangkatannya diserahkan pada masing masing suku. *Pertama*, Suku Melayu mengangkat seorang Manti berdasarkan ganti seorang penghulu karena seorang penghulu Melayu kembali ketempat asalnya yaitu Datuk Sinyato di nagari Unggan dengan asal itulah menjadi Manti penghulu. *Kedua*, Suku Domo mengangkat Manti yang bergelar Manti Besar berpedoman kepada salah seorang niniknya yang cerdik pandai yaitu Ujuh Rahman.

Ketiga, Suku Caniago mengangkat montinya bergelar Datuk Mangguang. *Keempat*, Suku Caniago berkelarasan Koto Piliang mengangkat seorang Mantinya bergelar Datuk Rajo Penghulu, seorang yang datang dari Lubuk Sikarah. Sedangkan Suku Pitopang mengangkat seorang utusan Sultan dari tanah Darek dengan gelar Manti Sutan. Suku Kampai mengangkat utusan dari Tanjung Sungai Bapagar. Ujung seorang yang sempurna cerdik bergelar Datuk Monti Sampono. Sultan Pandak merupakan raja terakhir yang menjabat Raja Ibadat, ketika ia wafat pada tahun 1879, tidak seorangpun yang patut dinobatkan menjadi raja. Di samping itu pemerintah kolonial Belanda sudah menerapkan sistem birokrasi, sehingga kedudukan Raja Ibadat sudah berada di bawah struktur pemerintahannya.

Sejak wafatnya Raja Ibadat terakhir, atau empat tahun jelang peristiwa Padri (1821-1837) menurut catatan Dobin, putri Raja

¹¹⁶S. Khatib Amin, *wawancara*, tanggal 15 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

Ibadat dikawini oleh Tuanku Lintau, seorang tokoh Paderi yang berhasil meluluhlantakkan Pagaruyung dan menggabungkan kekuasaan Raja Ibadat dan Raja Alam, berpusat di Lintau.¹¹⁷ Hubungan antara Raja Adat dengan Raja Ibadat Sumpur Kudus ini bisa dikaji dari keturunan Raja Adat, yakni Sultan Ahmad (Tuanku Tan Amat). Tuanku Tan Amat ini dalam sebuah arsip Belanda menyebut memiliki saudara seayah, baik dari Tepi Selo, Pagaruyung, Sumpur Kudus, Saruaso dan Kuantan Singingi.



Gambar 4 Istana Raja Adat di Lintau Buo. Istana ini terletak di Lubuk Jantan dan dibagian depan pintu tertulis Sultan Ahmad (Tuanku Tan Amat). Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.

Saudara seayah Tuanku Tan Amat di Tepi Selo berada di Kampung Rajo, antara lain: Datuk Marajo, Puti Cayo Gadih Elok Baso dan Sutan Hasyim Tuanku Tinggi. Di Pagaruyung, saudara seayahnya berada di Istana Silindung Bulan, yakni: Sutan Muhammad Isa Nan Dipertuan Sati Gunung Hijau, jadi raja di Gunung Sahilan dan Tuan Gadih Puti Reno Sumpu. Masih di Pagaruyung, tepatnya di Kampung Tengah, saudara seayahnya adalah Tuan Aciek Puti Salosai. Sedangkan hubungan Tuanku Tan

¹¹⁷ Akibat penyerangan ke kawasan Pagaruyung, Sultan Arifin Muning Alamsyah yang berusia sekitar 70 tahun itu bersama cucunya berhasil melarikan diri ke Lubuk Jambi (Indragiri), sedangkan dua putranya terbunuh. Lebih lanjut baca Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri ; Minangkabau 1784-1847...*, hlm. 136-137.

Amat dengan Sumpur Kudus adalah saudara seayah Tuanku Tan Amat adalah Puti Tisah di Kampung Dalam Sumpur Kudus. Di Saruaso dicatat Tuan Gadih Saruaso dan Sutan Manzun yang menjadi Tuan Indomo yang terakhir. Sementara itu di Kuantan Singingi, kita akan mendengar nama Nan Dipertuan Saleh sebagai raja di Koto Tuo, yang juga tercatat sebagai saudara seayah dari Tuanku Tan Amat.¹¹⁸

Sejak wafatnya Raja Ibadat, ranah Sumpur Kudus mulai menghilang dari peredaran sejarah Minangkabau. Akibatnya, hanya segelintir orang Minang yang mengetahui keberadaan Sumpur Kudus pasca wafatnya tokoh legendaris itu, itu pun mulai dikenal kembali pasca lahirnya historiografi yang mengisahkan sejarah Minangkabau. Pada akhir abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem birokrasi baru dan bertolak belakang dengan sistem pemerintahan selama ini di Sumatra Barat.¹¹⁹ Nagari-nagari yang hampir sama adat istiadatnya disatukan dalam satu Kelarasan yang dikepalai seorang *Lareh* (Laras). Tuanku Lareh diangkat oleh Belanda, umumnya orang yang berpengaruh dan berasal dari unsur Ninik Mamak. Seperti Lareh Sungai Puar, Lareh Koto Gadang dan Lareh Simawang. Sumpur Kudus dijadikan satu kelarasaan yang terdiri dari sembilan buah nagari, yaitu *Sumpur Kudus, Silantai, Unggan,*

¹¹⁸Memang ada belasan putra dan putri dari Nan Dipertuan Sembahyang yang tersebar di banyak daerah. Selama dalam masa perjuangannya melawan Belanda sampai dengan tahun 1850, Nan Dipertuan Sembahyang menetap di beberapa tempat dan memiliki banyak anak, termasuk Tuanku Tan Amat kita. Konon kabarnya, sejarah lisan mengatakan bahwa adik-adik Tuanku Tan Amat yang bernama Sutan Lembang Lawik dan Datuk Marajo tidak dimakamkan di Lintau, tapi dimakamkan di samping makam ayah mereka di ustano rajo-rajo Ceranti di Kuantan Singingi. Lebih lanjut baca *Verslag van een conflict tussen Raja Ibadat van en de Luitenant Kolonel Resident van Sumatra Hendrik te Boea 1824*.

¹¹⁹Gusti Asnan, *Pemerintahan di Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*. (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006).

*Sisawah, Tamparungo, Tanjung Bonai Aur, Durian Gadang, Kumanis, dan Paru.*¹²⁰

Untuk kelancaran pemerintahannya Belanda memberi *Besluit* pada beberapa orang Penghulu dalam nagari. Penghulu yang mendapat *besluit* inilah yang membantu Kepala Nagari Sumpur Kudus menjalankan roda pemerintahan, terutama untuk memungut iuran belasting¹²¹, rodi, dan lain sebagainya. Disamping itu Belanda mewajibkan masyarakat Sumpur Kudus menanam kopi, kulit manis, dan rempah-rempah lainnya tahun 1870 karena bahan-bahan ini dibutuhkan mereka dan masyarakat Eropa pada musim dingin.

Mulailah rakyat diperintah dengan paksa untuk menanam tanaman tersebut. Di Sumpur Kudus terutama diwajibkan tanaman kopi, maka pemerintah Belanda menugaskan seorang Manti kopi (Pokuhi) di Sumpur Kudus.¹²²

Selain dari kopi dan kulit manis, beberapa orang mulai menanam bibit karet yang dibawa dari Teluk Kuantan. Pada masa itu harga getah mahal di Teluk Kuantan, sehingga pemuda--pemuda Sumpur Kudus banyak merantau untuk menakik getah. Setelah kembali dari Teluk Kuantan, mereka mendulang pundi-pundi uang dan mengembangkan usaha kebun karet di Sumpur Kudus. Selain itu, masyarakat Sumpur Kudus yang berhasil di Teluk Kuantan membuka ladang gambir dan berdagang.

¹²⁰Setiap nagari dikepalai oleh seorang Ninik Mamak dengan jabatan Kepala Nagari atau Penghulu Kepala. S. Khatib Amin, *wawancara*, tanggal 15 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

¹²¹Sinar Hindia memberitakan ada beberapa macam belasting yang memberatkan masyarakat, di antaranya: *le personeel belasting* (belasting badan), *inkomesten belasting* (belasting perusahaan), *e hereendienst* (belasting dari orang yang terkena *hereendienst*), *landrente* (belasting tanah), *winst belasting* (belasting perang), *meubelsbelasting*, *honden belasting* (belasting anjing), *verponding*, *Sumatra Tabaks belasting* (pajak tembakau Sumatra). Lebih lanjut baca *Sinar Hindia* No.144 tanggal 22 Agustus 1923.

¹²²Anonim, "Raja Adat Sumpur Kudus dalam Struktur Kerajaan Minangkabau.", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, tanpa tahun), hlm. 10.

Membbaiknya kondisi perekonomian mereka pasca naiknya getah karet hingga tahun 1928, menyebabkan gaya hidup masyarakat Sumpur Kudus pun berubah. Bila sebelumnya rumah masyarakat beratap ijuk dan daun rumbio, pasca membbaiknya perekonomian atap rumah diganti dengan seng.

Sementara itu, keturunan terakhir Raja Ibadat, yakni Raja Umat tidak diangkat menjadi raja karena tidak memiliki kemurnian darah, karena ibunya bukanlah seorang Puti. Kondisi ini memberi gambaran, bahwa salah satu prasyarat dari seorang raja adalah bila ayahnya keturunan raja dan ibunya mewarisi darah puti.¹²³ Untuk mencegah kekosongan pemerintahan dan tugas pokok raja Ibadat, pepatah adat Sumpur Kudus memberi solusi, *Indak Rajo Baganti Rajo*. Pada tahun 1836 Datuk Nan Sapuluah menunjuk Datuk Inyiaq nan Batigo di Sumpur Kudus untuk menggantikan posisi dari Raja Ibadat. Maka sejak saat itu, daerah perkampungan raja menjadi kemenakan dari *Datuk Inyiaq nan Batigo* dan *Datuk nan Sapuluah* Sumpur Kudus. Untuk melanjutkan pemerintahan di nagari Sumpur Kudus, berdasarkan kesatuan geneologis masyarakat adat berada di tangan Datuk nan Sepuluh.¹²⁴

1. Datuak Ke IV Suku terdiri dari: Datuk Rajo Malayu, Kepala Pemerintahan/ Hakim Ketua/Kandang Adat dari suku Malayu; Datuk Paduko Marajo, Kepala, Pemerintahan/Cupak Panuah dari suku Domo; Datuk Paduko Rajo, Kepala Pemerintahan/Sandi Padek dari suku Piliang; dan Datuk

¹²³Raja Umat pergi meninggalkan Sumpur Kudus dan menjadi Raja rantau Kuantan, Batu Rijal dan Yang Dipertuan Pandak meninggal di Negeri Sembilan tahun 1837. Karena raja tidak adalagi, sehingga negeri seperti tidak bertuan. Atas kesepakatan ninik mamak di Sumpur Kudus diangkat Datuk Inyiaq nan Batigo sebagai raja "*Indak Rajo Baganti Rajo*." Walaupun demikian pewaris dari keturunan raja lebih banyak selama ini diketahui berada di Pagaruyung, mungkin karena lebih mempublikasikan dirinya. Untuk diketahui sampai saat ini tidak seorang pun lagi yang berhak untuk menjadi raja atau dirajakan karena tidak ada lagi kemurnian darah untuk menjadi seorang raja. Anonim, "Raja Adat Sumpur Kudus dalam Struktur Kerajaan Minangkabau.", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, tanpa tahun), hlm. 12.

¹²⁴Herni Datuk Paduko Marajo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

Bandaro Hitam, Kepala Pemerintahan/Camin Taruih dari suku Chaniago

2. Datuk Nan Baranam terdiri dari: Datuk Mangkuto Alam bertugas sebagai pemerintah/hakim Suku Domo; Datuk Paduko Alam bertugas sebagai pemerintah/hakim Suku Melayu; Datuk Rajo Melano bertugas sebagai pemerintah/hakim Suku Melayu; Datuk Paduko Simarajo, bertugas sebagai hakim Suku Piliang; Datuk Paduko Sinaro bertugas sebagai hakim Anggota Suku Piliang; dan Datuk Mangkuto Bandaro bertugas sebagai hakim Suku Caniago.

Sementara itu, dalam menjalankan syariat agama Islam ditunjuklah sembilan orang penghulu yang terdiri dari:

1. Tuanku Nan Balimo terdiri dari Khatib Kayo dari Suku Melayu, Khatib Aminullah dari Suku Melayu, Tuanku Bagindo Melano dari Suku Domo, Malin Permato dari Suku Piliang, dan Khatib Marajo dari Suku Caniago.
2. Jinih Nan Ampek, yang mempunyai tugas sebagai: Khatib Rajo sebagai Qadhi Nagari dari Suku Piliang, Alim Permato sebagai Imam Nagari dari Suku Melayu, Khatib Nagari sebagai pelaksana Khatib pada salat Jumat, dan Lebai Gelombang sebagai pelaksana azan pada hari Jumat dan sebagai Bilal Nagari dari Suku Pitopang Piliang.

Untuk menjaga lembaga adat, undang-undang dan syara' terdapat 12 orang penghulu yang terdiri dari Manti dan Dubalang/Paga Nagari untuk menjaga keamanan. *Pertama*, Manti 6 orang terdiri dari Datuk Manti Penghulu dari suku Melayu, Datuk Manti Sampono dari Suku Melayu, Datuk Manti Besar dari Suku Domo, Datuk Rajo Penghulu dari Suku Piliang, Datuk Manti Sutan dari Suku Piliang, dan Datuk Manggung dari Suku Caniago. *Kedua*, Dubalang atau Paga Nagari 6 orang, yaitu: Datuk Dubalang Sutan dari Suku Melayu, Datuk Malintang Sutan dari Suku Melayu, Datuk Ombak Gilo dari Suku Domo, Datuk Kelambu Alam dari Suku Piliang, Datuk Dubalang Sutan dari suku Pilang, dan Datuk Pahlawan Sati dari Suku Caniago.

Secara kelembagaan pengganti tugas Raja Ibadat di Sumpur Kudus berjumlah 14 orang, kemudian sebagai pembantu mamak rumah setiap suku 40 orang ninik mamak kampuang ditambah *Kapak Rambai*-nya. *Pertama*, Kampung Melayu terdiri dari Datuk Paduko Sanso, Datuk Paduko Labiah, Malin Kerajaan, Datuk Bagindo Ratu, Datuk Panghulu Mudo, Khatib Sutan, Malin Sutan, dan Panglimo Hitam. *Kedua*, Kampung Kampai terdiri dari Datuk Gadang Jalelo, Pakiah Mudo, Malin Palawan, Panglimo, Khatib Putih, Malin Putih, Dubalang Bungkuak, dan Peto Rajo. *Ketiga*, Kampuang Piliyang yang terdiri dari Datuk Bandaro Kayo, Paduko Tuan, Rajo Lenggang, Pakiah Mudo, Peto Beraian, dan Khatib Ja Lelo. *Keempat*, Kampuang Petopang yang terdiri dari Datuk Sirajo, Malin Mudo. *Kelima*, Kampung Domo terdiri dari Datuk Panghulu Mudo, Peto Kari, Malin Kerajaan, Malin Marajo, Bagindo Marajo, Rajo Gementar, Khatib Mudo, dan Peto Shaleh. *Keenam*, Kampung Caniago terdiri dari Datuk Bandaro Putih, Penghulu Sati, Manti Kayo, Khatib Besar, Datuk Rajo Mudo, Malin Emas, Pakiah Sati, dan Kali Sutan. Sehingga total jumlah ninik mamak Kenagarian Sumpur Kudus sebanyak 74 orang dengan pembagian tugas yang telah ada dalam masing-masing suku.¹²⁵

Pada tahun 1908, ketika Perang Blasting meletus di Buo yang dipimpin seorang perempuan bernama Siti Hajir. Tekanan pemerintah Hindia Belanda semakin kuat, menyebabkan beberapa orang anak Sumpur Kudus mulai bersekolah ke Buo. Sekolah Desa tiga tahun, sekedar tahu membaca dan menulis. Sejak tahun 1908 (Perang Buo), masyarakat Sumpur Kudus sudah mulai berkeinginan untuk bersekolah. Sumpur Kudus pada awal abad ke-20 sudah memiliki *Gouvernement School* yang meliputi kelurahan Sumpur Kudus.

Gouvernement School yang berada di Sumpur Kudus, menurut Mansur Datuk Penghulu Mudo, berlokasi di SD Sumpur Kudus (sekarang) dan terdiri dari lima kelas. *Gouvernement School* dijalani oleh seorang siswa selama 5 tahun, sebelumnya sekolah

¹²⁵ Anonim, "Raja Adat Sumpur Kudus dalam Struktur Kerajaan Minangkabau.", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, tanpa tahun), hlm. 12.

itu hanya tiga tahun.¹²⁶ Sementara itu, untuk siswa-siswa tamatan Sekolah Desa (*Volkshool*) tiga tahun asal daerah Unggan, Sisawah, Durian Gadang Sijunjung, banyak yang melanjutkan pendidikannya ke *Gouvernement School* Sumpur Kudus.¹²⁷ Salah satu gurunya adalah kakek dari Drg. Abraham Ilyas yang berasal dari Talang Solok.¹²⁸

Mata pelajaran yang diberikan oleh guru-guru pada masa itu antara lain aljabar, aritmetika, geometri, geografi, pelajaran peta (kartografi), menulis dan mengarang dengan huruf latin, dan bahasa Belanda. Sehingga menurut Mansur, hampir rata-rata siswa Sumpur Kudus yang belajar di *Gouvernement School* bisa bicara bahasa Belanda. Tamatan *Gouvernement School* pada umumnya melanjutkan pendidikannya ke luar nagari Sumpur Kudus. Seperti Mansur dan Ahmad Syafii Maarif (eks Ketua PP Muhammadiyah) melanjutkan sekolahnya ke Muallimin Muhammadiyah Lintau *afdeeling* Tanah Datar.¹²⁹ Sedangkan Khatib Amin melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Candung Agam.¹³⁰

Sejak pemerintah Kelarasan dihapuskan, pemerintah Hindia Belanda mengatur birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat *Residen*, *Controleur*, *Demang*, *Asisten Demang* dan untuk mengepalai nagari adalah *Kepala Nagari*. Menjelang Perang Dunia II Sumpur Kudus masuk pemerintahan Asisten Demang Buo Luhak Tanah Datar. Tak beberapa lama se usai Perang Dunia II Sumpur Kudus dipindahkan ke Distrik Sijunjung Onder Distrik Koto VII Tanjung Ampalu

¹²⁶Mansur Datuk Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 20 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

¹²⁷S. Khatib Amin, *wawancara*, tanggal 20 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

¹²⁸Drg. Abraham Ilyas, *wawancara*, via telepon seluler, tanggal 15 Februari 2014

¹²⁹Mansur Datuk Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 20 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

¹³⁰S. Khatib Amin, *wawancara*, tanggal 20 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

B. Sumpur Kudus Pada Masa Pendudukan Jepang**1. Mata-mata Jepang dan Situasi Terakhir Belanda di Sawahlunto/Sijunjung**

Proses datangnya orang-orang Jepang ke Indonesia tidak dimulai sejak tahun 1942. Gelombang pertama pedagang Jepang di Hindia Belanda pada umumnya bermata pencarian pedagang keliling dan pemilik toko.¹³¹ Pada tahun 1912 menurut arsip sejarah diplomatik Kementerian Luar Negeri Jepang, bahwa pemilikan toko merupakan jenis utama kegiatan perdagangan orang Jepang di Indonesia. Pada tahun itu terdapat 56 pedagang keliling, di antaranya 38 orang menjual obat-obatan dan sisanya adalah gelombang pedagang yang pertama.¹³²

Menurut Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi pada tahun 1920-1921 terlihat kecendrungan populasi pedagang Jepang di Hindia Timur Belanda cenderung naik, seperti gambar tabel di bawah ini:

Tabel 1. Populasi Pedagang Jepang di Hindia Timur Belanda (1920-1921)

Tempat	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926
1. Pulau Jawa							
Batavia	22	20	33	24	13	4	
Semarang	7	15	20	14	14	14	
Surabaya		70	142	17	26	18	31
Total		105	195	55	53	36	31
2. Luar Pulau Jawa		190	374	313	298	350	
Sub Total	29	295	569	368	351	386	31

Sumber: Saya Shirashi dan Takashi Shirashi Tahun 1998 hal.165

Pada awal periode masuknya (1912) menurut Saya Shiraishi populasi pedagang Jepang di Sumatera jauh lebih besar dibandingkan Pulau Jawa. Namun pada perkembangan berikutnya

¹³¹Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi, *Orang-orang Jepang di Koloni Asia Tenggara*. (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), hal. 159.

¹³²Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi, *Orang-orang Jepang di Koloni Asia Tenggara...*, hlm. 160.

sampai tahun 1925 populasinya cenderung mandek.¹³³ Adapun faktor yang menyebabkan kemandekan itu, antara lain kurangnya kemauan untuk meninggalkan cara lama dan usaha meningkatkan kemajuan. Cara-cara lama yang dimaksud di sini adalah profesi pelacuran yang melibatkan perempuan lebih banyak mendominasi. Pelacuran ini banyak ditemukan di Kota Medan. Sementara itu, orang-orang Jepang di Sawahlunto/Sijunjung pada umumnya berprofesi sebagai tukang foto.

Mendekati tahun 1941, ketika terjadinya perang Asia Pasifik yang diikuti fasisme Jepang, masyarakat Sumpur Kudus pada masa itu tidak mengetahui perkembangan situasi politik di luar negeri. Menurut Mansur Datuk Rajo Penghulu mengakui bahwa ketiadaan alat-alat komunikasi pada masa akhir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda merupakan salah satu sebab mereka tidak mengetahui kondisi di luar Indonesia.¹³⁴ Menurut Mansur, serdadu dan polisi Pemerintah Hindia Belanda, maupun aparatur pemerintahnya sibuk mengikuti pemberitaan, bahwa seorang berkebangsaan Jerman dan Jepang telah ditangkap dan dijadikan sebagai tawanan di Padang tahun 1941.

Konvoi serdadu Belanda di Sijunjung pada tahun 1941 pada umumnya berasal dari suku Ambon, Menado, dan Jawa. Patroli yang dilakukan oleh serdadu Belanda itu bertujuan melakukan *sweeping* terhadap orang-orang Jepang yang diduga masih berada di Sijunjung.¹³⁵ Namun adakalanya, patroli yang dilakukan berakhir hingga perbatasan Sumatra Barat dan Jambi. Kesibukan-kesibukan lain dari Pemerintah Belanda di Sijunjung adalah mengintesifkan latihan-latihan seperti Pengawal Kota (*tantswach*), Pengurus Nagari (*Landswacht*), Pengawal Bahaya Udara (*Suchtbasher min Dinst*), dan latihan Palang Merah (*Rodea Knuis*) untuk menanggulangi pertolongan Pertama pada kecelakaan.¹³⁶ Latihan-latihan dalam menghadapi situasi darurat

¹³³Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi, *Orang-orang Jepang....*, hlm. 161-165.

¹³⁴Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

¹³⁵*Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung*. (Sijunjung: Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1990), hlm. 5.

¹³⁶Maryah, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

juga pernah disaksikan Khatib Amin yang masa itu sudah duduk di bangku *Gubernemen School* Sumpur Kudus. Sekali dalam seminggu, menurutnya latihan mengatasi bahaya serangan udara diutamakan untuk *ambtenaar* berkebangsaan Belanda dan keluarganya.

Kalau ada kapal terbang musuh lewat atau terdengar bunyi serine disuruh mempertudung kuali dan menggigit sepotong karet dan menutup telinga dengan kapas untuk mencegah jika musuh menjatuhkan bom, terhindar dari pecahan bom, tuli dan geraham tidak akan terlepas dari pertemuannya.¹³⁷

Disamping mengadakan latihan-latihan itu, pada saat-saat terakhir kekuasaannya, Belanda lebih banyak melakukan taktik bumi hangus daripada mengadakan perlawanan langsung. Taktik bumi hangus ini dilakukan pada objek-objek vital di Sijunjung dengan tujuan menghambat laju pergerakan pasukan Jepang. Sebelum menduduki Sijunjung, Jepang melakukan serangan udara sebanyak dua kali. *Pertama* pada awal Januari 1942 sebuah pesawat pembom “menghajar” stasiun kereta api Simpangharu Padang. Serangan udara ini menghancurkan bengkel dan tempat penyimpanan suku cadang kereta api. Tidak puas dengan serangannya, pada pertengahan bulan Januari 1942 Jepang kembali mengerahkan tujuh pesawat pembomnya ke kota Padang.

Setelah berputar-putar beberapa kali di atas kota Padang langsung menuju daerah Teluk Bayur (Emma Haven) dan menjatuhkan beberapa buah bom di atas kapal-kapal yang sedang sandar (berlabuh di dermaga). Akibatnya tiga buah kapal ukuran besar tengelam, sebagian dermaga terbakar serta jembatan pemuat batubara kekapal menderita rusak berat.¹³⁸

Meskipun pemerintah Hindia Belanda telah menyatakan menyerah pada Jepang dengan menandatangani penyerahan kekuasaan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van

¹³⁷ S. Khatib Amin, wawancara tanggal 20 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

¹³⁸ *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 10-12.

Stakenberg dan Letnan Jenderal Heisterpsorton di Kali Jati pada tanggal 9 Maret 1942, namun Komandan Territorial di Sumatera Barat yang terdiri dari Sumatera Tengah dan Sumatera Utara memutuskan untuk meneruskan perlawanan. Pada waktu itu Komandan Territorial Sumatera dipimpin oleh Mayor Jenderal Overaker, merencanakan untuk membangun pertahanan di daerah Aceh di Kecamatan Takengon.¹³⁹

Pada tanggal 9 Maret 1942, markas Komando Territorial yang berkedudukan di Fort de Kock dipindahkan ke Kabanjahe. Kendaraan umum seperti truk, bus umum, HZN, TWP dan KAS dan lain-lain yang berada di Sijunjung diambil bersama sopirnya dan kondektur dan disembunyikan ke kampung-kampung jelang mengangkut orang-orang Belanda menuju Singapura. Setelah diketahui bahwa Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang, kendaraan itu dibelokkan ke Kotacane. Sesampai di Kotacane sopir-sopir beserta pembantu-pembantunya disuruh pulang ke Sumatera Barat dengan berjalan kaki diantaranya Lolo Batuah asal Muaro Bodi dan M. Satar Panduko Atar asal Muaro Bodi dan lain-lain.¹⁴⁰



Gambar 5 Rombongan serdadu Belanda yang menyerahkan diri pada pasukan pendudukan Jepang di Jawa pada tahun 1941. Setelah ditandatangani penyerahan kekuasaan Belanda, merupakan awal periode pendudukan Jepang di Indonesia. Sumber: www.timeline.com.

¹³⁹ *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 12-13.

¹⁴⁰ Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

2. Masa Pendudukan Jepang

Pada bulan Maret 1942, konvoi serdadu Belanda melalui wilayah Sijunjung menuju daerah Jambi. Serdadu ini, menurut Khatib Amin hampir berpapasan dengan tentara Jepang. Namun kontak senjata tidak terjadi karena saat menyeberangi batang Sumpur Kudus, kedua pasukan ini berjarak satu kilometer. Lebih lanjut Khatib Amin menuturkan:¹⁴¹

Tentara Jepang lebih licik dari serdadu Belanda, setelah hari malam tentara Jepang menghanyutkan beberapa ekor kambing dengan rakit di sungai Bantanghari Pulau Musang dan pada kambing itu diikatkan lentera. Melihat lentera yang bergerak-gerak ini oleh serdadu Belanda disangka tentara Jepang yang telah menyeberang, sehingga dilepaskan tembakan yang beruntun kearah rakit-rakit tadi. Dan Jepang pun membalas tembakan serdadu Belanda itu, sedangkan sebagian tentara Jepang telah melambung menyeberangi sungai Batanghari. Hal ini tidak diketahui oleh serdadu Belanda kemudian tentara Jepang telah berada dibelakang serdadu Belanda yang sedang asik menembak keseberang.

Tentara Jepang yang telah berada dibelakang pasukan serdadu Belanda itu tidak menggunakan senjata api (bedil) melainkan menggunakan bayonet/pedang Samurai, sehingga serdadu Belanda yang berasal dari Ambon, Menado, dan Jawa banyak yang tewas dan luka-luka berat. Serdadu Belanda menjadi panik dan kucar-kacir sehingga diantara mereka ada yang membuang senjata dan membuka pakaian seragamnya dan lari masuk hutan-hutan (kampung) serta manyamar seperti masyarakat desa biasa

Sebagian serdadu Belanda mundur arah ke Sijunjung dengan merusak jalan dan jembatan, serta membuang tanda kilometer yang ada disepanjang jalan yang dilalui. Prasarana jalan yang

¹⁴¹S.Khatib Amin, wawancara tanggal 20 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

dirusak oleh serdadu Belanda itu terletak di Bukit Sebelah dan jembatan Muara Batuk. Setelah tentara pendudukan Jepang merasa aman di Pulau Musang Jambi, mereka dengan penuh keramahan menyatakan dirinya sebagai “saudara tua” yang membebaskan masyarakat Jambi dari belenggu penjajahan Belanda.

Kondisi pelik yang diderita perantau Sijunjung di Jambi, untuk memperoleh beras menyebabkan mereka pulang ke kampung halamannya. Salah seorang tokoh Sijunjung yang memberi kabar kedatangan Jepang adalah Radjab St. Majolelo dari Palangki. Pada tanggal 9 April 1942, tentara Jepang mulai memasuki kawasan Sawahlunto/Sijunjung dengan berkendara sepeda ataupun berjalan kaki. Setelah dua hari menempuh perjalanan dari Pulau Musang, mereka pun sampai ke Kiliran Jao tanpa adanya perlawanan dari pihak Belanda.¹⁴²

Setibanya di Kiliran Jao, tentara Jepang mengumpulkan rakyat untuk memperbaiki jalan atau jembatan yang telah rusak oleh serdadu Belanda. Sebelum sampai di Muaro Batuk, tentara Jepang bermalam di Tanjung Gadang dan menggunakan tempat yakni gedung Sekolah Desa Los Pasar Tanjung Gadang. Pada tanggal 10 April 1942 tentara Jepang menggunakan kursi sekolah sebagai bahan bakar untuk memasak. Pada tanggal 17 Maret 1942 sebagian dari tentara Jepang memperbaiki jembatan Muaro Batuk bersama masyarakat, sedangkan sebagiannya menuju pasar Sijunjung.

Di Pasar Sijunjung, tentara Jepang disambut oleh rakyat yang berdatangan dari sekitar Sijunjung dan nagari-nagari yang berdekatan, karena mereka beranggapan bahwa Jepang adalah Saudara Tua yang akan melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Mereka disambut dengan teriakan *banzai* artinya selamat datang, dan mengibarkan bendera Merah Putih. Sementara Jepang memperbaiki jembatan Muara Batuk tentara Jepang

¹⁴²Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

mengambil kayu kepunyaan Abdul Rahman Poduko Sutan (Pegawai Kehutanan) dirumahnya di Kampung Baru Sijunjung dan dibawa dengan truk Ho Wis Seng ke Muara Batuk, kayu tersebut langsung dibayar oleh tentara Jepang (dr. Shigeru Konima) yang pandai berbahasa Inggeris dan lawan bicaranya (Syafri-Dt.Kayo) juga pandai berbahasa Inggris alat pembayaran kayu itu adalah uang Yen.¹⁴³

Mendengar tentara Jepang telah sampai dipasar Sijunjung, pejabat *Controleur* don Polisi *Opsiner* Boch langsung menyerahkan diri. Ketika tentara Jepang melanjutkan perjalanan ke Sawahlunto, Assisten Residen pun menyerahkan diri. Tentara Jepang yang dipimpin Fujiyama segera menuju Padang dengan kendaraan *Controleur* Sijunjung. Tujuan dari Fujiyama adalah secepatnya menuju kota Padang dan mengambil alih kekuasaan dari Residen Sumatra Barat Booseloar.

Salah satu hal yang berkesan bagi Maria pada masa awal pendudukan Jepang adalah kuatnya keinginan tentara Dai Nippon itu belajar bahasa Indonesia. Tentara Jepang yang datang ke Sumpur Kudus berupaya belajar dari para pemuda S maupun anak-anak sekolah untuk sekadar belajar bahasa Indonesia.¹⁴⁴ Di samping itu, semangat Jepang Pembebas Asia selalu didengungkan-dengungkan mereka untuk meraih simpati besar dari masyarakat.

Bendera kebangsaan kita merah putih berkibar dengan megahnya disamping bendera Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang, dimana-mana hanya ada perbuatan mereka yang menyinggung perasaan kita adalah mereka mengambil atau boleh dikatakan merampok apa saja yang diperlukan mereka seperti sepeda jam tangan

¹⁴³ *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 20-21.

¹⁴⁴ Menurut Maryah, bahwa kalau pembicaraan antara penduduk Sumpur Kudus dengan Jepang itu hanya dengan isyarat (seperti orang bisu). Dengan cara ini mereka bisa memahami bahasa Indonesia, demikian hal sebaliknya si lawan bicara juga bisa memahami bahasa Jepang. Maria, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

dan lain-lain yang disenangi mereka. Mereka buang air kecil sambil berdiri saja maupun waktu mandi disungai, ditempat yang ramai, tanpa kain sehelai benangpun yang melekat dibadannya.¹⁴⁵

Pasca jatuhnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, tahanan politik Soekarno dan isterinya Inggit yang bertolak dari pembuangannya di Bengkulu mulai menuju Padang. Kehadiran Soekarno di Padang pada saat yang genting itu, tentu saja disambut hangat penduduk kota Padang.¹⁴⁶ Soekarno dan isterinya tidak lama berada di Padang dan atas permintaannya bertolak ke Jawa pada akhir bulan Mei 1942.¹⁴⁷ Rute yang mereka tempuh adalah melalui Sijunjung. Sesampai di daerah ini, tokoh masyarakat Mansur Dt. Sati Ibrahim (*Opsiter* Pertanian) dan M. Said Guru Sekolah Rakyat menyambut kehadiran Soekarno dan Inggit. Soekarno berserta Inggit menginap di Bawah Pauh, tepatnya di rumah Zubaidah.

Rupanya ramah-tamah tentara Jepang terhadap penduduk nagari Sumpur Kudus tidak berlangsung lama. Jepang mulai menjalankan kediktatorannya terhadap negeri jajahan. Kebijakan umum yang selanjutnya mereka perkenalkan adalah menumpas semua gerakan kebangsaan dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat untuk dan demi Perang Asia Timur Raya. Sejalan dengan pengebirian terhadap organisasi kebangsaan, diikuti dengan mendoktrin masyarakat dengan melarang pemakaian

¹⁴⁵ Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

¹⁴⁶ Pada kesempatan itu diadakanlah pertemuan-pertemuan secara pribadi oleh tokoh-tokoh Sumatera Barat dan di samping itu diadakan rapat-rapat terbuka. Selama di Padang Ir. Soekarno beserta Isterinya tinggal di rumah. dr.h. Woworuntu. Dari rumah inilah Ir. Soekarno memulai aktivitasnya kembali sebagai seorang penganjur perjuangan yang telah bebas dari kungkungan. Penjajahan Belanda dan membentuk Komite Rakyat yang bertugas sebagai Pemerintah Sumatera dan untuk menjaga ketertiban, sesuai dengan anjuran Jepang kepada Ir. Soekarno bersama pemimpin Sumatera Barat (Khatib Soeleiman) maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat, yang terdiri dari pemuda-pemuda dikampung-kampung.

¹⁴⁷ *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 29-30.

bahasa Belanda dan literaturnya, menutup Sumatera Barat dari berita-berita Luar Negeri, dan mendoktrin masyarakat melalui lagu kimigayo, bushido, dan belajar sejarah Jepang untuk siswa-siswa Sekolah Rakyat.

Sejak awal kedatangannya pemerintah Dai Nippon sudah menyusun sistem pemerintahannya.¹⁴⁸ Jabatan-jabatan pemerintah pada mulanya tetap dipegang oleh pegawai-pegawai lama, setelah orang-orang sipil Jepang datang, pegawai-pegawai berkebangsaan Belanda diinternir, hanya orang Indonesia yang tetap dipakai karena pegawai-pegawai asal Jepang tidak memahami masalah adat istiadat nagari.

3. Kebijakan Pemerintah dan Pengerahan Tenaga Manusia Pada Masa Pendudukan Jepang di Sijunjung

a. Kebijakan Pemerintahan

Sawahlunto/Sijunjung pada tahun 1942 dalam administrasi pemerintahannya terdiri dari dua Kademangan yakni Kedemangan Sawahlunto, dijabat oleh Jamalus Yahya dan Kademangan Sijunjung dijabat oleh Naasin Sutan Syarif. Struktur di bawah Kademangan adalah Kecamatan atau *Fuku Gun*

- a. Fuku Gun Koto VII*, dijabat oleh Zainal Abidin
- b. Fuku Gun Sijunjung*, dijabat oleh Rauf.
- c. Fuku Gun Tanjung Gadang*, dijabat oleh Hasan Basri Aznam.
- d. Fuku Gun Batanghari.*

Sedangkan Sawahlunto Gun terdiri dari tiga belas nagari (*Shun Co*) yang terdiri dari Talawi, Kolok, Sijantang, Lunto,

¹⁴⁸ Mengenai susunan dengan Pemerintahan di Sumatera Barat tetap sama dengan struktur pemerintahan Belanda. *Pertama*, Keresidenan Sumatera Barat melalui *Kaicun Shu* dengan Residen-nya yang dijabat Yoko Kenzo. *Kedua*, Luhak/Kabupaten disebut *Bunshu*, pejabatnya disebut *Bung Shu Co*, dan Asisten Residen *Bun Sho Co* Tanah Datar pada masa itu dijabat Sinaga. *Ketiga*, Kademangan disebut Gun dan pejabatnya disebut *Gun Co*. Kademangan Muda disebut *Fuku Gun* dan pejabatnya dinamai *Fuku Gun Co*. *Keempat*, Kenagarian disebut *Shun* pejabatnya disebut *Shun Co*.

Kubang, Silungkang, Padang Sibusuk, Pamuatan, Batu Manjukur, Koto Baru, Kabun (Mundam Sakti) Muaro Bodi dan Palangki. Sementara itu Sawahlunto dipimpin oleh seorang penghulu dagang yang dijabat oleh Sutan Badarun asal Tanjung Ampalu.

b. Kebijakan di bidang Militer

1) Membentuk Heiho

Ketika Jepang mulai terdesak dengan Perang Asia Timur Raya, mereka berupaya untuk mencari jalan agar masyarakat Sumatera Barat dan Sijunjung khususnya mau membantu mereka. Mereka berupaya untuk merekrut pemuda-pemuda dalam kesatuan militer, seperti Heiho, Giyu Gun, dan Keibodan. Perekrutan tenaga Heiho dilaksanakan pada Agustus 1942, sedangkan untuk Giyu Gun pada bulan September 1942.¹⁴⁹

Pengumuman *recruitment* tenaga tentara untuk Perang Asia Timur Raya itu, rupanya menyedot perhatian dari pemuda-pemuda yang berada di Sijunjung dan Sawahlunto untuk ikut mendaftarkan diri. Seluruh peserta yang terdaftar di Sawahlunto dibawa ke Padang untuk pemeriksaan kesehatan. Namun dari 40 orang yang mendaftar untuk Heiho, hanya 25 orang saja yang lulus.¹⁵⁰ Berikut nama-nama pemuda yang masuk Heiho pada bulan Desember 1942.

¹⁴⁹Mestika Zed, *Giyu Gun Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 57-60.

¹⁵⁰Menurut Mansur Dt Rajo Penghulu, bahwa pada waktu pemeriksaan kesehatan akan dimulai ratusan pemuda yang akan diperiksa ini disuruh membuka pakaian, sehingga tak sehelai benangpun yang tinggal di badan (telanjang bulat ditempat terbuka). Rasa malu dihilangkan, tidak peduli ada semenda-menyemenda, rasa malu dan lucu terjadilah waktu itu, kemaluan berusaha menutupnya dengan kedua belah-tangan selesai pemeriksaan kesehatan yang tak lulus pulang kekampung, dan yang lulus di asrmakan terus dilatih. Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

**Tabel 2 Nama-nama Pemuda yang Lulus
Pendidikan Heiho**

No.	Nama	Asal Daerah
1.	Kalam	Sijunjung
2.	Syukur	Sijunjung
3.	Lutan	Sijunjung
4.	Saaban	Sijunjung
5.	Syawal	Sijunjung
6.	Johar	Muaro Sijunjung
7.	Hasan	Tanjung Gadang
8.	Alamsyah	Tanjung Gadang
9.	Bahar	Lubuk Tarok
10.	Bustamam	Pematang Panjang
11.	Anhar	Pematang Panjang
12.	Darwis	Pematang Panjang
13.	Nyaman	Kandang Baru
14.	Yanuar	Muaro
15.	Sutan Kadirun	Tanjung Lolo
16.	Abd. Munaf	Sei. Lansek
17.	Yadun	Sei. Lansek
18.	Ramli	Sei.Dareh
19.	Abd. Rahman	Sei.Dareh
20.	Maliki	Sei.Dareh
21.	Ibrahim	Sei.Dareh
22.	M. Ali	Sei.Dareh
23.	Ali	Sei.Dareh
24.	Syukur	Pelayangan Sei.Dareh
25.	Bujang	Sei.Dareh

Sumber: Arsip *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/Sijunjung...*, hlm. 90.

Dari daftar nama-nama pemuda tersebut, tidak terdapat pemuda-pemuda yang berasal dari nagari Sumpur Kudus.

Menurut Mansur, sebab tidak masuknya pemuda asal Sumpur Kudus karena terdiskualifikasi saat mengikuti ujian saringan pertama di Padang. Latihan-latihan militer yang dialami para pemuda asal Sijunjung dan Sawahlunto memang cukup berat. Setelah kepala digunduli, mereka harus memakai celana pendek tanpa baju dan dilatih diteriknya matahari. Setelah itu, gerak baris berbaris diajarkan. Kelalaian setiap gerak yang dikomandokan akan berakibat tamparan atau terjangan akan diterima dari sipelatih yang berasal dari Jepang dan Korea.

Waktu meluruskan barisan, sering sipelatih menghunus bayonet, yang kemudian bayonet itu dipergunakan sebagai tongkat untuk menunjuk mereka yang tidak dapat meluruskan barisan itu. Tak jarang ada yang luka. Setiap kesalahan ditegur dengan tamparan atau terjangan, penghormatan lurus dilakukan setiap melihat sipelatih atau tentera Jepang lainnya.¹⁵¹

Intan Sari, salah seorang narasumber mengungkapkan, bahwa para pemuda yang sedang menjalani pendidikan militer tidak hanya merasakan siksaan fisik saat latihan, namun juga waktu melakukan salat diasrama. Intan Sari memperoleh informasi dari salah seorang rekannya yang bernama Johar asal Muaro Sijunjung, bahwa saat melakukan salat, ia dipaksa dalam posisi hormat bila komandan regunya datang ke asrama.

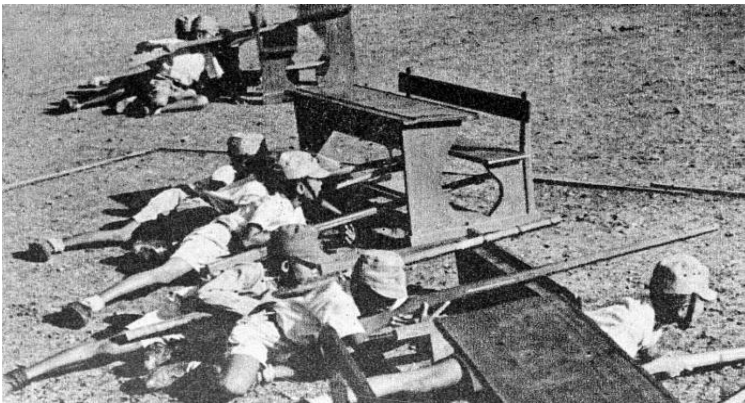
Sedang kita salat, datang Jepang yang lain melakukan penghormatan. Bila tidak memberikan penghormatan, ia langsung dipukuli, shalat diteruskan juga dengan pukulan yang bertubi-tubi, pukulan dan terjangan tidak akan berhenti sebelum memberi hormat. Yang lain tak sanggup melihat, lalu dikatakan, "berhentilah salat dulu". Untuk mengatasi hal itu, barulah oleh pemimpin kita dibuatkan sebuah tempat untuk salat dan bagi yang shalat ditempat itu

¹⁵¹Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

tidak lagi mendapat gangguan dari Jepang. Menjalani latihan yang seberat ini banyak pemuda kita yang tidak tahan, lalu melarikan diri, tetapi kalau dapat, dibuat separah mati, sehingga terpaksa menahan pahit getirnya latihan.¹⁵²

Latihan berat ini dirasakan pemuda asal Sijunjung selama tiga bulan. Setelah latihan berakhir, mereka diminta menuju Muaro Padang untuk memimpin masyarakat membersihkan sepanjang kawasan pantai. Bila ada peserta gotong royong itu malas, tentara Jepang akan memukul si mandor. Siswa lulusan Heiho yang menjadi mandor ini pun dipaksa menghajar badan dari peserta goro tersebut.

Tentara Heiho binaan Jepang ini sebagian kecil ditempatkan di pos-pos pemerintahan dan sebagian besar dikerahkan untuk bertempur ke Marotai, Birma, Malaya Siam. Bahkan, salah seorang tentara Heiho bernama Abdul Munaf pernah ikut bertempur di Kepualaun Solomon. Pemuda-pemuda dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dikirim ke medan pertempuran menghadapi serangan Sekutu.



Gambar 6 Latihan pemuda-pemuda yang bergabung dalam Heiho di Padang Bulan Desember 1942. *Sumber: Repro dari Iphos.*

¹⁵²Intan Sari Dt. Magek Parajan, wawancara, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

2) Giyu Gun

Bila di Jawa pemerintah Jepang mendirikan Pembela Tanah Air (PETA), maka di Sumatera Barat didirikan Giyu Gun (Laskar Rakyat). Disamping latihan untuk perwira diberikan pula pendidikan semi militer untuk calon bintara dan seterusnya dilatih pula prajurit-prajurit Giyu Gun. Latihan untuk prajurit tersebut hampir diseluruh daerah, salah satunya di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pendidikan dan latihan yang diberikan kepada pemuda Giyu Gun, coraknya hampir sama dengan Heiho, yakni keras dan ketat. Hasil yang diperoleh dari terbentuknya Giyu Gun memang diluar dugaan, baik dipandang dari segi kualitas ataupun kuantitas. Disamping memiliki pengalaman militer, bagi pemuda Giyu Gun mempunyai peranan penting dalam menyambut proklamasi kemerdekaan di Sawahlunto/Sijunjung.¹⁵³

c. *Kebijakan Romusha*

Romusha berasal dari bahasa Jepang yang diartikan pekerja buruh kasar.¹⁵⁴ Namun, dalam konteks sejarah Indonesia, istilah ini mempunyai pengertian khusus yang mengingatkan rakyat akan pengalaman yang sangat pahit di bawah pemerintah Jepang. Bagi orang Indonesia, romusha berarti buruh kuli yang dimobilisasikan untuk pekerjaan kasar di bawah kekuasaan

¹⁵³Ketika Jepang menyerah tanggal 14 Agustus 1945, banyak orang yang tidak mengetahui peristiwa itu. Namun bagi siapa yang memperhatikan wajah dan tindakan/ tingkah laku orang Jepang, keadaannya berlainan dari biasa. Mereka ada yang berkumpul-kumpul atau duduk di kantor atau di rumah. Di kalangan tentara pun wajahnya muram, tidak terlihat lagi apa yang dinamakan semangat Jepang. Di kantor-kantor pada kesatuan-kesatuan Giyu Gun di Padang, juga tampak suasana yang lain. Senjata-senjata mereka seluruhnya dikumpulkan dan pada tanggal 16 Agustus 1945 pada Gyu Gun, di antaranya yang berasal dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung disuruh pulang ke kampung masing-masing. Intan Sari Dt. Magek Parajan, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

¹⁵⁴Syafei Abdullah, *Korban Pembangunan Kereta Api Maut*. (Pekanbaru: Kanwil Depdikbud Prov. Riau, 1985), hlm. 88-95.

militer Jepang serta diperlakukan tidak manusiawi.¹⁵⁵ Menurut Koichi Kimura kebijakan romusha berawal dari ideologi Asia Timur Raya.¹⁵⁶ Salah satu isi dari ideologi itu adalah pembangunan dan jaminan keamanan terhadap sumber daya alam untuk keperluan industri militer antara lain minyak, karet, pertambangan, dan lain-lain (penjarahan sumber daya alam Indonesia). Maka untuk memperlancar usaha pendistribusian keperluan militer tersebut dibangunlah sarana rel kereta api antara Muara Sijunjung hingga Pekanbaru.

Pekerjaan pembuatan rel kereta yang melalui Muara Sijunjung hingga Pekanbaru menuntut tenaga kerja yang banyak. Hal ini yang menjadi problem berat bagi Jepang karena jumlah penduduk di sepanjang rel itu sangat jarang. Bila dikerjakan oleh penduduk daerah dari Lubuk Ambacang ke Pekanbaru, biasanya pemerintah pendudukan Jepang mewajibkan penduduk laki-laki berumur 16-45 tahun, namun jumlahnya masih jauh dari mencukupi. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah militer Jepang terpaksa mendatangkan tenaga kerja dari Pulau Jawa. Pada masa itu Pulau Jawa merupakan kawasan terpadat penduduknya. Selain itu, pemerintah pendudukan Jepang juga mencari tenaga kerja dari Pulau Sumatera.¹⁵⁷

¹⁵⁵Aiko Kurasawa, *Mobilisasi Dan Kontrol. Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan di Jawa 1942-1945*. (Jakarta: Grasindo. 1993), hlm. 123.

¹⁵⁶Eka Hindra dan Koichi Kimura, *Momoye Mereka Memanggilku*. (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2007), hlm. 2003-204.

¹⁵⁷Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.



Gambar 7 Pekerja romusha di Logas yang mengalami busung lapar, karena dieksploitasi tenaganya untuk menyelesaikan pekerjaan rel kereta api. *Sumber: Repro dari Iphos.*

Pekerja romusha yang bertugas membuat jalan kereta api dari Muaro Sijunjung hingga Pekanbaru, asal Sumpur Kudus dan Silantai pada masa itu menurut Syamsul Anwar jumlahnya cukup banyak.¹⁵⁸ Bahkan, Damhoeri Ghafoer saksi dari peristiwa pencidukan terhadap pemuda Sumpur Kudus, menuturkan, bahwa pemuda Sumpur Kudus dikirim sebagai tenaga romusha direkrut dengan beberapa cara:

¹⁵⁸Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.



Gambar 8 Pembangunan rel kereta api yang menghubungkan wilayah Muaro Sijunjung dan Pekanbaru tahun 1943. Kosentrasi manusia romusha dalam pekerjaan rel ini berada di Logas (masuk dalam Kabupaten Kuantan Sengingi). *Sumber: Repro dari ipphos*

1) Melalui propaganda Jepang

Dalam rangka mendorong rakyat Sumpur Kudus berpartisipasi menjadi tenaga romusha serta meningkatkan semangat kerja, pemerintah *Fuku Gun* Sijunjung melakukan berbagai propaganda. Jepang melalui propagandanya mendoktrin bahwa pekejaan tersebut merupakan pelayanan mulia, penghargaan dan penghormatan bagi romusha. juga diungkapkan dengan cara menyelenggarakan upacara pelepasan besar-besaran pada saat keberangkatan mereka.¹⁵⁹

Bagi rakyat yang berminat, pemerintah Jepang menjanjikan gaji sebesar 300 sen, di samping itu juga diberi pasokan bahan makanan secukupnya yang dibagikan secara gratis. Selain itu, disediakan pemondokan *plus* pakaian kerja. Pada masa itu menurut Abdul Gani, banyak pemuda berusia 18 sampai 25 tahun tertarik untuk mendaftarkan diri sebagai tenaga romusha.

¹⁵⁹ Damhoeri Ghafoer, "Derita Pemuda Sumpur Kudus Masa Pendudukan Jepang", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, 1997), hlm. 2-3.

2) *Melibatkan Pemerintah setempat*

Untuk memuluskan usaha propagandanya merekrut tenaga romusha di Sumpur Kudus, pemerintah *Fuku Gun* melibatkan pegawai lokal setempat. Melalui pegawai inilah disampaikan bahwa jenis pekerjaan itu merupakan usaha gotong royong. Menurut Damhoeri dalam kesaksiannya, “Tapi kalau menolak, malah dituduh anti Nippon. Bahkan pegawai itu mengatakan akan dihukum tembak atau dianiaya Kampetai Jepang.”

Namun usaha pangreh praja itu ternyata kurang efektif. Melalui akal liciknya, pemerintah pendudukan Jepang mengumpulkan pemuda untuk suatu latihan. Setelah mereka terkumpul diangkut paksa ke Logas. Mereka umumnya dipekerjakan kurang lebih satu bulan dengan cara bergiliran. Lain halnya yang terjadi di Riau, di mana para pemuda diambil di setiap *Ku* sebanyak 100 orang. Mereka ini bekerja dengan sistem bergilir untuk jangka pendek, yang disebut *Kinrohosi*.¹⁶⁰ Sedangkan di *Fuku Gun* Sijunjung, kepala nagari Sumpur Kudus diwajibkan mengirimkan tenaga kerja ke Muara Sijunjung dan Logas secara bergiliran. Para pekerja itu selanjutnya dikumpulkan di setiap nagari dan dikirim ke Pekanbaru.¹⁶¹

3) *Dengan Cara Paksa*

Seperti kata pepatah, “sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium jua”. Demikian halnya tipu muslihat pemerintah Jepang, akhirnya diketahui rakyat. Pemerintah Jepang mulai berpikir untuk melakukan tekanan dan ancaman kepada para calon tenaga romusha. Pemerintah *Fuku Gun* Sijunjung memerintahkan, agar para pemuda Sumpur Kudus yang berumur antara 18 sampai 35 tahun untuk datang ke kantor wali nagari dengan alasan urusan penting. Namun ada juga yang terpaksa datang setelah “dijemput” tentara Jepang. Setelah didaftar, mereka tidak diperkenankan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian mereka dikumpulkan di *Fuku Gun* Sijunjung.

¹⁶⁰Syafei Abdullah, *Korban Pembangunan Kereta Api Maut*. (Pekanbaru: Kanwil Depdikbud Prov. Riau, 1985), hlm. 96.

¹⁶¹Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

Taktik kedua yang dilancarkan oleh pemerintah *Fuku Gun* Sijunjung adalah melakukan seleksi di jalanan dan pasar-pasar, dan penculikan pemuda Sumpur Kudus. Penipuan juga ditempuh melalui surat panggilan. Taktik ketiga adalah melalui ajakan menonton bioskop. Pada masa itu beberapa bioskop di Sumatera menayangkan film gratis tentang kisah heroik Jepang dalam pertempuran Asia Pasifik. Setelah pertunjukan selesai, di depan bioskop telah menanti puluhan truk-truk militer Jepang. Sepuluh Orang pemuda Sumpur Kudus langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam truk yang selanjutnya mengubah kehidupan mereka sebagai tenaga romusha di Muaro Sijunjung dan Logas.¹⁶²

Pembuatan jalan kereta api itu, menurut Syamsul dimulai pada April 1943. Panjang jalur kereta api yang direncanakan lebih kurang 220 km, dengan rincian di Pekanbaru sepanjang 180 km dan di Sumatera Barat 40 km.¹⁶³ Pembangunan rel kereta api dilakukan secara bersamaan, yaitu dari Pekanbaru dan Muaro Sijunjung, kedua rel ini kemudian bertemu di Lubuk Ambacang yaitu di desa Logas. Pekerjaan ini kemudian ditambah sepanjang 18 km di desa Logas. Penambahan panjang rel kereta api ini pada dasarnya karena motif ekonomi pemerintah pendudukan Jepang yang menemukan tambang mineral di Loge Tangko. Pada awal bekerja, tenaga romusha ini diberi makan tiga kali sehari lengkap dengan lauknya. Pada masa itu mereka diberi jatah beras 250 gram per hari dan jatah lauk seberat 75 gram. Untuk lebih lanjut lihat tabel di bawah ini:

¹⁶²Damhoeri Ghafoer, "Derita Pemuda Sumpur Kudus Masa Pendudukan Jepang", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, 1997), hlm. 5-6.

¹⁶³Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Sejarah Daerah...*, hlm. 194-195.

Tabel 3
Jatah Makan Warga Jepang dengan Tenaga Romusha
(1942-1945)

Penduduk	Jenis Makanan	
	Beras	Lauk
Warga Jepang	550 gram	150 gram
Tenaga Romusha	250	75 gram

Sumber: "Sumatera Gunsei Shuyo Shokuryo Haikyuryo" (*Food Ration in Sumatera Military Administration*) tahun 1970.

Syamsul Anwar menuturkan bahwa tiap pagi, pekerja romusha sarapan dengan sagu sebesar tinju orang dewasa (ogol-ogol sagu), siang dan sore harinya mereka makan nasi. Menu pada siang dan sore hari hanya daun lobak busuk, dicampur garam, dan cabai goreng. Ia memperkirakan jatah beras untuk tenaga romusha sehari tidak lebih sebesar kepalan tangan (200 ons).¹⁶⁴ Sementara tukang masak di dapur umum biasanya diambil dari para pekerja romusha, atau penduduk setempat. Jatah satu orang romusha diberikan satu *sayak* tempurung kelapa (*sonduk*, bahasa Logas). Sedangkan piring tempat makan romusha terbuat dari anyaman bambu yang berbentuk mangkuk.

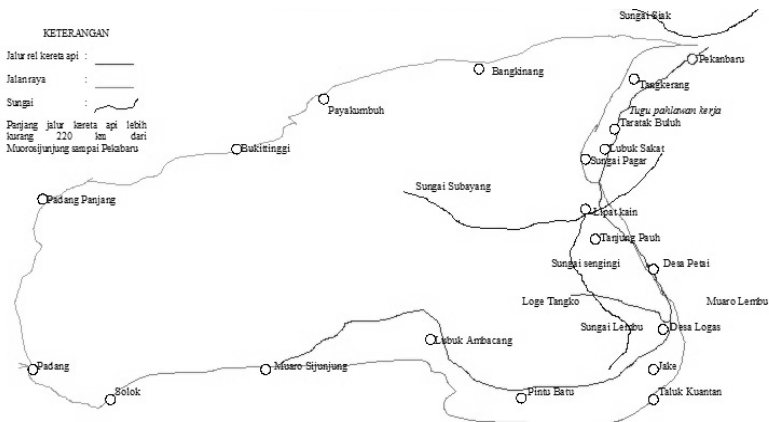
Namun jatah makanan tersebut hanya dirasakan selama tiga bulan. Setelah itu mereka selalu kekurangan, bahkan ada yang tidak diberi jatah makan. Tentara Jepang waktu itu beralasan bahwa tenaga romusha tidak bekerja maksimal, berakibat pada pemotongan jatah makan.

"Coba bayangkan, kayu-kayu yang begitu besar dan berat terpaksa dipikul di atas pundak. Apalagi rawa-rawa yang terdapat di sepanjang jalan kereta api itu mencapai beratus-ratus meter, ditimbun hanya dengan menggunakan cangkul keranjang seadanya. Sebagai imbalan dari kerja keras mereka hanya diberikan

¹⁶⁴Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

makanan sangat sedikit sekali, kadang-kadang malah dikurangi!.”¹⁶⁵

Peta 2 Jalur Kereta Api Dari Sumatera Barat Hingga Desa Logas



Sumber: Diolah dari “Sumatera Gunsei Shuyo Shokuryo Haikyuryo” (Food Ration in Sumatra Military Administration) tahun 1970.

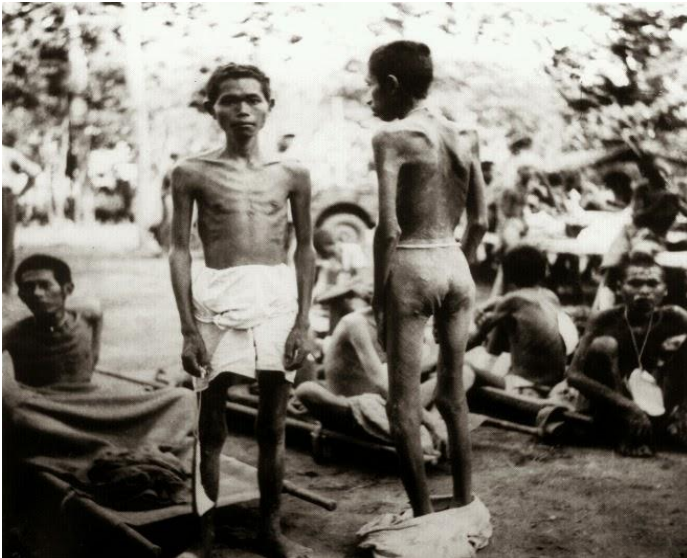
Untuk menutupi laparnya, sore hari mereka mencari cendawan ke hutan, untuk sekedar bertahan hidup dan menambah selera makan. Karena kurangnya pengetahuan cendawan yang boleh dimakan, banyak dari tenaga romusha tersebut mabuk, karena yang mereka konsumsi adalah cendawan nasi.¹⁶⁶ Selain memakan cendawan hutan, ada juga yang memakan buah karet, yang proses pembuatan sebelumnya adalah dipukul, direndam (untuk menghilangkan racunnya), kemudian dibakar. Siksaan fisik, psikis dan minimnya makanan merupakan sebab-

¹⁶⁵ Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

¹⁶⁶ Cendawan yang tidak boleh dimakan adalah berwarna putih dan tumbuh di tanah. Pada malam hari cendawan ini bercahaya. Masyarakat Logas menamakannya cendawan nasi. Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

sebab dari romusha melarikan diri dari kamp Logas. Pekerja yang bisa meloloskan diri, umumnya dalam keadaan menyedihkan.

Ada yang ke Logas untuk membuat jalan kereta api jurusan Muaro-Sijunjung ke Pekanbaru, ada yang ke Teluk Bayur Padang, dan lain-lain. Mereka dipaksa bekerja dan diberi makan tepung ubi kayu dicampur dengan beras kotor. Romusha yang datang dari Jawa banyak yang mati kelaparan dan banyak juga yang melarikan diri mati dalam hutan Lisun.¹⁶⁷



Gambar 9 Romusha di Logas yang sempat melarikan diri ke luar kamp, tapi tertangkap kembali oleh tentara Jepang. Biasanya romusha yang tertangkap itu akan mengalami siksaan fisik yang hebat. *Sumber: Repro dari Iphos.*

Menurut perkiraan setiap bantalan jalan kereta api yang hanya berjarak $\frac{1}{2}$ meter itu adalah satu mayat manusia. Satu kilometer sama dengan 2000 mayat dan bayangkan jarak antara Muaro Sijunjung ke Pekanbaru lebih dari 220 km, sehingga jumlah

¹⁶⁷ Damhoeri Ghafoer, "Derita Pemuda Sumpur Kudus Masa Pendudukan Jepang", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus, 1997), hlm. 2.

korban berkisar 4.400.000 orang. Walaupun telah menelan banyak korban, namun jalan kereta api Muaro Sijunjung ke Pekanbaru tidak kunjung selesai sampai diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia.

C. Sumpur Kudus Masa Revolusi Kemerdekaan

Pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, proses penyebaran berita mengenai munculnya negara Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan ke Sumatera Barat terlaksanatanggal 19 Agustus 1945 atas jasa Moh. Syafe'i. Sementara pengibaran bendera merah putih di Kewedanaan Sijunjung dilaksanakan tanggal 20 Agustus 1945 berdampingan dengan bendera Jepang.¹⁶⁸ Selain itu, Sumpur Kudus pada awal kemerdekaan merupakan bagian dari Kabupaten Tanah Datar yang meliputi Tanah Datar, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto, dan Sijunjung.

Pengibaran bendera merah putih yang berdampingan dengan Hinomaru mendapat teguran keras dari Amir Jamin (putra Kubang bekas Opsir Giyu Gun). Ia menegaskan bahwa bendera Jepang harus diturunkan, sehingga Merah Putih saja yang berkibar. Sebelum penurunan bendera Jepang, menurut Mansur memang ada silang pendapat antara Amir Jamin dengan Kepala Nagari. Sementara itu, pengibaran Merah Putih di stasiun kereta api Sawahlunto dilaksanakan atas perintah Kepala Stasiun kereta api Sawahlunto. Sedangkan di Sumpur Kudus pengibaran Merah Putih dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945.¹⁶⁹ Pasca proklamasi kemerdekaan seluruh perhatian masyarakat Sumpur Kudus banyak tersedot untuk mempertahankan kemerdekaan. Meskipun

¹⁶⁸Pada tanggal 20 Agustus 1945 oleh pemimpin-pemimpin dan pemuda Sijunjung yang dipimpin Ramli Marzuki dan Ibrahim (orang Bengkulu) membicarakan dengan Gunco Sijunjung Yoenoes untuk mengibarkan bendera merah putih. Pada tanggal 21 Agustus 1945 pemuda-pemuda Sijunjung mengibarkan Merah Putih di depan rumah controleur Sijunjung atau tepatnya di pasar Inpres Sijunjung. Petugas yang mengibarkan bendera ini adalah Nazarumin. *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 14.

¹⁶⁹Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

demikian mereka mulai menata kehidupan dengan menghidupkan kembali pusat perekonomian yang ada di tingkat nagari. Bila dibandingkan dengan Silantai, nagari Sumpur Kudus memang agak tertinggal. *Pertama*, Silantai merupakan daerah perbatasan yang menghubungkan antara Sijunjung dan Lintau (Tanah Datar). *Kedua*, perhubungan daerah Sumpur Kudus dengan Muaro Sijunjung cukup sulit karena sarana yang ada adalah jalan tanah.



Gambar 10 dari kiri ke kanan Khatib Sulaiman dan Ismail Lengah. Kedua tokoh ini memiliki jasa besar dalam pembentukan BKR di Sumatra Barat pada umumnya dan Kewedanaan Sawahlunto dan Sijunjung.

Sumber: Koleksi Museum Gedung Joang 45 Sumatera Barat

Tidak mengherankan, bila dalam literatur dan arsip-arsip mengenai revolusi kemerdekaan, yang banyak dibicarakan adalah Sijunjung dan Sawahlunto. Nama nagari Sumpur Kudus kembali mengemuka saat Republik Indonesia dihadapkan dalam situasi

darurat militer, yakni Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1945 diadakan rapat di Bukittinggi di bawah pimpinan Moh. Syafe'i dengan hasil keputusan rapat bahwa setiap Kewedanaan dibentuk pula Pemuda Republik Indonesia (PRI).¹⁷⁰ Pada tanggal 29 Agustus 1945 para pemimpin Sumatera Barat antara Khatib Sulaiman - Abdullah dan Ismail Lengah mengadakan rapat di Padang dengan hasil keputusan rapat, yakni pembentukan Balai Penerangan Pemuda Indonesia (SPPI); di daerah-daerah dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang disponsori oleh para Giyu Gun yang dipulangkan oleh tentara Jepang.

Sejak dikeluarkannya hasil keputusan rapat PRI, Ismail Lengah mengirim sepucuk surat yang ditujukan pada Amir Jamin (kewedanaan Sawahlunto) dan Zainal Arifin Badu (kewedanaan Sijunjung). Kedua orang ini merupakan eks tentara Giyu Gun yang ditunjuk untuk membentuk BKR di Sawahlunto dan Sijunjung. Berikut susunan pengurusnya di Kewedanaan Sawahlunto dan Sijunjung:

Kewedanaan Sawahlunto

Ketua	: Amir Jamin
Wakil Ketua	: Harun Rajo Sampono
Seksi Kota Sawahlunto	: Karnalis
Seksi Talawi, Kolok, Sijantang	: Boer Yoesoef
Seksi Padang Sibusuk, Bt.Manjulur, Pamuatan	: Mak Illa
Seksi Ma. Bodi, Palangki	

¹⁷⁰Beberapa keputusan dari PRI itu adalah membentuk susunan pengurus di Sawahlunto dan Sijunjung. *Pertama*, untuk Kewedanaan Sawahlunto dibentuk oleh Amir Jamin dengan menggunakan tenaga-tenaga Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang mengkoordinir para pemuda yang ada di Nagari-nagari seperti di Talawi, Kolok dan Sijantang yang dikoordinir oleh : Boer Yoesoef, Syamsu Anwar (Sumpur Kudus), Bahaoeddin dan Ramli Tuan Malin. *Kedua*, untuk Kewedanaan Sijunjung diketuai oleh Ahmadsyah Sampono Alam dengan Wakil Ketua Oemar Bey, dan anggota Zainuddin Daud, Chaidir Anwar, Boer Said, Hasnam Hasan, dan Zainal Arifin Badu. *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 16.

Koto Baru, Kabun :M. Mardamin Dt. Kali Majo Dunia
Seksi Silungkang : Agoesmar dan Alibi
Seksi Kubang dan Lunto : Amir Jamin¹⁷¹

Kewedanaan Sijunjung

Ketua : Zainal Arifin Badu
Wakil Ketua I : A. Hamid
Wakil Ketua II : Moechtar Boecok
Juru tulis : Naza K.G
Seksi Sijunjung :Syamsudi Panai
dan Syamsu Anwar
Seksi Tanjung Ampalu : Bermawi dan Mursal.¹⁷²

Setelah BKR terbentuk, anggota yang berasal dari eks Giyu Gun, Heiho, Seinendan, dan para pemuda lainnya di asramakan di beberapa lokasi. *Pertama*, untuk Kewedanaan Sawahlunto seluruh anggota BKR diinapkan di Air Dingin dan Pondok Kapur. *Kedua*, untuk Kewedanaan Sijunjung diasramakan di penginapan "Ichwan" milik AR.DT. Rajo Palembang, bekas Gudang padi Jepang, danrumah bekas Controleur, serta di Tanjung Ampalu. Adapun tokoh Sumpur Kudus yang masuk dalam BKR antara lain Syamsul Anwar, Imin Dt. Pdk Sirajo, dan Hasan Basri.

Badan Keamanan Rakyat (BKR) Sijunjung resmi terbentuk tanggal 23 Agustus 1945, terpilih Zainal Arifin Badu (komandan pleton) dengan dibantu oleh empat orang seksi yaitu:

- a. Seksi I : Letnan dua (Letda) Bermawi asal Tanjung Ampolu.
- b. Seksi II : Letnan Muda Mursal (Sumpur Kudus).

¹⁷¹Pada saat itu yang menjadi Demang Sawahlunto N. Dt. Rajo Itam, asal Sungai Jambu Tanah Datar, Kepala Polisi Darwin Karim, Kepala Tambang Batubara Ombilin Roesli, Kepala Rumah Sakit masih dipegang oleh Jepang Kaneko dan dr. Koode dan Penghulu Dagang/Pasar St.Badarun asal Tanjung Ampalu. Syamsul Anwar, wawancara, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

¹⁷²*Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/Sijunjung...*, hlm. 16.

- c. Seksi III : Letnan Muda Syamsudan Panai (Sijunjung)
- d. Seksi IV : Serson Mayor A. Hamid.

Setelah BKR Sijunjung terbentuk, setiap komandan kompi bertugas untuk mengkoordinasikan pasukannya mencari gudang-gudang Jepang yang berisi perbekalan perang maupun untuk keperluan tambang batu bara. Beberapa kegiatan yang dilakukan tentara BKR Sawahlunto antara lain:¹⁷³

1. Mencuri mesiu di gudang Ombilin. Untuk melaksanakan taktik ini, Anwar membuat kunci ganda untuk mengambil mesiu yang masih tersimpan. Setelah mesiu ini diperoleh Kapten Yasin dan Janun mencoba untuk merakit bom dibantu oleh beberapa orang, di antaranya Danas Wahab, Azwar Hamid, Syamsudin dan Syamsu Anwar.

Dalam percobaan merakit bom ini terjadi kecelakaan, dimana Anwar menjadi korban. Sementara itu, tentara Jepang yang masih bemarkas di Gereja Sawahlunto sudah dikepung tentara BKR. Untuk mempersempit ruang gerak dan melemahkan perlawanan tentara Jepang, mereka memblokade fasilitas air, listrik, sayur-sayuran. Akibatnya, tentara Jepang mencoba melarikan diri dengan menembus dinding Gereja melewati toko Cina yang berada di sebelahnya.

¹⁷³ *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/Sijunjung...*, hlm. 17-18.



Gambar 11 Hasan Basri, salah seorang tokoh penting Silantai Sumpur Kudus yang pernah tergabung dalam BKR. *Sumber:* Dokumentasi Keluarga Hasan Basri

2. Pada tanggal 11 Nopember 1945, Amir Jamin didesak oleh anggota BKR dan PRI, supaya cepat merebut kedudukan dan senjata tentara Jepang yang berada di Gereja. Amir Jamin dan Abdul Majid Rasad pun melakukan perundingan dengan Jepang dengan hasil keputusan sebagai berikut: Jepang tidak akan perang lagi; dalam tempo 15 hari Jepang harus meninggalkan Sawahlunto; blokade terhadap Jepang di Gereja dihapuskan aliran lisrik, air dan sayur-sayuran dipulihkan kembali; dan Jepang memberikan enam pucuk Kraben ex tentera Belanda kepada tentara BKR dan PRI. Walaupun tentara Jepang telah meninggalkan Sawahlunto dan Sijunjung, tetapi dua orang dokter asal Jepang tetap tinggal di

Sijunjung dengan alasan mereka sudah menyatu dengan rakyat Sawahlunto. Nama mereka adalah dr. Kaneko dan dr. Koodo tetapi berangkat juga ke Padang dengan kereta api.¹⁷⁴



Gambar 12 Anggota Badan Keamanan Rakyat asal Kewedanaan Sijunjung. Pada masa awal kemerdekaan, mereka bertugas untuk merebut objek vital dan perlengkapan senjata eks Belanda dan tentara Jepang. Sumber: Koleksi Gedung Joang 45 Sumatra Barat

Sementara itu untuk membantu pelaksanaan pemerintah di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dibentuklah Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dengan ketuanya Darwin Karim (asal Kepolisian) wakilnya adalah Parapat. Tidak berapa lama kemudian Darwin Karim digantikan oleh Yasin yang sebelumnya menjabat *Opzichter* listrik tambang Ombilin. Turut juga menjadi anggota persenjataan Azwar Hamid dengan pangkat Letnan I dan Marahimin berpangkat Kapten.¹⁷⁵

Sama halnya dengan Kewedanaan Sawahlunto, Sijunjung juga melakukan aksi merebut senjata api dari gudang senjata di

¹⁷⁴Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

¹⁷⁵Intan Sari Dt. Mugek Parajan, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

Muaro Sijunjung. Namun saat mereka beraksi hanya beberapa pucuk senjata saja yang bisa dikeluarkan karena ketahuan tentara Jepang. Akibat peristiwa ini dua orang anggota BKR ditembak, yakni Makdore dan Sitam. Pada tanggal 25 September 1945 anggota PRI ranting Muaro Sijunjung kembali berusaha merebut senjata dan sarana perlengkapan dengan cara:

1. Mencuri senjata-senjata di Asrama *Butai* Gudang Balok stasiun Muaro. Anggota-anggota PRI yang terlibat antara lain Sulaiman Pokieh Bagindo, Dinar Rajo Nan Sati, Samod Pono Malin, Amir R, Mak Nyomin Jambek, Ilyas, Haji Maknu, M. Yasir Tinggi, Agus Salim, dan M.Yosiri St. Bagindo.
2. Memperalat perempuan-perempuan simpanan (*geisha*) perwira Jepang.
3. Senjata eks tentara Belanda yang disimpan di Kantor Polisi Sijunjung, kemudian diserahkan pada BKR dan PRI.
4. Melaksanakan strategi tipu muslihat, di mana seolah-olah perang tetapi kedua belah pihak menembak ke atas. Jepang seakan bertekuk lutut dan menyerahkan 90 pucuk senjata, peluru, dinamit, karbit dan kain berbal-bal disita.
5. Langkah berikutnya untuk memperoleh senjata ialah dengan jalan membunuh dua orang tentara Jepang oleh Syamsu Anwar (asal Sumpur Kudus), Baharuddin Cibi (asal Palangki), dan Ahmad (asal Padang Sibusuk), M. Satar, M. Aras Sati, Siri Intan Rajo, Jamaluddin Janggut, Bilal Suki, dan Ali Sunar (asal Muaro Bodi).¹⁷⁶

¹⁷⁶Menurut penuturan Mansur Dt. Paduko Marajo, bahwa peristiwa itu bermula pada bulan Oktober 1945, PRI Muaro Bodi meperoleh informasi bahwa 2 (dua) orang tentera Jepang sedang berada di kenagarian Palangki, mereka hendak kembali ke tempatnya di Kampung Muaro dengah melalui jalan Muaro Bodi, mereka memiliki senjata pistol dan bayonet. Atas anjuran Syamsu Anwar yang memandu tentera Jepang itu sebaiknya dirampas, saja pistol dan bayonetnya guna melengkapi senjata BKR. Maka sepuluh orang pemuda berangkat dengan membawa tombak. Setelah dua orang tentera Jepang itu dengan dipandu oleh Syamsu Anwar sampai di tempat yang telah ditentukan semula, pemuda-pemuda tersebut di atas serentak keluar dari persembunyiannya dan menghadang kedua tentera Jepang itu. Kedua tentera Jepang jadi terkejut dan Syamsu Anwar menikam perut tentera Jepang yang ada di dekatnya. Sedang seorang tentera lagi ditikam pula peutnya oleh M. Satar. Tentera

Sejak kejadian pembunuhan dua orang tentera Jepang di Aur Duri jalan menuju hutan rimba Gaboyo berubah namanya menjadi Aur Jepang. Beberapa hari setelah kejadian itu, datang sepasukan tentera Jepang ke Palangki dan Muaro Bodi untuk menyelidiki dan mencari temannya yang hilang, namun peristiwa pembunuhan itu dirahasiakan masyarakat Muaro Bodi. Pasca kejadian pembunu-han itu, tanggal 30 September 1945 tentara Jepang berdatangan ke Palangki dan Muaro Bodi untuk melampiaskan kemarahannya. Mereka melemparkan dinamit dan granat tangan, bahkan ada yang melemparkan bom ke dalam sungai batang Palangki. Namun kenyataannya, tidak demikian karena alat-alat peledak itu diledakkan ditempat yang dangkal dan diantaranya dilemparkan ke tepian mandi dekat Masjid Muaro Bodi.¹⁷⁷

Pasca bertransformasinya BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), seluruh anggota TKR resmi ditarik ke Batusangkar, sehingga tentara kewedanaan Sijunjung tidak ada lagi yang tinggal hanya Polisi Tentara (PT) yang dipimpin Sersan Mayor Mohd. Yunis. Pada tanggal 24 Februari 1946 TKR kembali berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Disisi lain pada tanggal 31 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sijunjung yang pengurusnya terdiri dari:¹⁷⁸

Ketua I : Ahmadiyah Sompono Alam.

Ketua II : Rustam Thaib

Sekretaris : Nursiah Susun

Anggota : 1. Haji Mohd. Syafei (Padang Laweh)
2. Marah Tayab (Sumpur Kudus)
3. A. Ranin Dt. Sinaro Kayo (Sijunjung)

Jepang mendengar temannya yang meraung kesakitan ia kembali mendekati temannya serta menelukupi temannya itu. Pada waktu itulah anggota BKR dan RPI mengeroyok tentera Jepang itu dan berhasil kedua tentera Jepang itu dibunuh. Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

¹⁷⁷ Intan Sari Dt. Mugek Parajan, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

¹⁷⁸ *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 20-21.

4. AR. Dt. Rajo Palembang (Sijunjung)
5. Umar Arbay (Payakumbuh)
6. Soelaiman Khatib (Tanjung Ampalu)
7. Sirajuddin Saidi, dan lain-lain.

Anggota-anggota KNID Sijunjung pada umumnya terdiri pengurus dan panitia partai-partai politik seperti: Masyumi (anggota istimewa Muhammadiyah), Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI), Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), Partai Politik Tarekat Islam (PPTI). Setelah KNID terbentuk, masing-masing partai membentuk barisan-barisan perjuangan yang bertugas membantu TRI yang masih minim jumlah pasukannya. *Pertama*, Masyumi dan Muhammadiyah membentuk barisan Hizbullah yang dipimpin Amir Wahid. *Kedua* PSI tidak membentuk barisan, namun partai yang didirikan PM Sjahrir itu membentuk sistim ronda yang anggotanya diberdayakan dari eks Seinendan dan Keibodan. *Ketiga*, PKI membentuk barisan Tentara Merah Indonesia (TEMI) dipimpin oleh Abd. Muis. *Keempat*, MTKAAM membentuk barisan Hulubalang dipimpin oleh M. Yusuf Dt. Rajo Nan Gadang (Muaro) sebagai Letnan dan Abd. Muis Duasid sebagai Letnan Muda serta Basri Karang Ameh dan Makmun Sampono Batuah. *Kelima*, PPTI membentuk barisan Tentara Allah (BATA) yang dipimpin M. Jinis Dt. Manggung.¹⁷⁹ Selain dibentuknya barisan perjuangan, juga dibentuk Pengawas Makanan Rakyat (PMR) untuk Kewedanaan Sijunjung. Badan logistik ini bertugas mengatur dan memenuhi permintaan tenaga bersama, serta senjata untuk dikirim ke front pertempuran Padang Area.¹⁸⁰

¹⁷⁹Semua barisan di atas dikoordinir oleh *Volks Front* yang kemudian menjadi Dewan Perjuangan dengan susunan pengurus: Merah Sabirin (Ketua), Chaidir Anwar Hasan (Sekretaris I), Abd. Rivai Khatib Kayo (Sekretaris II), Chaidir Anwar (Bendaharawan). Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 22.

¹⁸⁰Untuk pertama kali barisan yang dikirim dalam pertempuran Padang Area adalah barisan Hizbullah kemudian dikirim pula barisan TEMI (Tentera Merah Indonesia) sebagai ganti Hizbullah, selanjutnya dikirim Barisan Tentara Allah (BATA), Barisan Hulubalang dan Lasymi (Lasykar Muslimin Indonesia) mendapat giliran dua kali sedangkan barisan Hizbullah karena anggotanya banyak.

Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadilah Agresi Militer I, di mana Belanda ingin memperluas daerah teritorialnya. Pada bulan Agustus 1947 kesatuan-kesatuan dari barisan-barisan perjuangan Hizbullah, Sabilillah, Lasymi, Hulubalang asal Kewedanaan Sijunjung digabungkan seluruhnya dalam Legiun Syahid dibawah pimpinan Letkol Syarif Usman. Pada bulan Nopember 1947 Legiun Syahid menyatu dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi resimen Istimewa Komandemen Sumatera.¹⁸¹ Anggota Resimen Istimewa Komandemen Sumatera yang tidak termasuk dalam susunan ketiga batalyon itu dikembalikan ke masyarakat dan mereka meneruskan perjuangan dalam BPNK.



Gambar 13 Anggota logistik di nagari Sumpur Kudus yang bertugas untuk mengumpulkan makanan dan pakaian yang dibutuhkan oleh barisan tentara pada peristiwa Padang Area tahun 1947.

Sumber: dokumentasi Intan Sari Dt. Mugek Parajan.

¹⁸¹Pada tanggal 2 Februari 1948 resimen Istimewa Komandemen Sumatera dibubarkan dan tiga Batalyon digabungkan dalam Divisi IX. Ketiga batalyon yang berasal dari resimen Istimewa Komandemen Sumatera dimasukkan ke dalam resimen VI/ Divisi IX di bawah pimpinan Mayor Kemal Mustafa untuk sektor Utara. Ketiga batalyon tersebut adalah: Batalyon III dibawah pimpinan Letnan Satu Maksum, Batalyon IV dibawah pimpinan Letnan Satu Abu Bakar, dan Batalyon V dibawah pimpinan Letnan Satu Syuib Ibrahim. Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 24-26.

Rekasi terhadap Agresi Militer I hanya terjadi ketika peristiwa Padang Area meletus dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Kewedanaan Sijunjung dan Nagari Sumpur Kudus. Menurut Mansur, dalam menghimpun kekuatan menghadapi agresor, rakyat Sumpur Kudus dan Silantai pada September 1947 mengimpun bantuan logistik yang akan di bawa oleh barisan-barisan tentara ke Padang. Sumbangan yang dikumpulkan dalam bentuk natura, pakaian, dan uang. Namun dari beberapa sumbangan yang dihimpun, pada umumnya yang dibawa ke Padang oleh bagian logistik adalah makanan. Masing-masing koordinator yang bertugas baik di Kewedanaan Sijunjung dan Sawahlunto setiap hari melakukan kontrol dan mengarahkan anggotanya datang dari rumah ke rumah untuk meminta bekal ransum.¹⁸²

Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di Kewedanaan Sawahlunto dan Kewedanaan Sijunjung adalah meningkatkan kewaspadaan dan persiapan untuk menghadang serangan Belanda. Menurut Intan Sari, bahwa di nagari Sumpur Kudus dan Silantai diperintahkan untuk merekrut para pemuda untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersiap-siap untuk menjaga kemungkinan serangan Belanda.¹⁸³ Meskipun pada tahun 1947 belum terbentuk Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK), namun pemuda-pemuda yang berusia mulai 15 tahun itu secara sukarela melakukan patroli di Sumpur Kudus dan Silantai.

¹⁸²Mansur Dt. Rajo Penghulu, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

¹⁸³Intan Sari Dt. Mugek Parajan, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di nagari Silantai.

BAB IV

MENGUAK LEMBARAN YANG HILANG: PEMERINTAH DARURAT DI NAGARI SUMPUR KUDUS TAHUN 1948-1949

A. Sumatera Barat Diambang Agresi Militer Belanda II

1. Bermula dari Agresi Belanda II di Yogyakarta

Bicara mengenai perjalanan Sjafruddin Prawiranegara, perangkat menterinya, beserta tentara yang membawa stasiun radio sender, tidak bisa dipisahkan dari kisah perjuangan mereka keluar dari Bidar Alam. Urgennya mengungkap hubungan historis perjalanan Ketua PDRI dan perangkatnya dari Bidar Alam menuju Sumpur Kudus sering luput dari pantauan sejarawan. Hampir seluruh literatur yang bicara tentang PDRI, lebih banyak menyorot keberadaan PDRI di Halaban, Koto Tinggi, dan Bidar Alam, namun agak “alpa” melihat perjalanan Sjafruddin Prawiranegara di Calau, Sumpur Kudus, dan Silantai.

Pada bagian ini akan diawali dengan proses awal terjadinya PDRI yang bermula dari tanggal 19 September 1948, ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II tepatnya pukul 06.00 pagi. Serangan ini dilakukan oleh pihak Belanda sebagai serangan terakhir dengan tujuan menghancurkan Republik Indonesia. Dengan pasukan lintas udara, serangan langsung di tuju ke ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo

dapat dikuasai Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta.¹⁸⁴

Dengan keberhasilan ini, Belanda beranggapan bahwa mereka mudah menduduki dan melumpuhkan ibu kota Republik Indonesia. Dengan adanya Agresi Militer II ini, secara fisik Belanda berhasil menangkap dan menawan Presiden Soekarno yang diterbangkan ke Prapat dan kemudian dipindahkan ke Bangka, Wakil Presiden Mohammad Hatta yang diasingkan di Bangka, dan beberapa petinggi lainnya seperti Agus Salim (Menteri Luar Negeri), Mohammad Roem dan beberapa menteri lainnya.

Sebelum para petinggi Republik Indonesia ini ditawan oleh pihak Belanda, mereka mengadakan Sidang Kabinet¹⁸⁵ dan mengambil sebuah keputusan untuk memberikan mandat melalui radiogram yang akan dikirimkan kepada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera. Mandat atau materi kawat ini dikirim pada menit-menit terakhir sebelum Soekarno-Hatta ditawan. Mandat tersebut berisikan agar Mr. Sjafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Adapun teks kawat pertama berbunyi :

Mandat Presiden Soekarno/wakil Presiden Hatta kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara.

Kami Presiden Republik Indonesia memberita-hukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah mulai serangnja atas Ibu Kota Djogjakarta.

¹⁸⁴Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*. (Jakarta: Grafiti Press, 1997), hlm. 10.

¹⁸⁵Sesuai dengan rencana awal dalam Sidang Kabinet tanggal 19 Desember 1948 bahwa seluruh kekuatan TNI yang masih ada di Yogyakarta diperintah kan keluar kota untuk melakukan gerilya. Angkatan perang yang telah membagi wilayah pertahanan Republik menjadi dua komando, yaitu Jawadan Sumatera, siap melaksanakan rencana di bidang pemerintahan tersebut. Ahmad Husein, dkk. *Sejarah Perjuangan pergerakan RI di Minangkabau/Riau 1945-1950*. (Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minang-kabau (BPSIM), 1991), hlm. 25-36.

Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewadajibannya lagi, kami menguasai pada Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra.¹⁸⁶

Dengan tertangkapnya para petinggi Republik Indonesia, lantas tidak berarti bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berakhir. Pada umumnya tentara Republik tidak dapat memahami alasan menyerahnya para politisi sipil pada Belanda sementara para prajurit mengorbankan jiwa mereka demi Republik. Seluruh kekuatan TNI yang ada di Yogyakarta diperintahkan keluar kota untuk bergerilya. Pasukan-pasukan Republik mengundurkan diri ke luar kota-kota dan memulai perang gerilya secara besar-besaran di kedua belah garis van Mook.¹⁸⁷ Selain materi Kawat yang dikirimkan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim mengirim Kawat kedua kepada Dr. Soedarsono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis di New Delhi yang berbunyi sebagai berikut :

Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, jam 06.00 pagi, Belanda mulai seranagannya atas Ibu Kota Djogjakarta. Djika iktiar Mr. Sjafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada Saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di India. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Sjafrudin Prawiranegara di Sumatra.

¹⁸⁶ Lebih lanjut lihat Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, sebuah Biografi* (Jakarta: Inti Dayu Press, 1986). Lihat juga dalam Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*. (Bandung: Salmadani Pustaka, 2010), hlm. 206.

¹⁸⁷ A.H Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*. (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 135. Lihat juga dalam M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: UGM Press, 1999), hlm. 347.

Djika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan seperlunya.¹⁸⁸



Gambar 1 Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara yang memiliki peran signifikan dalam usaha penyelamatan NKRI. Bahkan, selama pemerintahannya Sjafruddin tidak pernah memakai gelar “Presiden” di depan namanya. **Sumber:** www.republika.co.id

Materi Kawat atau radiogram itu rupanya tidak pernah diterima oleh Mr. Sjafrudin, hal ini diperkirakan bahwa dalam keadaan darurat itu menuntut mobilitas yang tinggi dengan berpindah-pindah kedudukan yang dimaksudkan untuk menghindari serangan dari lawan. Kekhawatiran inilah yang menyebabkan Hatta mengirimkan radiogram kepada Soedarsono, A.N. Palar, A.A. Maramis. Namun, kontroversi mengenai sampai tidaknya radiogram itu berhenti pada tanggal 22 Desember 1948, ketika di Desa Halaban Payakumbuh diadakan rapat dengan beberapa tokoh, yang akhirnya memutuskan untuk membentuk

¹⁸⁸ Lebih lanjut lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2...*, hlm. 266.

Pemerintah Darurat. Mr. Syafoeddin Prawiranegara, terpilih sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).¹⁸⁹

Pada tanggal 31 Maret 1949 berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Setelah terbentuknya PDRI, Mr. Sjafrudin Prawiranegara segera membentuk susunan kementriannya sebagai berikut :

Ketua dan Menteri Pertahanan dan Penerangan	: Mr.Sjafrudin Prawi- ranegara
Wakil Ketua dan Menteri Kehakiman	: Mr. Soesanto Tirtoprodjo
Menteri Luar Negeri	: Mr. A.A. Maramis
Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan	: Dr. Soekiman Wirjosan- djojo
Menteri Keuangan	: Mr. Loekman Hakim
Menteri Kemakmuran dan Pengawasan Makanan Rakyat	: IJ. Kasimo
Menteri Agama	: K.H. Masjkoer
Menteri P dan K	: Mr. Teuku Moh. Hasan
Menteri Perhubungan	: Ir. Inderatjaja
Menteri Pekerdjaan Umum	: Ir. Mananti Sitompul
Menteri Perburuahan dan Sosial	: Mr. St. M. Rasjid
Pejabat di bidang militer:	
Panglima Besar Angkatan Perang RI	: Letnan Jend. Sudirman
Panglima Tentara & Teritorium Jawa	: Kol. Abd Haris Nasution
Panglima Tentara & Ter. Sumatera	: Kol.R.Hdyt Martaatmadja
Kepala Staf Angkatan Laut	: Kol. Moh. Nazir
Kepala Staf Angkatan Udara	: KomUdaraHubert Suyono
Kepala Kepolisian Negara	: Kombes Polisi Umar Said

¹⁸⁹ Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, sebuah Biografi...*, hlm. 90.



Gambar 2 Suasana Agresi Militer II, dimana tentara Belanda berhasil meringkus pihak yang dianggap spionase. **Sumber:** www.republika.co.id

2. Agresor Memasuki Kewedanaan Sawahlunto

Agresi Belanda II ini tidak saja terkonsentrasi di Jawa, namun juga meluas di setiap nagari di Sumatera Barat, termasuk di Kawedanaan Sijunjung dan Nagari Sumpur Kudus. Pada tanggal 24 Desember 1948 situasi semakin mencekam. Badan Pengawal Nagari/Kota (BPNK)¹⁹⁰ pun menggelar rapat dengan pimpinan

¹⁹⁰BPNK sudah terbentuk saat terjadinya Agresi Militer I. Namun badan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang dikemukakan oleh Khatib Sulaiman yaitu sebagai badan pertahanan yang terendah yang dapat mengamankan rakyat nagari. Selain itu mereka bertugas sebagai pelindung masyarakat dari tentara Belanda. Selain itu BPNK ini juga bertugas untuk mengumpulkan pembekalan, yang dipungut dari masyarakat dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan.

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I, pada tanggal 27 Juli 1947 Residen Mr. Sutan Mohd Rasyid dan Komandan Divisi IX Banteng Ismail Lengah menghimpun seluruh pemimpin-pemimpin rakyat, para pemuda, dan pemimpin partai. Dalam pertemuan tersebut residen meminta supaya langkah perjuangan untuk disatukan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dalam pidatonya Drs. Moh. Hatta kembali menekankan penting adanya satu komando. Pada tanggal 30 Juli 1947 terbentuklah Front Petahanan Nasional (FPN) yang diketuai Buya Hamka, sekretarisnya Chatib Sulaiman. Kemudian FPN berhubungan langsung

Kapten Zainuddin Tembak di Surau Batu Pahat Aur Gading, untuk membentuk front-front pertempuran, di antaranya: Batu Arang dengan komandan Letda Salim Halimi. Front Batu Arang area tempurnya meliputi aliran sungai Ombilin - Talawi - Sawahlunto - Palangki - Muaro Bodi dan Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII.

Pada tanggal 27 Desember 1948 Camat Koto VII Rustam Effendi membentuk Dewan Pertahanan KotoVII. Anggota dari badan ini berasal dari masing-masing nagari se-Kecamatan Koto VII. Tanggal 28 Desember 1948 atas perintah Zainuddin Tembak, semua rakyat dipinggir jalan besar antara Batu Gadang sampai Batu Balang (Sijunjung) diperintahkan supaya mengungsi kepedalaman karena tentara Belanda akan memasuki Tanjung Ampalu Kecamatan Koto VII.

Untuk melakukan penghadangan, seluruh pemuda revolusioner dipersiapkan untuk melakukan Perlawanan Rakyat Semesta (*people defiance*). Kelompok pemuda di Kawedanaan Sijunjung terdiri dari dua kelompok, yakni pemuda yang tergabung dalam pemuda gerilya dan BPNK. Menarik, bila sebelumnya menelaah lebih awal mengenai proses berdirinya BPNK di Sijunjung. BPNK didirikan pada akhir bulan Juli 1948 oleh DPD Sumatera Barat. Pembentukan BPNK jilid dua ini merupakan realisasi dari aturan hukum DPD sebelumnya, yakni Peraturan Nomor: 15/DPD/P-1947. Sedangkan syarat keanggotaan dari BPNK adalah masyarakat umum yang telah dewasa atau berusia 17 sampai dengan 35 tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Mansur Datuk Penghulu Mudo:

Yang manjadi anggota BPNK ko kasado pemuda yang lah baumua 17 tahun kaateh sajo nyo paliang tuonyo umua 35 tahun atau kalo lai namuah yang lah basikola di SMP buliah sajo masuk manjadi anggota untuk mampatahan nagori surang-surang, karano dek kito maraso mamiliki nagori ko nan lah mardeka katiko Balandu masuak untuk manjajah baliak.¹⁹¹

dengan Dewan Pertahanan Daerah (DPD) yang akan mengkoordinir anggota Badan Pertahanan Nagari dan Kota (BPNK). Lebih lanjut baca *Propinsi Sumatera Tengah* (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953) hlm.173- 175

¹⁹¹Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

Terjemahan:

“Yang menjadi anggota BPNK semuanya pemuda yang berumur 17 tahun ke atas saja, paling tua berumur 35 tahun atau mereka yang sekolah di SMP boleh juga masuk menjadi anggota mempertahankan nagari, karena kita merasa memiliki nagari yang telah merdeka, ketika Belanda masuk untuk menjajah kembali.”

Pemuda-pemuda yang memenuhi persyaratan selanjutnya dilatih semi militer seperti tentara Republik. Anggota BPNK ini selanjutnya dilatih selama dua minggu. Setelah mampu bertempur, anggota BPNK kembali ke nagari masing-masing untuk selanjutnya menjaga nagari. Setelah itu anggota BPNK tersebut diseleksi kembali, untuk ikut bergerilya bersama TRI. Perpaduan dua badan ini selanjutnya dinamakan Pasukan Mobil Teras (PMT). Berdirinya PMT tersebut merupakan realisasi rapat partai-partai se-Sumatera Barat yang berlangsung tanggal 26 Maret 1949.

“Tentang : Pembentukan Pasukan Mobil Teras

B.P.N.K.

1. Untuk memperkuat susunan perjuangan dan pertahanan rakyat semesta (Total people's defence), perlu diadakan penyusunan baru dari pertahanan dan pembelaan rakyat di samping adanya angkatan perang. Penyusunan baru BPNK ini harus sesuai dan sejalan dengan taktik strategi pertahanan negara umumnya yang mempunyai perhubungan rapat dengan angkatan perang dalam melancarkan perjuangan kemerdekaan dan menyesuaikan revolusi nasional, baik dalam hubungan kecil atau besar.
2. Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh para anggota staf Gubernur Militer, para anggota penasehat dalam...”¹⁹²

¹⁹² Lebih lanjut lihat *SK Gubernur Militer Sumatera Barat No 24/G.M/Instr tahun 1948*.

Kelompok pemuda revolusioner ini siap sewaktu-waktu dikirim ke front pertempuran, sedangkan kelompok BPNK tetap mengadakan penjagaan dan sewaktu-waktu menghadapi kegiatan musuh-musuh, anti spionase karena tentara Belanda sebelum melakukan aksinya, telah mengirimkan mata-matanya seperti *Intelijen Dienst* (ID). Pasukan eksrimis/gerilya dalam kecamatan Koto VII yang terdiri dari nagari V Koto, Palaluar dan Padang Laweh dibagi atas front-front. *Pertama* Front I meliputi Tanjung Ampalu sampai Padang Sibusuk dengan komandannya Abbas. *Kedua*, Front II meliputi Pulaluar sampai Buluh Rotan dengan komandannya Bahrumsyah. *Ketiga*, Front III meliputi Tanjung dan Ladang Cengkeh sebagi komandannya Kaharuddin. *Keempat*, Front IV meliputi Padang Laweh dan Manggih Banyak sebagai komandannya A. Wahid.¹⁹³

B. Front Pertempuran Meluas ke Sijunjung

1. Penyergapan di SD 1 Tanjung Ampalu

Pada tanggal 1 Januari 1949 tentara Belanda bergerak dari Sawahlunto menuju ke Sijunjung. Namun karena melewati jalan yang salah, tentara Belanda meneruskan perjalanannya ke Muaro Bodi. Di daerah ini tentara Belanda hampir berpapasan dengan pasukan tentara Republik yang kembali dari Kumanis. Dari informasi yang mereka terima dari mata-mata, bahwa tentara Belanda akan bermalam di Tanjung Ampalu, tentara Republik pun menyusun strategi penyerangan di dua tempat.¹⁹⁴

- a. Rapat di rumah Dt. Mantiko Reno Tanjung Cerek pukul 19.00 dibawah pimpinan Camat Militer Rustam Effendi.

¹⁹³Ke empat front tersebut di atas berada di bawah Komandan Sektor Letnan Dua Bermawi Zen, yang anggotanya dari tiap-tiap front Padang tanggal 31 Desember 1948 tentara Belanda telah memasuki Kota Sawahlunto, pemuda ekstrimis/gerilya diperintahkan ke front Kupitan, Muaro Kalabanterus ke Bukit Sawahlunto, Pemudaekstrimis/gerilya I, III dan IV dikerahkan ke Kupitan dan pemuda gerilya II bersama pemuda revolusioner Pamuatan, Muaro Bodi dan Palangki ke Bukit sebelah atas RSU Sawahlunto, dibawah pimpinan Kapten Zainudin Tembak. Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 34.

¹⁹⁴*Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm.35-36.

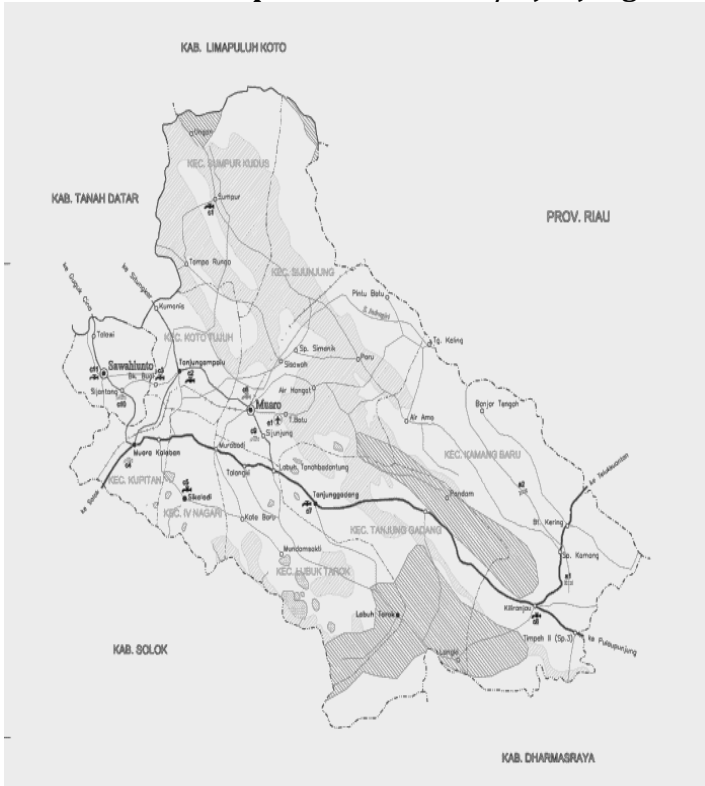
Rapat itu dihadiri oleh Datuk Mantiko Reno (Wali Perang Palaluar), Amir Mahmud (Wali Perang V Koto), Dt. Bijo Dirajo, Salim Halimi, Abd. Majid, dan beberapa orang Pemuda Tanjung Ampalu, Paloluar, Mangkudu Kadap dan Padang Laweh.

- b. Surau Padang Datar Aur Gading pukul 21.00 yang dipimpin Dt. Bijo Dirajo. Rapat di Surau Padang Padatar ini dihadiri Salim Halimi, Isrin Arif Dt. Sampan Hulu, Bermawi Zen, Johari Dt. Gomuk, pemuda dari Batu Gandang, Koto Panjang, Aur Gading dan Bukit Bual.

Adapun hasil rapat dari kedua tempat yang berbeda itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, ditugaskan untuk menyelidiki lokasi menginapnya tentara Belanda yaitu Muchtar Raja Pahlawan, Idris Imam Pokieh, dan Dahlias (Parambahan). *Kedua*, serangan terhadap tentara Belanda akan dilaksanakan tepat pada tanggal 2 Januari 1949 pukul 02.00 melalui strategi: (1) kelompok I Jurusan Barat dari Kubang Gajah dibawah pimpinan Kopral A. Rahman, (2) kelompok II Jurusan selatan dari arah kandang itik dibawah pimpinan Serda Haji Abbas, (3) Kelompok III jurusan Timur Arah Surau Rumah Hitam (Sumpadang) dibawah pimpinan Letnan Dua M. Majid. *Ketiga*, kode dimulai serangan dipegang oleh kelompok I Kopral A. Rahman dengan cara pelemparan granat. Pertempuran pun tidak bisa dihindari, sehingga meletuslah perang terbuka yang memakan korban tewas 37 orang pasukan Kewedanaan Sijunjung. Setelah Sawahlunto berhasil diduduki, Bupati Jamalul Yahya pun ditangkap tentara Belanda dihutan Batang Tapeh Mundam Sakti.¹⁹⁵

¹⁹⁵Usai pertempuran hebat itu, tanggal 2 Januari 1949 pasukan TNI langsung memeriksa gedung SD No.1 (tempat bermalam tentera Belanda) ternyata ditemui mayat pembantu rumah tangga dari guru Ismaniar. Sewaktu tentara Belanda berangkat Tanjung Ampalu tanggal 2 Januari 1949 itu menuju ke arah Sijunjung sepanjang jalan terus melakukan penembakan tanpa arah sampai ke Sijunjung. Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

PETA 3 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung



Sumber:Googlemap.com.

2. Serangan Gencar Terhadap Tentara Belanda di Tanjung Ampalu

Pada tanggal 4 Januari 1949 beredar berita bahwa pada malam harina tentara Belanda akan bermalam di Tanjung Ampalu. Mendengar kabar itu, Komandan Front II mengatur siasat dengan cara memanggil komondan sektor Pasukan Mobil Teras (PMT) mengadakan rapat di Surau Padang Datar Aur Gading, untuk mengatur langkah-langkah penyerbuan. Untuk melaksanakan strategi itu, ditugaskan Bahrumsyah, Abdul Munaf dan Inyiek

Dagang (asal Durian Gadang) memata-matai tentara Belanda yang akan bermalam.

Pada pukul 19.00 berangkatlah Bahrumsyah, Abdul Munaf dan Inyiek Dagang menuju Tanjung Ampalu. Namun siasat ini rupanya sudah diketahui Belanda, sehingga pecahlah pertempuran yang tidak seimbang di belakang rumah

Harifah yang berada di Pasar Tanjung Ampalu. Akibatnya Abdul Munaf menderita luka tembak di kakinya, sedangkan Bahrumsyah dan Inyiek Dagang kembali ke markas untuk melaporkan kejadian malam hari itu. Mendengar laporan ini komandan front II tanggal 5 Januari 1949 memerintahkan A. Munas dan pasukannya mencari Abdul Munaf.

Pada hari itu juga di Markas Solok Bayur Padang Datar diadakan rapat pasukan dari Tanjung Ampalu dan Pasukan PMT dari Pamuatan (Sersan Rakanin) yang pada pokoknya mencari informasi tentang keganasan tentera Belanda, baik yang di Sawahlunto maupun yang di Sijunjung dan mengumpulkan alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan, baik untuk perang maupun untuk kebutuhan sehari-hari dan menugaskan Dt. Rojo Garik untuk mencari informasi pasukan kita

Pada tanggal 6 Januari 1949 Dt. Rajo Garik pergi ke Sawahlunto mencari informasi, diperoleh berita bahwa tentera Belanda akan pergi ke Sijunjung lagi pada tanggal 8 Januari 1949 sebanyak 1 kompi (6 buah motor) dengan pimpinan Mayor Jonson.¹⁹⁶

Pada tanggal 8 Januari 1949 komandan front Tanjung Ampalu Sersan Rokanin memerintahkan Kopral A. Rahman menghadang tentara Belanda di batas Pamuatan. Strategi yang ditempuh adalah menyerang tentara Belanda pada malam hari. Pada tanggal 9 Januari 1949 ditangkap dua orang mata-mata Belanda. Salah seorang mata-mata yang bernama Cide di hukum tembak di Pamuatan oleh A. Munif Munaf dan Syamsuddin. Pada

¹⁹⁶ *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm.38-39.

pukul 17.00 kembali dilakukan penyisiran untuk mencari mata-mata Belanda yang sering membocorkan rahasia pasukan front Tanjung Ampalu. Taktik ini rupanya berhasil menjaring empat orang mata-mata, 12 pucuk senjata, Sati Monser, dan Satu cal. Akhirnya keempat mata-mata yang bernama Nur, B.M.L. Basiran, dan Manti P dihukum 12 tahun penjara di Sawahlunto.¹⁹⁷

Pada tanggal 10 Januari 1949 pasukan front Tanjung Ampalu dibawah pimpinan Kasim dan Amir melakukan aksi sabotase dan menghancurkan jembatan Tanjung Ampalu. Aksi sabotase ini mereka lakukan karena bertemu dengan tentara Belanda yang datang dari arah Sijunjung. Pertempuran pun tidak terelakkan dan memakan satu tentara dari pihak front Tanjung Ampalu. Pada tanggal 14 Januari 1949 bertempat di Padang Datar, dilaksanakan rapat kilat yang dipimpin Bermawi Zen dan komandan sektor Salim Halimi. Ada beberapa keputusan rapat yang disepakati oleh pimpinan front Tanjung Ampalu.¹⁹⁸

- a. Gedung SD 1Tanjung Ampalu supaya dihanguskan agar tentara Belanda tidak memanfaatkan sekolah sebagai tempat beristirahat. Sebelum sekolah dibumi hanguskan, sekolah dan peralatan mengajar dipindahkan ke Taratak Malintang.
- b. Pihak Pasukan Mobil Teras disiapkan supaya menghadang tentara Belanda yang datang dari Sijunjung maupun Sawahlunto.

Pada tanggal 30 Januari 1949 pasukan PMT menghadang tentara Belanda di Solok Batu Hampar. Dalam pertempuran itu Kasim¹⁹⁹ (eks tentara asal Jepang yang berpihak pada Republik)

¹⁹⁷ Masih pada hari yang sama, pasukan front Tanjung Ampalu kembali menangkap empat orang yang datang dari Sawahlunto. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi dan tentara, ternyata dua orang yang berpihak kepada Belanda, sedangkan dua orang lainnya tidak terbukti, yakni Idrus dan Sinyo. Keduanya dimanfaatkan sebagai intel Sersan Abas. Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 40.

¹⁹⁸ Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus: Tanpa Penerbit, 1990), hlm. 2.

¹⁹⁹ Kasim merupakan eks tentara Jepang yang tidak mau kembali ke negaranya dengan alasan sudah menyatu dengan masyarakat Sijunjung. Nama asli dari Kasim

memberi aba-aba perang dengan bahasa Jepang. Mendengar bahasa Jepang yang diteriakkan Kasim, tentara Belanda ketakutan dan mundur. Dalam pertempuran itu, enam orang tentara Belanda tewas. Setelah mengetahui bahwa pasukan PMT dibantu eks tentara Jepang, tentara Belanda pun melakukan aksi sporadis terhadap penduduk Tanjung Ampalu. Untuk menghindari tindakan brutal tentara Belanda, Bermawi Zen mengeluarkan perintah sebagai berikut :

- a. semua perahu dibawa keseberang sungai batang Ombilin dan disembunyikan.
- b. rakyat diminta eksodus ke tempat yang lebih aman.
- c. rakyat yang berumah dipinggir jalan antara Pamuatan dan Tanjung Ampalu dan Buluh Rotan diminta mengungsi segera.
- d. Bagi penduduk yang tidak mengindahkan perintah, dianggap musuh atau mata-mata Belanda.²⁰⁰

Pada tanggal 30 Januari 1949, Bermawi Zen meminta masyarakat yang asal Tanjung Ampalu dan Buluh Rotan

adalah Masao Suzuki. Selain Kasim, masih ada beberapa tentara Jepang yang memilih tinggal di Sijunjung, di antaranya Iwai Iwazo (Amir LL), Saka Guchi, Mitsuyaki Oyamada (Syafuruddin), dan Tanaka. Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 91.

²⁰⁰Pada hari itu juga datang kurir dari front Manggis Banyak Padang Laweh yang melaporkan usaha-usaha pencegatan terhadap Belanda dan sebelumnya tanggal 25 Januari 1949 jam 5 sorenya telah datang ke Manggis Banyak Padang Laweh pasukan TNI resimen III Kuranji (dibawah pimpinan Letda Yullus Atom dan Letda Yahya) yang hendak meneruskan perjalanan ke Batusangkar, sebelum berangkat kita dari Padang Laweh telah meminta kesediaan Pasukan TNI Resimen III Kuranji (pimpinan Yullus Atom dkk) supaya dapat membantu pasukan Manggis Banyak dalam usaha melakukan pencegatan terhadap tentara Belanda. Waktu itu. Letda Yulius Atom agak keberatan, sebab kalau diadakan pencegatan diManggis Banyak, tentara Belanda akan melakukan pertempuran/ penembakan membabi buta saja, dan rakyat ditembak langsung tanpa ditanya terlebih dahulu. Tetapi Komandan front A. Wahid berpendapat bahwa pencegatan terhadap tentara Belanda di Manggis Banyak Padang Laweh harus dilakukan mendengar dari A.Wahid itu maka Bermawi Zen, Salim Halimi sependapat dengan A.Wahid dan dilakukan pencegatan dan pengiriman pasukan (PMT) dari setiap Nagari ke Manggis Banyak itu dengan membawa peralatan yang secukupnya. Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 51.

berkumpul dan membawa alat-alat untuk melaksanakan aksi sabotase terhadap tentara Belanda mulai dari Landiaro Koto Panjang sampai ke Ketitian Tareh. Pada tanggal 31 Januari 1949 tentara Belanda menuju Tanjung Ampalu. Kedatangan Belanda yang disambut dengan tembakan itu, membuat mereka geram. Mereka pun membakar 60 bangunan rumah di Batu Gandong dibakar 60 buah, 9 rumah di Koto Panjang. Setelah melakukan aksi bumi hangus, tentara Belanda pun kembali ke Sawahlunto. Pada tanggal 2 Februari 1949 pasukan PMT mencegat tentara Belanda di Manggih Banyak. Aksi penghadangan ini juga dibantu Resimen III Kuranji pimpinan Letda. Yulius Atom. Pertempuran sengit pun berlangsung dan akibatnya 17 orang tentara Belanda tewas, 20 orang lainnya luka berat, sedangkan di pihak PMT satu orang tewas.²⁰¹

C. Kunjungan Sjafruddin Prawiranegara ke Calau Sumpur Kudus, dan Silantai

1. Suasana Sijunjung Jelang Kedatangan Ketua PDRI

Menguatnya tekanan-tekanan terhadap pemerintah darurat, setiap nagari di Sumatera Barat, termasuk nagari-nagari yang berada di Sawahlunto/Sijunjung dibentuk pula Markas Pertahanan Rakyat I Nagari (MPRN) dengan ketentuannya membentuk wali perang. Pembentukan struktur pemerintahan darurat ini bersumber dari Dewan Pertahanan Daerah (DPD) Sumatera Barat. No. 15/DPD/1947 yang dikuatkan oleh Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat No.13/GM/Instr tanggal 2 Februari 1949 setiap nagari dibentuk Badan Pengawal Nagari dan Kata (BPNK) yang kemudian dengan Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat tanggal 5 April No.24/GM/Instr dibentuk pula Pasukan Mobil Teras (PMT) dan Badan Pengawal Nagari/Kota (BPNK).

²⁰¹Semenjak keberangkatan pasukan kita (TNI Resimen III Kuranji) pimpinan Letda Yulius Atom dan Letda Yahya di Tanjung Ampalu tidak ada lagi tentera organik. Lebih lanjut baca Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip...*, hlm. 3.

Pada tanggal 5 Februari 1949 datang kurir Gubernur Militer Sumatera Barat yang hendak mencari Jarjis Babasthani dan Jaksa Mukmun Dt. Rangkayo Mulie yang datang ke Padang Sibusuk. Namun, utusan ini tidak bertemu dengan Makmun Dt. Rangkayo yang sedang berada di Padang datar. Dalam pertemuan itu. Disepakati bahwa Ketua PDRI akan mengadakan rapat di tiga tempat, yakni Calau, Sumpur Kudus, dan Silantai. Untuk menjaga keamanan Sjafruddin Prawiranegara dan menteri-menterinya harus dilakukan pengamanan selama 30 hari.



Gambar 3 Mr. Sutan Moh. Rasjid, Gubernur Militer Sumatera Barat tahun 1948-1949. Pemerintahan militer yang dipimpin Sutan Moh. Rasjid pada masa itu lebih sering berada di Koto Tinggi Kabupaten 50 Kota. **Sumber:** Marah Joenoes, 2013: 3.

Pada hari yang sama, seorang kurir bernama Maju Arif berangkat menuju Nagari Tanjung Bonai Aur ntuk menemui Wali Perang M.Rajo Dubalang untuk mencariteman perjalanan menuju

Koto Tinggi. Saat itu Wali Perang menunjuk Sidin Dt. Parpatih Sungai dan Suharuddin. Sementara itu di Padang Sibusuk tanggal 7 Februari 1949 tokoh-tokoh masyarakat di Air Terjun Bukit Putuih sepakat mengutus tiga orang untuk menghubungi pemerintah PDRI di Koto Tinggi, untuk melaporkan situasi di Sijunjung, di antaranya Muhammad Zen Angku Mudo, Sudurdin Ahmad, dan Dulah Rasin Pakiah Marajo.²⁰²

Pada tanggal 10 Februari 1949, kurir Maju Arif dan tiga orang utusan Wali Perang Tanjung Bonai Aur sampai di Koto Tinggi. Mereka kemudian menyerahkan surat itu kepada ajudan Gubernur Militer Sumatera Barat. Pada tanggal 11 Februari 1949 kurir Maju Arif dipanggil oleh Mr. Sutan Moh. Rasjid. Saat itu juga Gubernur Militer Sumatera Barat memerintahkan agar Tan Tuah yang sudah dilantik sebagai Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung agar pulang ke Sijunjung tanggal 24 Februari 1949. Tan Tuah ditugaskan untuk membentuk pemerintahan yang baru dan mencari tokoh masyarakat yang bersedia mengisi pos pemerintahan.

²⁰²Dalam perjalanan di Lasuang Batu Tanjung Ampalu, bertemu dengan Salim Halimi komandan front Tanjung Ampalu, kemudian melanjutkan perjalanan ke Lintau melalui Sisawah, dari Lintau dibawa A. Jarjis Bebasthani, pegawai tinggi pada kantor Kemakmuran Bukit Tinggi (Komisariat Pemerintahan Pusat) segera datang ke Lintau untuk menemui pemerintah Daerah Sumatera Barat. Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/Sijunjung...*, hlm. 52.



Gambar 4 Mr. Teuku Moh. Hasan, Menteri P & K pada masa PDRI, proses kedatangannya ke Sumpur Kudus sempat dikawal ketat, setelah Belanda melakukan serangkaian aksi sporadis di Tanjung Ampalu. **Sumber:** www.m-edukasi.web.id

Pada tanggal 16 Februari 1949 tentara Belanda mengadakan patroli ke Padang Laweh dan membakar 125 bangunan rumah. Pada masa darurat itu, Gubernur Militer Daerah Sumatera Barat Mr. Sutan Moh. Rasjid melalui Surat Keputusan No.49/GM/Inst tanggal 18 Februari 1949 menggabungkan kewedanaan Sijunjung dan Sawahlunto menjadi Kabupaten Militer Sawahlunto/Sijunjung. Pada tanggal 18 Februari 1949 dilantik Bupati Militer Tan Tuah gelar Bagindo Ratu Sijunjuang dengan Pangkat Mayor Tituler di Koto Tinggi Suliki.²⁰³ Sehari setelah peristiwa itu, staf

²⁰³Selain Tan Tuah dilantik sebagai Bupati Militer, juga dilantik beberapa orang Bupati Militer di berbagai daerah di Sumatera Barat. *Pertama*, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto menggantikan Arisun Sutan Alamsyah sebagai Bupati Militer 50 Kota. *Kedua*, Said Rasad menggantikan posisi Dahlan Djambek sebagai Bupati Militer Agam. *Ketiga*, BA Murad sebagai Bupati Militer Padang Pariaman. *Keempat*, Sidi Bakaruddin sebagai Bupati Militer Padang Pariaman. *Kelima*, Darwis Taram sebagai Bupati Militer Solok. *Keenam*, Aminuddin Sutan Syarif sebagai Bupati Militer Pesisir

PDRI yang berada di Sisawah, mengawal ketat rombongan Mr.Teuku Muhammad Hasan, agar terlindung dari aksi sporadis tentara Belanda.

Selesai peninjauan tertis ke Sumpur Kudus melalui Sisawah kembali, paninjauan oleh PDRI itu tercium oleh tentera Belanda di daerah patroli di Tanjung Ampalu, sehingga tentera mengadakan patroli lagi secara giat, dan pada tanggal 25 Februari 1949 tentera Belanda mengadakan patroli dari Tanjung sampai ke Taratak Batung Padang Laweh dan dapat ditangkapnya 2 orang pasukan kita yang langsung ditembaknya, yaitu Nurasyid dan Na'im.

Sementara itu, pasca pelantikannya, sebagai Bupati Militer, Tan Tuah yang berangkat menuju Sawahlunto/Sijunjung harus melakukan penyamaran sebagai kurir untuk menghindari pemeriksaan.²⁰⁴ Pada tanggal 24 Februari 1949 di Nagari Tanjung Bonai Aur, Tan Tuah bertemu dengan Syahrudin (kurir Camat Militer Koto VII) dan Rustam Effendi (Camat Militer Koto VII). Tujuan kedua orang ini bertemu Tan Tuah adalah untuk membawanya ke Lembaru nagari Tanjung. Setelah sampai di Lembaru, Tan Tuah memerintahkan untuk memanggil pemuka-pemuka masyarakat untuk hadir di Tanjung Bonai Aur pukul 10.00 pagi. Ada tiga orang tokoh masyarakat yang diminta oleh Tan Tuah untuk segera menghadap, yakni M. Syarif Dt. Gunung Emas dari Tanjung Ampalu, M. Zen Dt. Bijo Dirajo dari Koto Panjang dan M. Syafei Idris dari Padang Laweh.²⁰⁵

Selatan. *Ketujuh*, Basyrah Lubis sebagai Bupati Militer Pasaman. Lebih lanjut baca *Propinsi Sumatera Tengah...* hlm.196. Baca juga Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sebuah Masa Rantai Sejarah yang Terlupakan*. (Padang: PKSBE UNP, 1997), hlm.141.

²⁰⁴ Dalam perjalanannya menuju Sijunjung, Tan Tuah ditemani oleh kurir Maju Arif. Setelah Tan Tuah sampai di Nagari Tanjung Bonai Aur, kurir Maju Arif melanjutkan perjalanannya ke Padang Laweh. Ia pun mendengar bahwa Padang Laweh telah dibakar oleh tentera Belanda, sedangkan Tantuah Bagindo Ratu ditempatkan di rumah guru Syukur (orang tua dari kurir Saharuddin). Malam harinya Tan Tuah Bagindo Ratu minta Wali Perang M. Rajo Dubalang untuk mencari kurir menghubungi Camat Koto VII yang waktu itu dijabat oleh Rustam Effendi.

²⁰⁵ Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip...*, hlm. 2.

Pada tanggal 25 Februari 1949 dalam rapat antara Bupati Militer Tan Tuah bersama pemuka masyarakat di Tanjung Bonai Aur menghasilkan beberapa keputusan penting.

Pertama, membentuk pembantu Bupati Militer Sawahlunto/ Sijunjung yang terdiri dari: Haji Syafe'i Idris, M. Syarif Dt. Gunung Mas, Marah Tayab (asal Sumpur Kudus).

Kedua, staf Administrasi Kantor Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung untuk sementara dirangkap oleh staf Camat Militer Koto VII yaitu: Darwis, Hasan Basri, Manan Rajo Bujang, Maju Arif (sebagai kurir), M. Saman (sebagai kurir), dan Agus (sebagai kurir).

Ketiga, menunjuk staf perbekalan yang terdiri dari Malin Dubalang (Wali Nagari Perang Tanjung Bonai Aur), Saidin Dt. Perpatih Suangki, Jasam Gelar Pandito, Jamiruddin Mantari Satan, dan Datuk Patih.²⁰⁶

Setelah mengetahui salah seorang menteri pada Kabinet PDRI lepas , tanggal 1 Maret 1949 tentara Belanda meningkatkan operasi militernya di Ikon, Taratak Batung. Di Taratak Batuang, tentara Belanda menembak mati Kiram dan membakar rumah perbekalan milik Tamim Dt. Bandaro Hitam. Aksi sporadis tentara Belanda ini mengundang reaksi keras dari Tan Tuah. Namun, ia menyadari sebagai pejabat yang baru dilantik, ia harus secepatnya bergerak membentuk perangkat yang akan membantunya dalam pelaksanaan tugas.

Pada tanggal 3 Maret 1949 Tan Tuah menggelar rapat dengan pemuka masyarakat Sawahlunto/ Sijunjung guna menyempurnakan struktur pemerintahan dengan hasil keputusan sebagai berikut :²⁰⁷

1. Menunjuk staf Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung terdiri dari:
 - a. Kapten TNI Zainal Arifin ditunjuk sebagai Komandan dari Golongan Perwira.
 - b. Ajun Komisaris Polisi Amir Dt. Palindih, Kepolisian

²⁰⁶ Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip...*, hlm. 2-3.

²⁰⁷ Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip...*, hlm. 3-4.

- RI Kabupaten.
 - c. Haji Safe'i Idris.
 - d. M. Syarif Dt. Gunung Emas.
 - e. Marah Tayab
2. Menunjuk Staf Sekretariat yang terdiri dari:
- a. Sekretariat/
 - Penata Usaha Tk. I : A. Jarjis Bebasthani.
 - b. Kepala Kantor : Zairuddin Rajo Dubalang
 - c. Urusan Personalia : Abdul Munaf
 - d. Kepala Keuangan : Syaifullah
3. Menunjuk empat orang setingkat Wedana Militer
- a. Kewedanaan Militer Batang Hari meliputi wilayah Kec. Koto Baru dan Palau Punjung dipimpin Wedana Militer S. M. Dt. Sati
 - b. Kewedanaan Militer Sijunjung, meliputi Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Tanjung Godang, dipimpin Wedana Militer Haji Rusli Abd. Wahid.
 - c. Kewedanaan Militer Tanjung Ampalu, meliputi Kecamatan VII dan Kecamatan IX Dimudik, dipimpin Wedana Militer Rustam Efendi.
 - d. Kewedanaan Militer Sawahlunto, meliputi Kecamatan Sawahlunto dan Kecamatan Talawi dipimpin Wedana Militer Nurdin Dt. Majo Sati.
4. Menunjuk beberapa orang camat militer:
- a. Camat Militer Koto VII : Amir Mahmud
 - b. Camat Militer Koto IX, Simudik : A. B. Dt. Rajo Mudo
 - c. Camat Militer Sawahlunto : Sutan Salim
5. Menunjuk pejabat sementara untuk memimpin badan/instansi:
- a. Bujang Dt. Gadang Bandaro : Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten
 - b. Manan Dt. Rajo Pahlawan Garang : Jaksa Kabup

- c. Dt. Paduko Sirajo :KepPPK Kabup
- d. St. Ibrahim Majo Indo :Untuk
mengkoordinir Pega-wai Negeri PU yang berada di
Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
- e. Abd. Rahman :Untuk
mengkoordinir Urusan Pertanian, kehutanan,
peternakan dan Perdagangan
- f. Kasini :Mengurus/
mengusahakan berdirinya sebuah Kantor Pos
Darurat.

Pada tanggal 25 Maret 1949 tentara Belanda kembali menggelar operasi pembersihan dan penangkapan terhadap perangkat PDRI. Kali ini mereka menggelar operasi di Bukit Nunang Manggih Banyak. Dalam kontak senjata antara tentara Belanda dengan pasukan PMT²⁰⁸, menewaskan satu orang tentara yang bernama Enek. Pada bulan April 1949 Belanda mengepung masyarakat di Padang Laweh yang sedang memotong kerbau. Peristiwa itu bertepatan pada hari raya Idul Adha. Akibat dari operasi *sweeping* ini, dua orang pasukan PMT ditawan Belanda.²⁰⁹

Terdesaknya pasukan front Tanjung Gadang, mengakibatkan mereka mundur ke Sungai Piapung. Kondisi yang tidak kondusif, mendorong pimpinan front Tanjung Gadang memindahkan

²⁰⁸Pasukan Mobil Teras (PMT) merupakan kesatuan dan perpaduan tenaga rakyat diluar Organisasi angkatan perang yang titik berat tugas kewajibannya terletak dalam pertempuran. Anggota PMT ini diambilkan dari sebagian anggota Badan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK). Karena semakin meningkatnya perlawanan rakyat diseluruh garis depan (front) dalam daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, tentara Belanda semakin mengganas dengan melakukan penembakan secara membabi buta dan membakar rumah-rumah rakyat. Oleh karena itu maka Pusat Pemerintahan Militer Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dipindahkan dari Tamporungo ke Durian Gadang terus ke Sungai Betung kemudian ke Sibakur, Langki, Buluh dan Lubuk Tarok. Di Lubuk Tarok oleh Pemerintahan Militer Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung diadakan rapat konsolidasi dan koordinasi dengan semua Camat Militer Komandan-komandan Front dan Dinas/jawatan serta laporan-laporan dari seluruh Kecamatan dan pelaksanaan iyruran perang. Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 60.

²⁰⁹*Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm.53-54.

markasnya dari Padang Datar ke Taratak Mailintang (Taratak Luduk Koto Panjang sekarang). Sedangkan gudang dan bengkel senjata diletakkan di Kamang Bukit Bual. Teknisi yang ditugaskan untuk melakukan perawatan senjata adalah Nasar asal Mangkudu Kadap dan eks tentara Kasim. Tiga hari setelah dipindahkannya markas front Tanjung Gadang, tentara Belanda mengepung markas di Padang Datar, namun mereka tidak menemukan para pejuang dan amunisi.

Tentara Belanda rupanya tidak menyerah begitu saja. Mereka kemudian mengejar pasukan PMT ke Taratak Lubuk hingga Bukit Solok Malako. Setibanya di Bukit Solok Malako, pertempuran sengit selama 1 jam pun terjadi. Aksi penembakan ini mengakibatkan satu orang tentara tewas, yakni Munir. Sedangkan tentara Belanda terpaksa mundur kemarkasnya di Sumpadang. Namun, tentara Belanda belum mau menyerah. Mereka pun mencari pusat penyimpanan dan bengkel senjata di Kamang Bukit Bual. Serangan mendadak tentara Belanda ini menyebabkan satu orang teknis bengkel senjata yang bernama Nasar tewas.

Tentara Belanda itu terus berpatroli ke Taratak Malintang. Kebetulan di Muaro Bonde kepergok lagi dengan pasukan kita, terjadi tembak menembak dan gugur pasukan kita Mahyudin, dan pihak Belanda luka 2 orang, selanjutnya tentera Belanda kembali ke Tanjung Ampalu menelusuri sungai Ombilin, di Batu Hampar tentera Belanda ditembaki lagi oleh pasukan kita. mengungsi tetapi tetap melakukan perlawanan dan sabotase dengan cara menebang batang kayu sepanjang jalan raya sampai ke Bulu Rotan.²¹⁰

Suasana yang makin mencekam, menyebabkan markas tentara yang berada di Taratak Lubuk dipindahkan ke Taratak Malintang. Untuk mencegah berkurangnya persediaan logistik pasukan PMT, diutuslah Harun Lilah yang berasal dari PMT

²¹⁰Nazarudin, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di Kantor Wali Nagari Sumpur Kudus.

Palaluar untuk berangkat ke Kumanis. Meskipun berhasil lolos saat membeli bahan logistik, namun naas, Harun tewas saat disergap tentara Belanda di Bulu Rotan. Mendengar aksi penghadangan ini, gabungan pasukan PMT menghadang tentara Belanda di Tomosu Batupang. Dalam suana pertempuran sengit itu, dua orang penduduk Tomosu tewas, Nurut dan Dualim tertangkap. Sejak saat itu nagari Palaluar dan Tanjung Gadang sepenuhnya berada dalam genggaman Belanda.²¹¹

Situasi yang makin memanas itu, mendorong Camat Militer Koto VII yang berkedudukan Sumpur Kudus menugaskan Abdul Rahman, Amir Husin dan Roeslan Jamaris untuk memantau keamanan di luar Sumpur Kudus jelang kedatangan Sjafruddin Prawiranegara dan beberapa orang perangnya. Kecemasan Camat Militer Koto VII ini cukup beralasan, karena tentara Belanda telah menguasai seluruh nagari dan masyarakat sudah banyak yang mengungsi ke hutan-hutan. Selain itu pihak Camat Koto VII mulai mengantisipasi kondisi terburuk dengan menerapkan beberapa strategi.²¹²

- a. Seluruh pasukan PMT yang bersenjata dan Kasim dkk diungsikan ke Padang Sibusuk dipimpin oleh Letnan Ayub Bakar.
- b. BPNK tetap menjalankan tugas dalam nagari Calau, Sumpur Kudus, dan Silantai.
- c. Dipilihlah Ketua Keamanan Rakyat yang bertugas mengkoordinir anggota PMT.
- d. PMT dipindahkan ke Sisawah Kec.Sumpur Kudus.

Sementara itu kantor Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung pada masa darurat bersifat mobile, artinya sewaktu-waktu bisa pindah lokasi karena faktor keamanan dari serangan Belanda.²¹³ Pada bulan Mei 1949 kantor Bupati pindah beberapa

²¹¹ Atas keputusan Camat Militer Amir Mahmud, di nagari Palaluar dibentuk badan keamanan yang diketuai Baih Lobai. Badan ini bertugas sampai penyerahan kedaulatan untuk daerah kecamatan Koto VII. Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm. 55-56.

²¹² Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip...*, hlm. 6.

²¹³ Kantor Bupati Swahlunto/Sijunjung pindah dari Tanjung Bonai Aur ke Nagari Guguk dari sini ke Sisawah kembali lagi ke Tanjung Bonai Aur dan ke Tamparungo.

kali, yakni Tanjung Bonai Aur, Nagari Guguk, dan Sisawah. Bila keadaan tidak kondusif, pusat pemerintahan dipindahkan ke Tanjung Bonai Aur, dan Nagari Tamparungo.²¹⁴ Dengan demikian, sejak Mei 1949 Pemerintahan Kabupaten Militer Sawahlunto/Sijunjung telah terpisah dari Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya melalui SK Gubernur Militer Sumatera tanggal 15 Mei 1949 No.120/GM/1949 Jarjis Bebasthani diangkat sebagai Sekretaris Kabupaten untuk membantu Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung melaksanakan tugasnya.

Pada tanggal 17 Mei 1949 diadakan rapat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengenai gerak Kabupaten Militer Sawahlunto/Sijunjung.

Pertama, dari perwakilan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yakni Gubernur Militer Mr.St. Mohammad Rasyid dan staf penasihat Juir Muhammad dan Haji Ilyas Yacub.

Kedua, pihak Kabupaten Militer Sawahlunto/Sijunjung dihadiri oleh Tan Tuah Bagindo Ratu (Bupati Militer), anggota staf Bupati Militer, dan Wedana Militer yang terdiri dari Rusli Abd. Wahid, Nurdin Dt. Majo Sati, dan Rustam Efendi.²¹⁵ Rapat yang dibuka Juir Muhammad itu melahirkan beberapa keputusan penting.

Lebih lanjut baca *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung...*, hlm.57.

²¹⁴Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip...*, hlm. 4.

²¹⁵Marah Joenoes, *Mr. St. Moh. Rasjid. Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani, dan Jujur*. (Riau: Cerya Riau Mandiri Printing, 2013), hlm. 29.



Gambar 5 Haji Ilyas Yakub, salah seorang tokoh PDRI yang datang ke Sumpur Kudus menjelang hadirnya Mr. Sjafruddin Prawiranegara.
Sumber: *www.kodepos.nomor.net*.

1. Kewedanan Sijunjung dibagi dua, yaitu Kewedanan Sijunjung dan Kewedanaan Batang Hari dan Kewedanan Militer Tanjung Ampalu ditiadakan.
2. Camat Rustam Efendi naik pangkat menjadi Wedana Militer Batang Hari.
3. A. Rivai menjadi Camat Militer Sumpur Kudus.
4. Amir Mahmud dikukuhkan menjadi Camat Militer Koto VII.
5. Nain Dt. Mangguyang diangkat menjadi Camat Militer Pulau Punjung.
6. Abd.Rauf St. Mansur diangkat menjadi Camat Militer Koto Baru.
7. A. Jarjis Bebasthani diangkat menjadi Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung.²¹⁶
8. Tan Tuah Bagindo Ratu ditarik ke pusat Pemerintahan di Koto Tinggi.
9. Haji Rusli Abd.Wahid ditarik ke Pusat Pemerintah di Koto Tinggi.
10. Sumpur Kudus dan Abai Siat masing-masing diberi satu sekolah lanjutan, yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Untuk mempermudah jalannya roda pemerintahan di Sawahlunto/ Sijunjung berdasarkan Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat No.23/GM/Instr-1949 tanggal 25 Mei 1949, dibentuklah suatu Badan yang diberi nama Markas Pertahanan Rakyat Kecamatan (MPRK) dengan ketuanya Camat Militer yang bertugas mengkoordinir logistik baik untuk pemerintahan. Adapun susunan MPRK Koto VII adalah sebagai berikut: *Pertama*, MPRK diketuai Camat Militer. *Kedua*, anggota MPRK terdiri dari

²¹⁶Melalui Surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Barta tanggal 17 Mei 1949 No.120/GM/1949. A. Jarjis Bebasthani sebagai sekretaris ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung, di bawah pimpinan Bupati Militer A.Jarjis Bebasthani, Kecamatan IX Koto Dimudik diganti menjadi Kecamatan IV Nagari dengan Camat Militernya M. Aras Intan Sati. Lebih lanjut lihat Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip...*, hlm. 5-6.

bagian perbekalan, bagian penerangan, bagian sosial seperti: Palang Merah, dapur umum, pengungsian dan lain sebagainya.²¹⁷

Pada tanggal 15 Juli 1949, tentara Belanda kembali melanjutkan aksi sporadisnya dengan menembak mati seorang perempuan yang ikut mengungsi ke Padang Laweh. Esok harinya, tentara Belanda mengerahkan tenaga 100 orang bayaran untuk memanen padi penduduk Padang Laweh. Pasukan MPRK dan PMT yang mengetahui gelagat itu, segera menggempur tentara Belanda dan orang-orang bayarannya itu. Pasukan yang dikomandoi Jangguik itu pun berhasil memukul mundur tentara Belanda ke arah Sijunjung. Pada tanggal 17 Juli 1949 Belanda melakukan tindak kejahatan dengan membantai secara sadis empat orang penduduk Guguk Gadang, yakni Siri, Nurzami, Latif Bongkak Kaning, dan Denguik.

Penembakan oleh tentera Belanda ini kedengaran oleh pasukan kita dari Muaro dan Pasukan dari Pematang Panjang memburu ke daerah Guguk Gadang dan mengadakan penggempuran/ pengempungan maka terjadilah tembak menembak lebih dari 1 jam, berakhir dengan pasukan Belanda mundur ke Sijunjung dengan meninggalkan 4 orang mayat dan mayat tentera Belanda itu dikuburkan di Guguk Gadang di tempat peristiwa kejadian.

Sungguhpun banyak terjadi pembunuh-pembunuhan yang sadis oleh tentera Belanda, namun semangat pasukan kita tidak mundur malahan sebaliknya semangat meluap-luap tidak kenal lelah semua bahan-bahan amunisi, peluru-peluru dari bungkal jala dan kawat telefon dapat dibuat sendiri, jalan-jalan yang biasa dilalui tentera Belanda ditanami ranjau-ranjau dipinggir jalan karena apabila pasukan kita menggempur atau menghadang tentera Belanda itu akan menyebar ke parit-parit dipinggir jalan.²¹⁸

²¹⁷Untuk lebih jelasnya baca berdasarkan *Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat No.23/GM/Instr-1949* tanggal 25 Mei 1949

²¹⁸Menurut Syamsul Anwar, bahwa Sewaktu pengadangan dilakukan di Jembatan Basi Muaro dengan kekuatan sebanyak 20 orang, ketika truk tentera Belanda sampai di tengah jembatan, tembakan dilakukan cara bergelombang. Tentera Belanda pun terpaksa mundur sambil menembak membabibuta dan melakukan pembakaran

2. *Dari Bidar Alam Menuju Nagari Calau*

Persiapan Bupati Militer Sawahlunto/Sijunjung Tan Tuah dan wali nagari Sumpur Kudus dan Silantai sebelum kedatangan Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Bidar Alam memang cukup solid. Peran dari Calau, Sumpur Kudus, dan Silantai memang sedikit terlupakan oleh sejarawan profesional dan amatir yang kurang melihat urgensi keberadaan Ketua PDRI dan perangkatnya selama satu minggu di ketiga wilayah tersebut.

Umar Said Noor merupakan salah seorang penulis yang mengisahkan pengabdianya sebagai prajurit TNI Angkatan Udara membawa stasiun radio sender dari Bidar Alam ke Calau, Sumpur Kudus, dan Silantai. Meskipun bukan penulis profesional, Umar Said Noor berupaya mengungkap kisah perjalanannya yang penuh tantangan itu dengan uraian menarik.



Gambar 6 Aliran Sungai Kuantan yang pernah dilalui Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara dan rombongan pasukan sender dari Bidar Alam ke Calau.

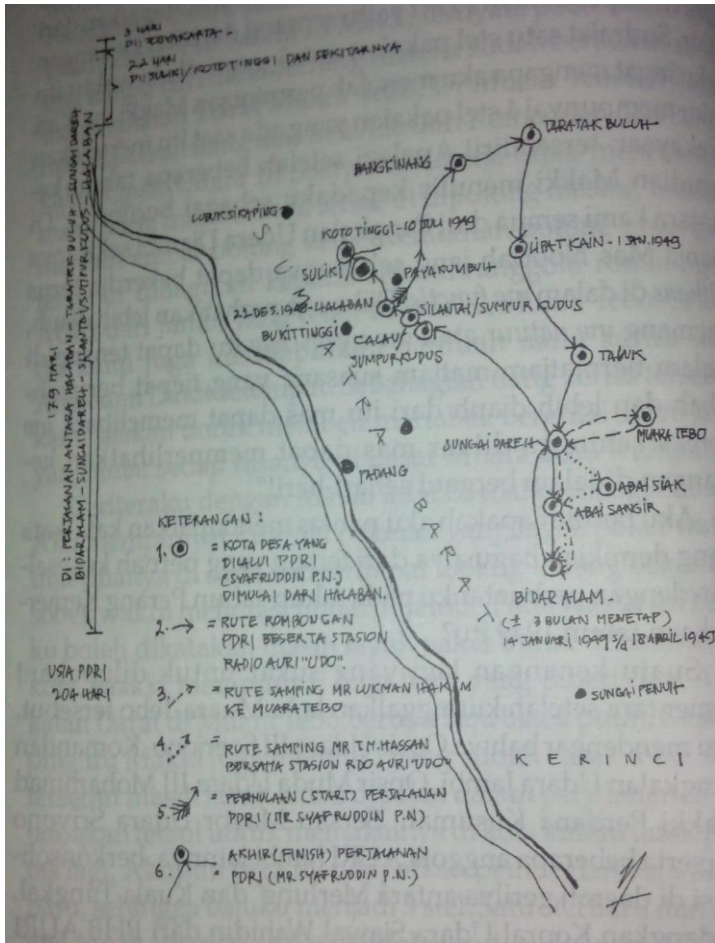
Sumber: koleksi Zusneli Zubir.

terhadap rumah rakyat. Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di Silantai.

Umar Said Noor dan rekan-rekannya memang berangkat belakangan dari rombongan Syafruddin Prawiranegara. Umar mengungkap, bahwa ia dan rombongan berjalan kaki menuju Batang Sangir yang deras arusnya pada tanggal 16 April 1949. Di tepi Batang Sangir ini, perahu sampan tentara AU ini akan berlayar ke Sungai Dareh melalui desa-desa Abai Sangir dan Muara Sangir. Umar mengungkap perjalanan yang ia tempuh memang riskan karena mereka berhadapan dengan arus sungai yang deras dan berbatu. Meskipun perahu itu dikemudikan oleh para pendayung yang cekatan dan berpengalaman, namun kondisi arus sungai yang menyeret perahu sampan itu membuat penumpangnya was-was.

Arus sungai mendorong perahu-perahu meluncur dengan cepatnya. Perahu-perahu yang dikemudikan oleh para pendayung yang berpengalaman dan cekatan tidak mengalami kesulitan apalagi kecelakaan. Arus sungai yang deras dan sering berbatu-batu dilaluinya dengan mudah. Hanya kadang-kadang kamilah sebagai penumpang dibuatnya senewen. Menjelang masuk ke Sungai Dareh sungai tidak lagi berbatu-batu tetapi arus sungai masih tetap deras. Dengan demikian perahu-perahu sampan yang ramping itu bertambah cepat lajunya. Kami menginap satu malam di Sungai Dareh dan hari berikutnya kami dari awak Stasiun Radio meneruskan perjalanan dengan tujuan Sumpur Kudus. Rombongan kecil Syafruddin Prawiranegara telah mendahului kami.²¹⁹

²¹⁹Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 111.



dalam rombongan pembawa sender ini ketika rombongan pertama sudah sampai di sebuah desa, rombongan lain baru sampai untuk bermalam. Meskipun perjalanan yang ditempuh oleh rombongan ini menguras tenaga dan pikiran, pasukan ini menikmati perjalanan mereka mengalir Sungai Kuantan yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau. Lebih lanjut Umar menuturkan:

Rombongan kecil Ketua Menteri rupanya telah berangkat terlebih dahulu, yaitu beberapa hari sebelumnya. Kami rombongan Stasiun Radio berangkat dengan tiga perahu, termasuk peralatan sender dan lain-lainnya. Perjalanan naik perahu menentang arus ini adalah perjalanan yang amat berkesan, seperti dalam film saja. Tepi sungai pada beberapa tempat menjulang tinggi, seperti halnya sungai-sungai yang membelah daerah pegunungan. Arusnya pun deras berliku-liku mengikuti dasar sungai yang terbelah-belah oleh batu-batu besar. Di banyak tempat, kadang-kadang air membentuk jeram-jeram yang deras. Air yang membentur-bentur batu memercik ke atas dan membentuk air muncrat sangat elok dipandangnya.²²⁰

Derasnya arus Sungai Kuantan menyebabkan seluruh penumpang dan teknisi terpaksa mendorong dan menarik sampannya untuk melawan arus. Dalam perjalanan lewat air yang deras memang penuh resiko dan membahayakan keselamatan jiwa, sehingga pasukan yang membawa sender ini bermalam di tengah perjalanan. Rombongan Umar Said menginap di sebuah gubuk eks pekerja romusha yang dibangun disela-sela batu besar di tepi sungai Kuantan.²²¹

²²⁰Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)...*, hlm.112.

²²¹Umar Said Noor mendeskripsikan dengan cukup baik suasana gubuk eks romusha. Gubuk tersebut memiliki kebun sayur-sayuran yang subur dengan pohon-pohon singkong. Gubuk itu dikelilingi pagar yang kokoh dan berlapis-lapis, mengelilingi kebun yang subur tersebut. Luas kebun beserta gubuknya tersebut menurut Umar sekitar 600 m², terpelihara dengan rapi, bersih dan teratur. Pemilik gubuk itu menuturkan, "Saya dulu bekerja pada Jepang sebagai Romusha untuk

Rombongan pasukan sender itu hanya menginap satu malam untuk melanjutkan perjalanan pada pagi harinya. Eks pekerja romusha, menuturkan dua hari jelang kedatangan mereka, banyak orang yang naik perahu ke hulu (kemungkinan rombongan Sjafruddin Prawiranegara) dan menginap di tepi Sungai Kuantan.

Pada tanggal 18 April 1949 pasukan sender ini kembali menyusuri Sungai Kuantan. Pasukan ini berangkat dengan perahu tradisional yang dilengkapi peralatan dayung, galah dan tali rotan untuk menarik perahu pada waktu-waktu tertentu. Pasukan sender ini melewati arus air yang deras, melewati jeram yang sempit diantara batu-batu yang besar. Ketika air membesar, pasukan sender ini pun turun dari perahu untuk menyelamatkan peralatan radio itu.

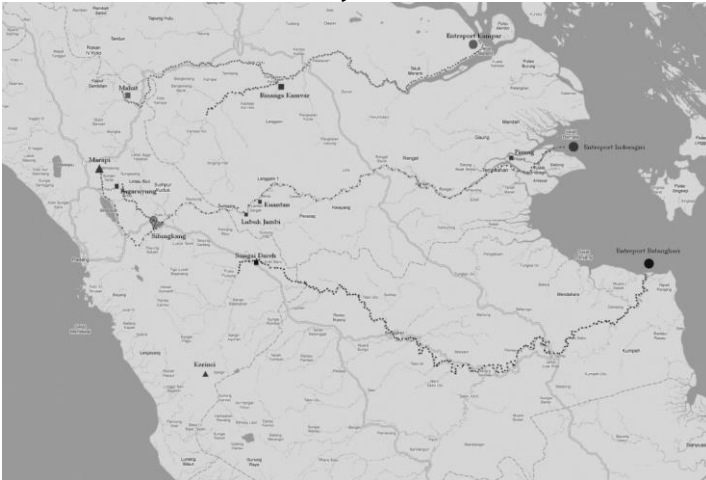
Pada suatu saat, perahu sama sekali tidak dapat laju dalam air. Kami terpaksa turun dari perahu bersama alat-alat sender yang dipikul oleh beberapa tenaga pembawa barang. Waktu kami menelusuri tepi sungai, kami keheran-heranan melihat di beberapa tempat muncul sepasang rel kereta api di tengah hutan belukar. Kadang-kadang muncul kadang-kadang meng-hilang ditelan belukar. Sesaat kami berjalan di tepi sungai itu, aku hanya bertemankan teman kopralku yang sama-sama berasal dari Pangkalan Udara Jambi. Waktu kami berdua akan melewati rel kereta api yang bergelantungan di atas sungai kecil, kami dengan teriakan-teriakan kera yang tidak jauh dari tempat kami berjalan.²²²

membuat rel kereta api di hutan sana. Saya tidak ingat lagi kapan saya lari dari Romusha itu, lalu berkeliling di hutan-hutan dan kampung-kampung sekitar sini. Akhirnya sampailah saya disini dan berhenti berkeliling hingga sekarang”. Lebih lanjut baca Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.114.

²²² Lebih lanjut baca Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.115.

Pada tanggal 20 April 1949, rombongan pasukan sender ini bertemu dengan rombongan pasukan logistik dan peralatan senjata yang sudah sampai terlebih dulu di Sungai Dareh. Gabungan pasukan logistik, peralatan senjata, dan peralatan radio sender ini pun berangkat menuju Calau. Dari Sungai Dareh, rombongan pasukan ini menyeberang dengan perahu dan melewati hutan yang belum terjamah tangan manusia.

PETA 5 Perjalanan Pasukan Sender dari Batang Kuantan Menuju Calau



Sumber:googlemap.com

Perjalanan rombongan PDRI dari Bidar Alam ke Sumpur Kudus di desa Calau, menurut Umar Said Noor memakan waktu kurang lebih sepuluh hari. Rombongan PDRI ini sampai di Calau secara berturut-turut tanggal 22, 23, 24, dan 25 April 1949. Daerah yang mereka lewati antara Sungai Dareh hingga Manganti antara lain Kiliranjao, Sei Bitung, Padang Tarok dan Durian Gadang. Sementara itu, rombongan pasukan yang membawa Stasiun Radio itu sampai di Calau pada tanggal 25 April 1949.²²³ Namun, satu hal yang konkrit menurut Mansur, keluarganya tidak

²²³Lebih lanjut baca Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.120.

pernah menduga Sjafruddin Prawiranegara akan datang bersama rombongan menteri dan pasukan pengawal dari TNI AU ke Calau, karena mereka datang tanpa memberi kabar terlebih dulu. Mansur mengakui, bahwa Sjafruddin Prawiranegara pernah menginap di rumahnya dan sering *mobil*, terkadang di Calau, esok harinya bisa di rumah Halifah di Sumpur Kudus.²²⁴



Gambar 7 Rumah Tua yang menjadi saksi persinggahan Ketua PDRI dan pasukan sender di Calau Sumpur Kudus, Kabupaten Militer Sawahlunto/Sijunjung. **Sumber:** Dokumentasi Zusneli Zubir.

²²⁴ Menurut Mansur, rombongan yang pernah menginap dirumahnya adalah Ketua PDRI Pak Sjafruddin, Dick Tamimidan Umar Said Noor yang berasal perwira TNI AU. Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.



Gambar 8 Suasana di depan rumah gadang Mansur Dt. Penghulu Mudo. Tampak pada foto ini Mansur Dt. Penghulu Mudo (empat dari kiri), Bagindo M. Letter, dan Zulwadi Dt. Bagindo Kali (Ketua DHD 45 Sumatera Barat). *Sumber:* Koleksi Mansur Dt. Penghulu Mudo.

Ketika pasukan pembawa sender tiba di Calau, langsung diperintahkan oleh Sjafruddin Prawiranegara untuk melakukan kontak dengan Gubernur Militer Sumatera Barat Mr. Moh. Rasjid yang berkedudukan di nagari Kototinggi. Berita yang disampaikan antara lain agar Mr. Sutan Moh. Rasjid dan Ir. Tompul menghadiri rapat pleno tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 1949, di salah Silantai, sebuah nagari yang berada dekat dengan Halaban dan Sumpur Kudus. Lebih lanjut Umar Said menuturkan:

Ampalu/Sumpur Kudus yang kemudian ternyata desa Silantai namanya. Bagi awak Stasiun Radio AURI "UDO" ini, tidaklah susah untuk dapat segera mengudara. Alat sendernya yang kecil dengan antena yang seolah-olah hanya disampirkan dari pohon-kepohon, maka Stasiun

Radio tersebut sudah dapat berhubungan dengan lawan Stasiun Radio di Jawa.²²⁵

Ketika Mr. Moh. Rasjid datang berkunjung ke Calau untuk bertemu Ketua PDRI tanggal 18 Mei 1949, kalangan ibu yang bertugas untuk memasak sibuk mencari ikan tawar yang akan disuguhkan kepada petinggi PDRI. Ketika para petinggi PDRI itu bertemu di ruang tengah rumah gadang itu, orang-orang yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan mendekat karena sudah dijaga ketat oleh tentara. Mansur hanya beberapa menit mendengar dari ruang belakang rumahnya, para petinggi PDRI itu berbincang-bincang dengan bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia.²²⁶

Calau merupakan jorong dari nagari Sumpur Kudus, dimana mata pencarian masyarakatnya fokus pada petani gambir. Mansur menuturkan, bahwa pada saat petani sibuk beraktifitas memeriksa kebun gambirnya yang terdapat di sekitar Calau yang dikelilingi bukit dan gunung, sering diamati oleh tentara AU yang bertugas membawa sender. Umar Said mendeskripsikan dengan baik suasana di depan rumah Ma'rifah Rauf Datuk Rajo Malayu (ayah Ahmad Syafii Maarif) terdapat sebuah kolam yang luas dan airnya jernih. Selain itu, dalam karyanya, Umar Said menuturkan ingatannya, ketika Datuk Rajo Malayu memberitakan anak perempuannya lahir dengan selamat.

Pak Datuk dengan muka berseri-seri menceritakan, bahwa istrinya semalam melahirkan anak perempuan. Pak Datuk minta kenang-kenangan berupa sebuah nama untuk anak puterinya yang baru lahir. Kami berlima awak Stasiun Radio lalu berunding, nama apakah sebaiknya diberikan kepada anak yang baru lahir itu. Kami masing-masing menyebut nama-

²²⁵ Lebih lanjut baca Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)...*, hlm.122.

²²⁶ Mansur Dt. Penghulu Mudo, wawancara, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

nama yang bagus-bagus, yaitu dari nama Belanda sampai nama Spanyol dari nama Arab sampai kenama Jawa.²²⁷



Gambar 9 Rumah Halifah yang sudah tua dan rapuh ini menjadi saksi bisu tempat bermalamnya Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara.
Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.

Seluruh awak radio sender saat itu setuju mengaitkan nama putri Datuk Rajo Melayu itu dengan Radio dan Angkatan Udara Republik Indonesia. Beberapa nama yang diusulkan pada masa itu antara lain: Siti Auri, Sanderina Auri, Radiatun Auri, Auri Sumkus dan masih ada 12 nama-nama lainnya diperuntukkan untuk bayi itu. Umar Said pun menulis sebuah nama, yaitu Aurina Radyawati. Nama itu pun disetujui oleh rekan-rekannya yang lain. Lebih lanjut Umar Said menulis:

Kertas tersebut ditunjukkan pada teman-teman lain dan secara aklamasi mereka setuju. Kertas bertuliskan nama,

²²⁷ Lebih lanjut baca Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)...*, hlm.124.

kuberikan kepada Pak Datuk. Tanpa komentar dan tanpa tanya bunyinya “bagaimana, Pak Datuk meninggalkan kami berlima di ruang sender. Kami tidak tahu selanjutnya, apakah nama tersebut digunakan atau tidak.”²²⁸

Selain di Calau, Sjafruddin Prawiranegara dan kelompok awak Stasiun Radio pernah menginap di rumah Halifah (mertua Ahmad Syafii Maarif). Untuk menjamin keamanan dari petinggi PDRI selama bermukim di Sumpur Kudus, selain dikawal tentara dari kesatuan AU, juga dijaga oleh pemuda-pemuda yang berasal dari BPNK, MPRK, dan PMT. Beberapa orang prajurit TNI asal Sumpur Kudus yang ikut menjaga keamanan Ketua PDRI antara lain Mursal, Rajo Badiah, Merak Udin, dan Syamsu Anwar. Sedangkan nama pasukan PMT asal Sumpur Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Nama Pasukan PMT Untuk Kabupaten Militer
Sawahlunto/Sijunjung

No	Nama	Nagari Asal	Kecamatan	Keterangan
1	SalimHalimi	Koto Panjang	Koto VII	Sektor A/III
2	SyahrilTamala			
3	AywarTamin			
4	Zainal			
5	ZakirJamil			
6	Muhammad Nur Said			
7	A. Muis			
8	Bahar			
9	Salim			
10	Agus Salam			
11	RajulinSyarif			

²²⁸ Lebih lanjut baca Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)...*, hlm.122.

No	Nama	Nagari Asal	Kecamatan	Keterangan
12	MakRifat			
13	Muhammad Rasid			
14	Muhammad Jatar			
15	Rasul			
16	A. Munas			
17	M. Yuni			
18	RoslanJamaris			
19	Mardamin			
20	Amir Husin			
21	Syamsu Anwar	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	
22	Majid			
23	Maawi			
24	A. Munir			
25	Ahmad			
26	Bahrunsyah			
27	HasanBasri			
28	Rustam			
29	Amir Hasan			
30	JatarMaliputi			
31	RajoBakimat			
32	Jaari			
33	Ilyas			

Sumber: *Sejarah Perjuangan Kabupaten Rakyat Sawahlunto/ Sijunjung.* (Sijunjung: Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, 1990), hlm. 88.

Selain dijaga oleh pasukan TNI dan PMT, selama bermukim di Sumpur Kudus, rombongan petinggi PDRI juga dijaga oleh pasukan BPNK yang berasal dari kalangan pemuda. Para pemuda ini direkrut oleh Wali Perang nagari Sumpur Kudus yakni Harun Malik. Meskipun usia yang ikut dalam BPNK itu ada yang berada di bawah umur 16 tahun, namun mereka diizinkan karena tekadnya yang keras untuk mempertahankan keberlangsungan

pemerintah darurat. Berikut beberapa nama anggota BPNK yang bertugas di Sumpur Kudus.

Tabel 5
Nama Anggota BPNK di Sumpur Kudus

No.	Nama	No.	Nama
1	Mursal	24	RajoSuari
2	Syamsu Anwar	25	M. Nasir
3	BaharuddinAman	26	M. Janir
4	M. Jarah	27	Kina'an
5	Halifah	28	Mursyal
6	MarahTayap	29	MuhtarGafur
7	Abdul Latif Dt. RajoLelo	30	DamuriGafur
8	Ma'rifah Dt. RajoMelayu	31	Nasaruddin
9	A. Rifa'i Dt. RajoMelayu	32	Syafaruddin
10	MattudinRauf	33	MansyurPanguluMudo
11	IntanManirun	34	HasanBasri
12	Amir Said	35	Zakaria
13	Syamsi	36	Azra'i
14	MarakAlam	37	Nasaruddin. J
15	HamzahLakon	38	M. Tari
16	Imam Biran	39	Ridwan
17	SyukurMalinPermato	40	Al Mauya
18	RajoKana'an	41	Banurun
19	RajoSaluhi	42	SyafrilMarah
20	RajoBadiyah	43	RajoLaut
21	RajoBadiri	44	Saharuddin
22	Rajo Muhammad Kahar	45	Yahya
23	M. Sadin		

Sumber: Sudarman Dt. Bandaro Hitam, "Pertemuan Sumpur Kudus.", *Manuskrip* (Sumpur Kudus: 2013), hlm. 4.

Bupati militer Sawahlunto/Sijunjung Sulaiman Tan Tuah Bagindo Ratu pada masa itu juga ikut memotivasi masyarakatnya untuk bersama-sama menyukseskan dan memfasilitasi pemerintah PDRI selama bermarkas di Sumpur Kudus. Tidak

hanya difasilitasi dan dilayani kebutuhan sehari-harinya, Mr. Soetan Moh. Rasjid pada tanggal 24 Oktober 1974 pernah mengungkapkan, bahwa pemerintah PDRI diberi pinjaman sebesar Rp 50.000.000 dan belum pernah dilunasi kepada Halifah tokoh masyarakat Sumpur Kudus.²²⁹ Dalam autobiografinya, Ahmad Syafii Maarif menyebutkan, bahwa jasa Halifah cukup besar dalam memenuhi kebutuhan pokok, salah satunya menyuplai berton-ton beras pada masa PDRI di Sumpur Kudus. Selain itu, menurut Nazaruddin pada masa PDRI itu, Sumpur Kudus menyediakan 20 rumah untuk ditempati oleh petinggi PDRI dan tim stasiun radio sender.²³⁰



Gambar 10 Nazaruddin dan penulis di Sumpur Kudus. Nazaruddin merupakan salah seorang saksi peristiwa PDRI di Sumpur Kudus.
Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.

²²⁹Yuzirwan Rasyid, "Relevansi Spirit PDRI dan Patriotisme Islam" *Padang Ekspres* tanggal 28 Desember 2012.

²³⁰Nazaruddin, *wawancara*, tanggal 14 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

Selain itu, kisah perjuangan masyarakat Sumpur Kudus dan Calau pada masa PDRI juga tampak dari aktivitas bagian logistik dan perempuan di dapur umum. Menurut Mansur, aktivitas logistik pernah dilakoninya dengan mengumpulkan bahan-bahan makanan dari rumah ke rumah bersama delapan orang temannya. Meskipun tergolong belia pada masa itu, namun Mansur yang tamatan Gubernemen School itu berjalan berkilo-kilometer untuk mengumpulkan bahan logistik. Lebih lanjut Mansur menuturkan, “Saya pada masa itu ditugaskan untuk mengkoordinir anggota untuk mencari beras selama masa PDRI, terutama wilayah Calau. Bagian logistik ini berada di bawah kontrol BPNK.”²³¹ Beberapa orang perempuan Sumpur Kudus yang pernah terlibat aktif di dapur umum pada masa PDRI bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Nama Anggota Dapur Umum di Sumpur Kudus

No	Nama	No	Nama
1	Monang	15	SitiSuari
2	Lamsiah	16	SitiNursiah
3	Bainah	17	Bariah
4	Sari Alam	18	Nurbahri
5	Sari Baganti	19	Kami Sari
6	Gandolmat	20	Dali'ah
7	SitiJamilan	21	SitiSuari
8	Nurkisah	22	SitiNunah
9	Nurkidah	23	Nunah PTP
10	Mariyah	24	Nunah PLYG
11	Hamsinah	25	Ruadan
12	Kisah	26	Rohani
13	Sarintan	27	Sari Kayo
14	Rosna	28	Saridan

Sumber: Sudarman Dt. Bandaro Hitam, “Pertemuan Sumpur Kudus.”, *Manuskrip* (Sumpur Kudus: 2013), hlm. 4.

²³¹ Mansur Dt. Penghulu Mudo, wawancara, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

Mariyah, salah seorang petugas di dapur umum menjelaskan tugas yang pernah dijalannya pada masa PDRI di Sumpur Kudus. Petugas dapur umum biasanya ada juga yang merangkap untuk mencari kebutuhan logistik. Setiap pagi, menurut Mariyah, perempuan-perempuan di Sumpur Kudus sudah berkumpul di dapur umum untuk memasak makanan. Masakan yang biasanya mereka sajikan untuk petinggi PDRI, pasukan pengawal, tim stasiun radio sender adalah ikan asin lado merah, goreng kentang, ikan goreng, maupun ikan gulai.²³²

Calau pada tahun 1949 itu masih dikelilingi hutan lebat dan terkadang harimau sering “turun” untuk mencari kambing atau binatang piaraan penduduk. Menurut Datuk Rajo Melayu, yang dituturkan kembali oleh Umar Said Noor, bahwa rumahnya sering didatangi harimau. Namun, selama Umar Said bermukim di Calau, ia tidak pernah mendengar suara harimau. Ia menduga, binatang itu takut pada suara gemuruh generator Stasiun Radio yang dihidupkan untuk menambah tenaga listrik pada *accu* radio.²³³

²³² Mariyah, *wawancara* tanggal 20 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

²³³ Umar Said menuturkan, “Pak Datuk mengatakan kalau seekor harimau datang di bawah rumah, binatang tersebut berjalan-jalan kian kemari sambil sekali-kali memukul-mukuli dengan kukunya yang tajam pada tiang-tiang rumah. Walau selama kami berada di rumah tersebut tidak pernah melihat harimau bertandang di bawah rumah, akan tetapi aum dari binatang-binatang tersebut sering kami dengar dari arah hutan yang mengelilingi desa Calau.” Lebih lanjut baca Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.123.



Gambar 11 Calau pada masa PDRI merupakan bagian dari wilayah nagari Sumpur Kudus. Pada masa sebelum PDRI, harimau sering turun mencari ternak-ternak penduduk di Calau. **Sumber:** Dokumentasi Zusneli Zubir.

Pada suatu sore hari awak tim radio sender mendengar rencana dari penduduk yang akan memburu harimau. Beberapa orang penduduk Calau menyatakan melihat dengan mata kepala sendiri harimau yang memakan ternak mereka. Mereka pun sepakat untuk menangkap dan membunuh binatang buas itu. Sore hari itu, menurut Umar Said lima orang laki-laki mempersiapkan peralatan untuk menjerat harimau itu, mulai dari tali-tali, parang, tombak, serta senapan tomong.



Gambar 12 kiri M.S Tamimi (Komandan Stasiun Radio UDO) dan Bawah : Umar Said Noor. Kedua perwira ini memiliki memori kuat dengan penduduk Sumpur Kudus dan Silantai. **Sumber:** Umar Said Noor, 1999: hlm. 54 dan 58.

Mansur pun membenarkan kondisi Calau yang sering didatangi harimau jelang kedatangan tim radio sender ke sana. Ia menuturkan, rencana penangkapan harimau itu biasanya dilakukan setelah Salat Maghrib. Mansur masa itu melihat lima orang laki-laki dewasa menuju tepi hutan, di mana harimau yang diincar itu diperkirakan lewat.²³⁴ Mereka pun berhasil menangkap harimau. Pagi harinya anak-anak bukan main senangnya melihat orang tua mereka berhasil menangkap harimau yang mereka cari. Tim radio sender yang mendengar berita tertangkapnya harimau itu langsung menuju asal suara. Lebih lanjut Umar Said menuturkan:

Kamipun berlari menuju ketempat dimana harimau yang mereka tangkap adalah harimau yang panjang badannya

²³⁴ Mansur Dt. Penghulu Mudo, wawancara, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

kurang lebih 2 meter. Setelah penduduk puas menontonnya, harimau yang berloreng-loreng tersebut dikupas kulitnya. Awak Stasiun Radio mendapatkan bagian kulit harimau yang dikuliti tersebut, masing-masing beberapa centimeter persegi sebagai kenang-kenangan dari penduduk Calau. Sampai kini kulit harimau walau hanya beberapa persegi sentimeter kusimpan dan kujadikan sebuah sampul buku catatanku.²³⁵



Gambar 13 Tugu Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumpur Kudus yang menjadi saksi pernah menjadi bagian episode keberlangsungan pemerintah Republik Indonesia. **Sumber:** Dokumentasi Zusneli Zubir.

Satu memori lainnya dikisahkan Mansur, ketika tim radio sender dan Indratjaja (Menteri Perhubungan PDRI) diberi hadiah golok dari potongan pedang samurai eks tentara Jepang yang ditemukan di hutan. Saat itu, samurai itu dibawa ke tukang besi dan meminta agar pedang samurai itu dijadikan golok yang bagus. Pandai besi itu pun menyanggupi dan pedang samurai itu dipotong menjadi empat bilah golok dan diberi tangkai yang cantik. Pisau golok itupun atas persetujuan Indratjaja dibagikan kepada empat orang tim Stasiun Radio, namun kepala tim stasiun

²³⁵Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)...*, hlm.124.

radioDick Tamimi tidak mendapat bagian. Umar Said menulis dalam memonya, bahwa ia mendapat sebilah golok namun hilang pada tahun 1952.

3. Rombongan PDRI Menuju Silantai

Setelah dua minggu bermukim di Sumpur Kudus, rombongan PDRI ini pun bergerak meninggalkan tempat itu tanggal 4 Mei 1949.²³⁶ Rombongan PDRI itu meninggalkan desa Calau untuk meneruskan perjalanannya ke arah Halaban. Satu wilayah yang dituju oleh rombongan Sjafruddin Prawiranegara adalah Silantai. Perjalanan dari Calau ke Silantai bisa ditempuh satu hari penuh dengan berjalan kaki. Rombongan PDRI berangkat pada pagi hari dan sampai di Silantai menjelang salat magrib. Perjalanan menuju Silantai ini dinarasikan dengan baik oleh Umar Said Noor. Perjalanan menuju Silantai dimulai dari jalan yang rata, mendaki perbukitan menyeberang beberapa anak sungai hingga menuju puncak perbukitan. Setelah itu, ada jalan setapak untuk menuruni bukit yang merupakan satu-satunya jalan bagi penduduk untuk menyeberangi bukit menuju Halaban.

Tim stasiun radio sender adalah rombongan pertama yang memasuki nagari Ampalu pada pukul 16.00. Sesampai di nagari Tetumbuhan mendekati puncak berupa semak-semak sedangkan yang telah kami lalui berupa pohon-pohonan biasa. Aku berjalan cepat. Teman jalanku waktu aku naik bukit itu adalah Komodor Udara Soejono Kepala Staf AURI PDRI dengan ajudannya Sersan Udara Soedarsono.

Kami bertiga paling pertama mencapai puncak, meninggalkan seluruh anggota rombongan yang berjumlah kurang lebih 30 orang belum terhitung para pembawa barang-barang. Sampai di puncak kami bertiga beristirahat sambil menunggu anggota rombongan lain, serta menikmati pemandangan di sekitar kami. Bungkus-bungkus bekal makanan pun kami buka dan bersantap dengan lahapnya.

Aku tidak merasa, bahwa aku melepaskan tas yang selalu kubawa ke mana-mana dan kugantungkan pada sebuah dahan

²³⁶Nazaruddin, *wawancara*, tanggal 14 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

semak-semak yang ada di dekatku. Setelah kami bertiga cukup beristirahat dan kenyang makan dan minum, tanpa menunggu teman-teman rombongan lainnya kami berangkat lagi meluncur ke arah Halaban dengan lebih cepat jalanya.²³⁷

Ampalu, rombongan PDRI dijemput beberapa orang anggota BPNK yang ditugaskan oleh wali nagari Ampalu. Sambil menunggu rombongan lainnya datang, Umar Said Noor, Dick Tamimi, Haji Soedjono, Soedarsono beristirahat di rumah penduduk nagari Ampalu. Umar Said baru menyadari bahwa tas kerjanya yang berisi dokumen negara dan rekaman sender tertinggal di puncak bukit.

Sebagai seorang perwira, Umar Said merasa lalai dan bersalah karena meninggalkan dokumen penting berupa catatan sistem pengiriman radiogram rahasia, bila bocor ke tangan tentara Belanda tentunya bisa menjadi ancaman terhadap rombongan petinggi PDRI. Umar Said pun segera berlari mengejar tas kerjanya yang tertinggal di puncak bukit. Ketika ia mulai menaiki bukit itu, Umar Said berjumpa dengan Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Lukman Hakim, Menteri Teuku Mohammad Hassan dan pejabat-pejabat tinggi PDRI lainnya dan anggota kelompok Stasiun Radio lainnya.²³⁸

²³⁷Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.126.

²³⁸Lebih lanjut Umar Said Noor menulis, "Mereka semua menegur, tetapi tidak sempat kujawab satu persatu. Aku lari terus menanjak gunung itu! Aku berhenti sebentar, waktu aku berjumpa dengan para pembawa barang dengan permintaan untuk menemaniku naik ke atas atau jika tidak dapat menunggulah saya di tempat. Sementara hari sudah mulai gelap. Tidak seorangpun yang mau menemaniku, bahkan untuk menunggu saja tidak ada yang menyanggupinya. Aku tidak gentar dan aku terus lari ke atas tanpa memandang kemungkinan-kemungkinan bahaya yang mengancam diriku. Alam yang sudah gelap, hutan yang lebat, batu-batu yang runcing ujungnya dan hantu-hantu yang menyebarkan wangi-wangian tidak kuhiraukan, pokoknya aku harus mendapatkan kembali tasku itu! Akhirnya aku sampai di puncak gunung dan alhamdulillah aku dapatkan tasku masih aman tergantung pada dahan yang sama waktu aku meninggalkan tempat itu. Dengan sigap kuambil tas tersebut dan dengan sigap pula aku mulai menuruni gunung itu kembali. Aku mencoba menyusul anggota rombongan yang terakhir, tetapi tak seorangpun dapat kukejar sampai tiba kembali di dataran nagari Ampalu. Baru sampai di ujung dataran tersebutlah aku mengejar para pembawa barang yang amat lambat jalannya. Setelah itu aku berjalan biasa dengan

Silantai yang sering disebut oleh beberapa penulis sebagai bagian dari Sumpur Kudus, terletak pada dataran tinggi, elok pemandangannya dan sejuk hawanya. Masyarakat Silantai menurut Intan Sari Datuk Mugek Parajan menyambut hangat kedatangan rombongan PDRI yang berjumlah 100 orang di Silantai. Rombongan PDRI itu diinapkan di beberapa lokasi, yakni Sungai Kolam, Guguk, Padang Aur (staf keuangan PDRI), Unggan. Khusus untuk rombongan tim Stasiun Radio AURI “UDO” ditempatkan di Siaur.²³⁹



Gambar 14 Intan Sari Datuk Mugek Parajan, seorang petugas logistik di Silantai pada masa PDRI. Ia menuturkan rapat akbar PDRI berlangsung di rumah Wali Perang Hasan Basri. Pernyataan ini diperkuat dengan tulisan memoar Umar Said Noor. **Sumber:** Dokumentasi Zusneli Zubir.

tenang bersama mereka. Aku sampai di tempat penginapan dan berkumpul kembali dengan teman-teman awak Stasiun Radio. Lebih lanjut baca Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.128.

²³⁹Intan Sari Datuk Mugek Parajan, wawancara, tanggal 21 Februari 2014 di Silantai.

Silantai yang terletak di lembah Sinamar itu pada awalnya hanya desa yang sepi, namun ronanya mulai berubah ketika rombongan PDRI memecah keheningan daerah tersebut. Intan Sari yang merupakan ketua logistik yang bertugas mengumpulkan bahan makanan dari rumah-rumah penduduk menegaskan, bahwa mereka bertugas menyediakan makanan dari dapur umum dan menyiapkan tempat untuk sidang Pleno PDRI itu. Pada masa itu, perempuan-perempuan yang bekerja di dapur umum dikoordinator oleh Nursani istri Wali Perang Silantai Hasan Basri. Sedangkan anggota yang bergerak di dapur umum adalah Jamilah (orang tua Novirman Jamarun), Menak, dan Jalisah.²⁴⁰



Gambar 15 Nursani (92 tahun) isteri Wali Perang Hasan Basri. Pada masa PDRI Nursani ditunjuk sebagai koordinator perempuan yang bekerja di dapur umum Silantai. **Sumber:** Dokumentasi Zusneli Zubir.

Meskipun Silantai posisinya dianggap aman dari kejaran tentara Belanda, namun untuk menjaga keselamatan dari Ketua PDRI dan rombongan, Hasan Basri selaku wali perang menunjuk

²⁴⁰ Nursani, 92 tahun. *wawancara*, tanggal 14 Februari 2014: Silantai

ketua BPNK Silantai, yakni M. Siran untuk berpatroli di nagari Silantai dan di perbatasan Silantai. Pada hari pertama masing-masing petinggi PDRI termasuk tentara diinapkan di rumah-rumah penduduk. Rombongan Stasiun Radio UDO menginap di rumah wali perang Hasan Basri, Harun Malik diinapkan di Lubuk Hijau, Mr. Lukman Hakim, Mr. Karim, Latif menginap di Tandak Onggan. Sedangkan Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara menginap di Surau Tabiang Silantai.²⁴¹ Hari selanjutnya para toko PDRI juga menginap di Dumpur Kudus, seperti di rumah Hanifah saudagar gambir dan di rumah Ma'rifah Rauf Datuk Rajo Melayu. Komunikasi antara petinggi PDRI, wali perang, dan masyarakat Silantai pada masa itu, menurut Syamsul Anwar terjalin baik. Masyarakat senantiasa mengunjungi Sjafruddin Prawiranegara di Surau Tabiang untuk mengantarkan makanan, minuman, dan buah-buahan. Meskipun statusnya sudah menjadi "Presiden", namun Sjafruddin menolak menginap di rumah penduduk, dengan alasan ingin menjalankan ibadah shalat.²⁴²



Gambar 16 Surau Tabiang merupakan tempat peristirahatan Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara. Dalam memoarnya Sjafruddin masih mengingat keramahamahan dan keikhlasan dari masyarakat Silantai.
Sumber: Dokumentasi Zusneli Zubir.

²⁴¹Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di Silantai.

²⁴²Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di Silantai.

Perlu diketahui, bahwa Sidang Pleno PDRI terjadi ketika usia PDRI memasuki umur 7 bulan dan pernah bersidang secara lengkap dua kali. *Pertama*, pada waktu pembentukan kabinet PDRI di amplasemen bekas Pabrik Teh Halaban. *Kedua*, menjelang dibubarkannya PDRI di Silantai. Persoalan dimana lokasi tempat penyelenggaraan Sidang Pleno inilah yang kemudian menimbulkan polemik, apakah di Sumpur Kudus atau di Silantai? Namun, persoalan ini pun sudah terjawab dalam memoar Umar Said Noor yang menegaskan, bahwa Sidang Pleno berlangsung di Silantai, bukan di Sumpur Kudus.



Gambar 17 Rumah Wali Nagari Militer Silantai Hasan Basri yang menjadi salah satu saksi dari Rapat Pleno yang dilaksanakan tanggal 14-17 Mei 1949. **Sumber:** Dokumentasi Zusneli Zubir.

Salah satu ciri khas dari Sjafruddin Prawiranegara yang selalu diingat Masyarakat Sumpur Kudus dan Silantai adalah ketika jalan-jalan pagi, ia selalu membawa tongkat yang terbuat dari bahan rotan (lihat gambar halaman 17). Untuk mengabadikan kenangan terhadap Ketua PDRI pasca kedatangannya, masyarakat Ampalu menamakan jalan di sana dengan Sjafruddin Prawiranegara. Dalam kesibukan sidang-sidang pada hari-hari itu, Sjafruddin Prawiranegara tidak pernah melupakan awak Stasiun Radio dan menanyakan kesehatan dan kecukupan

persediaan makanannya. Lebih lanjut Umar Said Noor mengungkapkan:

Benar-benar besar perhatian Ketua Menteri terhadap Stasiun Radio AURI “UDO” ini yang dengan setia mengikuti secara terus menerus perjalanan Rombongan Pusat Pemerintahan PDRI ini, Di Silantailah Ketua Menteri dengan para menterinya selama kurang lebih empat puluh satu hari mengalami hari-hari sibuk dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya selama perjalanan selama itu. Tidak sempat lagi para menteri pergi ke pasar atau apalagi main sepakbola seperti waktu di Bidar Alam. Tetapi Ketua Menteri hampir setiap pagi dengan beberapa teman berjalan pada pagi-pagi hari.²⁴³

Sidang lengkap PDRI tersebut dimulai sejak tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Mei 1949 secara resmi, akan tetapi dalam kenyataannya, menurut Syamsul Anwar anggota Kabinet PDRI, masih tetap berada di Silantai untuk berunding dan membicarakan hal-hal yang perlu diselesaikan hingga hari-hari menjelang Juni 1949. Syamsul Anwar melihat para Menteri kabinet PDRI hilir mudik dari penginapannya ke rumah wali perang di Silantai.²⁴⁴ Selain itu, kesibukan juga tampak dari tim Stasiun Radio UDO yang berkorespondensi dengan radiogram. Tamu-tamu yang datang tidak hanya datang dari Bidar Alam dan Kototinggi saja, akan tetapi juga dari daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Dibandingkan dengan daerah sebelumnya, menurut Umar Said, di Silantailah Stasiun Radio itu mengalami kesibukan tinggi pekerjaan sehari-harinya.²⁴⁵

Tanggal 14-17 Mei 1949 merupakan hari-hari penting untuk pembicaraan krusial, terutama dihentikan atau diteruskannya PDRI. Apabila PDRI dihentikan dan mau berunding dengan Belanda, maka pemerintah PDRI sudah menuruti keinginan

²⁴³Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.131.

²⁴⁴Syamsul Anwar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di Silantai.

²⁴⁵Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.131.

pemerintah di Jawa. Pemerintahan di Jawa, akhirnya memutuskan menemui Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat. Petinggi PDRI termasuk Mr. Sutan Moh. Rasjid memutuskan pertemuan dengan utusan dari Jawa dilaksanakan di Padang Japang pada tanggal 17 Juli 1949.

Hari-hari terakhir tim Stasiun Radio UDO di Siaur dikisahkan oleh Umar Said Noor dalam memoarnya. Bila Opsir Udara Dick Tamimi (Komandan Stasiun Radio) tinggal bersama Syafruddin Prawiranegara, kondisi berbeda dialami tim sender yang ditempatkan di Siaur (kurang lebih 3 kilometer dari desa Silantai). Di Siaur, tim stasiun radio ditempatkan di sebuah rumah baru dan keadaannya sangat bersih. Bagian depan maupun di samping rumah tersebut terdapat kolam ikan yang terawat baik.

Kami diberi izin khusus untuk memancing ikan di kolam tersebut sesuka kami. Kalau malam hari tiba, kami mendengar gemerciknya air yang mengalir dari sesuatu kolam ke kolam lainnya dan suara klasik dari cengkerik terdengar di antara gemerciknya air tadi, sungguh sesuatu kenangan yang menyenangkan. Perlu diketahui juga, bahwa mengingat rumah di desa Siaur, kami dari kelompok Stasiun Radio bertempat tinggal bersamaan dengan anggota rombongan lainnya, maka Stasiun Radio untuk amannya ditempatkan tersendiri di desa Guguk pada sebuah rumah kecil cukup untuk menempatkan alat-alat Stasiun Radio dan seorang untuk bekerja.²⁴⁶

Wilayah Siaur Ampalu membentang dari Sungai Kolam, Cuguk, Padang Aur, Unggan, Sabiluru, Tamporungo, Sisawah, Mangunai Tinggi, Padang Mangunai, Linggan, Silantai sampai Koto Simpang. Daerah ini dialiri oleh Batang Sinamar, sehingga wilayah

²⁴⁶Lebih lanjut Umar Said Noor mengisahkan, "Awak Stasiun Radio tetap menempati rumah di Siaur, sehingga kalau kami bekerja harus berjalan kaki kedesa Cuguk. Tetapi desa itu sangat dekat dengan desa Siaur hanya perjalanan kurang lebih seperempat jam saja. Di desa Guguk kalau kami bertugas malam hari selalu ditemani oleh pemuda desa tersebut secara bergiliran." Lebih lanjut baca Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)...*, hlm.132.

ini subur dan makmur. Selain itu padi, kelapa, tanaman sayur, kolam-kolam ikan tampak tersusun rapi. Tidak hanya itu, surau-surau dan rumah-rumah yang ada pada medio 1949 itu masih dengan arsitektur gonjong. Umar Said pun memuji, bahwa petinggi PDRI tidak salah memilih tempat untuk rapat pleno dan menjamu dengan baik tamu-tamunya sampai seratus orang lebih.

Dalam memoarnya Umar Said menarasikan suasana di sekitar penginapannya dengan pemandangan kolam-kolam ikan dan sebuah kincir air untuk menggerakkan alat penumbuk padi. Selain itu, pada pagi harinya perempuan-perempuan Siaur menumbuk padi dengan bergantian. Bila seorang penduduk Siaur melaksanakan hajatan, tim Stasiun Radio UDO ini selalu diundang. Mereka juga pernah memenuhi undangan penduduk untuk menyaksikan permainan *Badabuih* atau debus. *Badabuih* adalah permainan menginjak api atau menusuk lidah dengan barang tajam dan sebagainya yang dilakukan pada malam hari.

Jika kami menonton perlu membawa obor sebagai penerang, jalan menuju ke desa yang menyelenggarakan *badabuih*. Di tempat-tempat pertunjukan kami selalu mendapatkan tempat istimewa dan mendapatkan hidangan-hidangan yang menyejukkan. Penduduk menyebut kami dengan kata-kata “bapak-bapak”. Sebenarnya kami agak canggung dipanggil bapak, karena kami masih relatif muda-muda sekitar 22 sampai 24 tahun usianya dan masih bujangan, tetapi begitulah kenyataannya.²⁴⁷

Selain itu, setiap hari rombongan stasiun radio ini menerima kiriman makanan dari penduduk. Sebagai imbalan, Umar Said menyetel radio untuk mendengarkan warta berita atau musik. Malah, tim stasiun radio ini memberi kesempatan terutama anak-anak atau remajanya menyanyi dengan corong radio. Terkadang tim sender bergantian menyanyi lagu-lagu Melayu atau hari ini

²⁴⁷ Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)...*, hlm.133.

dinamakan *dangdut*. Selain laki-laki, gadis-gadis Siaur pun sering datang mendengarkan warta berita dan musik dari radio, tetapi dari antara gadis-gadis itu, menurut Umar Said tidak berani bernyanyi di depan corong radio. Gadis-gadis itu dengan malu-malu menanyakan seluk beluk radio dan menanyakan nama-nama bagian sender dan cara bekerjanya. Mereka cukup antusias terhadap pengetahuan ini dan mendengarkan penjelasan-penjelasan awak Stasiun Radio dengan tekun dan penuh perhatian. Dari gadis-gadis inilah tim stasiun radio UDO mendapatkan kiriman makanan, mulai dari pisang, kacang rebus sampai dadih atau susu kerbau dan lemag. Tim stasiun radio pun mengakui, bahwa di Siaurlah mereka sering dimanjakan penduduk, berbeda dengan kondisi perjalanan rute gerilya PDRI di daerah lainnya.

4. Menjernihkan Sisi Pandang Masyarakat Sumpur Kudus dan Silantai Mengenai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Pasca PDRI di Sumpur Kudus dan Silantai muncul persoalan mengenai peran kedua nagari dalam Sidang Pleno pada pertengahan Mei 1949. Masing-masing wilayah mengklaim diri sebagai daerah yang berhak menyatakan diri sebagai basis PDRI. Bila dilihat lebih jernih, persoalan ini seharusnya tidak mengemuka dan menjadi jurang perpecahan, sebab kedua nagari ini berada dalam Kecamatan Sumpur Kudus.

Beberapa penulis memang menulis berbeda mengenai peranan antara nagari Sumpur Kudus dan Silantai pada masa PDRI. Ada penulis yang mengklaim bahwa fakta-fakta yang ia temuka berdasarkan lama bermukimnya tokoh-tokoh PDRI, ataupun pertemuan resmi (sidang pleno). Menurut Didi Nazmi, bahwa persoalan ini muncul, ketika Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung berencana membangun Tugu/Monumen PDRI di salah satu desa. Kemudian mengemuka dua nagari, yakni Sumpur Kudus dan Silantai.²⁴⁸

²⁴⁸Didi Nazmi, "Konperensi Besar PDRI di Sumpur Kudus: Kontroversial Dua Nagari Bertetangga.", *Makalah* disajikan dalam Seminar Sehari Peranan Rakyat Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Pada Masa PDRI tahun 1949. Seminar dilaksanakan tanggal 30 April 2000, hlm. 1.

Penyaji sebelumnya, Didi Nazmi berusaha mengungkap keberadaan dari peranan nagari Sumpur Kudus melalui studi pustaka dengan mengutip beberapa literatur yang bersifat primer seperti *Tempo*, *Panji Masyarakat*, *Risalah* dan *Titian Persahabatanyang* diterbitkan Corps Tentara pelajar. Sisanya Didi mencoba mengungkap melalui guntingan berita, tajuk rencana, artikel baik berupa kolom maupun bersambung, serta resensi buku.



Gambar 18 Ma'rifah Rauf Datuk Rajo Melayu yang juga merupakan ayah kandung Ahmad Syafii Maarif. Pada masa PDRI rumahnya dijadikan sebagai tempat menginapnya tim Stasiun Radio UDO di Calau. **Sumber:** Ahmad Syafii Maarif, 2006: 411.

Memang persoalan nagari mana yang lebih berhak menyandang predikat basis PDRI, pada dasarnya kedua nagari memiliki peran yang cukup krusial. Jika melihat lebih jernih, tokoh-tokoh nagari baik di Sumpur Kudus maupun Silantai telah

mengakui, bahwa ketua PDRI pernah tinggal di rumah Ma'rifah Datuk Rajo Melayu, rumah Halifah, maupun surau Tabing Silantai. Selain itu, bila ditelaah lebih lanjut dalam beberapa literatur juga menegaskan bahwa kedua nagari memiliki peran yang sama.

a. Kesaksian Umar Said Noor

Umar Said merupakan tokoh PDRI yang bertugas mengoperasikan Stasiun Radio AURI "UDO". Sebagai perwira AU ia dengan jernih menarasikan proses kedatangan rombongan PDRI termasuk dirinya melalui Calau Sumpur Kudus, hingga mereka mengadakan rapat pleno di nagari Silantai.

"Pengalaman berikutnya adalah perjalanan jalan kaki menuju Sumpur kudus. Sebenarnya yang kami tuju, bukanlah Sumpur Kudus akan tetapi desa Calau di wilayah tersebut. Seperti dijelaskan di atas, rombongan PDRI ini tidak berjalan secara rombongan besar-besaran tetapi terbagi-bagi atas beberapa rombongan dan rombongan-rombongan kecil itupun tidak selalu berkelompok, kadang-kadang ada rombongan yang hanya dua orang. Beda jarak tempuhpun kadang-kadang mencapai 1 sampai 3 jam perjalanan."²⁴⁹

"Kelompok awak Stasiun Radio baru sampai di Calau pada tanggal 25 April 1949, sebagai rombongan terakhir, Kelompok awak Stasiun Radio menempati rumah penduduk bernama Datuk Rajo Melayu. Desa Calau ini termasuk desa kecil/ tetapi kesibukan sehari-harinya dapat dilihat dari para petani gambir yang setiap harinya memeriksa kebun gambirnya masing-masingnya di sekitar kampung yang dikelilingi bukit dan gunung."²⁵⁰

"Sidang lengkap PDRI tersebut sejalan mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Mei 1949 secara resmi, akan tetapidalam kenyataannya mereka, yaitu anggota

²⁴⁹ Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.112.

²⁵⁰ Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*..., hlm.120.

Kabinet PDRI, masih tetap berada di Silantai untuk berunding dan membicarakan hal-hal yang perlu diselesaikan/ hingga hari-hari menjelang Juni 1949. Itu dapat dilihat dari hilir mudiknya para Menteri di Silantai, Serta korespondensi dengan radiogram yang dilayani Stasiun Radio PHB AURI "UDO" dengan Yogyakarta. Tamu-tamu yang datang tidak hanya datang dari Bidar Alam dan Kototinggi saja, akan tetapi juga dari daerah-daerah lain di Sumatera Barat. Di Silantailah Stasiun Radio AURI "UDO" mengalami kesibukan tinggi pekerjaan sehari-harinya."²⁵¹

Penjelasan yang cukup gamblang dari Umar Said Noor, menandakan ia memiliki ingatan historis yang cukup kuat dan menerapkan konsep siapa, apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana (5W+1H) dalam tulisannya. Sebagai saksi primer tentunya tingkat validitas tulisan Umar Said bisa dipertanggung jawabkan. Ia tidak memiliki kecenderungan berpihak terhadap salah satu nagari, bahkan ia mengungkap pengalaman-pengalamannya yang berkesan ketika ia sampai di Bidar Alam, Calau, Sumpur Kudus, maupun Silantai.

b. Rapat Paripurna Kabinet PDRI di Silantai versi Marah Joenoes

Marah Joenoes penulis biografi Mr. Sutan Moh. Rasjid mengakui bahwa pertemuan bersejarah petinggi PDRI dilangsungkan di Silantai Kecamatan Sumpukuduih (Sumpur Kudus). Sebagai penulis dengan background militer, Marah Joenoes tentunya tidak asal menulis pernyataan ini karena ia tentu terlebih dulu melakukan cross check dengan sang tokoh itu sendiri.

Lebih lanjut Marah Joenoes menulis, Gubernur Militer Rasjid dan stafnya sampai ke tujuan tanggal 12 Mei 1949. Selain sebagai Gubernur Militer Sumatera Tengah, Rasjid adalah Menteri Dalam

²⁵¹Umar Said Noor, *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)...*, hlm.131.

Kabinet PDRI. Ketua rapat Mr. Sjafruddin Prawiranegara membuka dan memimpin rapat yang mengambil tempat di rumah Wali Perang Silantai tanggal 14 Mei 1949.²⁵²

c. Kesaksian Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara memiliki memori yang sama kuatnya dengan Umar Said Noor, terutama mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah ia alami di Sumpur Kudus dan Silantai. Bahkan, ia menggoreskan pengalamannya dalam *Islam Dalam Pergolakan Dunia* yang dikarang oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara selama beliau berada di Silantai. Keterangan dari buku ini dapat kita baca pada penjelasan pengarang diantaranya :

...buat sementara sudah kenyang akan jalan-jalan yang sempit dan berbelit-belit, penuh degan pacet, lintah dan agas yang semuanya perlu dilalaui untuk sampai pada tempat yang indah permai, ditengah-tengah sawah kuning mengemas, dikelilingi bukit yang membiru, dipusal alam Andalas... ditengah-tengah rakyat Silantai yang sangat sederhana.²⁵³

²⁵²Marah Joenoes, *Mr. H. St. Moh. Rasjid. Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur*. (Pekanbaru: PT Cerya Riau Mandiri Printing, 2013), hlm. 142.

²⁵³Sjafruddin Prawiranegara, *Islam Dalam Pergolakan Dunia*. (Bandung: Piranti, 1951).



Gambar 19 Kunjungan Syafruddin Prawiranegara ke Silantai pada tahun 1970. Sebelah kanan Ketua PDRI itu adalah Hasan Basri. Sumber: Koleksi Jamilah (isteri Hasan Basri)

Karya Syafruddin Prawiranegara yang kemudian diterbitkan tahun 1951 merupakan tulisan yang pernah ia rampungkan semasa di Silantai. Di tengah kesibukannya sebagai “Presiden” ia membubuhkan tanggal penyelesaian naskahnya, yakni Silantai, Sumpur Kudus 31 Mei 1949. Buku yang kemudian menjadi koleksi rumah Hasan Basri itu, terdapat tulisan dan tanda tangan Mr. Syafruddin Prawiranegara yang ditujukan pada wali nagari perang Hasan Basri sebagai kenang-kenangan selama bermukim di Silantai. Buku ini diserahkan langsung oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sawahlunto tahun 1950.

d. Versi Badan Pemurnia Sejarah Indonesia Minangkabau

Konferensi Besar PDRI dilangsungkan di Dusun Silantai dekat Sumpur Kudus dan Unggan dibuka pada hari Sabtu, 14 Mei 1949 yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara bertempat di rumah Wali Nagari Perang Silantai. Pada 7 Mei 1949 di Jakarta sementara itu telah tercapai persetujuan Roem-Royen. Pada buku

yang sama hulaman 350 dan 379 diceritakan tentang bantuan rakyat untuk konferensi besar tersebut.²⁵⁴

e. Versi Ahmad Syafii Maarif

Ahmad Syafii Maarif adalah putra kelahiran Sumpur Kudus yang berkecimpung dalam dunia akademik, terutama sejarah dan politik. Putra Ma'rifah Datuk Rajo Melayu ini mengungkapkan pemikirannya mengenai Silantai dan Sumpur Kudus dalam perspektif sejarah.

Diantara desa yang pernah dijadikan pusat pemerintahan darurat itu tersebutlah desa Sumpur Kudus di wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sekitar 165 km timur laut kota Padang. Desa ini sangat tersuruk, tapi bukan yang tidak dikenal dalam Sejarah Minangkabau, karena disanalah dahulunya bermukim Raja Ibadat, disisi Raja Adat di Buo, dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar. Saya tidak tahu pasti berapa lama Pak Syaf dengan PDRI-nya tinggal di desa ini. Tapi, dalam suratnya kepada Pengurus, Yayasan Rajo Ibadat Sumpur Kudus, tertanggal 23 Agustus 1988, Syafruddin telah merekamkan suatu keputusan politik yang pernah diambil PDRI didesa ini..²⁵⁵

Dalam rapat PDRI tanggal 16 Mei 1949, menurut Syafii Maarif telah dibahas Roem-van Royen Statement dan diputuskan oleh rapat PDRI yang dihadiri oleh semua anggotanya, bahwa PDRI tidak dapat setuju dengan beleid (kebijakan) pemimpin-pemimpin di Bangka, namun tidak akan membangkang, melainkan akan mengembalikan mandat pembentukkan PDRI yang telah dibuat oleh Presiden Soekarno (dan Hatta) pada tanggal 19 Desember 1949 sebelum Soekarno-Hatta ditawan Belanda-kembali kepada

²⁵⁴Ahmad Husein, dkk. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945 - 1950*. jilid II.(Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau,1981), halaman 348.

²⁵⁵Ahmad Syafii Maarif, "Sumpur Kudus dan PDRI" dalam *Panji Masyarakat* tanggal 10 Maret 1989.

Presiden. Dengan demikian maka terpelihara persatuan dan kesatuan pimpinan dan tanggungjawab pemerintahan kembali kepada Soekarno Hatta.

BAB V

KISAH SURAM PERGOLAKAN DAERAH DAN PECAHNYA GESTAPU DI SUMPUR KUDUS

A. Situasi Politik Menjelang Pecahnya PRRI

1. Situasi Sijunjung dan Sumpur Kudus Pasca PDRI

Setelah *cease fire* berhenti, pusat Pemerintahan Militer Sawahlunto/Sijunjung dipindahkan ke Palangki. Setelah pusat pemerintahan pindah, kembali digelar rapat konsultasi dan koordinasi dengan semua Camat Militer, Komandan-Komandan Front, serta Kepala Jawatan. Wedana Militer Sutan Mansur Dt. Sati, Thalib anggota Kepolisian ditugaskan dirantau Ikil untuk mengambil dana persiapan masuk Sawahlunto masing-masingnya mendapat dana Rp 200 ribu.

Pada tanggal 20 Desember 1949 setelah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Desember 1949, seluruh staf Bupati Militer yang berada di Palangki dipindahkan ke Sawahlunto sekaligus menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Bupati A. Jarjis Bebastani yang sebelumnya berada di Payakumbuh, kemudian berangkat ke Sawahlunto melalui Bukittinggi.²⁵⁶

Untuk kelancaran roda Pemerintahan, pada tanggal 15 Februari dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara (DPRDS) Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung dengan jumlah anggotanya sebanyak 21 orang dan diketuai oleh Haji Syafei Idris

²⁵⁶Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus: Tidak Diterbitkan, 1990), hlm. 15.

dan wakil ketuanya Muchtar Gafur.²⁵⁷ Keanggotaan DPRDS pada masa itu tidak dipilih, melainkan ditunjuk dua orang dari eks anggota MPRK ditambah tiga orang dari staf penasehat Bupati Militer, sehingga jumlahnya menjadi 21 orang. Kemudian dari anggota DPRDS itu ditetapkan empat orang menjadi anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) mendampingi kepala pemerintahan. Berikut nama-nama anggota DPRDS Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung tahun 1950.²⁵⁸

Kecamatan Koto VII	:Thamrin Dt. Pd. Hitam dan Daalimuddin.
Kecamatan Sumpur Kudus	:Muchtar Gafur dan Ali Saman Dt. Panji Alam.
Kecamatan Talawi	:A.Muluk Pandito Kari dan Marudin.
Kecamatan Sawahlunto	:Sudurdin Ahmad dan Kari Husin
Kecamatan IV Nagari	:Dirun Pk. Sati dan H. M. Daramin.
Kecamatan Sijunjung	:Basir Gani dan Hamdah Manco.
Kecamatan Tanjung Gadang	:Jasiruddin HS dan Saman Rajo Batuah.
Kecamatan Pulau Punjung	:A.Wahid dan M. Zainin
Kecamatan Koto Baru	:Mustafa Yusuf dan Bilal Bukhari.
Staf Penasehat Bupati Militer	:Haji Syafei Idris, M. Syarif Dt. Gunung Emas dan M. Zen Dt. Bijo Dirajo

Pada awal Januari tahun 1950 Pemerintahan Militer Sumatra Tengah dihapuskan, namun jalannya pemerintahan masih belum lancar karena adanya konflik internal antara pihak legislatif dengan eksekutif di Sumatra Tengah. Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 4/1950 yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus

²⁵⁷ Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Barat No.12 tahun 1949.

²⁵⁸ Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PDRI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1948-1949", *Manuskrip...*, hlm. 15.

1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatra Tengah,²⁵⁹ namun pembagian administratif tidak diatur secara tegas sehingga pemerintah daerah tetap melanjutkan jumlah dan format kabupaten yang lama, yakni berdasarkan Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat No. 10/1948. Dengan demikian Sawahlunto/Sijunjung tetap menjadi sebuah Kabupaten.

Perkembangan administrasi Pemerintah selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom setingkat kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya dengan UU NO.12 tahun 1956 Sawahlunto/Sijunjung ditetapkan menjadi Daerah Otonomi dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Melalui UU No.1 tahun 1957 DPRDS (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) diganti menjadi DPRDP (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan) Sawahlunto/Sijunjung. Adapun anggota DPD yang terlibat pada masa itu antara lain M.Sy. Dt. Gunung Emas, K.Dt. Bandaro Hitam, M. Zen Dt. Bidjo Dirajo, dan A. M. Pandito Kari.²⁶⁰

2. Memasuki Pasang Surut Hubungan Pusat dan Daerah

Pasca tahun 1957 hubungan antara Sumatra Barat dengan pemerintah pusat memasuki fase pasang surut. Setelah memasuki tahun 1950-an Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka mulai berdaulat dan belajar berpemerintahan sendiri. Bersamaan dengan itu, keadaan pasca-perang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan di bidang ekonomi. Kondisi infrastruktur, jalan dan jembatan, fasilitas publik yang hancur berantakan akibat

²⁵⁹Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalsime: Sumatera Tahun 1950-an*. (Jakarta:

KITLV, NIOD, Yayasan Obor, 2007), hlm. 120.

²⁶⁰Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Keberadaan PRRI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 1948-1949", *Manuskrip*. (Sumpur Kudus: tanpa penerbit, 1990), hlm. 10.

perang nyaris belum tersentuh pembangunan kembali.²⁶¹ Selain itu, penggal pertama tahun 1950-an menyaksikan jatuh bangun kabinet yang memerintah. Salah satu akibatnya ialah perhatian terhadap daerah terabaikan.

Sampai pertengahan tahun 1950-an, kondisi pasca perang tampaknya belum menunjukkan perubahan yang berarti.²⁶² Namun kekecewaan daerah terhadap kebijakan nasional makin menumpuk ketidakpuasan pada paska Pemilu 1955, di antaranya adalah:

- a. Tuntutan otonomi daerah luas dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi;
- b. Tuntutan perimbangan keuangan yang wajar, layak dan berkedilan antara daerah dan pusat, termasuk di antaranya penguasaan sumber daya ekonomi luar jawa, khususnya sumatera tengah (perkebunan, tambang dan sektor moneter dan ekonomi manufaktur) berada di bawah kendali pusat. Hanya sedikit yang disisakan untuk daerah.²⁶³

²⁶¹Sementara itu, cita-cita kemerdekaan yang masih hangat dalam memori kolektif para pemimpin dan rakyat di daerah justru melahirkan kekecewaan karena tidak sesuai dengan yang dibayangkan sebelumnya. Masih dekat dengan suasana perang dan pekik merdeka, maka bagi mereka keteguhan terhadap patriotism setelah merdeka, merupakan salah satu prasyarat menjadi bangsa yang 'modern', dalam arti Indonesia harus sejajar dengan Barat. Ide-ide progresif menentang feodalisme, dan keharusan adanya mobilitas sosial yang radikal, *koeli word toean* kuli menjadi tuan, masih tercermin dalam bahasa pejuang dan perjuangan di awal 1950-an. Lebih lanjut lihat Mestika Zed, Edi Utama dan Hasril Chaniago, *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1950*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1998).

²⁶²Tentang pemikiran gerakan otonomi daerah menurut pemikir Sumatera tahun 1950-an lihat Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Tahun 1950-an*. (Jakarta: KITLV, NIOD, Yayasan Obor, 2007).

²⁶³Nilai ekspor dari Padang tahun 1956 nominal adalah Rp 187.300.000,-, lebih kecil dibanding dengan nilai ekspor Sumatra Utara yang besarnya Rp 2.090.000.000,- dan Sumatra Selatan sebesar Rp 3.324.000.000,-. Dilihat dari konteks ini, diperkirakan bahwa dalam waktu sembilan bulan terhitung mulai Januari sampai September 1956, Sumatra Tengah, termasuk Riau, memperoleh devisa sebesar Rp 1.137.000.000,-. Pajak yang terkumpul di wilayah ini setiap bulan berjumlah Rp. 170.000.000,- tetapi hanya Rp20.000.000,- yang disisakan untuk daerah sedangkan sisanya disetorkan ke pemerintah pusat, yang mengalokasikan kembali sebesar Rp.

- c. Masalah keretakan dwitunggal Soekarno-Hatta yang berakhir dengan pengunduran diri wakil presiden hatta bulan desember 1956;
- d. Masalah ideologis pasca pemilihan umum tahun 1955 sehubungan dengan penyusunan konstitusi baru pengganti undang-undang dasar sementara tahun 1950; masalah konsepsi Soekarno sejak tahun 1957 dan *last but notleast* ialah *come-back*-nya PKI sebagai salah satu partai besar pemenang pemilu 1955 yang berlindung di balik *gezag* presiden Soekarno;
- e. Masalah integrasi berbagai kesatuan bersenjata lokal menjadi angkatan darat regular, termasuk masalah akseptabilitas tokoh kepala staf angkatan darat; campur tangan parlemen terhadap masalah intern angkatan darat; hubungan antara Presiden Soekarno dengan kabinet parlementer dan kepemimpinan angkatan darat.

Namun hal yang lebih menyakitkan lagi bagi para pejuang daerah ialah bahwa selama perang kemerdekaan mereka telah memperlihatkan loyalitas dan pengorbanan tanpa batas untuk kemerdekaan. Namun banyak kebijakan pemerintah pusat yang sewenang-wenang, yang membuat para pemimpin dan rakyat di pulau itu merasa diperlakukan tidak adil. Mereka memandang rezim Jakarta tak tahu berterima kasih dan diskriminatif.

Dalam kaitan ini tidak heran jika jajaran kelompok tentara di daerah paling merasakannya. Terlebih lagi tatkala upaya reorganisasi²⁶⁴ satuan tentara Divisi Banteng tahun 1950an

40.000.000,- untuk provinsi ini untuk mendanai kebutuhan badan-badan pemerintah setempat. Dengan kata lain, pusat mendapat penerimaan pajak yang jauh lebih besar daripada yang dapat diterima daerah. Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi. Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Terjemahan. (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 291.

²⁶⁴Dalam tubuh militer daerah perasaan dianak tirikan pusat juga tidak kalah hebat. Perasaan tersebut bahkan berlangsung sejak tahun 1949 ketika kebijakan RERA (Rekonstruksi dan Rasionalisasi) berimbas pada penyederhanaan struktur ketentaraan dan pengurangan jumlah pasukan. Kebijakan ini secara pahit harus diterima oleh kebanyakan veteran perang yang ikut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan karena harus berhadapan dengan kenyataan untuk diberhentikan dari kesatuan masing-masing.

dipandang sebagai tindakan pecah-belah. Hampir semua perwira Divisi IX tidak menerima penciutan tersebut. Beberapa perwira mengambil sikapnya sendiri-sendiri. Ada di antara mereka yang memilih keluar dari dinas ketentaraan, sebagian dirumahkan dan sebagian lagi bertahan pada dinas ketentaraan meski dengan konsekuensi ditempatkan di daerah lain. Di antara mereka yang mengundurkan diri antara lain Kolonel Ismael Lengah, Letkol. Dahlan Ibrahim, dan Letkol. Abdul Halim. Sebagian lain pulang ke kampung masing-masing dan banyak juga yang akhirnya memilih mengadu nasib ke rantau dengan daerah tujuan Jakarta dan sekitarnya.

Sebagian besar anggota pasukan Divisi IX Banteng harus menerima konsekuensi kebijakan RERA tersebut. Divisi IX Banteng dikurangi menjadi satu brigade dengan nama Brigade Banteng yang terdiri dari empat batalyon saja. Tidak berhenti sampai disitu, Brigade Banteng kemudian dirampingkan lagi menjadi satu resimen yaitu Resimen IV Sumatera. Kebijakan ini menimbulkan kekecewaan bagi anggota pasukan yang bergabung dalam Divisi IX Banteng sebab setelah menjadi salah satu kekuatan militer paling tangguh di Sumatra, pada waktu mengisi kemerdekaan mereka justru tidak dimanfaatkan. Perasaan kecewa tersebut semakin meningkat setelah melihat kenyataan bahwanya Divisi IX Banteng yang dihapuskan. Dua Divisi TNI lainnya di Sumatra tidak dikurangi anggotanya melainkan hanya sebatas perubahan nama menjadi Tentara Teritorium I Sumatra Utara di Medan dan Tentara Teritorium II Sumatra Selatan di Palembang.



Gambar 1 Panji Divisi IX Banteng yang diserahkan Residen Sumatera Barat St. M. Rasjid pada Kol. Ismail Lengah. Panji ini kemudian diarah keliling kota Bukittinggi. *Sumber:* koleksi Gedung Joang 45 Sumatra Barat.

Jika diambil perbandingan dengan tentara di Pulau Jawa pada saat agresi ke dua, pasukan-pasukan yang ada di Jawa tidak bisa melindungi para pemimpin dari penangkapan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Militer Sumatra Tengah, walaupun harus mundur keluar kota, secara gerilya masih mampu melindungi mobilitas pemimpin ketika menyelamatkan RI dengan pembentukan PDRI. Ternyata perlakuan yang sangat bertolak belakang harus diterima para tentara yang ada di Sumatra Tengah ketika program RERA

menyisakan hanya sepertiga dari total tentara yang pernah berjuang membela kemerdekaan.²⁶⁵

B. Aktivitas Dewan Banteng di Sumpur Kudus

1. Proses Terbentuknya Dewan Banteng

Perasaan kecewa masyarakat semakin meningkat pada tahun 1950 ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang calon Gubernur Sumatra Tengah. Empat orang calon Gubernur yang dikirim oleh DPRST kepada pusat yang terdiri dari Iljas Jakoeb, dr. M. Jamil, dr. A. Rahim Usman dan Mr. St. Mohammad Rasjid, dari empat calon Gubernur yang direkomendasikan DPRST tersebut tidak satupun yang diterima pusat.²⁶⁶

Pemerintah pusat memilih jalan mereka sendiri dengan mengirim Ruslan Mulyohardjo sebagai Gubernur Sumatra Tengah. DPRST menolak pengangkatan tersebut dengan mengembalikan keputusan Menteri Dalam Negeri. Babak baru persetujuan antara DPRST dengan Kemendagri telah dimulai dengan adanya penolakan tersebut. Pemerintah menganggap langkah DPRST sebagai sebuah pembangkangan. Melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tanggal 15 Januari 1951 secara resmi DPRST dibekukan. Pembekuan tersebut dilakukan agar kehendak Kementrian Dalam Negeri untuk meletakkan Ruslan Mulyohardjo dapat dengan mudah dilaksanakan. Hingga setelah Pemilu 1955 rakyat Sumatra Tengah berada dalam ketidakpastian di jajaran militer dan kepemimpinan sipil.²⁶⁷

Kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendagri menghapuskan keberadaan DPRST berakibat kepada hilangnya

²⁶⁵ Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang. Biografi Kolonel Ahmad Hussein*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 25.

²⁶⁶ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalsime: Sumatera Tahun 1950-an*. (Jakarta: KITLV, NIOD, Yayasan Obor, 2007), hlm. 30.

²⁶⁷ *Propinsi Sumatera Tengah*. (Djakarta: Kementerian Penerangan R.I, 1953), hlm. 416.

alat perlengkapan demokrasi. Kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan budaya Minang yang merupakan kebudayaan penganut demokrasi. Persoalan yang berkaitan erat dengan ketidakpuasan dan kekecewaan umum yang dimulai dari persoalan lokal, ketidakpuasan di kalangan perwira, sampai kemacetan sistem politik sesudah revolusi membawa daerah semakin tidak sabar untuk mengambil inisiatif sendiri.

Ketidakpuasan daerah di Sumatra Tengah berhulu dari reuni mantan anggota Divisi Banteng. Meski latar belakang reuni ini adalah untuk membantu rekan-rekan sesama pejuang yang terkena imbas dari kebijakan RERA, dalam pelaksanaan reuni masalah yang ada di tingkat pusat justru menjadi pembicaraan serius. Dari banyak makalah, pidato spontan, dan komentar dari para peserta reuni yang disampaikan dengan rasa gusar dan kurang puas, lahirlah keputusan yang sangat berani dan diantaranya menyangkut persoalan ditingkat pusat yaitu perbaikan-perbaikan dalam pimpinan angkatan darat dan seterusnya dalam pimpinan negara.

Reuni tersebut dilaksanakan pada selama tiga hari yaitu dari tanggal 21-24 November 1956 di Balai Prajurit Padang. Sebanyak 612 anggota bekas Divisi Banteng berdatangan dari berbagai daerah seperti Jakarta, Aceh, Medan, Palembang, Bandung dan dari Sumatra Tengah sendiri. KSAD menyambut baik rencana reuni tersebut karena acara tersebut beritikad baik untuk membicarakan nasib para pejuang dan keluarga mereka yang belum tertampung di masyarakat. Sekalipun tidak hadir, KSAD Nasution memperlihatkan dukungannya dengan memberi kemudahan kepada semua prajurit aktif untuk memperoleh Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi mantan anggota Divisi Banteng yang berada di luar Sumatra Tengah.²⁶⁸

²⁶⁸Reuni tersebut menghasilkan ketetapan sebagai berikut. *Pertama*, penyelesaian persoalan-persoalan dalam negara (nasional), menuntut dilaksanakannya segera perbaikan yang progresif dan radikal di segala lapangan, terutama dalam pimpinan Angkatan Darat, seterusnya di dalam pimpinan Negara dengan jaminan-jaminan demi keutuhan Negara Republik Indonesia. Penyelesaian Persoalan-persoalan dalam daerah. *Kedua*, Pemerintah Daerah Sumatera Tengah menginginkan segera pengisian pejabat-pejabat penting dalam pemerintahan di

Dari keputusan yang dihasilkan reuni, perlahan memperlihatkan persoalan-persoalan yang ada di daerah yang merupakan sinergi dari persoalan-persoalan yang ada ditingkat pusat. Dengan kata lain, kondisi pusat dilihat oleh para peserta reuni sebagai penyebab persoalan-persoalan yang ada di daerah. Untuk menindaklanjuti semua keputusan reuni mantan anggota Divisi Banteng, maka dibentuk Dewan Banteng.

Dewan Banteng memiliki tugas melaksanakan segala sesuatu yang telah menjadi keputusan reuni dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada reuni II. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya ternyata Reuni II mantan Divisi Banteng tidak pernah dilaksanakan sehingga tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Dewan Banteng. Untuk merealisasikan pembentukan Dewan Banteng, semua golongan masyarakat Sumatra Tengah didekati oleh Ketua Reuni Letkol. Ahmad Husein.

Melalui bermacam pendekatan, Ahmad Husein akhirnya bisa mengajak banyak unsur sipil dalam kepengurusan Dewan Banteng. Di luar dugaan banyak orang karena Ahmad Husein sendiri adalah orang militer. Para peserta reuni sangat menyadari bahwa keputusan yang dibuat tidak akan berarti apa-apa tanpa disertai pelembagaan keputusan tersebut.²⁶⁹

daerah Sumatra Tengah dengan tenaga-tenaga yang mampu, jujur, kreatif dan revolusioner konsekuen yang sedapatnya berasal dari daerah itu sendiri. Pemerintah menuntut segera diselenggarakannya pemberi otonomi luas dalam bentuk dan isi kepada daerah Sumatra Tengah, sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada. *Ketiga*, pertahanan daerah. Menuntut suatu Komando Pertahanan Daerah dalam arti teritorial, operatif dan administratif yang sesuai dengan pembagian administrative dari Negara Republik Indonesia dewasa ini (Provinsi Sumatera Tengah), dan yang merupakan komando utama dalam Angkatan Darat. Selain itu menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatra Tengah sebagai kesatuan pelaksana proklamasi yang tradisional jadi satu korps dalam Angkatan Darat. *Keempat*, Aspek Sosial dan Ekonomi Daerah. Menuntut dihapuskannya segera system sentralisme yang dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat dan juga menjadi pokok pangkal korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan serta kontrol. Lebih lanjut baca Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang. Biografi Kolonel Ahmad Hussein...*, hlm. 156-159.

²⁶⁹Unsur-unsur di luar militer dilibatkan dalam kepengurusan seperti dari kalangan ninik mamak yang diwakili oleh Datuak Simarajo, mewakili kelompok

Dewan Banteng berupaya merealisasikan rencana yang telah mereka buat, rencana itu diteruskan kepada Gubernur Roeslan Muljohardjo. Usulan itu ditanggapi secara dingin oleh pemerintah pusat termasuk soal usulan pembangunan. Tanggapan pemerintah pusat seperti itu menimbulkan anggapan daerah bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan upaya perbaikan nasib rakyat di daerah. Dalam situasi yang tidak kondusif tersebut maka pada tanggal 20 Desember 1956 Gubernur Ruslan Muljohardjo dikudeta oleh Ketua Dewan Banteng di Bukittinggi.

Faktor-faktor di atas meninggalkan pengalaman pahit dan menimbulkan perasaan dendam terhadap pusat yang diidentikkan dengan Jawa. Beberapa ikhtiar untuk mendamaikan konflik pusat dan daerah telah dilakukan, baik lewat lobi-lobi pribadi maupun lewat forum terbuka nasional seperti Munas kemudian Munap bulan September 1957, Piagam Palembang dan lain-lain. Namun niat baik itu menjadi mentah ketika terjadi “Peristiwa Cikini” di akhir November 1957, sehingga segala sesuatu yang diupayakan sebelumnya menjadi buyar dan pada saat yang sama teror, intimidasi dan fitnah makin tak terkendali.

Sejumlah pemimpin terpaksa menyelamatkan diri keluar Jakarta dan bergabung dengan dewan-dewan perjuangan di daerah yang dipelopori oleh kelompok militer Sumatera Tengah (Kol. Ahmad Husein) dengan mendirikan Dewan Banteng, kemudian disusul oleh Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Kol. Burlian), Dewan Gajah di Sumatera Utara (Kol. Simbolon), Dewan

agama adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, dari unsure pemerintahan ada A. Abdul Manaf (Bupati Kabupaten Merangin Jambi), Saidina Ali (Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Kampar Riau), Darwis Taram Dt. Tumanggung (Bupati 50 Kota) dan Ali Luis.

Sebanyak 12 orang anggota Dewan Banteng lainnya berasal dari kalangan militer baik yang masih aktif maupun sudah pensiun. Delapan orang berstatus sebagai militer aktif yaitu Letkol. Ahmad Husein, Komisaris Besar Polisi Kaharuddin Dt. Rangkyo Basa, Komisaris Polisi Soetan Soeis, Mayor Anwar Umar, Kapten Nurmathias, Letnan Sebastian, Kapten Jusuf Nurdan Mayor Sjoeib. Tiga orang lagi yang duduk menjadi anggota Dewan Banteng merupakan pensiunan militer yaitu, Kol. (Purn) Ismael Lengah, Letkol. (Purn) Hasan Basri, dan Mayor (Purn) Soelaiman. Lebih lanjut baca Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang. Biografi Kolonel Ahmad Hussein...*, hlm. 160.

Lambung Mangkurat dan Permesta di Sulawesi (Kol. Ventje Samual).²⁷⁰ Dengan pelembagaan gerakan protes menentang Jakarta ini, polarisasi pertentangan pusat dan daerah dan sebaliknya semakin mendekatkan daerah ke jurang perpecahan.

2. Aktivitas Dewan Banteng Jelang Meletusnya PRRI di Sumpur Kudus

Dewan Banteng setelah menjadi operator pemerintahan langsung menangani masalah-masalah pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Jalan-jalan yang banyak mengalami kerusakan parah segera diperbaiki terutama jalan arteri yang menghubungkan daerah pedalaman dengan pusat pemerintahan dan pelabuhan. Selain itu dibuka pula jalan baru untuk membuka keterisolan sebuah daerah dan menghubungkannya satu sama lain.

Tingginya tingkat swadaya masyarakat, banyak daerah berhasil dihubungkan. Membaiknya kondisi jalan-jalan yang ada berdampak kepada membaiknya pemasaran hasil-hasil produksi. Perbedaan skala pembangunan antara pusat dengan daerah menjadi isu yang sangat ampuh untuk membangkitkan semangat rakyat dalam upaya membangun daerahnya. Perasaan kurang puas terhadap pembangunan melahirkan bermacam istilah untuk sekedar melihat perbedaan itu. Sebagian masyarakat memberikan perbandingan dengan mengatakan bahwa perbedaan itu dapat dilihat dari kondisi misalnya jalan Sumpur Kudus yang masih banyak belum ditempuh roda kendaraan bermotor jenis apapun, apa yang dikatakan sebagai jalan raya tidak lebih dari jalan kerbau pulang dari sawah, berbeda dengan di Jawa sampai ke dapur jalan telah diaspal.²⁷¹

²⁷⁰Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang. Biografi Kolonel Ahmad Hussein...*, hlm. 158-159.

²⁷¹Contoh ungkapan perbandingan lain, menurut Mansur Dt. Pengulu Mudo adalah aie gadang di nagari awak, tapi urang subarang nan basah dek mandi (air besar di negeri kita, tapi orang di seberang yang basah karena dapat mandi). Meski perbandingan seperti di atas tidak merupakan sebuah data statistik, namun setidaknya dapat dilihat bahwa di daerah, masyarakat telah memiliki pandangan demikian sinis terhadap perbedaan pembangunan di Pulau Jawa dengan Sumatra

Di Sumpur Kudus, Dewan Banteng langsung mendapat respon positif masyarakat. Dukungan itu semenjak adanya reuni telah mereka berikan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang tidak mendukung kehadiran Dewan Banteng yaitu PKI yang berada di nagari Unggan dan Kumanis, namun jumlah mereka yang sedikit tidak merusak bentuk dukungan yang banyak diberikan oleh masyarakat Sumpur Kudus.

Secara garis besar dominasi politik di Sumpur Kudus dikuasai oleh dua kekuatan besar, yakni PERTI dan Masyumi yang menjadi pemenang Pemilihan Umum pada tahun 1955.²⁷² Menurut Mansur Dt. Penghulu Mudo, bahwa di Sumpur Kudus dari tahun 1955 hingga berakhirnya G.30.S 1965 tidak satupun ditemukan penduduknya menganut paham komunis. Pada hari-hari menjelang Pemilu 1955 tokoh-tokoh politik yang sering datang ke Sumpur Kudus adalah Zulkifli Mahmud yang berasal dari Partai Masyumi.

Sumpur Kudus pun tidak luput dari usaha-usaha penggalangan dukungan terhadap Dewan Banteng. Selain berusaha menarik simpati masyarakat melalui penyebaran dukungan-dukungan yang ada seperti diatas, Dewan Banteng banyak melakukan usaha-usaha pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Dewan Banteng memiliki program pembangunan daerah di seluruh Sumatra Tengah. Setiap kabupaten diberi bantuan dana Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dengan dana tersebut usaha-usaha pembangunan dilaksanakan,

Barat. Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

²⁷²Sementara itu pada tingkat propinsi, pimpinan Partai Masyumi Sumatra Tengah Buya Duski Samad menyuarakan dukungannya terhadap Dewan Banteng lewat media massa. Begitu pula halnya dengan partai-partai lain seperti PSI Sumatra Tengah, Partai Adat Rakyat atau PAR di bawah pimpinan Dt. Bagindo Basa Nan Kuniang. Partai lain yang turut memberikan dukungannya terhadap Dewan Banteng adalah IPKI. Secara garis komando, apabila pimpinan propinsi sebuah partai politik telah mengeluarkan pernyataan dukungan, maka pengurus partai yang lebih rendah seperti pimpinan kabupaten turut memberikan dukungan.

di antara usaha pembangunan yang dilakukan Dewan Banteng bersama penduduk di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.²⁷³

Dari banyak upaya pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sektor pendidikan menjadi perhatian serius bagi Dewan Banteng khususnya pendidikan dasar. Perhatian itu diperlihatkan dengan mendirikan banyak Sekolah Rakyat. Salah satu sekolah Dewan Banteng berada di nagari Sumpur Kudus. Pada masa darurat itulah, Dewan Banteng mengucurkan dana untuk sebuah kegiatan pembangunan sekolah darurat. Dalam pelaksanaan gotong royong tersebut, masyarakat bekerja dengan hati gembira tidak seperti suasana di bawah tekanan pihak militer dan penguasa. Disamping usaha-usaha pendirian sekolah baru, di Sumpur Kudus Dewan Banteng juga banyak mengupayakan pembukaan jalan baru serta peningkatan kualitas bagi jalan yang telah ada.²⁷⁴ Demikian pula halnya dengan jembatan yang menghubungkan nagari Sumpur Kudus dengan nagari tetangganya.

C. Pecahnya Perang di Sumpur Kudus

1. Meletusnya Peristiwa PRRI

Ketika semua upaya rekonsialisasi mengalami jalan buntu, sebuah badan disebut dengan Dewan Perjuangan, yaitu unsur inti dari gabungan dewan-dewan yang disebut sebelumnya, mengeluarkan semacam *ultimatum* kepada pusat pada 10 Februari 1958, setelah mengadakan rapat di Sungai Dareh,

²⁷³Sementara bentuk lain usaha Dewan Banteng pada tahun 1957 adalah memberikan harapan kepada masyarakat yang tinggal di pelosok propinsi Sumatra Tengah untuk berdiri sendiri atau memisahkan diri dari kabupaten induk untuk selanjutnya mendirikan kabupaten baru. Misalnya aspirasi masyarakat Kerinci untuk berpisah dari Kabupaten PSK dan keinginan masyarakat Rao (Pasaman Barat) untuk berpisah dari Lubuk Sikaping. Oleh masyarakat di daerah yang menginginkan pemekaran sikap tersebut dianggap sebagai sebuah respon positif. Dalam perjalanan selanjutnya, semua aspirasi pemekaran wilayah tersebut tidak pernah direalisasikan Dewan Banteng. Mansur Dt. Penghulu Mudo, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2014 di Calau Sumpur Kudus.

²⁷⁴Intan Sari Dt. Mugek Parajan, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di Silantai Sumpur Kudus.

Sumatera Tengah. Isinya antara lain ialah tuntutan agar Kabinet (Pemerintahan) Djuanda dibubarkan dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden atau Pejabat Presiden; memberikan kesempatan dan bantuan sepenuhnya kepada Hatta dan Sultan Hamengkubuwno IX untuk membentuk *zakenkabinet* (kabinet ahli) sampai Pemilu berikutnya; meminta kepada Presiden Soekarno agar bersedia kembali sebagai Presiden konstitusional dengan membatalkan semua tindakannya yang melanggar konstitusi selama ini.

Apabila dalam tempo 5x24 jam Presiden Soekarno dan Kabinet Djuanda tidak memenuhi tuntutan tersebut, maka mereka akan membentuk pemerintahan sendiri yang “terlepas dari kewajiban untuk mentaati pemerintah Jakarta.” Oleh karena kedua belah pihak tidak mau mundur dengan pendirian masing-masing, dan setelah ultimatum itu mencapai tenggat waktu yang ditetapkan, maka pada tanggal 15 Februari, genderang “perang saudara” segera ditabuh. Itu ditandai dengan dibentuknya PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indoensia) lengkap dengan susunan kabinet tandingan Jakarta. Sejak itu meletuslah apa yang disebut oleh Jakarta sebagai “pemberontakan” oleh PRRI, tetapi sebaliknya para pendukungnya menyebut gerakan mereka sebagai “pergolakan” daerah menentang rejim Jakarta yang inkonstitusional. Berikut susunan kabinet PRRI tanggal 15 Februari 1958.²⁷⁵

Mr. Sjafruddin Prawiranegara	:Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan.
Mr. Assaat Dt. Mudo	:Menteri Dalam Negeri.
Maluddin Simbolon	:Menteri Luar Negeri.
Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo	:Menteri Perhubungan dan Pelayaran.
Muhammad Sjafei	:Menteri PPK dan Kesehatan.
J.F. Warouw	:Menteri Pembangunan.
Saladin Sarumpaet	:Menteri Pertanian dan Perbu-ruhan.

²⁷⁵ Lebih lanjut baca Mestika Zed dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang. Biografi Kolonel Ahmad Hussein...*, hlm. 258.

Muchtar Lintang	:Menteri Agama.
Saleh Lahade	:Menteri Penerangan.
Ayah Gani Usman	:Menteri Sosial.
Dahlan Djambek	:Menteri Pos dan Telekomu-nikasi.

Tentara pusat (APRI) atau “tentara Soekarno”, mengerahkan seluruh angkatan perang (darat, laut dan udara dan kepolisian). Kekuatan APRI waktu pertama diterjunkan mencapai lebih 20.000 pasukan, Mereka umumnya dari Satuan Diponegoro, yang waktu itu kebanyakan sudah disusupi oleh kelompok merah (komunis). Sementara Kekuatan PRRI pada tahap awalnya disokong oleh CIA. Namun karena sama sekali tidak menduga dan karena itu tidak siap untuk menghadapi perang sesungguhnya.²⁷⁶

Langkah pertama yang dilakukan untuk menguasai Sumatra Barat adalah dengan mengadakan serangan-serangan terhadap pemancar radio di Padang dan Bukittinggi. Aksi tersebut dimaksudkan untuk membatasi jalur komunikasi PRRI. Kemudian pasukan APRI terus bergerak memasuki Kota Padang melalui jalur utara kota yaitu di Pantai Ulak Karang. Setelah Padang dikuasai, operasi terus dilanjutkan untuk menguasai kota-kota lain. Solok adalah daerah operasi dari Resimen Team Petempuran/RTP III Diponegoro dengan komandan Letnan Kolonel Suwito Harjoko. Pasukan RTP III terdiri dari Batalyon 438/Diponegoro, Batalyon 440/Diponegoro, Batalyon/507 Brawijaya, Staf Komando serta Jawatan/dinas dan senjata bantuan yang terdiri dari Batalyon PHB, Detasemen Zeni, Batalyon Artileri, Detasemen Kavaleri, Detasemen Peralatan, Kompi Intendans, Kompi Angkutan, dan Kompi Markas.

²⁷⁶Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 95.



Gambar 2. Suasana Proklamasi PRRI tanggal 15 Februari 1958. Dari kiri ke kanan Kolonel Dahlan Djambek, Mr. Burhanuddin Harahap, Letkol. Ahmad Husein, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dan Kolonel Mauluddin Simbolon. **Sumber:** *Repro Life*.

2. *Penyerangan Tentara APRI ke Sumpur Kudus*

Pada tahun 1950-an, Sumpur Kudus masih termasuk wilayah terisolir di Sijunjung. Masyarakat masih hidup dengan dengan fasilitas terbatas. Kondisi wilayah Sumpur Kudus pada tahun 1958-1961 sangat memprihatinkan. Untuk mencapai kecamatan yang letaknya di Kumanis, masyarakat harus berjalan selama tiga hari. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan pokok, harus pergi ke pasar dengan menempuh perjalanan selama tiga hari. Alat transportasi yang dipakai pada masa pergolakan itu pun masih sederhana, yakni kuda beban. Setiap hari Senin, biasanya ibu-ibu di Sumpur Kudus berangkat bersama-sama, lalu menginap di Tanjung Bone Aur. Pagi harinya baru ke pasar dan malam harinya sampai di rumah. Bila ibu-ibu itu membeli barang kebutuhan dengan jumlah banyak yang dibawa dengan kuda beban.²⁷⁷ Sehingga pada sampai akhir 1960an lagu kudo baban menjadi tren di kalangan masyarakat Sumpur Kudus.

²⁷⁷Puti Hanijar, *wawancara*, tanggal 15 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

*Batang Sumpu balantai batu
Batang aie balantai papan
Sajak lalu motor ka sumpu
Lah mamakik kudo baban*

Peristiwa meletusnya PRRI di Sumpur Kudus pada dasarnya belum diketahui pasti oleh tokoh-tokoh masyarakat ketika itu. Mansur Dt. Penghulu Mudo menegaskan, sewaktu mengikuti rapat di Sungai Dareh ia belum mengetahui pasti apakah ada kelanjutan dari hasil rapat itu. Namun, gelagat itu menurutnya sudah mulai terbaca ketika Marah Tayab dan Muchtar Gafur mengisyaratkan perang saudara itu akan meletus dalam waktu dekat.

Proses masuknya Batalyon 440 Diponegoro telah dimulai dari dikuasainya Kiliranjao tanggal 21 April 1958.²⁷⁸ Sedangkan Sungai dareh dan Tandjung Gadang masih diduduki PRRI.²⁷⁹ Tentara Diponegoro yang masuk melalui Kiliranjao itu dalam berkomunikasi dengan penduduk setempat memakai bahasa Jawa halus, sedangkan tentara PRRI menggunakan bahasa Minang yang tentunya sudah dipelajari oleh tentara Diponegoro.

Pasukan PRRI yang dipersiapkan untuk membendung kedatangan tentara pusat di nagari Sumpur Kudus berasal dari

²⁷⁸Reni Nuryanti, *Perempuan Berselimut Konflik*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011), hlm. 91.

²⁷⁹Dalam majalah *PHB* tahun 1958 dijelaskan sebab-sebab mudahnya tentara pusat merusak frekuensi pembicaraan tentara PRRI melalui Stasiun Radio. Dengan dirusaknya frekuensi pembicaraan ini, peta kekuaran dari tentara PRRI mudah diketahui. Berikut petikan artikelnya. **“Sungguh suatu kejadian perlu mendapat perhatian para pencipta teknis pesawat P 22. Walaupun kita diganggu, kita harus diam saja. Perlunya agar mereka mengira bahwa suaranya tidak bisa kita tangkap (ingat jarak capai dari pesawat P 22). Di samping itu ada satu hal lagi yang dapat merhasiakan pembicaraan kita melalui P 22 yaitu menggunakan bahasa jawa halus. Cara ini setelah dilakukan ternyata musuh menjadi marah dan jengkel, karena tidak mengetahui pembicaraan kita. Buktinya mereka pernah masuk dalam channel kita dengan mengatakan, kalau berani tentara Soekarno supaya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kita diam saja. Sayang, hingga sekarang dari sejumlah senjata yang dirampas dari PRRI baru beberapa buah P 22 berada ditangan kita. Lebih lanjut baca “Waktu Banteng Raiders sampai di Kiliranjao.”** Majalah *PHB* tahun 1958.

batalyon Satuan Komando Daerah Riau (SKDR) yang dipimpin oleh Mayor (Inf) Syamsi Nurdin asal Lintau.

Markas Komando Syamsi Nurdin pada masa itu sering berpindah-pindah dan dilengkapi dengan sebuah pesawat radio telefoni yang akan dipergunakan untuk berhubungan jarak jauh.²⁸⁰

Pasukan Divisi Diponegoro mulai bergerak dari Kumanis (basis Komunis) menuju Sumpur Kudus untuk memburu Syamsi Nurdin dan pasukannya. Tentara pusat pada tahun 1958, tidak saja menyerang dari darat, namun juga dari udara. Untuk memutus hubungan antara Sumpur Kudus dengan nagari lainnya, tentara SKDR merusak jembatan satu-satunya, sehingga peralatan berat tentara pusat tidak masuk ke Sumpur Kudus. Setelah pertahanan PRRI di Tanah Bato berhasil ditembus oleh pihak APRI, mereka meneruskan perjalanan menuju Sumpur Kudus.

Perlawanan yang dilakukan tentara SKDR di Sumpur Kudus cukup sengit. Namun jumlah tentara yang minim, menyebabkan tentara SKDR dengan mudah dipukul mundur karena tentara pusat tidak saja menyerang dari darat, namun juga menghujani Sumpur Kudus dari udara. Rute operasi yang ditempuh Batalyon 451 Diponegoro setelah sampai di Sumpur Kudus tidak langsung menuju pusat pemerintahan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, melainkan kembali ke nagari Kumanis. Taktik ini rupanya tidak disadari oleh tentara SKDR sebagai jebakan untuk memancing mereka keluar dari persembunyian. Dugaan seperti ini mengagetkan pasukan SKDR karena pasukan APRI memakai rute berbeda dengan terlebih dahulu memutus lumbung beras tentara SKDR.

Saat tentara 451 Diponegoro mulai masuk ke Sumpur Kudus, laki-laki dewasa ijok ke hutan-hutan atau ke tempat yang lebih aman demi menghindari APRI. Para pengungsi menempuh perjalanan dengan memotong rute atau melalui 'jalan tikus' di hutan. Keberadaan tentara SKDR dengan segala keterbatasannya diberi tugas di garis terdepan berhadapan dengan tentara APRI

²⁸⁰Nazarudin, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di Kantor Wali Nagari Sumpur Kudus.

yang sudah berpengalaman memadamkan gerakan di daerah, menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Sumpur Kudus sudah siap berhadapan dengan tentara pusat? Dari segi persenjataannya, tentara PRRI memang sudah disuplay persenjataannya dari Amerika Serikat serta latihan singkat untuk para milisi. Namun kenyataannya seberapa besar pasukan SKDR, termasuk yang ber-Nomor Registrasi Prajurit (NRP) sama sekali dibuat tidak berdaya melawan APRI. Mereka justru bergerilya ke hutan-hutan untuk menghindari tentara pusat.

Dalam perkembangan berikutnya, operasi penumpasan PRRI, sebagian masyarakat Sumpur Kudus memiliki menyimpan pengalaman yang buruk terhadap organisasi bentukan APRI, yakni Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR). Pembebasan yang dilakukan APRI terhadap beberapa nagari di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung di antara yang anti komunis, seperti Sumpur Kudus dan Silantai meninggalkan trauma yang cukup mendalam. Masyarakat diliputi rasa kecemasan dan ketakutan setiap pasukan APRI dan OPR mulai memasuki dua nagari tersebut.

Nama OPR muncul pertama kali dari pernyataan Ali Moertopo tanggal 12 Desember 1958. Menurut Ali Moertopo sisa-sisa pemberontak PRRI harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dengan mengikutsertakan rakyat dalam usaha pembasmian itu. Dalam upaya memperkuat posisi APRI di Sumatera Barat, menurut Ali Moertopo harus ada tambahan pasukan dari Organisasi Keamanan Rakyat (OKR) dan Legiun Veteran.²⁸¹ Ali Moertopo berpendapat bahwa strategi ini diperlukan karena PKI merupakan musuh besar PRRI dan merupakan kekuatan sentral pasca pergolakan daerah. Pasca PRRI inilah, PKI dan organisasi massa kiri lainnya mulai dimanfaatkan oleh petinggi APRI untuk kepentingan kelompok militer.

C. Sumpur Kudus Pasca Pergolakan Daerah

1. Operasi Bivak dan Kondisi Sekolah Darurat Sumpur Kudus

²⁸¹“Basmi Gerombolan Pengacau Sampai Akar-akarnya”, harian *Rakyat* 12 Desember 1958.

Untuk menggambarkan situasi masyarakat Sumpur Kudus di bawah penguasaan APRI tepat sekali dikemukakan sebuah ungkapan berbahasa Minangkabau yaitu *gajah baparang samo gajah, samuik mati kanai pijak* (Gajah berperang melawan gajah, semut mati terinjak). Perang saudara antara tentara APRI dengan PRRI membawa banyak akibat yang tidak terbayangkan. Masyarakat Sumpur Kudus tidak saja kehilangan harta, namun juga korban jiwa sebagai konsekuensi arus perang saudara itu. Dalam rangka penguasaan Sumpur Kudus dan membebaskan daerah itu dari anasir tentara SKDR merupakan tugas utama dari tentara APRI, ditemukan tindakan yang berada di luar batas manusiawi.

Jika anggapan yang berkembang selama ini mengatakan bahwa tentara pusat adalah satuan tentara yang kejam tentu tidak sepenuhnya benar, begitu pula dengan berita tentang kebaikan-kebaikan tentara PRRI bukan berarti mereka tidak pernah melakukan kekerasan. Ada hal yang perlu dilakukan agar sebuah sisi pandang tidak langsung menjadi generalisasi atau pandangan umum. Kedua pihak yang bersengketa juga memiliki satuan-satuan atau unit tugas dan satuan tugas itu memiliki ciri khas dengan sikap impresif mereka dalam menjalankan tugas. Tentara Diponegoro merupakan pasukan yang dikenal kejam oleh masyarakat Sumpur Kudus. Dalam melaksanakan tugas, ciri khas pasukan itu ketika memasuki sebuah perkampungan adalah dengan melakukan tembakan secara membabitnya yang memiliki tujuan agar pasukan musuh segera melarikan diri.²⁸²

Operasi Bivak yaitu sejenis operasi keliling kampung untuk menangkap sisa-sisa tentara. Pada bulan Agustus 1958, dalam sebuah kesempatan melakukan operasi tersebut tentara pusat yang berkedudukan di Nagari Kumanis bergerak menuju Sumpur Kudus dengan kekuatan sekitar 30 orang. Selain operasi Bivak, tentara AURI juga menghujani Sumpur Kudus dengan bom dari udara. Masyarakat Sumpur Kudus yang telah menggali lubang-

²⁸² Menurut Syamsul Anwar tindakan yang diambil Divisi Diponegoro ini sangat efektif untuk menimbulkan sikap gentar pasukan PRRI namun korban yang ditimbulkan justru masyarakat biasa dan di dalamnya. Syamsul Anwar, *wawancara* tanggal 22 Februari 2014 di Silantai.

lubang, segera bersembunyi. Namun malang, seorang pelajar SMP adik sepupu Syafii Maarif yang bernama Azwir Maaruf tewas.²⁸³ Sejak pecahnya masuknya tentara 451 Diponegoro ke Sumpur Kudus, masyarakat sering menyanyikan lagu berikut, seperti yang dituliskan oleh Siti Hanijar

*Ondeh balantung-lantung
Buni mortar balantung-lantung
Badarak-darak bunin urang barandang kacang
Kato bukiK onde-ondeh inyo kacang bana
Kato sungai*²⁸⁴

Lagu yang diberi judul perang saudara ini menjadi tren dan selalu dinyanyikan oleh penduduk Sumpur Kudus setelah tentara 451 Diponegoro meninggalkan nagari tersebut. Pasca kematian Azwir Maaruf, operasi Bivak kembali digelar di Sumpur Kudus. Tidak hanya melakukan tembakan di udara, tentara APRI juga melakukan sweeping terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai tentara SKDR. Menurut Nazaruddin, bila masyarakat mulai bergerak meninggalkan Sumpur Kudus, tentara SKDR ini akan menyusup ditengah-tengah pengungsi. Namun, tidak satupun masyarakat yang mau memberitahukan dalam rombongan mereka ada tentara PRRI.

Pernah waktu tentara Diponegoro masuk, para pengungsi terjebak. Ditanya oleh tentara pusat yang bertanya apakah ada SKDR. Penduduk mengatakan tidak melihat keberadaan dari tentara PRRI. Tapi rekan saaya ada yang meninggal, ketika tentara APRI masuk melalui Ampalu, tiga orang rekan saya tewas ditembak.²⁸⁵

Aktifitas sekolah darurat yang didirikan oleh tentara SKDR pada masa pergolakan tetap berjalan normal di Sumpur Kudus.

²⁸³ Ahmad Syafii Maarif, *Otobiografi Ahmad Syafii Maarif*. (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm.161.

²⁸⁴ Siti Hanijar, *wawancara*, tanggal 21 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

²⁸⁵ Nazaruddin, *wawancara* tanggal 21 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

Sekolah-sekolah yang ada pada umumnya dibuat atas inisiatif guru-guru atau tokoh pendidikan yang bergabung dengan PRRI. Sekolah-sekolah lanjutan yang didirikan di daerah yang dikuasai PRRI dikenal sebagai sekolah penampungan. Di sekolah tersebut aktifitas belajar dilakukan sama dengan sekolah biasa, memiliki ruang belajar atau kelas, dan ada pembagian mata pelajaran. Kegiatan belajar dilakukan dengan menggunakan rumah-rumah penduduk yang cukup luas sebagai kelas.²⁸⁶

Sekolah-sekolah yang ada juga mengadakan ujian penghabisan untuk para siswanya. Panitia ujian akhir diangkat oleh Kepala Inspeksi masing-masing tingkatan sekolah lanjutan. Panitia ujian akhir tingkat SR diangkat dan diberi surat keputusan pengangkatan oleh Kepala Inspeksi SR. Panitia-panitia yang diangkat adalah guru dari sekolah yang bersangkutan. Sangat dapat dimaklumi bahwa dalam kondisi darurat tidak memungkinkan untuk mengadakan ujian dengan metode pengawasan silang.

Pasca tentara APRI melakukan operasi Bivak di Sumpur Kudus, aktivitas sekolah darurat mengalami penurunan drastis. Pada tahun-tahun awal (1958) sekolah darurat ini secara tidak resmi ditutup. Hal ini disebabkan oleh kondisi sekolah yang menjadi lengang akibat ketakutan anak-anak terhadap bahaya perang. Hal lain yang menyebabkan menurunnya aktifitas sekolah adalah karena kebanyakan dari guru-guru sekolah bergabung dengan PRRI.

Aktifitas belajar-mengajar mulai berjalan efektif setelah tentara pusat menguasai Sumpur Kudus tahun 1959 yang merupakan pusat seluruh kegiatan pada masa itu seperti adanya sarana dan kegiatan pemerintahan, militer, pasar dan lainnya. Sekolah darurat setingkat SR itu boleh beraktivitas apabila mendapat jaminan keamanan dari tentara pusat. Hal ini disebabkan oleh ketakutan para pelajar karena adanya pemberian cap terhadap mereka sebagai “anak pemberontak”. Namun persoalan berikutnya muncul ketika guru-guru SR Sumpur Kudus

²⁸⁶ Mariah, wawancara tanggal 21 Februari 2014 di Kantor Wali Nagari Sumpur Kudus.

yang berstatus pegawai negeri menikah dengan tentara SKDR, banyak yang diberhentikan dengan alasan dituduh terlibat PRRI.²⁸⁷

Sementara itu, pasca terjadinya peristiwa PRRI, posisi wali nagari sempat beberapa kali mengalami pergantian, yakni dari A.H Datuk Rajo Gagah (1956-1960) dilanjutkan oleh Harun Malik (1960-1961).²⁸⁸ Kedua orang wali nagari ini bukanlah orang Komunis, sehingga Camat Kumanis Siswoyo mengutus Marah Intan yang notabenenya pengurus PKI Ranting Kumanis. Pada masa pemerintahan Marah Intan, menurut Nazarudin tentara 451 Diponegoro tinggal satu pleton.



Gambar 3 Bupati Sawahlunto/Sijunjung Mansur Sami yang pernah mengalami kekerasan fisik tentara APRI karena istrinya dilarikan oleh tentara. *Sumber: Metro Files.*

Kekerasan fisik pernah menimpa Bupati Sawahlunto/Sijunjung Mansur Sami yang dipukul oleh Heru

²⁸⁷ Mariah, wawancara tanggal 21 Februari 2014 di Kantor Wali Nagari Sumpur Kudus.

²⁸⁸ "Sejarah Pemerintahan Nagari", *Arsip Pemerintah Nagari Sumpur Kudus* tahun 1980.

Wijaya tentara Divisi Diponegoro. Mansur Sami yang dikeroyok secara brutal oleh tentara Diponegoro itu dilarang diobati oleh masyarakat Sumpur Kudus. Pada masa pemerintahan Marah Intan inilah masyarakat Sumpur Kudus dipaksa untuk memikul mobil tentara Diponegoro menuju Sipua. Jenis mobil yang diangkut pada masa itu oleh eks tentara PRRI dan masyarakat Sumpur Kudus adalah Jeep dan Land Rover.

Selain siksaan fisik, kerja paksa, pada masa pemerintahan Marah Intan, tokoh-tokoh Sumpur Kudus yang berafiliasi ke Masyumi dan Perti menjadi sasaran pembunuhan. Mansur Dt. Penghulu Mudo menegaskan bahwa dirinya dan Damhoeri Ghafoer pernah menjadi sasaran pembunuhan karena tidak mau mengakui komunis sebagai bagian dari ideologi mereka.

“Saya pernah dipukul dengan koran waktu itu di masjid oleh Marah Intan. Dia mengatakan bahwa saya orangnya terlalu keras. Saya bilang, saya tidak keras Pak. Tapi kami penduduk Sumpur Kudus menghormati raja Ibadat sebagai pemimpin agama. PKI itu sendiri tidak ada ibadatnya. Jadi kami menolak komunis sebagai ideologi.”²⁸⁹

2. *Ganja Batu dan Ganja Kayu: Dampak Peristiwa PRRI di Sumpur Kudus*

Pada masa PRRI, menurut Marahsuddin Datuk Paduko Alam, seorang simpatisan PRRI di Sumpur Kudus, masalah kekerasan fisik terhadap perempuan mulai merebak ketika Divisi Diponegoro meluncurkan operasi Bivak. Semenjak itulah, banyak perempuan yang tidak ikut PRRI harus berpisah atau talak dengan suaminya. Mereka hanya bercerai melalui wali kadi saja.²⁹⁰ Kondisi yang sama juga terjadi di Sijunjung, Sawahlunto. Di antaranya dialami oleh Aras, Kepala Kantor Camat Sijunjung, yang istrinya dibawa paksa tentara APRI. Menurut keterangan

²⁸⁹ Mansur Dt. Penghulu Mudo, wawancara tanggal 21 Februari 2014 di Kantor Wali Nagari Sumpur Kudus.

²⁹⁰ Marahsuddin Datuk Paduko Alam, wawancara tanggal 15 Februari 2014 di Mangganti Sumpur Kudus.

Nazarudin, istri Aras yang bernama Rosmaida diambil paksa oleh APRI.

Setelah PRRI meredup, perempuan-perempuan Sumpur Kudus diminta datang ke Kecamatan Kumanis untuk menghibur tentara APRI. Puti Hanijar mengungkapkan, bahwa ia dan Laila Khamisah (istri Mansur Sami), Suryana, Dahmayar, dan Salmi berangkat menuju Kumanih dengan berjalan kaki selama tiga hari. Setelah pertunjukan selesai, perempuan-perempuan ini beristirahat satu hari di Kumanis dan pagi harinya kembali ke Sumpur Kudus.²⁹¹



Gambar 4 Mariah (81 tahun) dan penulis di lokasi makam raja Ibadat Sumpur Kudus. Mariah merupakan salah seorang perempuan yang pernah menikah dengan tentara SKDR asal Kampar. **Sumber:** Dokumentasi Zusneli Zubir.

Sebelum tentara Batalyon 451 Diponegoro sampai di Sumpur Kudus perempuan-perempuan di Sumpur Kudus sebagian menikah dengan tentara Satuan Komando Daerah Riau (SKDR). Salah satunya Maria (81 tahun) yang menikah dengan seorang tentara SKDR asal Tembilahan Riau. Pada tahun 1960-1962, Maria

²⁹¹Puti Hanijar, *wawancara*, tanggal 15 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

harus berjuang menghidupi dirinya, suami, dan dua orang anaknya dari gaji orang tua murid. Tahun 1962, suaminya meninggalkan Maria karena harus mematuhi Kepres tahun 1961 tentang amnesti terhadap eks PRRI. Menurut Maria, istilahnya *oto Barangkek ganja tingga* (mobil berangkat, ganjal ditinggalkan)."

Bukan hanya Mariah saja, ada belasan perempuan Sumpur Kudus lainnya yang menikah dengan tentara PRRI, di antaranya Laila Hamsiah, Khamsia, Puti Maidar, Jarani, Dahniar, Yulinar, Rauyah, Lalila Khairani, Surtini, dan Syamsiar.²⁹² Seperti halnya Maria, Yulinar pernah mengungkapkan kisahnya sebagai "ganja batu" pada masa PRRI. Kisah Yulinar ini pernah terekam dalam karya Reni Nuryanti yang berjudul *Perempuan Berselimut Konflik*, berikut petikannya:

*"Awak kawin jo Apak, wakatu Peri-Peri tahun 1960. Wakatu turun gunung tahun 1961, Awak alah beranak duo, sedang hamil limo bulan pulo. Wakatu itu, Apak baliak ka Batusangka karano di sinan Apak alahpunyo bini. Anak Apak ampek urang, ketek-ketek, alun sakolaSD. Sudah itu Apak indak pulang. Iko karano, Amak juo indak namuah dibaok Apak ka sinan. Apak kan indak karajo, yo baa parasaan Amak. Urang tua Amak nan mambiyai anak Amak. Ibo ati amak mangana maso itu. Wakatu sabalun pai, Apak bajanji keceknyo ka dibalanjoi. Kironyo indak, nak. Ditinggaannyo Awak. Awak digantuang indak batali. Ibo hati Awak, manangihlah, Nak. Nan dicinto indakjadi. Bilo takana Batusangka, Awak manyasa. Apo lai nak, ciek anak Amak maningga. Tapi apolah dikato Nak, yo itulah nasib."*²⁹³

Terjemahan:

Saya kawin dengan bapak, pada saat Peri-Peri (baca: PRRI) tahun 1960. Pada saat turun gunung tahun 1961, saya sudah punya dua anak dan sedang hamil lima bulan.

²⁹² Dahniah, *Wawancara*, 15 Februari 2014

²⁹³ Reni Nuryanti, *Perempuan Berselimut Konflik*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011), hlm. 91.

Saat itu, bapak kembali ke Batusangkar, karena di sana bapak sudah punya anak istri. Anak bapak empat orang, masih kecil-kecil, belum sekolah SD. Lama nak, sesudah itu, bapak tidak pulang. Ya gimana ya nak, bapak tidak bekerja. Orang tua ibu yang membiayai anak amak. Pernah, ibu mau diajaknya ke Batusangkar, tapi ibu tidak mau. Sedih hati, ibu mengingat saat itu. Waktu sebelum pergi, bapak berjanji, katanya dinafkahi. Nyatanya tidak, nak. Saya ditinggalkannya. Ditinggalkan tanpa kepastian. Saya sedih, ee menangislah, nak. Ibu takut, anak tidak ada jaminan. Ya begitulah nak, yang dicinta, tidak! Kalau ingat Batusangkar, saya menyesal. Apalagi nak, salah satu anak ibu meninggal. Tapi apalah dikata nak, itu nasib.

Kisah Yulinar dan Mariah merupakan bagian kecil dari derita perempuan di Minangkabau yang ditinggalkan oleh suaminya karena persoalan politik dan militer. Yulinar dan Mariah merupakan satu potret buram perempuan di Sumpur Kudus yang ditinggalkan suami begitu saja. Mariah dan Yulinar bukan saja korban “ganja batu” masih ada sederet nama lainnya di Sumpur Kudus yang ikut merasakannya, seperti Khamsia, Puti Maidar, Jarani, dan Surtini. Mereka yang menjadi ganja batu adalah isteri tentara PRRI yang ditinggalkan di daerah asalnya dan si suami kembali ke nagari asalnya, dengan alasan masalah ekonomi dan lain sebagainya.

*Oi nan lah barubah jauh kini
Dahulu indak bak cando iko
Sajak lah dapek dek uda ka pangganti
janji nan lamo lah lupo sajo*

*Mangkonyo denai ka uda malengah diri
Dek cinto uda mulai bakurang
Itu sababnyo danai ka mungkia janji
Karonu takuik kagilo surang
Indak lah patuik uda bak cando iko
Di lanyah denai oi kandung uda tinggakan
Denai dibuek bak ganja batu*

Oi lapeh paguno uda campakkan

*Kasiahnjo sayang kito nan indak jadi
maafkan muluikyo nan tadorong
Kato lah putuih ndeh uda nan uda bari
Can kan untuang yo surang surang.²⁹⁴
(Lirik lagu Ganja Batu)*

Lagu tersebut adalah gambaran psikologis perempuan Sumpur Kudus yang sedih ditinggal suaminya merupakan sebuah realitas sosial yang tidak dipungkiri pada masa PRRI. Permasalahan ini ganja batu ini mulai berkembang ketika pasukan PRRI mulai turun gunung pada bulan Juni 1961. Nasib perempuan Sumpur Kudus pada masa itu hanya dua, yakni menjadi ganja batu atau ganja kayu. Bila perempuan itu menjadi ganja kayu, artinya ia akan dibawa oleh suaminya ke daerah asal. Beberapa orang perempuan yang dibawa suaminya pergi dari nagari Sumpur Kudus adalah Laila Hamsia, Dahniar, Rauyah, Laila Khairani, dan Syamsiar.

²⁹⁴ Puti Hanijar, wawancara, tanggal 15 Februari 2014 di Sumpur Kudus.

**TAHUN
1942-1965**

**[SUMPUR KUDUS DALAM PERJALANAN SEJARAH
MINANGKABAU]**

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Sumpur Kudus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari episode sejarah Minangkabau sejak masa masuknya Islam hingga pecahnya peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sumpur Kudus dalam catatan sejarah dijuluki Mekkah Darek. Sebutan ini bukanlah isapan jempol belaka, karena Sumpur Kudus menjadi bagian dari kekuasaan raja Ibadat yang legendaris dalam sejarah Minangkabau.

Raja Ibadat bukanlah tipikal raja yang memerintah seperti di Jawa, namun ia merupakan simbol pemersatu dari orang Minangkabau, tempat bertanya, menyelesaikan simpul yang kusut dalam hubungan bersuku dan beragama. Raja ibadat berdiri di atas semua golongan yang sering diidentikkan sebagian pengamat sebagai simbol pluralisme. Raja ibadat pun tidak berdiri sendiri dalam pemerintahannya. Ia sebagai katalis dari kekuasaan alam Minangkabau dan adat, sehingga falsafah adat basandi syara' dan syara' basandi Minangkabau masih lekat di nagari Sumpur Kudus.

Sumpur Kudus pada akhir 1950-an tenggelam dalam masa keemasannya. Sumpur Kudus bukanlah satu-satunya nagari yang dianggap sebagai “pembangkok”. Masih banyak nagari-nagari lainnya yang bernasib sama, namun tidak seharusnya tenggelam dalam trade mark pemberontak. Episode Sumpur Kudus yang suram, makin terlupakan ketika dalam lembaran sejarah jarang menyebut nagari ini sebagai bagian peristiwa PDRI tahun 1949. Tokoh-tokoh Sumpur Kudus telah membuktikan pengabdianya pada kelangsungan Republik Indonesia.

Meskipun terletak jauh dari keramaian kota, Sumpur Kudus membuktikan ketulusannya dengan memberi sumbangan yang

besar terhadap rombongan PDRI. Dengan legowo, tokoh-tokoh Sumpur Kudus mengakui, bahwa Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara tinggal di beberapa lokasi, seperti di Calau, Sumpur Kudus, dan Silantai. Ma'rifah Dt. Rajo Melayu dan Halifah sudah membuktikan pengabdian yang tulus dalam situasi darurat itu. Mata rantai sejarah PDRI pun tidak akan terputus bila dihubungkan dengan sumbangsih nagari Silantai dalam masa PDRI. Masyarakat Silantai pun membuktikan kesetiaan mereka pada Republik Indonesia dengan memberikan pelayanan terbaik pada petinggi-petinggi PDRI.

Lantas apa yang menyebabkan orang Sumpur Kudus dan Silantai harus menyalahkan diri dengan peristiwa PRRI? Memang sesuai dengan sifatnya, suasana perang menimbulkan tindakan anarkhis, brutal yang menyebabkan banyak korban jatuh akibat tindak kekerasan, begitu juga penyalahgunaan wewenang militer, teror, pemerkosaan, pendobrakan rumah penduduk, sampai pada penyiksaan dan pembunuhan.

Sumpur Kudus bukanlah satu-satunya nagari yang menanggung akibat dari peristiwa pergolakan daerah itu. Menurut laporan korban PRRI menurut versi pemerintah terbunuh sebanyak 983 orang, 1.695 luka-luka dan 154 orang hilang, sementara pihak PRRI sebanyak 6.373 terbunuh, 1.201 terluka dan yang tertangkap serta 6.057 yang menyerah. Sedangkan menurut sumber resmi Kodam 17 Agustus di pihak PRRI sebanyak 6.115 tewas dan 627 yang hilang, sedang pihak Kodam III/APRI sebanyak 1.031 tewas. Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus penyiksaan dan pemerkosaan, teror dan kasus "ganja batu". Satu hal yang konkrit, masyarakat Sumpur Kudus harus bangkit dan membangun sejarahnya sendiri.

B. Saran-saran

1. Kepada Pemerintah Daerah di Kabupaten Sijunjung

- a. Supaya pemerintah daerah memperhatikan pembangunan Sumpur Kudus kedepannya, termasuk indra struktur jalan.
- b. Pemerintah diharapkan mampu memberikan terobosan penting dan mencari solusi untuk membantu

pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumpur Kudus, terutama memperkenalkan rendang belalang dan rendang daun sebagai ciri khas Kabupaten Sijunjung.

- c. Mempromosikan produk masakan dan makanan tradisional di nagari Sumpur Kudus dan tenunan tradisionalnya kepada wisatawan lokal dan mancanegara.
- d. Agar pemerintah membangun kembali Istana Raja Ibadat sesuai dengan posisi awalnya di Kampung Dalam.

2. Kepada Generasi Muda

- a. Generasi muda agar bisa memahami dan menghargai sejarah Sumpur Kudus sebagai bagian dari ingatan kolektifnya.
- b. Generasi muda harus memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk mempromosikan Sumpur Kudus dan sejarah keemasannya melalui website, facebook, youtube, dan lain sebagainya.

DAFTAR BACAAN

Arsip

A.R Dt.Rajo Melayu,"Sejarah Ringkas dan Silsilah Raja Minangkabau Pagaruyung, *Manuskrip*. Sumpur Kudus:tanpa penerbit, 1992.

"Basmi Gerombolan Pengacau Sampai Akar-akarnya", harian *Rakyat* 12 Desember 1958.

Dagregister 1680 hlm. 123, 716, 721.

De Volksinstellingen der Padangsche Bovenlanden no.4, 1870

Instruksi Gubernur Militer Sumatera Barat No.23/ GM/Instr-1949 tanggal 25 Mei 1949.

Mansur Dt. Penghulu Mudo, "Mutiara Terpendam: Sejarah Ringkas Suku Domo Dan Kebesaran Ninik Mamak *Manuruik Alur Jo Patuik* Nagari Sumpur Kudus". *Manuskrip* Januari tahun 2011

Monografi Kenagarian Sumpur Kudus, *Arsip Nagari Sumpur Kudus* bulan Juni 1980.

Profil Nagari Sumpur Kudus, *Arsip Nagari Sumpur Kudus* bulan Agustus 2009.

Over de Wijziging van Het Erfregt Bij de Maleijers Sumatra's Westkust, 1864.

Soedarman Dt. Bandaro Hitam, "Sejarah Singkat Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia", *Manuskrip*. 2003.

SK Gubernur Militer Sumatera Barat No 24/G.M/Instr tahun 1948.

Surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Barta tanggal 17 Mei 1949 No.120/GM/1949.

Standard-brief A.V Michels No,La.Q tanggal 3 Oktober 1842.

Verslag van een conflict tussen Raja Ibadat van en de Luitenant Kolonel Resident van Sumatra Hendrik te Boea 1824.

Koran Majalah

A. Chaniago H.R,""Wangsa Tuan Gadih,"", *Singgalang* tanggal 4 Mei 1982.

_____, "Kaum Raja-Raja Minangkabau dari Balai Janggo Pagaruyung", *Singgalang* 1 Juni 1982.

_____, "Putri Raja Swarnabhumi Dharmasraya" *Haluan* tanggal 10 Januari 1983.

_____, "Wilayah Minangkabau Maso Saisuak Terbentang di Sumbar, Riau, dan Bengkulu" *Haluan* tanggal 20 Januari 1984.

_____, Raja Puteri Swarnabhumi Darmasyraya" *Haluan* tanggal 25 Januari 1984.

_____, Waktu Banteng Raiders sampai di Kiliranjao." *Majalah PHB* tahun 1958.

Ahmad Syafii Maarif, "Sumpur Kudus dan PDRI" dalam *Panji Masyarakat* tanggal 10 Maret 1989.

"Damhoeri Gafoer, Saksi Sejarah Perjuangan PRRI di Sumpurkudus, Sijunjung", *Padang Ekspres* tanggal 11 September 2011.

"Gali Penyebaran Islam dan Nasionalisme PDRI di Sumpur Kudus.", *Padang Ekspres* tanggal 24 Desember 2012.

Sinar Hindia No.144 tanggal 22 Agustus 1923.

Yulizar Yunus, "Sumpurkudus dari Istana Rajo Ibadat ke PDRI", *Padang Ekspres* tanggal 26 Desember 2012.

Yuzirwan Rasyid, "Relevansi Spirit PDRI dan Patriotisme Islam" *Padang Ekspres* tanggal 28 Desember 2012.

Proceeding

Nuryanti, Reni. 2011. "Perempuan, Seks, dan Perang: Analisis Dalam Pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) (1958-1961)", *Proceedings*. Padang: BPSNT Press dan F. Sastra Unand.

Buku

Abdullah, Syafei. 1985. *Korban Pembangunan Kereta Api Maut*. Pekanbaru: Kanwil Depdikbud Prov. Riau.

Abdullah, Taufik. 1984. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

- _____, Abdurrahman Surjomiharjo, 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi, Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia.
- Alfian, T. Ibrahim. 1987. *Dari Babad dan Hikayat hingga Sejarah Kritis*, Yogyakarta: UGM Pres.
- Alfiandri, 2003. *Sejarah Minangkabau, Pra Sejarah Hingga gerakan Pemurnian Islam*. Padang: , MSI. Cab. Sumatera Barat.
- Amran, Rusli. 1981, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan,
- Asnan, Gusti. 2007. *Memikir Ulang Regionalsime: Sumatera Tahun 1950-an*. Jakarta: KITLV, NIOD, Yayasan Obor.
- _____, 2006, *Pemerintahan di Sumbar dari VOC Hingga Revormasi*, Yogyakarta, Citra Pustaka
- Azra, Azyumardi. 2002, *Historiografi Islam Kontemporer, Wacana, Aktualisasi dan Aktor Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Batuah, Ahmad. Dt dan A. Dt. Madjoindo. 1956, *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Carano, Sudarso Salih BCHK St. 1985. *Sejarah Ketatanegaraan Kerajaan Pagaruyung* Purwokerto: Pribumi Offset.
- Djafri, Dato Paduka Haji, Dt. Bandaharo Lubuk Sati. 1992, *Susur Galur raja-raja dan Adat Perpatih Negeri Sembilan, Hubungan dengan Raja-Raja Alam dan Adat Minangkabau*, Pemprow Sumatera Barat.
- Dobbin, Christine. 2008. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri ; Minangkabau 1784-1847*. Jakarta: Komunitas Bambu.

- Ensten, Mursal. 1993. *Minangkabau : Tradisi dan Perubahan*. Padang: Angkasa Raya.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroso, (t.t), *Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi*, LP3ES. Jakarta.
- Geldern, Robert-Hein. 1982, Terjemahan Deliar Noer, *Konsepsi tentang negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*, Jakarta: Rajawali.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Penterjemah Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Graghan, Gilbert J., 1984. *A. Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Hamka, 1985. *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Panji Mas.
- _____, 1973., *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hindra, Eka dan Koichi Kimura, 2007. *Momoye Mereka Memanggilkku*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Huen, P. Lim Pui, Dkk, 2000, *Sejarah Lisan Di Asia Tenggara, Teori dan Metode*. Jakarta: LP3ES..
- Husein, Ahmad. 1981. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945 - 1950*. jilid II. Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau.
- Joenoës, Marah. 2013. *Mr. H. St. Moh. Rasjid. Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur*. Pekanbaru: PT Cerya Riau Mandiri Printing.

- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kiram, Abdul. 2003, *Raja-raja Minangkabau dalam Lintasan Sejarah*, Meseum Adityawarman, Padang: MSI..
- Kuntowijoyo, 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi Dan Kontrol. Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan di Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- Lapidus, Ira. M. 1999. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, penerjemah Ghufroon A. Mas'adi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2006. *Otobiografi Ahmad Syafii Maarif*. Yogyakarta: Ombak.
- Mansoer, MD 1979. *Sejarah Minangkabau*, Jakarta: Bhratara.
- Marsden, William. 2008. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Moertono, Soemartono. 1985, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Nain, Sjafnir Aboe, 1988. *Tuaniku Imam Bonjol, Sejarah Intelektual Islam di Minangkabau, 1784-1832*, ESA. Jakarta.
- Nasroen. M, 1967. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, A.H. 1986. *Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta: Gunung Agung.

- _____, 1986, Navis A.A, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta, Pustaka Grafis Persada
- Noor, Umar Said. 2001. *Peran TNI AU dalam Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nursam, M. 2008. *Membuka Pintu Bagi Masa Depan. Biografi Sartono Kartodirdjo*. Jakarta: Kompas.
- Prawiranegara, Sjafruddin . 1951. *Islam Dalam Pergolakan Dunia*. Bandung: Piranti.
- Propinsi Sumatera Tengah* Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953.
- Radjab, Muhammad. 1964. *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reid, Anthony, dkk 1979. *Pre-Colonial State System in Southeast Asia, The Malay Peninsula, Sumatera, Bali, Lombok, South Celebes*. Kuala Lumpur: MBRAS Rajiv Printers.
- Rosidi, Ajip. 1986. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, sebuah Biografi*. Jakarta : Inti Diayu Press.
- Salih, Sudarso, 1985. *Sejarah Ketatanegaraan Kerajaan Pagaruyung, Tinjauan Arkeologi dan Sosiologi*, Purwokerto: Pribumi Offset.
- Sango, Dt. Batuah, (t.t), *Tambo Alam Minangkabau*, Payakumbuh : Perc. Limbago.
- Schrieke, B.J.O. 1973. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat. Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Jakarta: Bhartara.

- Shiraishi, Saya dan Takashi Shiraishi.1998.*Orang-orang Jepang di Koloni Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Soebadio,Hadi. 2002. *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryanegara,Ahmad Mansur. 2010.*Api Sejarah 2*. Bandung: Salmadani Pustaka.
- Tim RSPDM, 2000. *Menelusuri Sejarah Minangkabau*, Citra Budaya Indonesia. Padang.
- Zed, Mestika. 1984, *Pengantar Studi Historiografi*, Padang : F.S Unand
- _____. 1997. *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan*.Jakarta: Grafiti Press.
- _____. 1997. *Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sebuah Masa Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Padang: PKSBE UNP.
- _____.Edi Utama dan Hasril Chaniago,1998. *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945-1950*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. dan Hasril Chaniago, 2001.*Perlawanan Seorang Pejuang. Biografi Kolonel Ahmad Hussein*.Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 2005, *Giyu Gun Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta: LP3ES

Tesis/Skripsi :

- Naldi, Hendra, (2002), *Perkembangan Media Pers Daerah : Cermin Perubahan Masyarakat di Sumatera Barat Masa Kolonial 1900-1930*, Tesis, UI. Jakarta.

Reni Nuryanti, "Hidup di Zaman Bergolak; Perempuan Minangkabau pada Masa Pergolakan Daerah (1956-1961)", *Tesis*. Yogyakarta: PPS UGM, 2009.

Syafni T, (2004), *Sejarah Kerajaan Melayu Dharmasraya Abad XII-XIV, di Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kab. Dharmasraya*, Skripsi UNP. Padang.

Destrianto Ahmad, (2002) *Tradisi Basapa di Sumpur Kudus* (Suatu Tinjauan Historis Alkuturelasi Budaya, Skripsi

Makalah

Didi Nazmi, "Konferensi Besar PDRI di Sumpur Kudus: Kontroversial Dua Negara Bertetangga.", *Makalah* disajikan dalam Seminar Sehari Peranan Rakyat Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Pada Masa PDRI tahun 1949. Seminar dilaksanakan tanggal 30 April 2000

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Syamsu Anwar
Umur : 78 tahun
Alamat : Silantai
Tanggal Wawancara : 14 Februari 2014
2. Nama : Nazaruddin
Umur : 77 tahun
Alamat : Sumpur Kudus
Pekerjaan : Pensiunan PNS guru
Pendidikan : KPG
Tanggal Wawancara : 14 Februari 2014
3. Nama : Marahsuddin Datuk Panduko Alam
Umur : 87 tahun
Alamat : Manganti, Sumpur Kudus
Tanggal Wawancara : 15 Februari 2014
4. Nama : Mansur Datuk Penghulu Mudo
Umur : 84 tahun
Alamat : Calau, Sumpur Kudus
Tanggal Wawancara : 15 Februari 2014
5. Nama : Sutan Amir Radjab
Umur : 70 tahun
Alamat : Sumpur Kudus
Tanggal Wawancara : 15 Februari 2014
6. Nama : Puti Hanidjar
Umur : 69 tahun
Alamat : Sumpu Kudus

- Tanggal Wawancara : 15 Februari 2014
7. Nama : Soerdarman Datuk Bandaro Hitam
Umur : 70 tahun
Alamat : Sumpur Kudus
Tanggal Wawancara : 14 Februari 2014
8. Nama : Herni Dt. Paduko Marajo
Umur : 48 tahun
Alamat : Sumpur Kudus
Tanggal Wawancara : 15 Februari 2014
9. Nama : Efriyanti
Umur : 52 tahun
Alamat : Sumpur Kudus
Tanggal Wawancara : 14 Februari 2014
10. Nama : Dahniar
Alamat : Sumpur Kudus
Tanggal Wawancara : 15 Februari 2014
11. Nama : Khamsiah
Alamat : Sumpur Kudus
Tanggal Wawancara : 15 Februari 2014
12. Nama : S. Khatib Amin
Alamat : Sumpur Kudus
Tanggal Wawancara : 20 Februari 2014
13. Nama : Intan Sari Dt. Magek Perajan
Alamat : Silantai
Tanggal Wawancara : 21 Februari 2014
14. Nama : Nursani
Umur : 92 tahun
Alamat : Silantai

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2014

15. Nama : Drg. Abraham Ilyas
Umur : 69 tahun
Alamat : Palembang
Tanggal Wawancara : 15 Februari 2014
(via telpon seluler)